

Jurnal Ilmu Kepolisian (JIK) diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan Ilmu Kepolisian. Jurnal akademik kami adalah sumber referensi, baik bagi para ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sekaligus mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya kepada dengan masyarakat luas mengenai segala hal yang berkaitan dengan Ilmu Kepolisian. Jurnal Ilmu Kepolisian diterbitkan dalam edisi cetak (ISSN: 2620-5025), dan edisi online (E-ISSN: 2621-8410, [http://u.lipi.go.id/1532313039).](http://u.lipi.go.id/1532313039)) Sesuai dengan hasil re-akreditasi Jurnal Ilmiah Tahun 2023, Jurnal Ilmu Kepolisian telah terakreditasi kembali berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 79/E/KPT/2023, tanggal 11 Mei 2023 (Sinta 5).

Jurnal Ilmu Kepolisian berisi artikel hasil penelitian dan ulasan tentang disiplin ilmu yang berkaitan dengan Ilmu Kepolisian, yaitu Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Sosiologi, Ilmu Administrasi, Ilmu Kriminologi, dan lain-lain. Selain itu, Jurnal Ilmu Kepolisian juga mencakup banyak penelitian dan ulasan tentang Ilmu Kepolisian dalam arti yang lebih luas. Redaksi mengundang pada ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas. Dan perlu kami tekankan di sini, bahwa tulisan dalam Jurnal Ilmu Kepolisian ini tidak selalu mencerminkan pendapat redaksi.

**ISSN: 2620-5025**

**E-ISSN: 2621-8410**

**website:** [**http://jurnalptik.id/index.php/JIK/index**](http://jurnalptik.id/index.php/JIK/index)

Alamat Redaksi/Tata Usaha

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK

Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12160

Telp: 021-7222234, Faks: 021-7207142, 08129400276 (WA only)

**e-mail: jurnalilmukepolisian@stik-ptik.ac.id**



**Pelindung**

**Penasehat**

**Penanggung jawab**

.

**Dewan Pakar**

**Pemimpin Redaksi**

**Redaktur Pelaksana**

**Dewan Redaksi**

**Sekretaris**

**Bendahara**

**Produksi**

Gubernur/Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K., M.Si.

Wakil Ketua Bidang PPITK STIK Lemdiklat Polri Brigjen Pol. Drs. Sofyan Nugroho, S.H., M.Si., M.H.

Kepala Laboratorium Profesi dan Teknologi Kepolisian Bidang PPITK STIK Lemdiklat Polri

Kombes Pol. Dr. Firman Fadillah, M.H

Prof. Dr. Iza Fadri, S.H., M.H.

Prof. Dr. A. Wahyurudhanto, M.Si.  
Prof. Dr. Rycko Amelza Dahniel, M.Si.

Prof. Dr. Indrianto Senoadji, S.H., M.H.

Prof. Dr. Eko Indra Hery, M.H.

Prof. Dr. Chrysnanda Dwi Laksana, M.Si.

Dr. Vita Mayastinasari, S.E., M.Si.

Dr. Novi Indah Earlyanti, S.Pd., M.Pd.Dr. Syafruddin, S.Sos, M.S

Rahmadsyah Lubis, S.Pd., M.Pd.

Dr. Sutrisno, M.Si.

Dr. Zulkarnein Koto, S.H., M.Hum.   
Dr. Benyamin Lufpi, S.S., M.Hum.  
Dr. Yopik Gani, S.I.P., M.Si.

Kombes Pol. Erik Ferdinan, S.I.K., M.H.

AKBP Yustinus Setyo Indriyono, S.H., S.I.K.

Erna Yatmi, S.Pd.

AKP Nia Kurniasih, S.H., M.Si.

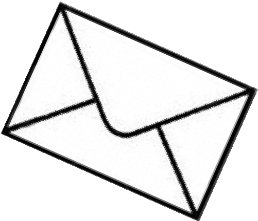
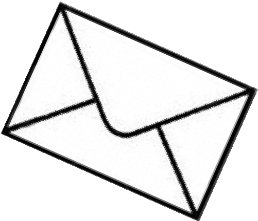
Kompol Afriska Nababan, S.H., S.I.K

Bripka Rafi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **Jurnal Ilmu Kepolisian** | **Volume 17** | **Nomor 3** | **Desember 2023** | **ISSN : 2620-5025**  **E-ISSN : 2621-8410** |

**DAFTAR ISI**

|  |  |
| --- | --- |
| 255-268 | ***Digital Policing: Studi Pemanfaatan Teknologi Dalam Pelaksanaan Tugas Intelijen Kepolisian Untuk Mencegah Kejahatan Siber (Cybercrime)***  Marzuki Ismail |
| 269-282 | ***Inovasi Green Police Dalam Lensa Polri Yang Presisi: Kolaborasi Pencegahan Dan Penindakan Kerusakan Sungai Citarum***  Jaka Ramdani |
| 283-302 | **Penyetaraan Lulusan Program Studi S2 Dan S3 Kedinasan Dengan Lulusan Sespimmen Dan Sespimti Guna Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Polri Yang Unggul Di Era Police 4.0**  Yopik Gani, Rahmadsyah Lubis, Muhammad Azis Muslim |
| 303-317 | ***Penataan Kurikulum Pendidikan Pengembangan Umum STIK PTIK (S1, S2, S3) Guna Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Polri Yang Unggul Di Era Police 4.0***    Novi Indah Earlyanti, M. Erwan, Endry Boeriswati, Nurhattati |
| 318-335 | ***Analisis Motivasi Teroris Perempuan Indonesia Dilihat Dari Perspektif Teori Identifikasi Diferensial***  Alfira Yulisza Atry Hutabarat, Nadia Utami Larasati |
| 336-353 | ***Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan***  Sugiri, Syafruddin, |
| 354-365 | ***Crowd Policing Guna Mencegah Konflik Tawuran Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas Yang Kondusif***  Didi Dewantoro |
| 366-376 | ***Artificial Intelligence (AI) And Internet of Things (IoT): Threats Or Future For The Police?***  Alfin Reza Syahputra, Bagus Aditya, Zulaikha Sari Handayani |
| 377-390 | ***Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana***  Rudy Kosasih Marlin Sembiring, Halimah |
| 391-405 | ***Analisis Patroli Perintis Presisi Polres Metro Tangerang Kota Menggunakan***  ***Broken Window Theory***  Bondan Anugrah, Arsenius Wisnu, Aji Patria Perkasa |
| 406-421 | ***Analisa Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum***  Rina Hasanah |
| 422-441 | ***Analisa Lembaga Praperadilan Sebagai Kontrol Tugas Penyidik Dalam Proses Penegakan Hukum***  Tatang Prajitno Panjaitan |
| 442-459 | ***Optimalisasi Kerjasama Hexa-Helix Guna Mendukung Pengamanan Pemilu***  Bellen Anggara Pratama |
| 460-474 | ***Penerapan Metode Multiple Machine Learning (Hybrid Model) Untuk Mendeteksi Link Phishing Sebagai Upaya Preventif Dalam Meminimalisir Korban Pencurian Data***  Mokhamad Fikri Alfawaid, Jarot Prianggono |
| 475-490 | ***Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Ketidakadilan Kemanusiaan Dan Dampak Sosialnya***  Dien Fahrur Romadhoni |
| 491-507 | ***Pemolisian Terhadap Marginalisasi Dan Eksklusi Sosial Dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional Di Pulau Rempang***  Dony Setiawan, Supardi Hamid |



*Salam dari Redaksi*

**Pembaca yang budiman,**

Selamat bertemu kembali para Pembaca yang budiman di Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 17 No. 3 Desember 2023. Sesuai dengan amanat dari program Presisi Kapolri dalam upaya transformasi organisasi, seperti penataan kelembagaan, perubahan sistem dan metode organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0 dan perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0., kami menyajikan beberapa tulisan yang kami harapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca untuk mengembangkan keahlian dan pengetahuan dalam disiplin ilmu masing-masing.

Kami sangat berterimakasih kepada para kontributor penulis, baik dari luar yang antusias dengan jurnal ini dalam upaya ikut serta menyuburkan Ilmu Kepolisian dan menjadi kolega dan patner dalam komunitas keilmuan studi Kepolisian serta dari dalam lembaga. Hubungan yang harmonis ini tentu saja harus dikembangkan dan ditumbuhsuburkan dalam upaya menciptakan iklim keilmuan dan tradisi pemikiran yang bisa melahirkan difusi inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam Ilmu Kepolisian ke depan. Untuk edisi kali ini—Edisi Khusus Akhir Tahun—sebagai edisi penutup untuk Volume 17 (2023), Kami menyajikan 16 artikel dari berbagai disiplin ilmu yang tergabung dalam Ilmu Kepolisian dengan penjelasan singkat sebagai berikut:

Artikel pertama, yang dihadirkan oleh JIK Edisi Khusus Akhir Tahun ini, berjudul *Digital Policing: Studi Pemanfaatan Teknologi Dalam Pelaksanaan Tugas Intelijen Kepolisian Untuk Mencegah Kejahatan Siber (Cybercrime)*. Artikel ini ditulis oleh Marzuki Ismail, seorang mahasiswa Program Doktor STIK yang juga seorang anggota kepolisian yang berhasil menjuarai Karya Tulis Ilmiah STIK 2023. Artikel ini membahas situasi pasca transformasi sosiologis masyarakat menuju masyarakat digital dengan dukungan jaringan internet, di mana sebagian besar kebiasaan perilaku dan budaya pun ikut berubah, termasuk transaksi keuangan yang dulunya dilakukan secara konvensional sejak satu dekade terakhir dengan menggunakan berbagai *platform* aplikasi. Kejahatan penipuan *online* semakin mengancam dan meningkat secara signifikan dengan berbagai modus operandi yang berubah dan terus berkembang. Perkembangan teknologi digital kelihatannya belum secara maksimal dimanfaatkan oleh intelijen kepolisian untuk mencegah berbagai bentuk kejahatan (*crime prevention*). Hal ini mengakibatkan lambatnya antisipasi terhadap berbagai potensi kejahatan siber. Perpolisian digital dalam pelaksanaan tugas intelijen kepolisian perlu terus dikembangkan dengan melakukan investasi pada peralatan teknologi terkini agar dapat mewujudkan kepolisian yang prediktif, responsif, transparan, berkeadilan, dan mampu melakukan pencegahan kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dengan menganalisis buku, jurnal, berita media terkait pemanfaatan teknologi dalam tugas intelijen kepolisian. Pada bagian akhir, Penulis menyarankan agar dapat mengantisipasi dan mencegah kejahatan siber, intelijen kepolisian perlu menggunakan dan memanfaatkan teknologi mutakhir untuk mendukung *data collecting*, analisis dan prediktif sehingga dapat diambil langkah antisipatif dan kebijakan oleh pimpinan. Disamping itu, perlu dibentuk Direktorat Cyber-Intelligence untuk secara maksimal dapat melakukan pencegahan kejahatan siber dengan memanfaatkan Unit Intellgence Cyber Cops (ICC) dan kepolisian perlu secara terus menerus meng-*upgrade* peralatan intelijen khusus untuk mendukung pelaksanaan pencegahan kejahatan siber yang sangat luas sebarannya; dan melakukan pelatihan secara berkala dan insidentil untuk mengantispasi perkembangan teknologi baru.

Artikel kedua, yang ditulis oleh Jaka Ramdani, seorang mahasiswa Program Magister Studi Pembangunan, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung, berjudul *Inovasi Green Police Dalam Lensa Polri Yang Presisi: Kolaborasi Pencegahan Dan Penindakan Kerusakan Sungai Citarum.* Artikel ini bercerita tentang dinamika tata kelola DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum yang merupakan kunci pemecahan permasalahan yang perlu segera diselesaikan oleh para pihak yang berkepentingan. Berbagai peranan institusi telah dilibatkan, tidak terkecuali Polri dalam upaya pencegahan dan penindakan pelaku perusak kelestarian Sungai Citarum. Untuk menjawab keterlibatan Polri dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2018, Penulis menggunakan pendekatan *mixed-methods* dengan alat analisis UCINET 32 bit. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jejaring sosial institusi Polri perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor termasuk lapisan akar rumput, sehingga dapat dirumuskan inovasi *Green Police* yang dapat memperkuat peranan dalam sebuah tata kelola. Keterlibatan Polri juga menjadi kekuatan penegakan hukum yang diperlukan untuk menangani pelanggaran lingkungan. Polri memiliki kapasitas untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku yang secara sistematis merusak DAS Citarum. Kehadiran Polri juga dapat menciptakan efek pencegahan dan memperkuat kesadaran akan konsekuensi hukum bagi mereka yang merusak lingkungan. Penulis, pada bagian akhir tulisannya, menyarankan agar ada pelatihan berkelanjutan bagi personal Polri tentang kejahatan lingkungan hidup, kolaborasi Polri dengan lembaga lintas sektoral, dan pengembangan teknologi sehingga dapat membantu memantau secara *real time*. Untuk memastikan efektivitas dan relevansi *Green Police*, sebaiknya dilakukan evaluasi secara berkala tentang performa, tantangan, dan peluang perbaikan dalam operasional mereka.

Artikel ketiga yang berjudul *Penyetaraan Lulusan Program Studi S2 Dan S3 Kedinasan Dengan Lulusan Sespimmen Dan Sespimti Guna Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Polri Yang Unggul Di Era Police 4.0*., merupakan hasil joint research antar 2 lembaga: STIK, UNJ dan UI dengan Penulis Yopik Gani dan Rahmadsyah Lubis (STIK) dan Muhammad Azis Muslim (UI). Artikel ini disajikan dengan latar belakang tentang perlunya Polri memiliki SDM yang handal dalam waktu yang cepat. Era baru dunia yang ditandai dengan lahirnya kondisi VUCA (*volatility, uncertainty, complexity*, dan *ambiguity*) akibat perubahan yang semakin cepat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perubahan tersebut juga mempengaruhi perkembangan kejahatan dengan ditemukannya alat-alat yang semakin canggih. Polri, sebagai institusi penanggungjawab masalah keamanan dan ketertiban umum, harus memiliki personel dengan jumlah dan kualitas yang memadai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Polri melakukan banyak inovasi dan pembaharuan menyangkut SDM, yang salah satunya adalah program Penyetaraan (Perkap No. 6/2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan program penyetaraan yang sudah dilakukan dan sempat dihentikan oleh pimpinan Polri pada saat itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang sudah ada perlu disempurnakan agar personal Polri mau mengikuti program pendidikan lanjutan yang ada saat ini serta hal-hal lain yang menyangkut masalah promosi, kenaikan pangkat dan kesejahteraan personel (reward).

Artikel keempat yang berjudul *Penataan Kurikulum Pendidikan Pengembangan Umum STIK PTIK (S1, S2, S3) Guna Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas SDM Polri Yang Unggul di Era Police 4.0.,* juga merupakan karya Bersama antar dua lembaga pendidikan tinggi: STIK dan UNJ. Peneliti yang terlibat dalam kerja sama ini adalah Novi Indah Earlyanti dan M. Erwan (STIK) dan Endry Boeriswati dan Nurhattati (UNJ). Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, sikap, ketrampilan, hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden RI. Kapolri kemudian menetapkan Program Kebijakan Transformasi menuju Polri yang Presisi, yaitu meningkatkan kapasitas SDM Polri yang unggul di era 4.0., melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Polisi masa kini dan mendatang harus memiliki pengetahuan adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi sehingga diperlukan kesiapan pendidikan berbasis kompetensi, yang memiliki pemahaman, pemanfaatan dan penggunaan *Internet of Things*, *augmented reality* dan *Artifical Intelligence*. Penelitian ini bertujuan untuk mengadakan tinjaun kurikulum yang telah berjalan dan mengembangkan kurikulum masa depan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif untuk memperkuat hasil perhitungan. Data diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya harapan masyarakat terhadap profil polisi yang dihasilkan oleh lulusan STIK yang mampu memelihara keamanan, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Peneliti merekomendasikan agar STIK perlu memperhatikan variabel *input* dan luaran, memiliki landasan pendidikan karakter, mendeskripsikan profil lulusan secara operasional dan terukur, dan membenahi capaian pembelajaran lulusan.

Artikel kelima yang berjudul *Analisis Motivasi Teroris Perempuan Indonesia Dilihat Dari Perspektif Teori Identifikasi Diferensial* ditulis oleh Alfira Yulisza Atry Hutabarat dan Nadia Utami Larasati, mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta. Kedua Penulis ini memulai tulisan mereka dengan pernyataan bahwa terorisme merupakan salah satu kasus kejahatan yang seringkali menarik perhatian khalayak. Ada beragam alasan yang mendasari para pelaku teror menjalankan aksinya. Pelaku terorisme biasanya didominasi oleh laki-laki. Keduanya membahas tentang teroris perempuan di Indonesia, khususnya mengenai motivasi yang mendasari tindakan mereka. Teori Differential Identification yang dikemukakan oleh Daniel Glaser digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis motivasi dari para teroris perempuan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian dengan pengumpulan data melalui studi data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai studi terdahulu dan dokumen hasil penelitian tentang keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme pada enam wilayah Polda yang dilakukan oleh CTRS PTIK. Penelitian ini menunjukkan bahwa aksi teror yang dilakukan oleh perempuan maupun keterlibatan perempuan dalam terorisme didasari oleh rasa pengabdian kepada keluarga, yang dominasinya berasal dari laki-laki atau biasa disebut budaya patriarki dan dilatarbelakangi oleh paham fanatisme agama yang berbuntut pada pengidentifikasian diri kepada kelompok yang mengaku sebagai umat islam yang paling benar. Teroris perempuan dikonstruksi oleh lingkungan sosial mereka dan yang mereka identifikasikan sebagai bagian dari dirinya.

Artikel keenam, yang ditulis oleh Sugiri, mahasiswa S2 STIK bersama dengan Dosen STIK Syafruddin berjudul *Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan.* Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca tentang kedudukan dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam struktur organisasi kenegaraan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Data-data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan terhadap beberapa dokumen untuk mengetahui kedudukan kepolisian dalam struktur organisasi negara, dan bagaimana fungsi kepolisian dalam sistim pemerintahan negara. Hasil-hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian kepustakaan ini mengungkapkan bahwa (i) mencermati hukum positif di Indonesia minimal ada empat instrumen hukum yang mengatur tentang kedudukan Polri, yakni Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/ 2000, Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Polri; dan (ii) lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat, di mana Polri berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Polri juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Kemandirian polisi sangat diperlukan terutama dalam pelaksanaan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

Artikel ketujuh, yang diberi judul *Crowd Policing Guna Mencegah Konflik Tawuran Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas Yang Kondusif,* ditulis oleh Didi Dewantoro, seorang peserta didik Sespimmen Lemdiklat Polri Dikreg 63 Tahun 2023, Lembang. Penulis menjelaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum sehingga tercapainya serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam rangka menangkal, mencegah, serta menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum serta bentuk-bentuk lainnya yang meresahkan masyarakat. Namun, banyak ancaman terhadap kamtibmas, yang salah satunya adalah konflik tawuran antar pelajar. Penelitian ini berlokasi di wilayah hukum Polres Tegal karena ancaman gangguan kamtibmas yang kerap kali terjadi dan terus berulang hingga menimbulkan korban jiwa adalah konflik tawuran yang terjadi antar pelajar. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Polres Tegal telah berupaya keras mencegah terjadinya konflik tawuran, namun masih belum optimal. Penulis merekomendasikan Polres Tegal untuk mengambil tindakan yang komprehensif dalam memelihara kamtibmas yang kondusif dengan mencegah terjadinya konflik tawuran antar pelajar dengan cara melaksanakan *crowd policing*.

Artikel kedelapan yang berjudul *Artificial Intelligence (AI) and Internet of Things (IOT): Threats Or Future For The Police?* ditulis oleh Alfin Reza Syahputra (STIK) dan Bagus Aditya dan Zulaikha Sari Handayani (Telkom University, Bandung). Kajian ini meneliti dampak dari teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) dalam pemolisian dari perspektif tantangan, ancaman dan kesiapan. Kajian ini menggunakan kajian literatur yang sistematis dengan data yang diperoleh dari artikel-artikel jurnal dan penelitian sebelumnya pada kurun waktu 2020-2023. Kajian-kajian sebelumnya menyimpulkan bahwa kejahatan adalah bayangan dari peradaban. Maka, kepolisian harus mampu menyesuaikan diri. Perkembangan peradaban yang semakin modern bahkan membuat kejahatan semakin kompleks, di mana AI dan IoT akan menciptakan potensi kejahatan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Penulis merekomendasikan agar negara-negara di dunia, khususnya Indonesia berinvestasi dalam perkembangan teknologi AI dan IoT untuk pencegahan dan pendeteksian kejahatan agar kejahatan dapat diprediksi dan dideteksi sehingga kepolisian mampu menegakkan hukum dengan tepat dan pantas.

Artikel kesembilan yang berjudul *Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana* ditulis oleh Rudy Kosasih Marlin Sembiring, mahasiswa S2 STIK dan Halimah, Dosen STIK. Penulis mengemukan bahwa selain sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, Polri juga memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penegak hukum. Untuk memahami nilai-nilai penegakan hukum yang dianggap sebagai moral utama—yang tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002—Polri memerlukan pendekatan filosofis. Artikel mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polri menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum dalam pengaturan tugas dan fungsi Polri sebagai penegak hukum adalah tugas utama dan Polri merupakan pintu masuk dalam penegakan hukum di Indonesia. Polri sebagai *gatekeepers* (penjaga gerbang) SPP (Sistem Peradilan Pidana) memiliki peran sentral karena SPP dimulai dari kepolisian. Memang banyak terjadi pelanggaran hukum yang diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, namun ada juga pelanggarang yang belum bisa terselesaikan dengan alasan yang beragam. Artikel ini juga menelaah *progres* peranan kepolisian dalam SPP di Indonesia. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, di mana data-data diambil melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sampai saat ini kepolisian dalam melakukan penegakan hukum masih belum maksimal sehingga ada beberapa pelanggaran yang masih belum ditegakkan. Penulis merekomendasikan Polri untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan secara maksimal sehinga perkembangan SPP sebagaimana yang diharapkan dapat direalisasikan.

Artikel kesepuluh yang diberi judul *Analisis Patroli Perintis Presisi Polres Metro Tangerang Kota Menggunakan Broken Window Theory* ditulis oleh Bondan Anugrah, Arsenius Wisnu, dan Aji Patria Perkasa, mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta. Kerusakan fisik lingkungan di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, sebagai lokasi penelitian, memberikan persepsi kepada pelaku atau calon pelaku kejahatan bahwa daerah tersebut rentan terhadap kejahatan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran serta fungsi tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Tangerang Kota mengenai proses pencegahan dan pemeliharaan kamtibmas. Penelitian ini menggunakan teori *Broken Window* sebagai dukungan analisinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa penurunan tingkat kriminalitas yang terdapat dalam bagan laporan Polres Metro Tangerang Kota merupakan hasil dari kerja sama yang baik yang dilakukan antara institusi kepolisian dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan inti dari teori *Broken Window* yakni merupakan perwujudan dari keinginan petugas penjaga keamanan dalam hal ini institusi Polri untuk bersikap mengayomi, tanggap, dan responsif terhadap segala peluang timbulnya kekacauan dan kriminalitas.

Artikel kesebelas, yang berjudul *Analisa Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum* ditulis oleh Rina Hasanah, mahasiswa S2 STIK. Tulisan ini membahas fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut UU No. 2/2002 tentang Polri. Tulisan ini juga ingin mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat peran dan fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kehidupan bernegara terdapat berbagai peraturan yang memaksa masyarakat untuk tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. Sifat ketundukan maupun kepatuhan terhadap peraturan tersebut karena adanya kesadaran hukum, yaitu memahami makna dan tujuan hukum bagi kemashlatan. Polri memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorientasikan dengan perkembangan masyarakat.

Artikel keduabelas yang berjudul *Analisa Lembaga Praperadilan Sebagai Kontrol Tugas Penyidik Dalam Proses Penegakan Hukum* ditulis oleh Tatang Prajitno Panjaitan, mahasiswa S2 STIK. Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Kebenaran material adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data-data dikumpulkan melalui kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam perkara aquo hakim mempunyai pertimbangan terkait asas keadilan dan persamaan hukum untuk menetapkan tersangka baru yang sebenarnya merupakan domain atau kewenangan dari penyidik melalui serangkaian tindakan penyidikan. Penulis merekomendasikan kehati-hatian dalam melakukan tindakan penahanan dan peningkatan kemampuan para penyidik dalam melaksanakan tugasnyavkarena mereka bisa menjadi obyek praperadilan.

Artikel ketigabelas yang berjudul *Optimalisasi Kerjasama Hexa-Helix Guna Mendukung Pengamanan Pemilu* ditulis oleh Bellen Anggara Pratama, peserta didik Sekolah Staf Dan Pimpinan Menengah Polri Lemdiklat Polri Dikreg 63 Tahun 2023, Bandung, Lembang. Tulisan ini dilatarbelakangi adanya urgensi untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu (pemilihan umum) 2024, mengingat sejumlah negara mengalami konflik pasca-pemilu. Meskipun demokrasi Indonesia cenderung berada dalam kondisi yang lebih baik, tantangan pengamanan pemilu semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan kerjasama *hexa-helix*, yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas/NGO, media massa, serta agregator yaitu penyelenggara dan peserta pemilu yang diharapkan dapat meningkatkan sinergi dalam pengamanan pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi literatur, dan analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi antar unsur hexa-helix belum optimal, terutama interaksi dengan akademisi, dunia usaha, media massa, dan peserta pemilu. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Polres Ketapang memiliki peran sentral dalam mengkolaborasikan unsur *hexa-helix*, meskipun masih ada ditemukan kendala operasional dan perlu meningkatkan perannya sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator.

Artikel keempatbelas yang berjudul *Penerapan Metode Multiple Machine Learning (Hybrid Model) Untuk Mendeteksi Link Phishing Sebagai Upaya Preventif Dalam Meminimalisir Korban Pencurian Data* ditulis oleh Mokhamad Fikri Alfawaid, mahasiswa S1 STIK dan alumni LPDP S2 di Inggris dan Jarot Prianggono, Dosen STIK. Seperti halnya teknologi, kejahatan terus berevolusi dari waktu ke waktu, menciptakan ruang-ruang baru yang sebelumnya tidak berpenghuni. *Phishing*, salah satu bentuknya telah menjadi momok yang menakutkan di dunia digital karena mengeksploitasi kerentanan terbesar di dunia maya: manusia. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian penulis dalam mengembangkan model *machine learning* (ML) untuk membantu mendeteksi dan mengenali tautan *phishing*, sekaligus mengusulkan penggunaan ML oleh Polri untuk membantu masyarakat dalam menghindari kejahatan *phishing*. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan ML dengan tiga metode, yaitu Support Vector Machine (SVM), Decision Tree, dan Random Forest secara terpisah dan kombinasinya (*hybrid model*) dalam empat area penilaian, yaitu tingkat akurasi, presisi, *recall*, dan nilai f1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model *hybrid* yang merupakan gabungan dari ketiga model ML, yaitu Decision Tree, Random Forest dan Support Vector Machine (SVM) mampu menunjukan performa yang lebih unggul dibandingkan dengan masing-masing model yang berdiri sendiri. Penulis merekomendasikan penggunaan model gabungan dan penelitian lebih lanjut untuk memperkaya jumlah *dataset* yang digunakan agar hasil klasifikasi dan performa ML yang dihasilkan lebih baik.

Artikel kelimabelas yang berjudul *Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Ketidakadilan Kemanusiaan dan Dampak Sosialnya* ditulis oleh Dien Fahrur Romadhoni, mahasiswa S1 STIK. Perdagangan organ tubuh manusia adalah masalah serius yang mengancam prinsip-prinsip kemanusiaan, dengan dampak yang meluas pada individu yang terlibat, masyarakat, dan sistem kesehatan. Hal ini melibatkan eksploitasi individu yang rentan secara ekonomi dan mengarah pada pelanggaran HAM (hak asasi manusia). Selain itu, masalah ini menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap transplantasi organ, merusak sistem perawatan kesehatan, dan memengaruhi persepsi masyarakat tentang etika dalam bidang kesehatan. Diperlukan upaya serius untuk mengatasi masalah perdagangan organ tubuh manusia ini dan melindungi hak asasi manusia serta prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasar. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis perdagangan ilegal organ tubuh manusia melalui analisa unsur ketidakadilan kemanusiaan dan dampak sosialnya. Penulis menggunakan teori sosiologi kriminal, teori kejahatan organisasi dan teori eksploitasi. Peneliti menggunakan pendekatan kulitatif dengan teknik pengambilan data secara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan ilegal organ manusia adalah praktik ilegal yang melanggar hukum, etika, dan HAM. Fenomena ini berkembang karena berbagai faktor, seperti ketidaksetaraan ekonomi dan permintaan organ yang tinggi. Dampaknya pada korban dan keluarganya sangat serius, melibatkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup perlindungan hukum, perawatan medis, dan dukungan psikososial bagi korban, serta upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Selain itu, perdagangan ilegal organ manusia juga memengaruhi pandangan masyarakat tentang etika dan kemanusiaan, dengan menghadirkan isu-isu etis dan moral yang kompleks. Dalam menghadapi tantangan ini, masyarakat harus mencari solusi yang memadukan perlindungan HAM, keadilan sosial, dan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan.

Artikel keenambelas dan juga sebagai artikel penutup yang berjudul *Pemolisian Terhadap Marginalisasi dan Eksklusi Sosial Dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Pulau Rempang* ditulis oleh Dony Setiawan, mahasiswa S3 STIK. Mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah memang merupakan salah satu etika kenegaraan yang wajib dilaksanakan Polri yang bila tidak dilaksanakan merupakan pelanggaran kode etik profesi Polri. Dalam mengamankan kebijakan pemerintah, sering kali Polri dihadapkan pada dilema untuk mengabdi kepada kepentingan pemerintah atau kepentingan publik. Seperti dalam pengamanan pembangunan PSN (Proyek Strategis Nasional) di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Polri dihadapkan dengan rangkaian penolakan dan perlawanan dari warga yang merasa termarginalkan sehingga menimbulkan kerusuhan, kerusakan fasilitas, korban luka, dan dugaan pelanggaran HAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi marginalisasi dan eksklusi sosial yang terjadi, faktor penyebabnya serta strategi pemolisian yang diperlukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* dengan paradigma pragmatik studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marginalisasi dan eksklusi sosial yang terjadi bersifat struktural, multidimensi dan relasional meliputi dimensi politik, hukum dan HAM, ekonomi, sosial dan budaya. Marginalisasi tersebut disebabkan oleh paradigma pembangunan dan tidak adanya pengakuan terhadap eksistensi dan hak masyarakat adat dan paradigma kepolisian. Peneliti merekomendasikan penerapan pemolisian yang berorientasi pada masalah agar marginalisasi dan eksklusi sosial tidak berkembang sehingga membahayakan keselamatan dan keamanan warga dengan secara bersama para *stakeholder* mengatasi marginalisasi, eksklusi sosial, diskriminasi, dan ketidaksetaraan yang terjadi, mengatasi faktor-faktor penyebab dan dampaknya, membangun hubungan dan komunikasi saling percaya, sosialisasi informasi yang dibutuhkan warga, memfasilitasi aspirasi dan mendorong partisipasi warga, pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap eksistensi, identitas dan hak asasi manusia dan hak masyarakat adat, mengupayakan persetujuan warga atau kesepakatan atas solusi yang telah dirumuskan bersama sebelum memulai tahapan pembangunan.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Jakarta, Desember 2023  Salam dari Kami  **Dr. Vita Mayastinasari**  **Pemimpin Redaksi** |

***DIGITAL POLICING*: STUDI PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM PELAKSANAAN TUGAS INTELIJEN KEPOLISIAN UNTUK MENCEGAH KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*)**

**Marzuki Ismail**

**Program Studi Doktor Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12160**

**e-mail: ahmadmarzuq2021@gmail.com**

**Abstrak**

Pasca transformasi sosiologis masyarakat menuju masyarakat digital dengan dukungan jaringan internet, sebagian besar kebiasaan perilaku, budaya pun ikut berubah, termasuk transaksi keuangan yang dulunya dilakukan secara konvensional sejak satu dekade terakhir dengan menggunakan berbagai platform aplikasi. Kejahatan penipuan *online*, semakin mengancam dan meningkat secara signifikan dengan berbagai modus operandi yang berubah dan terus berkembang. Perkembangan teknologi digital belum maksimal dimanfaatkan oleh intelijen kepolisian untuk mencegah berbagai bentuk kejahatan (*crime Prevention*). teknologi digital secara maksimal untuk mengumpulkan informasi dan melakukan pendataan secara digital, hal ini mengakibatkan lambatnya antisipasi terhadap berbagai potensi kejahatan siber. Perpolisian digital dalam pelaksanaan tugas intelijen kepolisian perlu terus dikembangkan dengan melakukan investasi pada peralatan teknologi terkini agar dapat mewujudkan kepolisian yang prediktif, responsif, transparan, berkeadilan, dan mampu melakukan pencegahan kejahatan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi literatur dengan menganalisis buku, jurnal, berita media terkait pemanfaatan teknologi dalam tugas intelijen kepolisian.

***Kata kunci: perpolisian digital; teknologi; kejahatan siber; pencegahan kejahatan; intelijen***

***Abstract***

*After the sociological transformation of society to a digital society with the support of the internet network, most behavioural habits, culture have also changed. Including financial transactions that used to be carried out conventionally since the last decade using various application platforms. Various crimes, especially online fraud crimes, are increasingly threatening and increasing significantly with various modus operandi that change and continue to develop. The development of digital technology has not been maximally utilised by police intelligence to prevent various forms of crime (crime prevention). Police intelligence has not used digital technology to the fullest to collect information and conduct digital data collection. This has resulted in slow anticipation of various potential cyber crimes. Digital policing in the implementation of police intelligence tasks needs to be continuously developed by investing in the latest technological equipment in order to realise a predictive, responsive, transparent police force with justice and could accur the prevention of crime. The approach in this research is qualitative research with a literature study method by analysing books, journals, media news related to the use of technology in police intelligence tasks.*

***Keywords: digital policing; technology; cybercrime; crime prevention; intelligence***

**Pendahuluan**

Sejak beberapa dekade terakhir, komunikasi, dan transaksi sektor keuangan ditransformasikan ke dalam sistem teknologi jaringan internet dan digital, maka peluang pelaku kejahatan menggunakan jaringan internet untuk melakukan kejahatan semakin meningkat secara signifikan. Berdasarkan data Kemenkominfo, selama tahun 2022 ada 130 Ribu korban kasus penipuan online (*Online Fraud, Phishing, Scamming*). Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Semuel Abrijan, masyarakat Indonesia paling mudah ditipu secara online dan penipuan online sangat tinggi di Indonesia (<https://infopublik.id/kategori/>). Data tersebut baru kasus penipuan online, belum termasuk kasus-kasus pencurian data pribadi, pecemaran nama baik, dan lain-lain.

Tidak hanya di Indonesia, di Amerika Serikat berdasarkan *Internet Crime Report* (ICR) tahun 2020 terdapat 791.790 kasus laporan kejahatan internet di Amerika Serikat dengan total kerugian diperkirakan $ 4,1 Milyar atau sekitar Rp 59,5 Triliyun. Jumlah laporan ini naik 69% dibanding tahun 2019 dengan penipuan online merupakan laporan yang paling menonjol berjumlah 241.342 kasus. Jumlah kasus *ransomware* juga terus meningkat dengan 2474 laporan pada tahun 2020 (IC3, 2021: 3). Pergeseran jenis tindak pidanan dari konvensional ke kejahatan siber merupakan dampak negatif dari transformasi masyarakat tradisional ke masyarakat digital.

Perubahan sosial merupakan perubahan dari interaksi dan bagaimana masyarakat menyikapi setiap perkembangan yang terjadi. Perubahan sosial meliputi struktur, nilai, norma, pranata, dan fungsi masyarakat. Perubahan sosial masyarakat yang cepat akibat perkembangan ilmu dan teknologi dapat berakibat pada kondisi apa yang disebut oleh Emile Durkheim (1893) sebagai *anomie****.*** *Anomie* diartikan sebagai disfungsi sebuah sistemyaitu suatu keadaan masyarakat yang berubah dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern di mana terjadi kondisi *normlessness*. Kondisi *normlessness* diartikantidak berfungsinya norma dalam masyarakat serta nilai yang selama ini hidup dalam masyarakat terjadi kehilangan makna sebagai akibat munculnya banyak jenis kejahatan. Durkheim termasuk ilmuan yang memiliki keperihatinan tentang dampak modernitas terhadap masyarakat kontemporer (Stewart, John, 2023: 1).

Salah satu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah terjadinya transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat digital. Saat ini kita hidup pada era yang sangat dinamis yang terus berubah dengan cepat. Teknologi informasi telah mengubah struktur kehidupan manusia. Pengaruh teknologi digital saat ini terhadap kehidupan individu dan sosial diyakini belum pernah terjadi sebelumnya (Levin dan Mamlok, 2021). Pola dan pengalaman hidup kita saat ini telah jauh berubah dibandingkan dengan pengalaman hidup kita 20 atau 30 tahun yang lalu. Transformasi teknologi informasi berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai kebiasaan sehari hari, pola hubungan sosial, budaya masyarakat, pendidikan, ekonomi, politik, keamanan, pertahanan dan lain-lain.

Transformasi perkembangan teknologi ini tidak hanya membawa manfaat besar tetapi juga risiko besar. Kejahatan digital (*digital crime*) adalah salah satu aktivitas kriminal dengan pertumbuhan tercepat (Rakhmanova dan Pinkevich, 2020: 193). Pada saat bersamaan orang di berbagai belahan dunia bisa menjadi korban kejahatan yang sama. Kejahatan digital memiliki karakteristik tersendiri. Kejahatan ini tidak memiliki batas geografis; kejahatan digital dapat dilakukan di suatu negara atau wilayah sementara korbannya ada di negara lain. Terlepas dari kenyataan bahwa dunia digital memunculkan anonimitas dan impunitas ketika melakukan kejahatan menggunakan teknologi digital, penjahat tetap meninggalkan jejak digital. Tempat terjadinya kejahatan digital adalah lingkungan virtual; data komputer, sistem digital, atau media sosial yang digunakan untuk melakukan kejahatan (Rakhmanova: 195).

Transformasi masyarakat yang cukup signifikan adalah ketika penemuan komputer, tetapi yang menjadi katalisator dalam transformasi yang besar dan cepat mulai terjadi ketika penemuan internet pada tahun 1969. Karena internet inilah yang dapat menghubungkan jaringan komputer global. Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung dan memiliki kemampuan untuk membaca dan menghubungkan, memfasilitasi berbagai aplikasi. Perkembangan jaringan internet semakin berkembang pesat, apalagi setelah Amerika Serikat membentuk *National Science Foundation Network* (NSFNet) pada tahun 1986. NSFNet menghubungkan jaringan komputer yang ada di berbagai negara. Dari sinilah kemudian pada tahun 1993 semua komputer yang menggunakan internet harus memiliki alamat *Internet Protocol* (IP *address*) atau nama domain berupa simbol numerik atau bentuk tertentu sebagai tanda pengenal. Jadi sampai saat ini setiap komputer, laptop atau *notebook* dan *device* lainnya yang terhubung dengan internet pasti memiliki IP *address*.

Kemudian secara perlahan jaringan internet ini mulai dikomersialkan pada awal tahun 1990-an dengan dilakukannya restrukrisasi NSFNet dan membuat entitas nirlaba untuk pengembangan komersial jaringan. Sejak saat itulah lahir berbagai pengembangan mulai *dot kom*, mesin pencari *mozilla firefox browser,* [*Chrome*](https://www.computerhope.com/jargon/c/chrome.htm)*browser, bitcoin, windows* dan istilah lain yang membuat masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan menghubungkannya dengan berbagai komunitas, produk dan juga ilmu pengetahuan di berbagai belahan dunia. Saat ini kita dapat mengetahui secara mudah apa yang terjadi di berbagai belahan dunia pada detik yang sama. Termasuk perkembangan mutakhir beberapa tahun belakangan adalah kita dapat melakukan belanja secara online dengan aplikasi bukalapak.com, shopee, tokopedia tanpa kita harus datang ke pusat perbelanjaan atau ke toko tempat barang yang kita butuhkan di jual. Atau kita juga dapat memesan tiket pesawat, tiket kereta api, memesan hotel hanya melalui sebuah peralatan yang ada dalam genggaman kita. Kita benar-benar sudah berada dalam percaturan dunia digital.

Kemudahan tersebut pada satu sisi dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan dengan memanfaatkan tekhnologi (*cybercrime*). Semua kemudahan dari revolusi teknologi ini awalnya dipandang sebagai sebuah peluang baru karena membawa kemudahan yang sangat signifikan. Namun dibalik semua kemudahan juga dengan segera menjadi sebuah ancaman. Revolusi industri tidak hanya menyumbangkan banyak kekayaan, tetapi juga banyak ketimpangan dan banyak masalah ekonomi. Hal yang sama berlaku untuk periode teknologi digital dan perubahan sosial saat ini (Hilbert, Martin, 2020: 189).

Dengan mudahnya pelaku kejahatan melancarkan misinya di dunia digital, maka ini merupakan tantangan bagi negara dan aparat penegak hukum untuk dengan serius memberantasnya untuk menghindari korban kejahatan digital semakin banyak. Salah satu yang perlu dilakukan adalah peningkatan sumber daya teknologi yang digunakan oleh intelijen kepolisian untuk mengantisipasi dan mencegah kejahatan siber dan kecepatan dalam menanggapi suatu insiden kejahatan siber.

Yang menjadi permasalahan dalam artikel ini adalah dengan semakin tingginya kasus kejahatan di ruang digital (*cybercrime*) belum direspon secara maksimal oleh Intelijen kepolisian untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang begitu pesat. Pelaku kejahatan siber terus mengembangkan modus operandinya dalam melakukan kejahatan tanpa upaya maksimal dari intelijen kepolisian untuk melakukan uapaya-upaya pencegahan.

**Tinjauan Literatur**

**Digital**

Digital berasal dari bahasa Yunani yaitu *digitus*yang berarti jemari. Maksudnya adalah hitungan jari yang berjumlah 10 (sepuluh). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti digitaladalah angka-angka. Digital merupakan penggambaran dari keadaan bilangan. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya atau disebut juga dengan istilah Bit (*Binary digit*). Era digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer (Wikipedia.org). Media baru era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia, Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas.

Era digital sebenarnya dimulai sejak lahirnya sistem komputer. Tetapi ketika itu data yang ada dalam memori komputer belum dapat bergerak cepat. Baru setelah munculnya internet, data-data komputer dapat bergerak cepat, seperti pengiriman data melalui surat elektronik (email). Belakangan setelah muncul era *smartphone* maka pergerakan data jauh lebih cepat. Seiring munculnya *smartphone* muncul pula berbagai aplikasi media digital yang digunakan untuk keperluan *chatting* seperti *yahoo massanger*, *short massage service*, *face book*, *whataps, istagram*, *twitter*, *youtube,* dan lain-lain. Media jurnalistik *online*pun bermunculan sangat banyak.

Teknologi digital, termasuk keterhubungannya yang ada di mana-mana dan kecerdasan buatannya (*Artificial Intelligence*) yang kuat, adalah gelombang panjang terbaru dari evolusi sosial ekonomi umat manusia (Hilbert, 2020; 189). Inovasi teknologi informasi terus berkembang tanpa henti, bahkan transaksi ekonomi dan bisnis, pertemuan bisnis semuanya dapat dilakukan secara online atau *virtual*. Pembelian saham sebuah perusahaan atau emiten dapat dilakukan tanpa harus datang ke perusahaan atau bursa efek. Dengan membaca profile perusahaan dan jenis saham yang dijualnya Indonesia dapat langsung membeli saham sebuah perusahaan dan langsung masuk dalam portofolio Indonesia. Tidak hanya sampai di situ, pada saat ini apabila masyarakat membutuhkan dana dalam keadaan mendesak, tanpa harus bergerak dari tempat duduknya dapat melakukan pinjaman secara *online* (Pinjol) melalui *platform* digital.

*Policing*

Istilah ‘*policing*’ dalam bahasa Indonesia diartikan ‘pemolisian’, ada juga yang memberi makna ‘perpolisian’. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan makna ‘pemolisian’. Awalnya, menurut Johnston (Dalam Button, 2002; 4-5) sebelum pertengahan abad ke 18 istilah *policing* mencakup regulasi pemerintahan, moral, dan ekonomi. Baru kemudian istilah *policing* dikaitkan dengan pemeliharan ketertiban dan pencegahan kejahatan. Penting untuk membedakan istilah ‘*police*’ dan ‘*policing*’. Istilah ‘*police*’ mengacu pada sebuah organisasi tertentu, sedangkan ‘*policing’* mengacu pada proses sosial di mana fenomena-fenomena menjadi bagiannya, walaupun sebagian besar *‘policing*’ dilaksanakan oleh organisasi polisi. *Policing* atau pemolisian merupakan fungsi masyarakat yang berkontribusi pada tatanan sosial tertentu yang dilakukan oleh berbagai badan dan lembaga yang berbeda.

*Policing* merupakan profesi yang sangat lama sekaligus baru. Kelahiran polisi modern pada awal abad ke 19 secara bersamaan dengan lahirnya birokrasi modern, industrialisasi, dan pembagian sosial. Kepolisian Metropolitan Robert Peel dianggap sebagai departemen kepolisian modern pertama, karena fokus pada birokrasi dalam menetapkan domain yang dapat diprediksi, yaitu kejahatan dan kekacauan publik, serta penekanan mereka pada pembangunan konsensus (Bielejewski, 2021: 11) Menurut Sparrow Pemolisian modern telah menjadi semakin “ilmiah,” dengan penekanan pada cara terbaik untuk mencapai tujuan kelembagaan profesi tersebut.

MenurutNewburn (2008: 1)dalam literatur-literatur ilmu sosial modern, istilah yang dominan dibicarakan adalah globalisasi, resiko, bentuk baru modernitas dan lain-lain. Hal-hal yang dibahas tersebut merupakan hal-hal yang signifikan mempengaruhi kehidupan kita yang menembus semua aspek kehidupan, tidak terkecuali masalah pemolisian (*policing*). Maksudnya diskursus tentang *policing* merupakan masalah yang ikut didiskusikan oleh para sarjana sosial dalam literatur-literatur mereka. Bahkan banyak ilmuan sosial, kriminologi menaruh perhatian khusus pada masalah *policing* sebagai subyek penelitian mereka. Karena harus diakui bahwa *policing* merupakan suatu sub sistem dalam menata ketertiban masyarakat, penjaga moral, sebagai kontrol sosial dan juga kontrol kejahatan serta merupakan bagian yang dapat memberikan kampanye atau pendidikan tentang kejahatan dan dampaknya, pelaku kejahatan dan bagaimana agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.

Dalam Collins *Dictionary* (www.collinsdictionary.com) ada dua makna *policing*: pertama, *the activities carried out by [police](https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/police" \o "Definition of police)*[*officers*](https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/officer)*in order to [preserve](https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/preserve" \o "Definition of preserve) law and order the policing of public places*  (kegiatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di tempat umum). Makna yang ke dua lebih moderat yaitu: *the actions of a person or group in authority in order to ensure fairness and legality in an area of public life* (tindakan seseorang atau kelompok yang berwenang untuk memastikan keadilan dan legalitas di bidang kehidupan publik). Makna yang pertama hanya dilaksanakan oleh polisi saja, tetapi makna yang ke dua dapat saja dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok masyarakat dan makna ini lebih fokus pada pengawasan.

**Intelijen Kepolisian**

Intelijen sendiri berasal dari bahasa Inggris *intelligence* yang bermakna kecerdasan. Pengertian intelijen dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu: *pertama,* intelijen sebagai kegiatan; *kedua,* Intelijen sebagai organisasi; dan Intelijen sebagai produk, yaitu bahan keterangan yang sudah diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. *Core* dari tugas intelijen adalah *early warning system* atau sistem peringatan dini yang dapat memberikan informasi, peringatan atau pencegahan sebelum terjadi suatu insiden, terutama tindak pidana siber.

Intelijen kepolisian merupakan intelijen penegakan hukum (*law enforcement intelligence*) atau juga sering ditemukan istilah intelijen kriminal (*criminal intellgence*) yang merupakan tugas kepolisian untuk menjaga keamanan dalam negeri. Pengertian intelijen penegakan hukum salah satunya dikemukakan oleh David L. Carter, dari *School of Justice, Minchigan State University* yaitu produk akhir dari sebuah proses analitik yang mengumpulkan dan menilai informasi tentang kejahatan dengan tujuan untuk membuat penilaian dan kesimpulan tentang kondisi masyarakat, masalah potensial, dan aktivitas kriminal dengan tujuan untuk melakukan penuntutan pidana atau memproyeksikan tren kejahatan (Carter, 1990: 2).

Intelijen kepolisian juga sering disebut intelijen keamanan yang bertugas melakukan penyelidikan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan metode mengumpulkan informasi (bahan keterangan) mengolah informasi, membuat analisa dan kemudian menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan untuk penentuan kebijakan.

Secara struktural intelijen kepolisian berada pada Badan Intelijen Keamanan (BIK) Polri yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Di samping intelijen kepolisian, ada juga fungsi bahkan institusi intelijen melekat pada berbagai lembaga negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (TNI), Intelijen Kejaksaan, Intelijen Imigrasi, Intelijen Pertahanan, Intelijen Keuangan, dan lain-lain.

**Pencegahan Kejahatan**

Pencegahan kejahatan (*crime prevention*) terdiri dari strategi dan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan, dan potensi dampak buruknya terhadap individu dan masyarakat, termasuk rasa takut akan kejahatan, dengan mengintervensi berbagai penyebabnya (*[The Prevention of Crime ECOSOC Resolution 2002/13, Annex](https://www.unodc.org/unodcor%20the%20Prevention%20of%20Crime%20ECOSOC%20Resolution%202002/13,%20Annex)*). Di dalam *Action to promote effective crime prevention* disebutkan bahwa diantara prinsip dasar dalam strategi pencegahan kejahatan antara lain adanya peran semua level pemerintahan untuk membangun strategi yang efektif dalam pencegahan kejahatan.

Lab (1992: 31-32) mendefinisikan pencegahan kejahatan merupakan sebuah tindakan untuk menghilangkan kejahatan sebelum terjadi atau sebelum kejahatan berkembang lebih jauh. Lab juga membedakan antara pencegahan kejahatan dengan pengendalian kejahatan. Model pencegahan kejahatan dibagi tiga yaitu pertama, pencegahan kejahatan primer merupakan tindakan yang diambil untuk menghindari pengembangan tingkat masalah; kedua, pencegahan kejahatan sekunder bergerak dan fokus pada masyarakat dan situasi yang memperlihatkan tanda-tanda awal suatu masalah atau kejahatan; ketiga pencegahan kejahatan tersier berhubungan dengan pelanggar hukum yang nyata dan melibatkan intervensi setelah terjadi kejahatan agar tidak terjadi kejahatan berulang.

Untuk melaksanakan ketiga model pencegahan di atas harus ada kerjasama antara berbagai *stakeholders* juga sangat menentukan pengembangan strategi pencegahan kejahatan. Konsep pemolisian modern yang yang dicetuskan oleh Sir Robert Peel di Inggris sejatinya menekankan pada pencegahan kejahatan dengan model patroli polisi berseragam (Rainer, 2016: 114). Di samping upaya-upaya dari kepolisian, pencegahan kejahatan dapat dilakukan oleh masyarakat dan *stakeholders* lainnya dalam perspektif tradisional sebagaimana dalam teori *Situasional Crime Prevention*, yaitu dengan menciptakan lingkungan masyarakat untuk mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi lingkungan, waktu, dan modus operandi. Pendekatan pencegahan seperti ini berupaya membuat target kurang memiliki potensi dan meningkatkan resiko bagi pelaku serta meningkatkan kesukaran bagi pelaku untuk melakukan kejahatan atau *target hardening*. Menciptakan lingkungan dalam konteks kejahatan siber dengan memasang *end-point* antara lain *Instrusion Detection Systems* (IDS), *Instrusion Prevention Systems* (IPS) yang mengambil tindakan otomatis untuk menghentikan serangan potensial, *Authentication and Access Control* dan peralatan lainnya.

**Kejahatan Siber (*Cybercrime*)**

Casey (2000) mendefinisikan *cybercrime* sebagai kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan (Kyung-Shick Choi, 2008: 2). Dalam kejahatan siber, alat yang digunakan adalah komputer, *smartphone* atau peralatan lainnya yang difasilitasi oleh jaringan internet dan antara korban dengan pelaku rata-rata tidak pernah bertemu, mereka hanya berkomunikasi secara virtual. Ada berbagai macam jenis kejahatan siber antara lain: *unauthorized acces to computer system and service*; *hacking dan cracking ; cyber fraud/online fraud;* *spoofing*; *credit card fraud*; *identity theft* (Vadza, 2013: 1) *data forgery , cyber espionage; cyber sabotage and extortion; offense against intellectual property; infrengments of privacy; gambling; cyber porn/cyber sex; cyber stalking* (Burhansyah, 2016: 41), *cyber terrorism, cyberbullying, child pornography* (Ibrahim, Samira dkk, 2021: 1-2). Jenis kejahatan siber ini terus berkembang dan berubah dengan berbagai modus operandinya. Maka dalam pencegahan kejahatan siber sangat dibutuhkan strategi yang efektif oleh intelijen kepolisian untuk dapat mendeteksi potensi ancaman kejahatan siber dan juga dapat mendeteksi potensi masyarakat yang akan menjadi korban, sehingga dapat diberikan *early warning* dari awal.

**Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan strategi studi kepustakaan dengan menganalisis buku, jurnal, dan berita media yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam tugas intelijen kepolisian. Metode penelitiannya adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik analisis data yaitu dengan triangulasi data, sebelumnya dilakukan validitas data.

**Hasil dan Pembahasan**

**Polisi dan Teknologi**

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa polisi merupakan pengadopsi awal penggunaan teknologi baru dan dapat memprediksi perkembangan teknologi baru. Karena adanya kemajuan tekhnologi, maka polisi menerapkan *cyber-policing* dengan pembentukan unit khusus *cybercrime* (Dale Willits dan Nowacki, 2016: 12-13). Penggunaan teknologi oleh kepolisian, karena polisi berada paling depan dalam penggunaan teknologi untuk merespon kejahatan siber. Hal ini menunjukkan bahwa polisi secara eksperimental menggunakan teknologi canggih sebagai bentuk keterlibatan dalam teknologi sosial dan berada di garis depan. Dalam penelitian lain tentang inovasi kepolisian ternyata ada manfaat antara keterlibatan teknologi dan kemajuan lainnya dalam strategi teknologi kepolisian (Dale, 2016: 25).

Perkembangan kontemporer lain bidang pemolisian, dalam tugasnya polisi juga menggunakan teknologi baru dan selalu mengubah metode dan strategi mereka (Michael Gelles dkk., 2019: 4). Tantangan tugas yang berhadapan dengan perkembangan teknologi informasi. Kejahatan-kejahatan yang terjadi, modus operandi atau polanya terus berubah. Kejahatan siber secara kuantitas dan kualitas meningkat pesat, sehingga menuntut Polri untuk membentuk satuan khusus untuk menangani kejahatan siber, yaitu dengan dibentuk Direktorat Tindak Pidana Siber (Dit Tipidsiber) yang berada di bawah Bareskrim Polri. Direktorat Siber harus memanfaatkan teknologi Informasi secara maksimal, terutama melakukan patroli siber (*cyber patrol*) terhadap media-media sosial. Pembentukan Dittipidsiber Bareskrim Polri tidak diimbagi oleh pembentukan *cyber intelligence* yang kuat di Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri. Dalam tugasnya Dit Tipidsiber melaksanakan penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan suatu tindak pidana kemudian memproses secara hukum di sisi lain penyelidikan intelijen melaksanakan penyelidikan untuk meniadakan (mencegah) suatu potensi kejahatan siber.

Walaupun teknologi informasi terus berubah secara cepat, fungsi, dan tugas pokok aparatur hukum adalah tetap menegakkan hukum dengan tantangan dan peralatan yang semakin berkembang. Fungsi penegakan hukum, khususnya terhadap kasus siber, selama ini dirasakan belum efektif terutama pada aspek pencegahan dan juga penindakan. Karena kompleksitas dari kasus siber mulai dari sifatnya yang virtual, trans-nasional, dan sulitnya mengikuti uang hasil kejahatan (*follow the money*). Tetapi kurangnya perhatian yang diberikan pada kejahatan siber tidak sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Padahal kerugian akibat kejahatan siber tidak sama dengan yang dialami oleh korban kekerasan, terutama mengalami trauma emosional dan psikologis (Cross dan Blackshaw, 2015: 4-5).

Kemunculan kejahatan siber dan banyaknya sebaran informasi yang salah serta informasi negatif memerlukan aparat penegak hukum yang dapat menanggulangi dan dapat memprediksi kejahatan serta dapat mencegah menyebarnya informasi negatif kepada masyarakat di dunia maya. Hal ini menyebabkan model-model pemolisian di berbagai negara mengalami perubahan yang signifikan seperti di Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan lain-lain yang sudah mencari solusi terhadap sebuah pemolisian yang berlomba dengan perkembangan kemajuan TI yaitu *Digital Policing*, *Predictive Policing* atau Pemolisian prediktif. Pemolisian digital dapat menganalisis isu dan permasalahan yang berpotensi menjadi gangguan keamanan. Hal ini menunjukkan pemolisian digital dan prediktif memerlukan penerapan teknik kuantitatif untuk menganalisis data untuk menentukan perkiraan potensi di mana kegiatan kriminal mungkin terjadi dalam waktu dekat (Meijer dan Wessels, 2019: 1033). Dalam perkembangan pemolisian, tidak dapat diimplementasi satu model pemolisian saja, tetapi beberapa model pemolisian berjalan secara simultan. Di samping ada model pemolisian yang modern, model pemolisian lama juga tidak dapat ditinggalkan seluruhnya. Hal ini tentu saja ditujukan untuk menemukan pola pencegahan yang efektif terhadap kejahatan siber.

Dalam menghadapi tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks, terutama kejahatan siber, perlu dibangun “pusat keunggulan” (*center of excellent*) sebagai representasi dari seluruh penegakan hukum. Seperti yang dilakukan di Kepolisian Australia, mereka membangun “*center of excellent*” dan “*point of contact*” yang mewakili seluruh penegakan hukum yang efektif untuk seluruh spektrum kejahatan yang serius/menonjol. Dengan adanya pusat keunggulan ini dapat memastikan peningkatan yang terus menerus di bidang forensik, intersepsi dan kemampuan teknis lainnya. *Center of excellent* ini sebentuk kemlompok ahli di bidang intelijen dan juga para penyidik yang berkolaborasi untuk mengantisipasi kejahatan siber.

**Penggunaan Teknologi oleh Intelijen Kepolsian**

Tugas-tugas intelijen sejatinya dapat memanfaankan Teknologi Informasi (TI) secara lebih cerdas dan masif. Karena pemanfaatan TI merupakan konsekuensi logis atau sesuatu yang niscaya. Tugas intelijen salah satunya adalah mendeteksi isu-isu yang berkembang dalam masyarakat di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Tekhnologi informasi telah memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia, tetapi di sisi lain tekhnologi informasi juga memunculkan kejahatan dengan menggunakan tekhnologi. Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai media, modusnya juga bermacam-macam dan cepat sekali berubah.

Intelijen kepolisian adalah intelijen penegakan hukum yang bekerja sebagai bagian dari penegakan hukum. Tugas-tugas kepolisian di bidang *law enforcement* memerlukan aktifitas intelijen. Karena proses penegakan hukum membutuhkan data-data spesifik yang dibutuhkan oleh pimpinan (*user*). *Data collecting* dilakukan oleh fungsi intelijen melalui aktifitas *early detection* yang secara sistematis mengikuti *intelligency cycle* yang meliputi *planning, collection, processing, analysis, dissemination.* Siklus intelijen ini merupakan metode kerja intelijen yang terencana yang diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat mendukung upaya-upaya penegakan hukum (Chryshnanda, 2020: 157).

Dalam pelaksanaan penyelidikan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh penyelidik di antaranya terkait masalah praktis, teknis, dan sosial seperti ketersediaan sistem dan kerja kolaboratif serta didukung dengan perangkat komputer (Nouh, Mariam dkk, 2019: 1) Dalam pelaksanaan penyelidikan dengan berbagai model, pengumpulan data intelijen merupakan proses untuk mendukung penegakan hukum. Meskipun model-model pengumpulan informasi seperti berbeda, tetapi model proses pengumpulan informasi intelijen memiliki proses yang sama, seperti yang terlihat dalam gambar siklus intelijen di bawah ini (Nouh, 2019: 2).



**Gambar 1. Siklus Intelijen (*Departement of Defence)***

Siklus Intelijen terdiri dari enam langkah utama: perencanaan dan pengarahan, pengumpulan, pemrosesan dan eksploitasi, analisis dan produksi, penyebarluasan dan integrasi, serta evaluasi dan umpan balik. Dalam pengumpulan data dan informasi siklus ini akan terus berputar. Apabila ada suatu misi atau target yang hendak dicapai maka selalu dimulai dari perencanaan pengumpulan informasi yang terdiri dari menentukan personil yang akan melaksanakan misi, rencana anggaran, rencana limit waktu, rencana *safe house*, rencana *emergency* dan rencana *escape* apabila terjadi situasi emergensi untuk tindakan penyelamatan personil dan informasi yang telah didapat. Dan yang sangat penting dalam pelaksanaan pengumpulan informasi ini adalah penggunaan teknologi digital pada setiap tahap siklus intelijen tersebut. Proses pengumpulan informasi yang dilakukan selama ini kurang dibarengi dengan penggunaan teknologi informasi berupa peralatan khusus (alsus) yang seharusnya melekat pada setiap langkah siklus intelijen untuk membantu dan memetakan serta pendataan yang akurat dalam membuat analisis, prediksi, dan rekomendasi intelijen.

Pemanfaatan model pemolisian digital dalam bidang intelijen kepolisian belum maksimal. Padahal model pemolisian digital ini sebagai salah satu bentuk *e-policing* dan merupakan salah satu bentuk pemolisian era digital yang berupaya menerobos sekat-sekat ruang dan waktu sehingga pelayanan kepolisian dapat terselenggara secara cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses. Model pemolisian ini dapat menjadi terobosan kreatif atau *creative breakthrough* (Chryshnanda, 2020: 39).

Pelaksanaan tugas intelijen kepolsian masih sangat minim pemanfaatan teknologi informasi sehingga intelijen kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya masih dominan dengan *human intelligence* atau metode konvensional yang mengandalkan kemampuan agen (petugas) intelijen yang kurang dikombinasikan dengan peralatan teknologi canggih untuk membantu tugas intelijen kepolisian. Karena masih belum optimalnya pemanfaatan TI maka kehadiran anggota Polri secara fisik dalam rangka mengumpulkan informasi (*gather of Information*) masih sangat dominan. Padahal kalau TI dimanfaatkan secara maksimal, maka akan memudahkan kerja-kerja intelijen kepolisian yang berujung juga pada pelayanan masyarakat yang lebih cepat, mudah dan akurat serta dapat melakukan *crime prevention* secara simultan.

Bagi dunia intelijen, secara tradisional petugas intelijen (agen) berhadapan dengan suatu sasaran yaitu manusia. Tetapi di era digital, sasaran operasi atau penyelidikan intelijen bukan hanya manusia, tetapi perangkat tekhnologi yang digunakan manusia. Perangkat seperti *smartphone*, komputer, aplikasi dan vitur-viturnya dengan media internet maka akan sangat efektif dalam mengirim pesan kepada orang lain. Teknologi intelijen seharusnya dapat mendeteksi pesan atau lalu lintas pesan dan gerak media sosial yang merupakan sebuah dunia tersendiri (dunia maya) tetapi dapat memberikan dampak dalam dunia nyata. Karena melalui lalu lintas pesan di dunia maya yang sangat banyak itulah berisi potensi dan rencana melakukan kejahatan.

Pola-pola pemolisian di bidang intelijen selama ini belum jauh berubah sejak bergulirnya reformasi Polri. Artinya pola pemolisian di bidang intelijen masih sangat mengandalkan human (tenaga manusia), selama ini personil bekerja mirip seperti pekerjaan fungsi Binmas, sehingga muncul *anekdot*, intelijen itu ada dua, yaitu Intel yang berseragam yaitu Binmas atau Babinkamtibmas dan Intel tidak berseragam (*Ununiform*) yaitu fungsi intelijen, karena memang pola kerjanya hampir sama. Padahal kemajuan TI seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat dalam pengumpulan bahan keterangan (informasi) dan juga dapat secara cepat disampaikan (diseminasi) kepada pengambil kebijakan atau kepada *stakeholders* yang membutuhkan.

Pemolisian era digital di bidang intelijen sangat luas. Intelijen harus dapat mendeteksi potensi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan (Ipoleksosbudkam). Bidang-bidang tersebut kalau di*break* *down* sangat luas, mulai dari politik, dampak otonomi daerah, sengketa batas daerah, konflik antara masyarakat dengan investor, dampak pelaksanaan pilkada, kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, masalah buruh, tenaga kerja, masalah investasi, pelaksanaan ujian nasional, dampak inflasi, dampak pembangunan, masalah sumber daya alam, kejahatan konvensional, kejahatan bidang ekonomi, korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, aliran kepercayaan, konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Dalam semua bidang yang disebut di atas semuanya dapat berpotensi terjadi kejahatan siber. Maka dengan bidang tugas yang sangat luas seperti itu, pemanfaatan teknologi informasi dan sarana elektronik yang maksimal sangat membantu pelaksanaan tugas-tugas intelijen agar lebih modern, cepat, akurat, tepat, dan akuntabel untuk dapat menjaga kepentingan dan keamanan nasional, termasuk serangan dari kejahatan siber.

Untuk dapat mendukung misi-misi intelijen dalam pengumpulam informasi, maka diperlukan juga Unit *Intellgence Cyber Cops* (ICC). Unit ini dibutuhkan untuk menjawab tantangan era digital yang serba cepat. Unit ini diisi oleh polisi intelijen yang muda dan memiliki kemampuan TI yang mempuni sehingga dapat menyajikan data 24 jam sehari, Tujuh hari dalam seminggu dengan standar kualitas yang tinggi dengan kemampuan analisis intelijen yang kuat. Mereka harus dilatih secara khusus dan serius tentang analisa intelijen, sehingga mereka dapat membuat sebuah analisa intelijen yang kuat, tajam dengan prediksi dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pimpinan (*user*) untuk mendukung pengambilan keputusan bidang pencegahan kejahatan siber.

Dampak komunikasi di dunia maya dengan teknologi digital dari sisi positifnya sangat banyak, seperti pengiriman data atau file melalui media yang cepat dengan kapasitas besar. Tetapi perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif seperti provokasi melalui media sosial yang menyebabkan kerusuhan, penculikan, penipuan, penghasutan, transaksi *illegal,* dan lain-lain. Sehingga sangat berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (*social order*). Kalau sudah berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, artinya masalah ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Polri sebagai penjaga ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Polisi yang bertugas sebagai *law enforcement officer* tidak bisa tiba-tiba langsung dapat menangkap pelaku kejahatan di dunia maya apabila tidak ada kemampuan untuk mendeteksi dan menelusuri jejak pelaku yang juga ada di dunia maya dengan menggunakan berbagai aplikasi digital.

Intelijen polisi yang bertugas sebagai investigator di dunia maya harus memiliki kemampuan *cyber patrol*, harus dapat membongkar sebuah akun, *IP address*, *mobile number* yang digunakan dan sebagainya. Gunanya adalah untuk mengetahui pemilik akun yang digunakan untuk menipu atau menghasut, provokasi dan lain-lain. Kalau sudah sampai pada tahap ini polisi dapat merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam rangka penegakan hukum.

Kemampuan dan jenis media yang digunakan oleh lembaga kepolisian juga perlu menjadi perhatian, karena pesatnya kemajuan teknologi informasi, maka masyarakatpun menggunakan berbagai jenis media sosial dalam berinteraksi. Dalam organisasi Polri belum ada data tentang jenis-jenis media sosial yang digunakan oleh departemen di kepolisian. Misalnya Badan Intelijen Keamanan (BIK) Polri yang di dalamnya terdapat beberapa direktorat dan bagian, secara official menggunakan media sosial apa saja untuk memonitor dan menjalin kemitraan dengan masyarakat. Di Amerika Serikat, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Police Exsecutive Research Forum* (PERF) pernah melakukan penelitian tentang persentase jenis media sosial yang digunakan oleh badan/bagian kepolisian terungkap bahwa 98 % dari badan-badan kepolisian yang disurvey akan meningkatkan penggunaan media sosial dalam dua sampai lima tahun yang akan datang (PERF, 27).

Tujuan penggunaan media sosial oleh kepolisian di antaranya adalah untuk desiminasi pesan kepada masyarakat dan juga dapat mengumpulkan informasi dari media sosial untuk mencegah dan dalam rangka penyelidikan kejahatan (PERF). Dalam even-even, besar media sosial dapat memandu bagian operasi kepolisian untuk memonitor isu-isu atau *trending topics* yang menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat atau mengguna media sosial. Bahkan *Los Angeles Police Departement* (LAPD) telah memasukkan bagian sosial media dalam struktur organisasi operasi dalam banyak even yang bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan tentang aktivitas yang sedang dibicarakan di media sosial (PERF, 28).

**Peralatan Teknologi Intelijen Kepolisian**

Intelijen kepolisian sejatinya memiliki peralatan khusus (Alsus) yang memiliki kualitas dan berteknologi tinggi untuk dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas intelijen untuk mencegah kejahatan siber. Secara umum peralatan intelijen terdiri dari alat deteksi, alat keamanan dan alat komunikasi. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor : Skep / 992 / XII / 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Standarisasi Alat Khusus Intelijen, ada tiga belas kegunaan peralatan khusus intelijen yaitu untuk observasi, merekam suara, merekam gambar bergerak (video) dan tidak bergerak (photo), menyadap suara, menyadap video, komunikasi, pengamanan, deteksi barang-barang berbahaya, membuka pintu dan tas koper, transportasi, pengolah data, menjam/ mengacau alat penyadap lawan, melacak alat penyadap lawan (Sumarjiyo, 2018: 150).

Pada saat ini dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat peralatan intelijen kepolisian juga harus disesuaikan dengan perkembangan peralatan terbaru, agar dapat berfungsi efektif dalam mencegah kejahatan siber. Standar produk yang digunakan untuk pelaksanaan tugas intelijen kepolisian harus mempertimbangkan kelayakan, kehandalan, spesifikasi dari material dan juga struktur penggunan (Sumarjiyo, 158). Pengadaan peralatan intelijen kepolisian sangat perlu memperhatikan kualitas dan fungsionalisasinya agar dapat dioperasionalkan secara maksimal. Oleh sebab itu dibutuhkan pelatihan bagi personil yang mengawaki peralatan tersebut untuk dapat mengetahui secara detail penggunaan dan pemeliharannya.

**Kesimpulan dan Saran**

Perkembangan teknologi informasi, terutama teknologi digital tidak dapat dihindari oleh semua komponen masyarakat dan lembaga pemerintah. Yang terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut untuk tetap menjaga dan membangun peradaban yang dicita-citakan. Polri, terutama intelijen kepolisian harus memaksimalkan peran pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan teknologi dalam bentuk kejahatan siber (*Cybercrime*) dan apabila sudah terjadi penyalahgunaan atau adanya unsur tindak pidana yang merugikan orang lain atau bahkan merugikan negara, Polri harus dapat mengatasi bentuk-bentuk kejahatan yang dapat merusak peradaban umat manusia dengan cara Intelijen kepolisian melakukan *collecting data base* terhadap kelompok masyarakat, residivis, kelompok pelaku kejahatan, aktivitas masyarakat yang menonjol*. Collecting data* dapat dilakukan secara konvensional dan juga secara digital (*online)* dengan memanfaatkan teknologi untuk mengimbagi para pelaku kejahatan yang juga menggunakan teknologi digital dalam menjalankan aksinya. Polri juga melaksanakan investigasi atau penyelidikan secara digital dan *online* seperti penggunaan media sosial untuk ketepatan dan kecepatan penyajian data dan hasil investigasi kepada *user* agar dapat diambil langkah-langkah antisipatif dan preventif.

Saran yang diberikan dalam artikel ini berupa saran praktis, bukan saran teoristis, dengan maksud agar dapat dilaksanakan oleh pengambil kebijakan di bidang pelaksanaan intelijen kepolisian. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut: (1) Untuk dapat mengantisipasi dan mencegah kejahatan siber, intelijen kepolisian perlu menggunakan dan memanfaatkan teknologi mutakhir untuk mendukung data *collecting*, analisis dan prediktif, sehingga dapat diambil langkah antisipatif dan kebijakan oleh pimpinan; (2) dalam pelaksanaan tugas intelijen era digital, maka perlu dibentuk Direktorat *Cyber-Intelligence* untuk secara maksimal dapat melakukan pencegahan kejahatan siber dengan memanfaatkan Unit *Intellgence Cyber Cops* (ICC); (3) Intelijen kepolisian perlu secara terus menerus meng-*upgrade* peralatan intelijen khusus untuk mendukung pelaksanaan pencegahan kejahatan siber yang sangat luas sebarannya; dan (4) perlu melatih personel khusus intelijen kepolisian yang memiliki kompetensi bidang teknologi informasi. Pelatihan yang dilaksanakan secara berkala dan insidentil untuk mengantispasi perkembangan teknologi baru. Di samping memiliki kemampuan TI, personel intelijen kepolisian juga memiliki kemampuan analisis yang kuat dalam bidang kejahatan siber agar dapat memberikan rekomendasi yang akurat.

**Daftar Pustaka**

Albert Meijer and Martijn Wessels, 2019. *Predictive Policing: Review of Benefits and Drawbacks*, International Jounal of Public Administration, Vol 42 No 12.

Bielejewski, Aaron, 2021. *Policing Communities and Community-Oriented Policing in Rural Germany,* a Doctoral Dissertation to the University of Kassel, Department of Social Sciences, Germany.

Burhansyah A, Encik Muhammad, 2016. *Kerja Sama Polri dan Australian Federal Police (AFP) Sektor Capacity Building Dalam Penanggulangan Tindak Pidanan Cybercrime Di Indonesia Periode 2012-2014*, Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 1, p. 38-46.

Button, Mark, 2002. *Private Policing*, UK: Willan Publishing.

David L. Carter, David L, 1990. *Law Enforcement Intelligence Operations*, School of Justice, Michigan: Michigan State University.

Chryshnanda DL, 2020. *Polisi dan Pemolisian*, Jakarta: YPKIK.

Cross, Cassandra dan Dom Blackshaw, 2015. *Improving the Police Response to Online Fraud*, Policing, Oxford: Oxford Press.

Dale Willits and Jeffrey Nowacki, 2016. *The Use of Specialized Cybercrime Policing Units: An Organizational Analysis*, Criminal Justice Studies, Vol. 29, No. 2, Southern Illinois University, Departement of Criminology and Criminal Justice.

Federal Bureau of Investigation (Internet Crime Complaint Center, IC3), *Internet Crime Report 2020*, 2021. Linglay, USA.

Hilbert, Martin, 2020. *Digital Technology and Social Change: The Digital Transformation of Society from a Historical Perspective*, Dialogues in Clinical Neuroscience, Vol 22 No. 2.

Ibrahim, Samira, Ojeifoh Okosun, Daniel Nnamani, 2021. *Types of Cybercrime and Approaches of Detection*, [IOSR Journal of Computer Engineering](https://www.researchgate.net/journal/IOSR-Journal-of-Computer-Engineering-2278-0661?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19) 23(5):24-26, DOI:[10.9790/0661-2305022426](http://dx.doi.org/10.9790/0661-2305022426" \t "_blank).

Kyung-Shick Choi, 2008. *Computer Crime Victimization and Integrated Theory: An Empirical Assessment*, International Journal of Cyber Criminology, (IJCC) ISSN: 0974 – 2891 January-June 2008, Vol 2 (1).

Lab, Steven P, 1992. *Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations*, Anderson Publishing, Edisi Terjemahan Bahasa Indonesia 2017.

Levin, Ilya, dan Mamlok, Dan, 2021. *Culture and Society in the Digital Age*, MDPI, Information, <https://doi.org/10.3390/info12020068>

Michael Gelles, Alex Mircow and Joe Mariani, 2019. *The Future of Law Enforcement*, The Deloitte Center for Government Insights.

Newburn, Tim, 2008. *Introduction: Understanding Policing* (dalam buku *Handbook of Policing*), Willan Publishing.

Nouh, Mariam, Jason R.C. Nurse, Helena Webb, dan Michael Goldsmith, 2019. *Cybercrime Investigators are Users Too! Understanding the Socio-Technical Challenges Faced by Law Enforcement*, Cornell University, Published in the Proceeding of 2019 Workshop on Usable Security 24-27, San Diego, USA. <https://arxiv.org/abs/1902.06961>.

Police Executive Research Forum (PERF), 2014. *Future Trends in Policing.* Washington, D.C.: Office of Community Oriented Policing Services.

Rainer, Robert, 2016. *Policing, popular culture and political economy: towards a social democratic criminology*, Routledge Punlising, London and New York.

Rakhmanova E.N, Pinkevich T.V, 2020, *Digital Crime Concept*, Advances in Economics, Business and Management Research, volume 138, Atlantic Press SARL, Russian State University of Justice, Saint Petersburg -http://creativecommons.org/ licenses/by-nc/4.0/.

Stewart, John, 2023. *The Crisis of Modern Society: Richard Titmuss and Emile Durkheim*, History of the Human Sciences, Sage Journal, [https://doi.org/ 10.1177 /09526951231169399](https://doi.org/%2010.1177%20/09526951231169399).

Sumarjiyo, 2018. *Efektifitas Peralatan Intelijen Polri Dalam Rangka Deteksi Dini Guna Mencegah Tindak Pidana*, Jurnal Litbang Polri, Vol 21, No1.

[The Prevention of Crime ECOSOC Resolution 2002/13, Annex](https://www.unodc.org/unodcor%20the%20Prevention%20of%20Crime%20ECOSOC%20Resolution%202002/13,%20Annex), Action to Promote Effective Crime Prevention.

Vadza, Kejal Chintan, 2013. *Cyber Crime and its Categories*, Computer Science, Volume: 3 | Issue: 5 | May 2013 | ISSN - 2249-555X.

Weeber, Stan C, 2004. *Durkheim on Crime and Societal Development: The Durkheim School of Comparative Criminology Reconsidered*, Free Enquiry of Creative Sociology, Volume 32 No.1.

# **INOVASI *GREEN POLICE* DALAM LENSA POLRI YANG PRESISI: KOLABORASI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN KERUSAKAN SUNGAI CITARUM**

# Jaka Ramdani

**Program Magister Studi Pembangunan, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung, 40132**

**24021303@mahasiswa.itb.ac.id.**

**Abstrak**

Dinamika tata kelola Daerah Aliran Sungai Citarum merupakan kunci pemecahan permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Berbagai peranan institusi dilibatkan tidak terkecuali Polri dalam upaya pencegahan dan penindakan bagi pelaku perusak kelestarian Sungai Citarum. Untuk menjawab keterlibatan Polri dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2018, peneliti menggunakan pendekatan *mixed-methods* dengan alat analisis UCINET 32 bit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jejaring sosial institusi Polri perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor termasuk lapisan akar rumput, sehingga dirumuskaninovasi *Green Police* yang dapat memperkuat peranan dalam sebuah tata kelola. Keterlibatan Polri juga menjadi kekuatan penegakan hukum yang diperlukan untuk menangani pelanggaran lingkungan. Polri memiliki kapasitas untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku yang secara sistematis merusak DAS Citarum. Kehadiran Polri juga menciptakan efek pencegahan, memperkuat kesadaran akan konsekuensi hukum bagi mereka yang merusak lingkungan.

***Kata Kunci: inovasi green police; kolaborasi; pencegahan; penindakan; Sungai Citarum***

***Abstract***

*The dynamics of Citarum Watershed governance is the key to solving problems that need to be resolved immediately. Various institutional roles are involved, including the National Police in prevention and enforcement efforts for perpetrators of the preservation of the Citarum River. To answer the involvement of the National Police in Presidential Regulation Number 15 of 2018, researchers used a mixed-methods approach with the UCINET 32bit analysis tool. The results show that the social network of the Polri institution needs to strengthen cross-sector collaboration, including the grassroots layer, so that Green Police innovations are formulated that can strengthen the role in governance. The involvement of the National Police is also a necessary law enforcement force to deal with environmental violations. Polri has the capacity to investigate and take action against perpetrators who systematically damage the Citarum watershed. The presence of the National Police also creates a preventive effect, strengthening awareness of the legal consequences for those who damage the environment.*

***Keywords: green police innovation; collaboration; prevention; enforcement; Citarum River***

### Pendahuluan

Pada era globalisasi yang semakin terhubung, isu lingkungan menjadi perhatian utama bagi banyak negara. Menurut World Wildlife Fund (WWF, 2020), dampak dari kejahatan terhadap lingkungan telah mencapai tingkat yang sangat serius, dengan hilangnya keragaman hayati dan perubahan iklim yang semakin cepat. Menurut pandangan Idris, dkk., (2019) sebagai respons terhadap trend ini, lembaga penegak hukum di seluruh dunia menyadari pentingnya adaptasi dan inovasi. Salah satu respons positif kepolisian dari berbagai negara adalah dengan memasukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan lingkungan sebagai salah satu pilar dalam bertugas (United Nations Environment Programme, 2019). Seperti halnya, di berbagai kejahatan di antaranya perdagangan satwa liar ilegal, pembabatan hutan, serta pencemaran air dan udara di Amerika Serikat, Eropa, hingga Asia, banyak negara telah menjadikan kejahatan lingkungan sebagai bagian dari prioritas penegakan hukum (Lynch & Barrett, 2017).

Dalam konteks ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai salah satu lembaga publik yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, telah mengidentifikasi perlunya inovasi dalam pendekatannya. Konsep *Green Police* yang dapat diadaptasi oleh Polri menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif yang di mana Polri tidak hanya fokus pada penegakan hukum secara umum namun juga pada pencegahan dan penindakan kepada pelaku pencemar lingkungan atau perusak lingkungan (Massé, F., 2022).

Studi kasus secara tersurat ditemukan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, yang menyebutkan bahwa Polri memiliki peran penting untuk penegakan hukum terhadap kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Pelibatan Polri dikukuhkan dalam Perpres No. 15 Tahun 2018 melalui penetapan sebagai Wakil Bidang Pencegahan dan Penindakan Hukum I yaitu Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Wakil Bidang Pencegahan dan Penindakan Hukum II yaitu Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta. Pelibatan Polri dalam implementasi program ini adalah melaksanakan pencegahan, pembinaan, serta penegakan hukum bagi oknum yang membuang limbah tidak sesuai baku mutu di Sungai Citarum.

Penegakan hukum di wilayah Sungai Citarum dilakukan melalui upaya pencegahan, pembinaan, dan menangani pihak-pihak yang membuang limbah yang tidak memenuhi baku mutu ke Sungai Citarum (White & Heckenberg, 2014). Salah satunya adalah mengawasi terhadap cairan limbah yang dibuang secara sengaja ke aliran sungai dan limbah melebihi batas baku mutu di sepanjang aliran sungai Citarum (Lynch & Long, 2022). Maksud dalam penegakan hukum yaitu agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami pentingnya ekosistem kehidupan sungai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Output* yang diharapkan adalah tertanganinya kasus kerusakan lingkungan daerah aliran sungai oleh Polri. Sebagaimana capaian yang hendak ditarget pada tahun 2025 adalah 0 kasus yang tertangani (Tabel 1) sebagai berikut.

**Tabel 1. Target *Outcome* Penegakan Hukum**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Jumlah Kasus tertangani | 58 | 35 | 30 | 25 | 10 | 5 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Sumber: Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum 2019 - 2015.**

Melihat target capaian tersebut pada tahun 2025 mendorong pentingnya keterlibatan dan kolaborasi lintas sektor khususnya oleh Polri. Dalam konteks Indonesia, tantangan lingkungan seperti penurunan kualitas Sungai Citarum membutuhkan solusi yang cerdas dan terpadu (White & Graham, 2015). Mengadopsi konsep Polisi Hijau dalam kerangka Presisi memberikan pendekatan yang komprehensif bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pendekatan prediktif memungkinkan polisi untuk mengidentifikasi potensi ancaman sebelum mereka menjadi masalah yang lebih serius (Rahman, A., 2021). Tanggung jawab dan transparansi yang adil menjamin bahwa intervensi dilakukan dengan akuntabilitas dan keadilan, sehingga membangun kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas tindakan (Sudaryanto, T., 2018).

Namun, terdapat pikiran kritis bagaimanakah inovasi *Green Police* yang diadaptasi oleh Polri dalam kerangka Presisi? Bagaimana kolaborasi antara Polri dengan stakeholder lain (seperti pemerintah daerah, komunitas, dan industri) dalam inovasi *Green Police* untuk Sungai Citarum? Apa saja strategi dan implementasi dari inovasi *Green Police* dalam upaya pencegahan dan penindakan kerusakan Sungai Citarum? Mengingat trend global sebagaimana pandangan Nurse, (2022) yang semakin mendukung perlindungan lingkungan, serta dengan adanya kerangka Presisi, Polri memiliki peluang besar untuk memposisikan diri sebagai pelopor dalam penegakan hukum lingkungan di Asia Tenggara. Inisiatif seperti *Green Police* menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga kelestarian alam Indonesia, sekaligus meningkatkan kepercayaan dan citra positif di mata masyarakat sehingga inovasi *Green Police* harapannya dapat mewujudkan Polri yang Presisi menuju Indonesia Maju.

Penelitian ini bermanfaat: Pertama, memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana Polri menerapkan konsep *Green Police* dalam kerangka Presisi, yang nantinya bisa menjadi referensi bagi institusi penegak hukum lainnya, baik di dalam maupun luar negeri, dalam mengatasi masalah lingkungan. Kedua, dengan memahami dinamika terhadap kolaborasi antara Polri dan berbagai stakeholder, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang cara meningkatkan kolaborasi di masa depan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan upaya pemulihan lingkungan. Ketiga, dengan mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Polri dalam mengimplementasikan *Green Police*, pihak-pihak yang terkait dapat mengembangkan solusi dan strategi yang lebih efisien dan efektif untuk mengatasi masalah lingkungan di masa depan. Kelima, dengan memahami kesuksesan dan kelemahan dari implementasi *Green Police* oleh Polri, model ini dapat dikembangkan dan disesuaikan untuk diterapkan di daerah atau isu lingkungan lainnya.

**Tinjauan Literatur**

Pendekatan inovatif *Green Police* dalam penegakan hukum lingkungan mencerminkan evolusi signifikan dalam peran kepolisian dan saat ini belum banyak dikembangkan di institusi-institusi kepolisian. Zimmerman, F. J. (2005), dalam penelitiannya, menggarisbawahi pergeseran peran kepolisian dari pendekatan tradisional yang responsif menjadi peran yang semakin proaktif dalam menanggapi dan mencegah pelanggaran lingkungan. Maas, L., et al., (2019), mengidentifikasi *Green Police* sebagai model inovatif yang tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga menerapkan pendekatan pencegahan. Ini mencakup kegiatan edukasi, penegakan, dan kolaborasi dengan masyarakat untuk mencegah kerusakan lingkungan. Mascarenhas, M., et al. (2018), menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam *Green Police*. Dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra, *Green Police* menciptakan hubungan yang lebih erat dan berkelanjutan dalam upaya identifikasi dan pencegahan kerusakan lingkungan. Selain itu, Smith, M. R., et al. (2021), melalui evaluasi efektivitas *Green Police*, menunjukkan bahwa inovasi ini memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat pelanggaran lingkungan, mengukuhkan keberhasilan *Green Police* dalam mencapai tujuannya.

*Green Police* sangat menekankan kolaborasi pada institusi dalam hal ini adalah Polri dalam upaya pencegahan dan penindakan kerusakan Sungai Citarum menunjukkan pentingnya kerjasama lintas sektor untuk mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks. Beberapa penelitian (Gleick, 2000; Pahl-Wostl, 2009) menyoroti kebutuhan akan integrasi dalam pengelolaan sumber daya air, sementara studi lain (Karkkainen, 2002; Bodin & Crona, 2008) menekankan peran keterlibatan pihak publik dan swasta dalam pelestarian sungai. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil juga diakui sebagai komponen krusial (Reed, 2008; Armitage & Plummer, 2010). Meskipun literatur memberikan wawasan penting tentang bagaimana kolaborasi institusi dapat meningkatkan keberlanjutan lingkungan, terdapat gap penelitian yang cukup signifikan terkait penerapan *Green Police* di Indonesia. Adanya regulasi dan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga (Pasal 12 Perpres 15 Tahun 2018) memang memberikan landasan hukum, namun efektivitas penegakan hukum lingkungan sering kali masih menjadi tantangan. Kehadiran *Green Police* dapat menjadi refleksi bahwa Polri turut andil dan memiliki peran penting untuk menjadi lokomotif penanganan kerusakan lingkungan, khususnya di sekitar wilayah Sungai Citarum.

**Metodologi Penelitian**

Karya ilmiah ini akan mengeksplorasi inovasi *Green Police* dalam lensa Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi berkeadilan). Selain itu, penelitian ini didukung dengan pendekatan mix methods yaitu menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, mengolah, menganalisis, dan mevisualisasikan temuan di lapangan secara bertingkat dari level desa, kota atau kabupaten, provinsi, dan nasional. Informan dan responden berasal dari tokoh-tokoh kunci dari berbagai unsur seperti masyarakat dan LSM, media, pemerintah, swasta dan dunia usaha, serta akademisi yang menjadi data primer.



**Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023.**

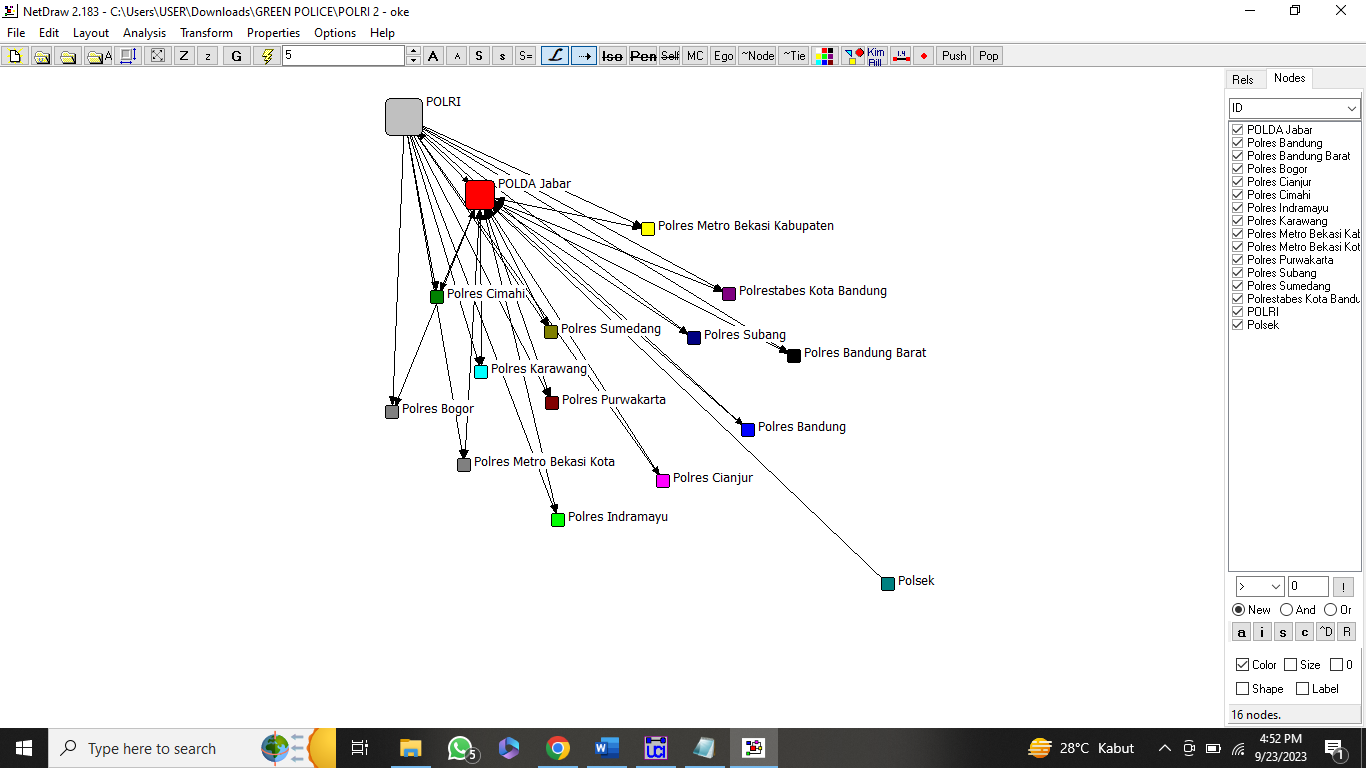
**Gambar 1 dan 2. Pengumpulan Data Primer dengan Aktor.**

Untuk memperkuat data, peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari sumber literatur pendukung. Adapun alat analisis yang digunakan peneliti yaitu menggunakan aplikasi UCINET 32.bit. Aplikasi ini merupakan alat yang digunakan untuk membedah dan mengeksplorasi jejaring aktor dan tingkat kolaborasi aktor, sehingga dapat diketahui peluang dan tantangan aktor dalam berkolaborasi.

**Hasil dan Pembahasan**

**Analisis dan Temuan Lapangan (Level Internal)**

Setelah memanfaatkan aplikasi UCINET 32.bit untuk analisis jaringan sosial dalam lingkup POLRI dalam pencegahan dan penindakan, Peneliti berhasil menggali informasi penting terkait tradisi instruksi yang diterapkan oleh institusi POLRI. Dengan memanfaatkan UCINET 32-bit untuk analisis jaringan sosial dalam konteks Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait upaya pencegahan dan penindakan, peneliti berhasil menggali informasi krusial seputar tradisi instruksi yang diterapkan oleh institusi Polri. Kelebihan penggunaan aplikasi ini dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menyajikan visualisasi yang mendalam tentang hubungan antar individu dan kelompok dalam jaringan sosial Polri. Analisis yang presisi dan terinci dari data jaringan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika internal Polri, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan interaksi yang berpotensi mendukung efektivitas upaya pencegahan dan penindakan institusi tersebut. Selain memberikan kemampuan visualisasi yang analitis, aplikasi ini memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam struktur komunikasidalam berkolaborasi dan hierarki instruksi dalam Polri, adapun Gambar 3menunjukan visualisasi jejaring aktor Polri dalam upaya pencegahan dan penindakan kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

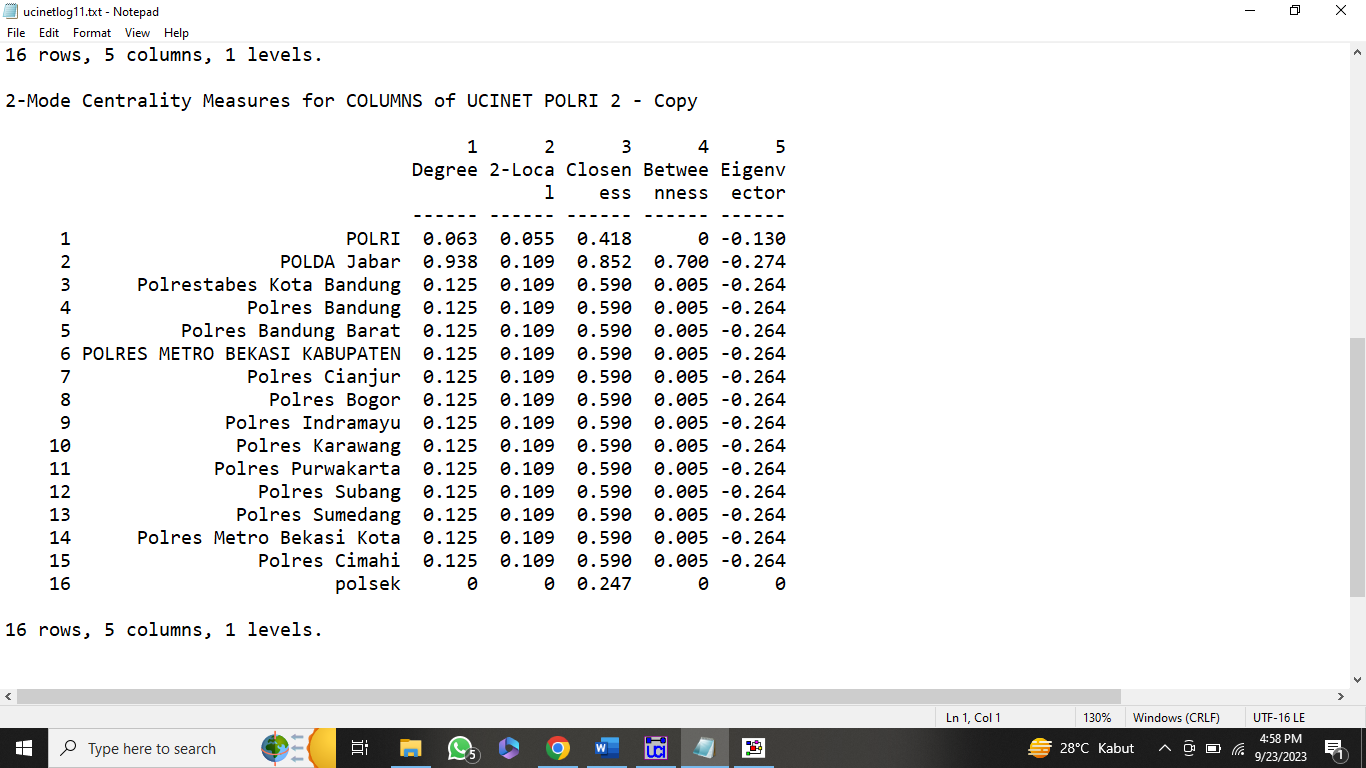


**Sumber: Hasil Analisis Data Peneliti, 2023.**

**Gambar 3. Kolaborasi Aktor POLRI.**

Temuan bahwa struktur sentralisasi Polri yang Kuat. Berdasarkan visualisasi jaringan yang dihasilkan UCINET, terlihat jelas bahwa Polri memiliki pusat komando (*Node Central*) yang menjadi sumber instruksi utama. Dari pusat ini, instruksi menyebar ke seluruh jaringan dengan cepat dan efisien. Selain itu, terdapat kelebihan dan kekurangan yang dapat diketahui melalui Gambar 4.

Dengan fitur analisis jalur pada UCINET, peneliti menemukan bahwa rata-rata instruksi dari pusat keanggota di lapangan hanya memerlukan sedikit "langkah" atau "hops". Ini menunjukkan efisiensi tinggi dalam penyebaran instruksi. Adapun, terdapat kelebihan aktor pusat yaitu Polri dan Polda Jawa Barat (Garis Warna Merah). Yang pertama, respons cepat: Dengan struktur yang terpusat dan efisien, Polri dapat merespons situasi darurat dengan cepat dan terkoordinasi. Kedua, konsistensi Instruksi: Keseragaman instruksi lebih mudah dicapai dengan struktur seperti ini, memastikan setiap anggota Polri memiliki pemahaman dan tindakan yang konsisten terhadap situasi tertentu.

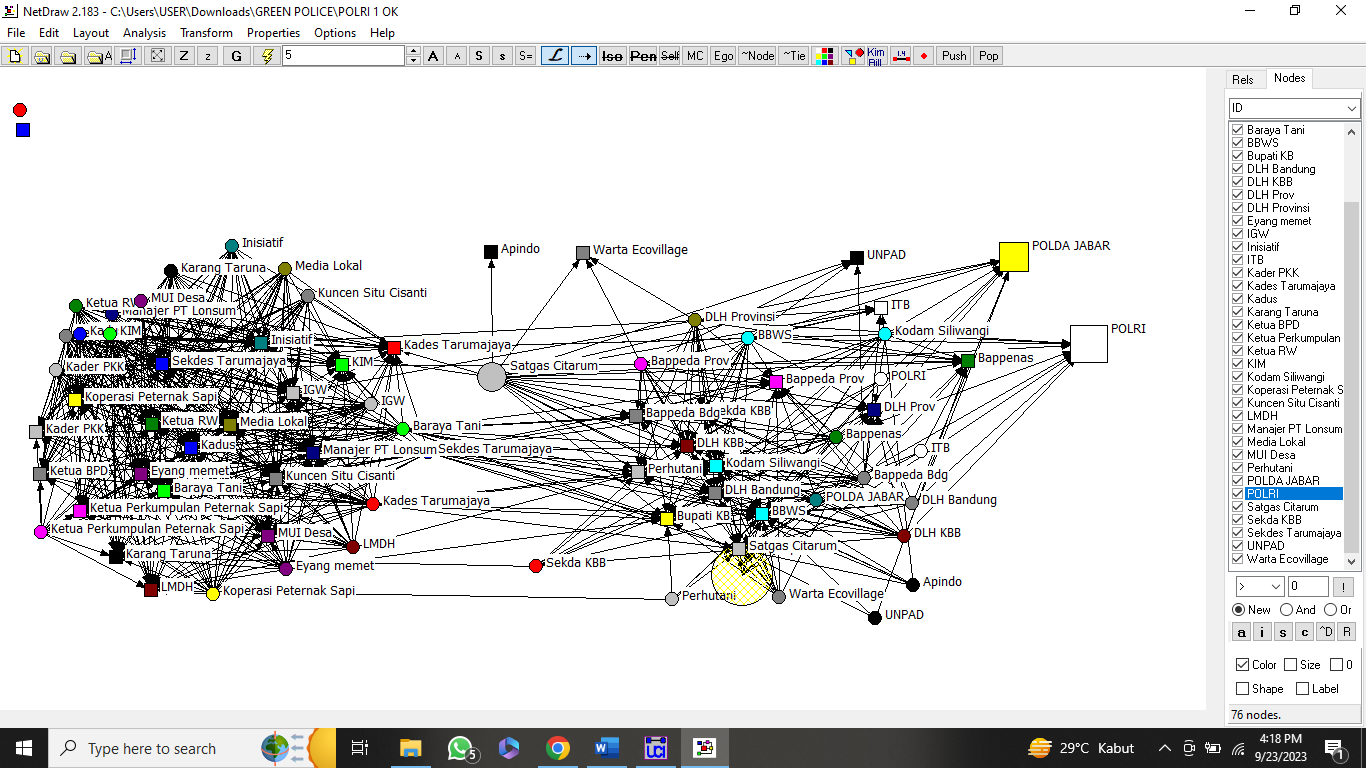


**Sumber: Hasil Analisis Data Peneliti, 2023.**

**Gambar 4. Tingkat kolaborasi Polri.**

Selain itu, terdapat kelemahan (Warna Biru) yang menunjukan yang Pertama, berupa ketergantungan pada *Node Sentral* yaitu jika terjadi masalah pada pusat komando atau *node sentral*, bisa berpotensi menghambat seluruh jaringan komunikasi dan kolaborasi. Kedua, kemungkinan keterlambatan informasi yaitu meskipun instruksi dari pusat disebar dengan cepat, namun informasi dari lapangan ke pusat mungkin mengalami keterlambatan, yang bisa menghambat proses pengambilan keputusan. Melalui temuan ini, Polri memang memiliki tradisi instruksi yang kuat dan terstruktur, seperti yang tercermin dari analisis jaringan sosial. Namun, seperti banyak sistem lainnya, terdapat kelebihan dan kekurangan yang harus diperhatikan untuk peningkatan efektivitas di masa depan.

**Analisis dan Temuan Lapangan (Level Eksternal)**

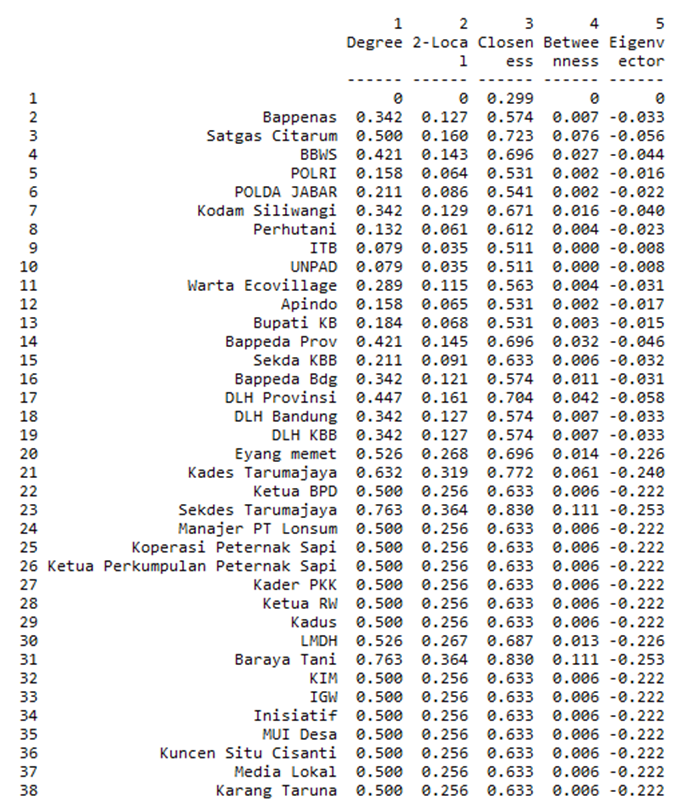
Dalam upaya mengukur keefektifan kolaborasi Polri dalam pencegahan dan penindakan kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, penelitimefokuskan kedalaman interaksi dan hubungan Polri dengan aktor-aktor lain seperti akademisi, pemerintah, masyarakat, swasta dan media yang terlibat dalam isu sungai Citarum. Adapun visualisasi kolaborasi diketahui padaGambar 5, berikut ini:

**Sumber: Hasil Analisis Data Peneliti, 2023.**

**Gambar 5. Kolaborasi Aktor POLRI dengan stakeholder lainnya.**

Visualisasi jaringan yang dihasilkan oleh UCINET menunjukkan beberapa titik kunci. Pertama, Jejaring Interaksi yang Lemah, diketahui dari node yang mewakili Polri dan Polda Jawa Barat, terlihat jelas bahwa koneksi dengan aktor-aktor luar, termasuk komunitas lokal, organisasi lingkungan, dan pemerintah daerah, cenderung tipis dan jarang. Hal ini menunjukkan intensitas interaksi dalam berkolaborasi yang rendah. Kedua, didukung dengan data kualitatif yang berupa pernyataan tokoh-tokoh kunci mengindikasikan bahwa pernyataan dari tokoh-tokoh masyarakat, seperti pemuka adat dan pemimpin komunitas, menunjukkan adanya kesenjangan dalam kerjasama dengan Polri.

Pola Jejaring Interaksi juga menunjukkan bahwa tokoh-tokoh kunci, khususnya dari kalangan masyarakat seperti pemuka adat dan pemimpin komunitas, memberikan konfirmasi kualitatif atas kesenjangan dalam kerjasama dengan Polri. Mendasarkan analisis ini pada data kuantitatif dan kualitatif memperkuat urgensi untuk memperbaiki kolaborasi melalui *Green Police* dengan melibatkan secara lebih efektif aktor-aktor eksternal yang vital dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.



**Sumber: Hasil Analisis Data Peneliti, 2023.**

**Gambar 6. Tingkat kolaborasi POLRI dengan stakeholder lainnya.**

Implikasi dapat diketahui pada Gambar 6 di mana dari hasil analisis yaitu terdapat kekurangan sinergi antara Polri dengan aktor-aktor lain (warna merah) dalam upaya pencegahan dan penindakan kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum mungkin menjadi salah satu penyebab utama kelesuan dalam penanganan isu ini dan belum tuntasnya permasalahan Sungai Citarum. Catatan penting dalam kolaborasi yang kuat dan terintegrasi antara Kementerian dan Lembaga memiliki peran krusial dalam pencegahan dan penindakan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Mandat yang diberikan oleh Pasal 12 Perpres 15 Tahun 2018 menegaskan pentingnya dukungan lintas sektor untuk mengatasi tantangan lingkungan di wilayah tersebut diantaranya melibatkan Kementerian dan Lembaga, termasuk Kementerian Agama, Keuangan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kesehatan, Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Agraria dan Tata Ruang, PPN/BAPPENAS, BUMN, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kepolisian Negara, menunjukkan pendekatan holistik dan sinergis. Tidak lepas dari hal tersebut, berkolaborasi dengan akar rumput (masyarakat lokal) merupakan suatu kewajiban yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang berkelanjutan.

Kolaborasi ini menciptakan kerangka kerja yang menyeluruh, memungkinkan pertukaran informasi, sumber daya, dan keahlian lintas sektor. Sinergi antara instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan sektor swasta akan memperkuat kapasitas untuk melakukan pemantauan, penegakan hukum, dan implementasi program-program pencegahan. Namun, untuk memastikan kolaborasi ini berhasil, penting untuk memastikan koordinasi yang efektif, pembagian peran yang jelas, dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, sinergi antar Kementerian dan Lembaga dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam menjaga keberlanjutan DAS Citarum, melampaui batas administratif dan sektoral. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inovatif untuk memperkuat jejaring kolaborasi Polri. Salah satu inovasi yang bisa diadopsi adalah pengembangan *Green Police* yaitu polisi yang memiliki fokus khusus pada isu lingkungan, *Green Police* dapat menjadi jembatan antara Polri dan aktor-aktor lain, memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan berkolaborasi dengan lebih efektif.

**Profil Inovasi *Green Police***

*Green Police* dalam konteks Polri yang Presisi merujuk pada upaya dan inisiatif khusus dari Kepolisian Republik Indonesia dalam melindungi lingkungan hidup. *Green Police* adalah konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kepolisian dengan pelestarian lingkungan. Inisiatif ini mengedepankan pencegahan, penegakan hukum, serta edukasi terhadap masyarakat dalam isu-isu lingkungan.

Dalam konteks Presisi (PREdiktif, responSIbilitas, dan transparanSI berkeadilan) yang dicanangkan oleh Polri, *Green Police* memiliki peran kunci sebagai berikut:

1. Pemantauan dan Penegakan: *Green Police* memastikan bahwa setiap aktivitas di sekitar Daerah Aliran Sungai Citarum tidak melanggar regulasi lingkungan. Mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran yang dapat merusak ekosistem sungai.
2. Edukasi Masyarakat: Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, *Green Police* juga bertindak sebagai edukator. Mereka menjalankan program-program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan Citarum.
3. Kolaborasi dengan Pihak Lain: Dalam menjalankan tugasnya, *Green Police* bekerja sama erat dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, komunitas lokal, hingga NGO yang fokus pada isu lingkungan. Kolaborasi ini memastikan bahwa upaya pelestarian Citarum dilakukan secara komprehensif.
4. Inovasi dalam Penegakan Hukum: *Green Police* mengadopsi pendekatan-pendekatan baru dalam penegakan hukum, seperti teknologi pemantauan lingkungan dan pendekatan restoratif yang menekankan pada pemulihan kerusakan daripada hanya hukuman.

Melalui inisiatif *Green Police* menurut Vallmüür, B. (2019), Polri telah menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam upaya pelestarian Daerah Aliran Sungai Citarum. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif, harapannya, Citarum bisa kembali menjadi sungai yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Selain itu, *Green Police* juga memiliki keselarasan dengan beberapa komitmen Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Bapak Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si) di antaranya yaitu nomor 5. Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreatifitas yang mendorong kemajuan indonesia dan nomor 7. Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan *problem solving*. Dengan demikian, *Green Police* dalam konteks Polri yang Presisi menekankan pada pendekatan yang holistik, dimana Polri tidak hanya berfokus pada penindakan tetapi juga pada aspek prediktif, edukasi, dan kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

**Urgensi keterlibatan Polri dalam Pencegahan dan Penindakan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum**

Urgensi keterlibatan Polri dalam pencegahan dan penindakan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum tidak dapat diabaikan mengingat kompleksitas tantangan lingkungan yang dihadapi. Sungai Citarum, sebagai salah satu yang terbesar di Indonesia, mengalami tekanan serius dari limbah industri, domestik, dan pertanian. Keterlibatan Polri menjadi kunci karena kehadiran mereka dapat memberikan kekuatan penegakan hukum yang diperlukan untuk menangani pelanggaran lingkungan. Dengan peran sebagai agen penegakan hukum, Polri dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk industri, masyarakat, dan pemerintah lokal, dalam upaya pencegahan. Selain itu, Polri memiliki kapasitas untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku yang secara sistematis merusak DAS Citarum. Kehadiran Polri juga menciptakan efek pencegahan, memperkuat kesadaran akan konsekuensi hukum bagi mereka yang merusak lingkungan. Dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya mereka, Polri dapat berperan sebagai penjaga keberlanjutan DAS Citarum, membentuk kemitraan strategis untuk menjaga ekosistem penting ini dari kerusakan lebih lanjut.

Keterlibatan Polri dalam pencegahan dan penindakan kerusakan DAS Citarum sangat penting, dan alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang tegas, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di Indonesia, Polri memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua pihak, termasuk industri dan individu, mematuhi regulasi lingkungan yang ada.
2. Deterrensi yaitu dengan kehadiran dan keterlibatan aktif Polri dapat berfungsi sebagai deterrensi bagi potensi pelanggar. Pengetahuan bahwa Polri secara aktif memantau dan bersedia untuk mengambil tindakan dapat mencegah pelanggaran sebelum terjadi.
3. Kapasitas dan sumber daya yaitu Polri memiliki sumber daya manusia, peralatan, dan infrastruktur yang memungkinkan mereka untuk melakukan pemantauan, investigasi, dan penindakan secara efektif.
4. Kolaborasi dengan stakeholder lain yaitu Polri dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, organisasi lingkungan, masyarakat setempat, dan sektor swasta untuk menciptakan strategi yang komprehensif dan kolaboratif dalam menjaga DAS Citarum.
5. Edukasi dan Sosialisasi, Polri dapat berkontribusi dalam upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga DAS Citarum dan konsekuensi dari kerusakan lingkungan.
6. Respon Cepat pada kasus insiden yang memerlukan tindakan cepat, seperti pembuangan limbah ilegal atau tindakan merusak lainnya, Polri dengan jaringannya dapat merespons dengan cepat.
7. Peningkatan Akuntabilitas, keterlibatan Polri dapat memastikan bahwa pelanggaran yang teridentifikasi diadili dengan adil dan akuntabel sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Mengatasi Konflik, DAS Citarum seringkali menjadi sumber konflik antara berbagai pihak, mulai dari masyarakat setempat, industri, hingga pemerintah daerah. Polri dapat berperan dalam mediasi dan penyelesaian konflik agar tidak berlarut-larut.

Memperhatikan urgensi dan pentingnya peran Polri dalam menjaga DAS Citarum, maka perlu adanya dukungan penuh dari berbagai pihak, baik dalam bentuk sumber daya, pelatihan, maupun kerja sama strategis, agar upaya pencegahan dan penindakan kerusakan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi kelestarian DAS Citarum.

**Strategi dalam *Green Police***

Keterlibatan Polri dalam pencegahan dan penindakan kerusakan DAS Citarum menjadi salah satu bentuk nyata dari komitmen kepolisian dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Berikut beberapa strategi *Green Police* dalam hal tersebut. Pertama, Operasi Khusus yaitu Polri dapat mengorganisir operasi khusus yang ditujukan untuk mengidentifikasi, memonitor, dan menindak pelaku yang melakukan pembuangan limbah atau aktivitas ilegal lainnya yang berdampak pada kerusakan DAS Citarum. Kedua, pengawasan yaitu melalui *Green Police*, Polri dapat melakukan patroli dan pemantauan reguler di daerah-daerah yang dianggap kritis atau rawan pelanggaran di Daerah Aliran Sungai Citarum. Ketiga, edukasi dan kampanye dengan bekerjasama instansi terkait, Polri mengadakan program edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan kepada masyarakat, industri, dan stakeholder lainnya tentang pentingnya menjaga kelestarian DAS Citarum. Keempat, kerja sama dengan stakeholder yaitu Polri menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga lingkungan, komunitas setempat, dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas upaya pemantauan dan penegakan hukum di Daerah Aliran Sungai Citarum. Kelima, melakukan penyelidikan dan penindakan melalui laporan atau temuan mengenai tindakan yang merusak lingkungan di Daerah Aliran Sungai Citarum, Polri melakukan penyelidikan mendalam dan, jika ditemukan bukti yang kuat, melanjutkannya dengan penindakan sesuai hukum yang berlaku.Keenam, pelatihan dan peningkatan kapasitas: Polri terus meningkatkan kapasitas personelnya melalui pelatihan khusus tentang isu-isu lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan DAS, sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik dan dapat bertindak dengan efektif. Ketujuh, pengembangan teknologi dan *database* melalui Polri sebagai kepengurusan Satgas Citarum dapat memanfaatkan teknologi, seperti sistem pemantauan berbasis satelit atau drone, untuk memonitor kondisi DAS Citarum. Selain itu, pengembangan database pelanggaran lingkungan dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan strategi pencegahan. Kedelapan, mediasi dan penyelesaian konflik yaitu dalam situasi dimana ada konflik antara masyarakat, pemerintah daerah, dan industri terkait pengelolaan dan perlindungan DAS Citarum, Polri dapat berperan sebagai mediator untuk mencari solusi secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan.Melalui berbagai strategi tersebut, Polri dapat memainkan peran kunci dalam upaya menjaga kelestarian DAS Citarum. Namun, keberhasilan ini juga membutuhkan dukungan dan kerja sama dari semua pihak agar upaya perlindungan dan pemulihan DAS Citarum dapat berlangsung secara maksimal.**Relevansi *Green Police* dalam sudut pandang Presisi dan Visi Indonesia Maju**

Inovasi *Green Police* dalam konteks Polri dan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) menawarkan pendekatan progresif dalam penegakan hukum lingkungan. Relevansi dan kaitannya dengan konsep "Indonesia Maju" dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prediktif

*Green Police* memiliki relevansi yaitu Pendekatan prediktif pada *Green Police* memungkinkan Polri untuk memahami dan mengantisipasi tantangan lingkungan yang mungkin muncul di masa depan, terutama terkait dengan kerusakan lingkungan seperti di Sungai Citarum.

1. Responsibilitas

*Green Police* memiliki relevansi yaitu Polri dapat menunjukkan tanggung jawabnya dalam menjaga dan melindungi lingkungan. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada penindakan tetapi juga pada pencegahan dan edukasi.

1. Transparansi berkeadilan

*Green Police* memiliki relevansi transparansi dalam tindakan dan kebijakan *Green Police* memastikan bahwa publik dapat memahami dan mendukung upaya Polri. Keberpihakan pada keadilan menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang diperlakukan dengan pilih kasih dalam penegakan hukum lingkungan.

Inovasi *Green Police* dalam kerangka program Presisi oleh Polri menunjukkan evolusi positif dalam pendekatan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Inisiatif ini tidak hanya relevan dalam konteks lingkungan tetapi juga dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan visi "Indonesia Maju". Sebuah Indonesia yang maju bukan hanya mengukur kemajuan ekonominya, tetapi juga komitmennya terhadap lingkungan, tata kelola yang baik, dan kesejahteraan seluruh warganya.

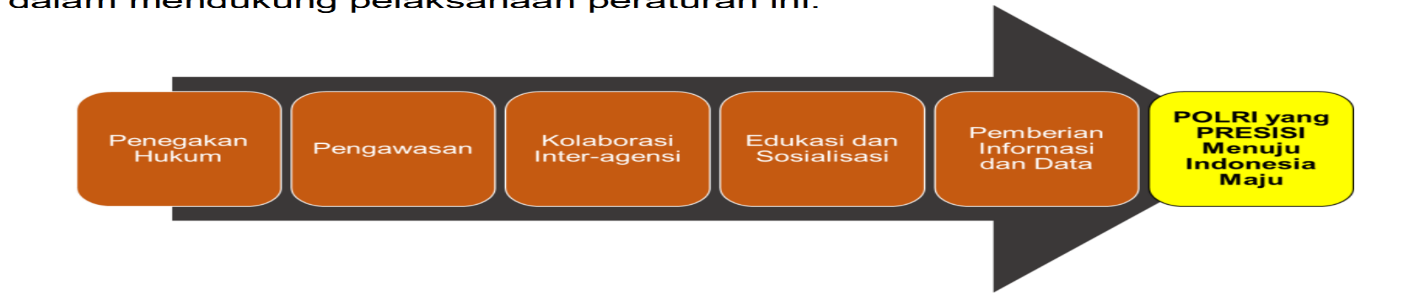
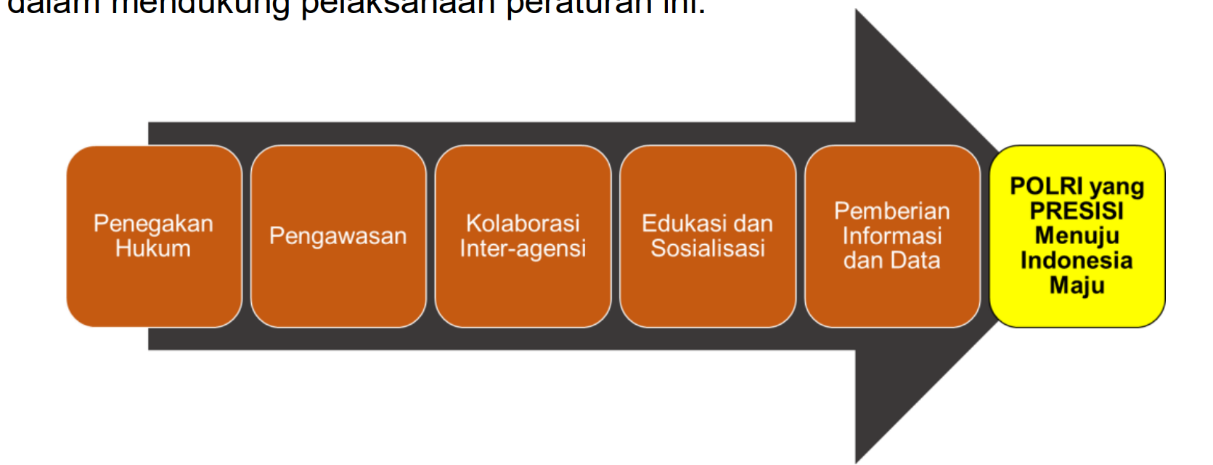
**Implementasi *Green Police***

Pelaksanaan *Green Police* dalam pencegahan dan penindakan kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum melalui kegiatan analisis data, di mana Polri dapat mengumpulkan dan menganalisis data terkait pelanggaran lingkungan, khususnya di daerah rawan seperti sekitar Sungai Citarum. Melalui analisis data, Polri dapat mengidentifikasi pola dan prediksi potensi pelanggaran di masa depan. Selain itu, kerja sama dengan ahli lingkungan juga penting dilakukan oleh Polri, sehingga dapat bekerja sama dengan pakar lingkungan dan institusi penelitian untuk mendapatkan wawasan tentang dampak lingkungan dari berbagai aktivitas manusia dan bagaimana mencegahnya.

Beberapa kegiatan lainnya berupa pelatihan khusus yaitu memberikan pelatihan khusus kepada anggota *Green Police* mengenai isu-isu lingkungan dan teknik pemantauan yang proaktif. Selanjutnya, sebelum pelanggaran terjadi, *Green Police* dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan industri mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan konsekuensi dari pelanggaran lingkungan.Jika terdapat pelanggaran, *Green Police* bertindak cepat dan tegas dalam penegakan hukum, dengan memastikan pelaku mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, tidak kalah penting *Green Police* secara reguler menginformasikan kepada publik mengenai aktivitas, pencapaian, dan tantangan yang mereka hadapi dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Ini menciptakan kesadaran dan dukungan publik.

**Posisi Strategis Polri dalam Tata Kelola Daerah Aliran Sungai Citarum**

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2018 merupakan jawaban dari tantangan berat yang dihadapi Sungai Citarum, salah satu sungai terpenting di Indonesia. Dengan statusnya sebagai salah satu sungai terkotor di dunia, Sungai Citarum bukan hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga soal kesejahteraan masyarakat, ekonomi, dan keamanan pangan, mengingat sungai ini menjadi sumber irigasi bagi lahan pertanian yang luas. Dalam konteks regulasi ini, peranan, tugas, dan tanggung jawab kepolisian menjadi sangat vital. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum memiliki sejumlah tugas krusial dalam mendukung pelaksanaan peraturan ini:



**Sumber: Hasil Analisis Data Peneliti, 2023.**

**Gambar 7. Skema *Green Police***

Peran penting Polri dalam tata kelola Daerah Aliran Sungai Citarum sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden dapat memperkuat posisi strategis Polri yaitu:

1. Penegakan hukum, yang dimana salah satu tugas utama Polri adalah memastikan bahwa setiap regulasi dan ketentuan yang ada dalam Perpres dijalankan dengan baik. Ini termasuk mencegah dan menindak aktivitas ilegal seperti pembuangan limbah industri, penebangan hutan tanpa izin, dan aktivitas lainnya yang berkontribusi pada pencemaran dan kerusakan Sungai Citarum.
2. Pengawasan, mengingat luas dan kompleksitas wilayah Daerah Aliran Sungai Citarum, Polri memiliki tugas untuk melakukan patroli dan pengawasan rutin, mendeteksi dini potensi pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
3. Kolaborasi Inter-agensi, dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum, Polri perlu berkolaborasi dengan instansi lain seperti KLHK, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya untuk mencapai efektivitas maksimal.
4. Edukasi dan Sosialisasi, selain penegakan hukum, Polri juga memegang peranan dalam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan DAS Citarum serta konsekuensi hukum dari pelanggaran terkait.
5. Pemberian Informasi dan Data. Polri dengan jaringannya yang luas, dapat membantu dalam pengumpulan data dan informasi terkait potensi pelanggaran atau ancaman terhadap DAS Citarum, yang kemudian dapat digunakan untuk strategi dan kebijakan lebih lanjut.

Sebagaimana posisi Polri yang memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum terkait kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Keterlibatan Polri secara resmi diakui dan diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018, di mana Polri ditetapkan sebagai Wakil Bidang Pencegahan dan Penindakan Hukum I (Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat) dan Wakil Bidang Pencegahan dan Penindakan Hukum II (Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta). Tugas penting Polri dalam peran ini mencakup pelaksanaan pencegahan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap individu atau entitas yang membuang limbah secara tidak sesuai baku mutu di Sungai Citarum. Dengan demikian, Polri berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas lingkungan Sungai Citarum dan keberlanjutan ekosistemnya.

Penerapan *Green Police* dalam konteks penegakan hukum lingkungan memberikan dimensi humanis yang signifikan kepada masyarakat. Responsivitas *Green Police* terhadap sejumlah permasalahan kontemporer menunjukkan adopsi pendekatan yang lebih holistik, melebihi sekadar penindakan hukum biasa. Pertama-tama, *Green Police* bukan hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial. Mereka mendekati masalah lingkungan dengan pemahaman mendalam terhadap kondisi masyarakat lokal, memastikan bahwa solusi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan dan realitas setempat. Responsivitas *Green Police* juga tercermin dalam pendekatan pencegahan yang proaktif. Mereka tidak hanya bersifat represif terhadap pelanggaran, tetapi juga terlibat dalam edukasi masyarakat. Melalui program-program penyuluhan dan pelatihan, *Green Police* membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan. Dengan mendekati permasalahan kontemporer dengan kepekaan dan keberdayaan masyarakat, *Green Police* bukan hanya menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai mitra dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, implementasi *Green Police* menciptakan dampak positif yang melampaui aspek pemberian sanksi, menggambarkan peran Polri sebagai garda terdepan dalam menjawab tantangan lingkungan dengan cara yang humanis dan berkelanjutan.

**Kesimpulan dan Saran**

Karya tulis ilmiah ini telah menyajikan sebuah analisis mendalam tentang bagaimana peran penting Polri, melalui inovasi *Green Police*, dapat berperan aktif dalam upaya pelestarian Sungai Citarum. Konsep “Presisi” dari Polri, yang menekankan pada profesionalisme, representasi, sinergi, integritas, serta inovasi, menjadi landasan filosofis di balik pendekatan ini. *Green Police* mewujudkan esensi dari 'Polri yang Presisi' dengan memberikan solusi inovatif dan kolaboratif. Inisiatif ini tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan, edukasi, dan kerjasama lintas sektor. Hal ini mengakui bahwa tantangan kerusakan lingkungan, khususnya di Sungai Citarum, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua pihak. Sebagai kesimpulan, *Green Police* telah menjadi simbol transformasi dan komitmen Polri dalam melindungi lingkungan, khususnya Daerah Aliran Sungai Citarum. Melalui pendekatan yang berbasis pada 'Presisi', Polri memastikan bahwa pelestarian lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab sekelompok orang, tetapi menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Untuk mendukung implementasi *Green Police* di Indonesia, terdapat saran untuk Polri sebagai berikut: Perlunya pelatihan berkelanjutan. Agar *Green Police* selalu relevan dengan perkembangan isu-isu lingkungan terkini, disarankan untuk mengadakan pelatihan berkelanjutan mengenai teknik pencegahan, penindakan, dan juga teknologi terbaru yang dapat membantu dalam pemantauan kondisi Sungai Citarum. Hal ini, juga Perlunya Kolaborasi Multisektor. Mengingat kompleksitas masalah di Sungai Citarum, disarankan agar *Green Police* meningkatkan kerjasama lintas sektor dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, LSM lingkungan, dan komunitas setempat. Perlunya pengembangan teknologi. Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi dalam pemantauan dan penegakan hukum menjadi krusial. Saran untuk mengadopsi dan mengembangkan teknologi pemantauan lingkungan secara real-time dapat membantu *Green Police* bekerja dengan lebih efisien, dan perlunya pendekatan partisipatif. *Green Police* disarankan untuk lebih melibatkan masyarakat sekitar Sungai Citarum dalam setiap inisiatif pelestariannya. Pendekatan partisipatif ini dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai. Akhirnya penelitian ini juga menyarankan perlunya evaluasi berkala. Untuk memastikan efektivitas dan relevansi *Green Police*, sebaiknya dilakukan evaluasi berkala mengenai performa, tantangan, dan peluang perbaikan dalam operasional mereka.

**Daftar Pustaka**

Armitage, D., & Plummer, R. (2010). Adapting and transforming: Governance for navigating change. The Proceedings of the Resilience 2011 Conference, Tempe, Arizona, USA.

Bodin, Ö., & Crona, B. I. (2008). Management of Natural Resources at the Community Level: Exploring the Role of Social Capital and Leadership in a Rural Fishing Community. World Development, 36(12), 2763-2779.

Bovens, M. (2007). "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework." European Law Journal, 13(4), 447–468.

Gleick, P. H. (2000). Integrating Water Management Institutions: The Three I's. Water International, 25(3), 384-395.

Idris, A. M. S., Permadi, A. S. C., Kamil, A. I., Wananda, B. R., & Taufani, A. R. (2019). Citarum Harum Project: A restoration model of river basin. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 3(3), 310-324.

Karkkainen, B. C. (2002). Collaborative Ecosystem Governance: Scale, Complexity, and Dynamism. Virginia Environmental Law Journal, 21, 147.

Lynch, M. J., & Barrett, K. L. (2017). Environmental crime and justice: A Green Police criminological examination. The Routledge handbook of environmental justice, 425-436.

Lynch, M. J., & Long, M. A. (2022). Green Police criminology: Capitalism, Green Police crime and justice, and environmental destruction. Annual Review of Criminology, 5, 255-276.

Maas, L., et al. (2019). "Proactive Policing for Environmental Offenses: A Comparison Between Environmental and Social Outcomes." European Journal on Criminal Policy and Research, 25(1), 1–18.

Mascarenhas, M., et al. (2018). "Community Participation in Environmental Crime Control: A Case Study of India’s *Green Police*." Policing and Society, 28(4), 400–414.

Massé, F. (2022). Police power in Green Police: Furthering political ecologies of the state. Political Geography, 97, 102627.

Nurse, A. (2022). Contemporary perspectives on environmental enforcement. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 66(4), 327-344.

Pahl-Wostl, C. (2009). A conceptual framework for analysing adaptive capacity and multi-level learning processes in resource governance regimes. Global Environmental Change, 19(3), 354-365.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

Rahman, A. (2021). Environmental governance and law enforcement in Indonesia. Environment & Policy Journal, 32(3), 445-459.

Reed, M. S. (2008). Stakeholder participation for environmental management: A literature review. Biological Conservation, 141(10), 2417-2431.

Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum 2019-2015.

Smith, M. R., et al. (2021). "The Effectiveness of *Green Police* in Reducing Environmental Offenses: Evidence from a Quasi-Experiment in Brazil." Crime & Delinquency, 67(3), 463–488.

Sudaryanto, T. (2018). Green Police policing: An approach to environmental law enforcement in Indonesia. Indonesian Law Review, 6(1), 78-96. United Nations Environment Programme. (2019). Environmental rule of law: First global report. UNEP.

Vallmüür, B. (2019). The contours of an organizational theory of *Green Police* integrity. Exploring Police Integrity: Novel Approaches to Police Integrity Theory and Methodology, 139-164. White, R., & Graham, H. (2015). Green Policeing justice: Examining the interfaces of criminal, social and ecological justice. British Journal of Criminology, 55(5), 845-865.

White, R., & Heckenberg, D. (2014). Green Police criminology: An introduction to the study of environmental harm. Routledge. World Wildlife Fund. (2020). The global threat of environmental crime. WWF Internasional.

Zimmerman, F. J. (2005). "The Role of Police in Environmental Enforcement: A Case Study from Southern California." Journal of Environmental Planning and Management, 48(2), 271–291.

**PENYETARAAN LULUSAN PROGRAM STUDI S2 DAN S3 KEDINASAN**

**DENGAN LULUSAN SESPIMMEN DAN SESPIMTI**

**GUNA PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS**

**SUMBER DAYA MANUSIA POLRI YANG UNGGUL DI *ERA POLICE 4.0***

**1Yopik Gani, 2Rahmadsyah Lubis, 3Muhammad Azis Muslim**

**1,2Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12160**

**3Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Jakarta**

**e-mail: muhazismuslim01@gmail.com**

**Abstrak**

Perkembangan yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia, mulai dari idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya saat ini sudah menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Perkembangan sedemikian cepat ini tentu berimplikasi kepada kehidupan manusia di muka bumi ini. Implikasi itu antara lain: banyaknya pekerjaan yang hilang karena digantikan oleh berbagai alat cerdas yang diciptakan manusia dan, tentu saja, semakin banyaknya pengangguran akibat kehilangan pekerjaan. Kita masuk ke era VUCA (*volatility, uncertainty, complexity*, dan *ambiguity*). Seiring dengan perkembangan kehidupan tadi, kejahatan juga ikut berkembang dengan ditemukan nya alat-alat yang semakin canggih. Hal ini tentu membutuhkan SDM (sumber daya manusia) yang handal dalam menangani masalah-masalah yang ditimbulkan oleh semakin canggihnya peralatan dan modus operandi yang digunakan dalam melakukan kejahatan. Polri, sebagai institusi penanggungjawab masalah keamanan dan ketertiban umum, harus bisa memiliki personel dengan jumlah dan kualitas yang memadai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Polri melakukan banyak inovasi dan pembaharuan menyangkut SDM, yang salah satunya adalah program penyetaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan program penyetaraan yang sudah dilakukan dan sempat dihentikan oleh pimpinan Polri pada saat itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitaif. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner, wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang sudah ada perlu disempurnakan agar mau mengikuti program pendidikan lanjutan yang ada saat ini serta hal-hal lain yang menyangkut promosi, kenaikan pangkat dan kesejahteraan personel.

***Kata kunci: penyetaraan; kedinasan; SDM unggul; police 4.0***

***Abstract***

*Developments that occur in all aspects of human life, starting from ideology, politics, economics, socio-culture, have now become something that cannot be avoided. This rapid development certainly has implications for human life on this earth. These implications include: the number of jobs lost due to being replaced by various intelligent tools created by humans and, of course, the increasing number of unemployed due to job losses. We are entering the era of VUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity). Along with the development of life, crime also developed with the discovery of increasingly sophisticated tools. This of course requires reliable human resources (HR) in dealing with the problems caused by increasingly sophisticated equipment and modus operandi used in committing crimes. The National Police, as the institution responsible for security and public order issues, must be able to have personnel with sufficient numbers and quality in the not too distant future. The National Police has carried out many innovations and reforms regarding human resources, one of which is the equalization program. This research aims*

*to find out the extent of the success of the equalization program that had been carried out and was stopped by the National Police leadership at that time. This research uses a qualitative and quantitative approach. Data was obtained from distributing questionnaires, interviews and document review. The results of the research show that existing regulations need to be refined in order to participate in current continuing education programs as well as other matters relating to promotion, promotion and personnel welfare.*

***Keywords: equalization; officialdom; superior human resources; police 4.0***

***​***

**Pendahuluan**

Pesatnya perkembangan teknologi akhir-akhir ini telah berimplikasi positif dalam mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor kehidupan manusia, dan bahkan juga sebaliknya dapat menjadi ancaman bagi berbagai sektor kehidupan. Banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, kebutuhan keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang tinggi, kebutuhan merumuskan banyaknya kebijakan atau peraturan, munculnya kejahatan-kejahatan baru (digital), adalah beberapa implikasi substansial dari kemajuan teknologi tersebut. Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat ini telah membawa kehidupan manusia ke dalam era baru. Oleh Schwab (2017) era baru ini disebut sebagai era revolusi indutri 4.0, yang dicirikan oleh peningkatan yang begitu cepat dalam hal teknologi digitalisasi, robotisasi dan kecerdasan otomatisasi (*intelligent automation*), *internet of things* dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang dapat berdampak pada berbagai sektor kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, bisnis, nasional dan global, masyarakat dan individu.

Polri sebagai institusi publik yang bertanggungjawab dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, tentunya perlu merespon berbagai dampak dari perkembangan revolusi industri 4.0 ini dengan menyiapkan SDM Polri yang unggul baik dari segi kualitas, kompetensi, maupun etika. Menyiapkan SDM yang unggul yang dapat merespon implikasi dari berbagai dampak perkembangan revolusi industri 4.0, tentunya membutuhkan suatu sistem pembinaan yang memadai, baik pengetahuan maupun keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan yang tentunya diperoleh melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi baik secara internal maupun eksternal.

Pada organisasi Polri, bentuk pendidikan yang diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan dalam 2 (dua) pendidikan, yaitu pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan. Dalam pendidikan pengembangan dikenal adanya pendidikan kedinasan, yaitu pendidikan kedinasan di Polri yang dilaksanakan baik di dalam dan luar negeri dengan menggunakan anggaran Polri. Untuk pendidikan kedinasan dalam negeri, Polri telah menyelenggarakan pendidikan Program Pascasarjana Strata 2 dan Strata 3 Ilmu Kepolisian pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), dan Program Pascasarjana S2 Studi Kajian Ilmu kepolisian (KIK) dengan bekerjasama dengan Universitas Indonesia (UI). Sedangkan pendidikan kedinasan Program Pascasarjana S2 dan S3 di luar negeri Polri bekerjasama dengan Kementerian Keuangan melalui program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pendidikan program Pascasarjana S2 dan S3 ini tentunya ditujukan untuk pengembangan spesialisasi dari ilmu kepolisian.

Ilmu Kepolisian sebagaimana dikemukakan oleh Parsudi (1999) adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari masalah-masalah sosial dan penangananya dalam mewujudkan keteraturan sosial. Dengan pemahaman ini, dapat dimaknai bahwa ilmu kepolisian adalah kumpulan disiplin ilmu yang dipelajari untuk digunakan menangani masalah-masalah sosial yang muncul dalam atau di tengah-tengah masyarakat yang ditujukan untuk memelihara keteraturan sosial. Untuk itu, pengembangan ilmu Kepolisian bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme personel Polri agar mampu menangani masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan kedinasan S2 dan S3 Ilmu Kepolisian merupakan investasi jangka panjang bagi institusi Polri agar mampu menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tujuan Polri. Tujuan Polri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4, UU Nomor 2 Tahun 2002, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Personel Polri yang telah mengikuti pendidikan kedinasan S2 dan S3 ilmu Kepolisian tentunya memerlukan pembinaan secara berkelanjutan agar dapat diberdayakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengeluaran anggaran dinas yang telah dikeluarkan oleh organisasi Polri akan lebih efisien bila terdapat pembinaan secara berkelanjutan kepada personel yang bersangkutan. Pengembangan sumber daya organisasi akan mudah diwujudkan bila personel yang telah mengikuti pendidikan S2 dan S3 ilmu Kepolisian mendapatkan pendidikan pengembangan Sespimmen dan Sespimti melalui program penyetaraan dengan membuat tugas akhir pada kedua pendidikan manajerial tersebut. Program penyetaraan antara S2 ilmu Kepolisian dengan Sespimmen dan S3 ilmu Kepolisian dengan Sespimpti akan mampu meningkatkan efisiensi anggaran yang telah digunakan untuk pendidikan kedinasan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Polri.

Program penyetaraan antara S2 ilmu Kepolisian dengan Sespimen dan S3 ilmu Kepolisian dengan Sespimpti pada dasarnya telah dituangkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016, tentang Penyetaraan Lulusan Program Pendidikan Strata dua dan Strata Tiga Kedinasan dengan Lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi. Penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam Perkap ini dijelaskan pada Pasal 6 ayat (5), yaitu persamaan perlakuan dalam pembinaan karier yang meliputi persamaan perlakuan dalam jenjang pangkat dan persamaan perlakuan dalam jenjang jabatan. Dengan adanya persamaan perlakuan ini, diharapkan animo dan motivasi anggota Polri untuk mengikuti program pendidikan Strata Dua dan Strata Tiga kedinasan dapat terjaga.

Namun demikian, dalam implementasinya Perkap ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Masih terdapat kendala-kendala manajerial yang membuat Perkap ini sulit untuk diimplementasikan secara konsisten, yang kemudian menimbulkan de-motivasi di kalangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengikuti program pendidikan Strata Dua dan Strata Tiga kedinasan ilmu Kepolisian.

Dalam konteks studi implementasi kebijakan sudah menjadi isu umum bahwa hampir selalu terjadi distorsi antara hal-hal yang ingin dicapai dengan hal-hal yang tercapai atau terealisasi dari hasil implementasi sebuah kebijakan. Tentunya, hal ini juga tidak tertutup kemungkinan terjadi pada implementasi implementasi penyetaraan lulusan Prodi S2 dan S3 dengan lulusan Sespimmen dan Sespimti yang telah disiapkan dan diimplementasikan. Banyak faktor yang dapat menimbulkan distorsi tersebut. Misalnya, tidak adanya komitmen dan konsistensi implementator kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat, lemahnya dukungan instansi samping, rendahnya pengetahuan implementator terdepan terhadap isi kebijakan, dan lain sebagainya.

Berkait dengan itu, Grindle (1980) dalam Tachan (2006: xiv), menyebutkan ada tiga hambatan besar yang acapkali muncul dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, yakni: (1) ketiadaan kerjasama vertikal, antara atasan dengan bawahan; (2) hubungan kerja horizontal yang tidak sinergis; dan (3) masalah penolakan terhadap perubahan yang datang dari publik maupun kalangan birokrasi sendiri. Selain itu, George C. Edwards III (1980), mengemukakan bahwa terdapat beberapa variable yang mempengaruhi efektivitas implementasi sebuah kebijakan. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat  variabel,  yakni:  (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Perspektif teori ini menemukan pembenaran empirik dari hasil penelitian tesis yang dilakukan oleh Novitasari (2018) pada Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian dengan judul “Efektivitas Implementasi Program *Assessment Center* di Kepolisian.” Dalam kesimpulannya, dikemukakan bahwa salah satu faktor penyebab ketidakefektifan implementasi program *Assessment Center* di kepolisian disebabkan oleh variabel disposisi pelaksana program yang masih rendah. Variabel disposisi pelaksana program ini, meliputi rendahnya dukungan, komitmen, dan konsistensi pelaksana program baik di tingkat Mabes Polri maupun di tingkat polda.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah “Penyetaraan lulusan Prodi S2 dan S3 kedinasan dengan lulusan Sespimmen dan Sespimti guna peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Polri yang Unggul di *Era Police 4.0*”. Adapun pokok-pokok persoalan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana implementasi Penyetaraan lulusan Program pendidikan strata dua (S2) dan strata tiga (S3) kedinasan dengan lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Penyetaraan lulusan Program pendidikan strata dua (S2) dan strata tiga (S3) kedinasan dengan lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi? Bagaimana preferensi anggota POLRI untuk mengikuti program Pendidikan pengembangan pada program S2/S3 STIK?

**Tinjauan Literatur**

Implementasi merupakan sebuah tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar supaya mempunyai dampak yang diinginkan. Wiliam. N. Dun (2000: 24-25) menganjurkan bahwa di setiap tahapan proses kebijakan publik, termasuk tahapan implementasi kebijakan penting dilakukan analisis. Analisis yang dimaksud tidak identik dengan evaluasi karena dari tahapan penyusunan agenda hingga evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) sudah harus dilakukan analisis.

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2001: 68) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Sedangkan Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2006: 139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep implementasi kebijakan mengarah pada suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggungjawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan-hambatan yang dapat menghambat. Gow dan Morss dalam Pasolong (2007: 59), mengungkapkan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan adalah antara lain sebagai berikut:

1. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan.
2. Kelemahan institusi.
3. Ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif.
4. Kekurangan dalam bantuan teknis.
5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi.
6. Pengaturan waktu (*timing*).
7. System informasi kurang mendukung.
8. Perbedaan agenda tujuan dan aktor.

Sedangkan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan menurut Weimer dan Vining dalam Pasolong (2007: 59) ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni sebagai berikut:

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan-sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
2. Hakekat kerjasama yang dibutuhkan-apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling produktif.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaanya.

George C. Edwards III (1980) dalam Subarsono (2005: 90) menyebutkan bahwa terdapat beberapa variable yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat  variabel,  yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

Menurut Goggin (1990) dalam Erwan (2012), kebijakan merupakan sebuah *message* yang diberikan oleh yang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di mana tindak lanjut pelaksanaan kebijakan tersebut agar berhasil harus dipengaruhi oleh sejumlah hal di antaranya yaitu yang pertama isi kebijakan *(the content of policy message),* selanjutnya *f*ormat kebijakan *(the form of the policy message) dan* yang terakhir reputasi aktor *(the reputation of the communicators).*Perumusan kebijakan diawali dari *agenda setting* (penentuan agenda), *policy formulation* (perumusan alternatif kebijakan), *policy legitimation* (penetapan kebijakan), *policy implementation* (pelaksanaan atau implementasi kebijakan), dan *policy evaluation* (evaluasi kebijakan). Implementasi bertujuan untuk menciptakan suatu kaitan (linkage) sehingga tujuan-tujuan kebijakan dapat terealisasi dengan mudah sebagai akibat dari suatu kegiatan pemerintah.

Pembentukan “*a policy delivery system*” mencakup sarana-sarana tertentu yang dipersiapkan dan dilaksanakan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan (Grindle, 1980: 447). Rondinelli dan Cheema (1983) dalam Erwan (2012) juga mengungkapkan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, antara lain ialah hubungan antar organisasi *(inter-organizational relationship),* sumber daya *(resources)*, karakter institusi implementor *(characteristic implementing agencies). Dan* kondisi lingkungan *(environmental conditions),*  Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan cara yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai sasarannya (Nugroho, 2008:432). Kemungkinan timbulnya masalah atau terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan sangat besar. Hal tersebut dapat dicegah melalui pengenalan terhadap kendala yang mungkin akan dihadapi beserta latar belakang yang mengikutinya, lalu dibuat solusi-solusi untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi penyebabnya (Winarno, 2012: 221).

**Metodologi Penelitian**

Peneliti menggunakan paradigma *post positivist.* Alasan pemilihan menggunakan pendekatan ini adalah definisi Creswell (2009) bahwa pendekatan *post positivist* dimulai dari teori dengan mengumpulkan data baik mendukung atau membantah teori. *Post positivist* menggabungkan teori dengan fenomena sosial, namun mengintegretasikan teori dengan fakta empiris melalui observasi dan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini menganggap bahwa teori tidak dapat meneropong realitas secara utuh, akan tetapi realitas dapat diperkirakan atau didekati. Implementasi Perkap Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyetaraan lulusan Program pendidikan strata dua dan strata tiga kedinasan dengan lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi dapat diungkap secara utuh dan obyektif. Sifat penelitian ini adalah metode evaluatif, yang melakukan analisis masalah yang telah terjadi.

Sumber informasi yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu: sumber data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam atau FGD dilakukan dengan menggunakan metode tidak terstruktur. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara agar data yang diperoleh relevan. Telaah dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen penting yang mendukung penelitian, terutama dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*) yang berarti memanfaatkan secara bersamaan metode kuantitatif dan kualitatif. Berbagai data yang yang diperoleh tersebut digunakan sebagai dasar menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan harapan selain melengkapi kekurangan juga akan diperoleh jawaban atas pokok permasalahan secara lebih komprehensif dibandingkan memanfaatkan salah satu metode saja. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini data diperoleh melaui survei, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) sehingga triangulasi dapat dilakukan secara lebih lengkap.

**Hasil dan Pembahasan**

Survey untuk penelitian Penyetaraan lulusan Prodi S2 dan S3 kedinasan dengan lulusan Sespimmen dan Sespimti guna peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Polri yang Unggul di *Era Police 4.0* dilakukan di lokasi penelitian yang mencakup 3 wilayah hukum Polda Sumatera Barat, Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya dengan total responden berjumlah 302 orang. Berikut merupakan deskripsi atas temuan data kuantitatifnya, secara demografi responden yang berjenis kelamin wanita sejumlah 7,6 persen. Secara kualifikasi pendidikan mayoritas responden memiliki jenjang pendidikan S1 yaitu 41,1%.

Survei ini dilakukan untuk mengetahui persepsi dari responden yang akan berpengaruh dalam bersikap atas urgensi Pendidikan akademik dan pengembangan di lingkungan polri. Sehingga pertanyaan penelitian bermaksud untuk mengukur aspek sikap yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik responden.

Data kualitatif diperoleh melalui Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dan wawancara yang melibatkan para responden/narasumber yang relevan. Keberadaan data ini sangat penting selain untuk mengkonfirmasi data survei juga dapat menggali lebih jauh pandangan responden atas permasalahan penelitian yang diajukan. Untuk lebih jelasnya, temuan dan pembahasan data kualitatif ini Penulis jelaskan sebagai berikut:

* 1. **Kepolisian Daerah Sumatera Barat**

Penelitian penyetaraan lulusan program pendidikan Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3) kedinasan dengan lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) yang dilakukan di wilayah hukum Polda Sumbar mengambil 7 (tujuh) Polres sebagai obyek penelitian, yaitu Polres Padangpanjang, Bukittinggi, Payakumbuh, 50 Kota, Agam, Padang Pariaman, Kota Padang. Berdasarkan hasil *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan terkait pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini di Polda Sumbar dan Polres jajaran, dapat dikemukakan beberapa informasi atau data yang dapat ungkap, yaitu sebagai berikut:

* + 1. Implementasi penyetaraan lulusan program pendidikan Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3) kedinasan dengan lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) melalui Perkap 06/2016 belum terimplementasi dengan baik. Kesimpulan ini didasarkan pada gejala-gejala yang mengemuka dalam FGD. Dan adapun gejala-gejala tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perkap 06/2016 tentang tentang Penyetaraan Lulusan Program Pendidikan Strata dua dan Strata Tiga Kedinasan dengan Lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi belum terdistribusi dan tersosialisasi secara merata di tingkat kewilayahan atau Polres di wilayah hukum Polda Sumbar.
2. Belum terdistribusi dan tersosialisasinya Perkap No. 6 tahun 2016 tersebut, kemudian berimplikasi pada kurangnya pemahaman terhadap isi Perkap oleh pelaksana dan calon peserta matrikulasi (*target group)* di tingkat kewilayahaan terhadap maksud dan tujuan program Penyetaraan Lulusan Program Pendidikan Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3) Kedinasan dengan Lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti).
   * 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penyetaraan lulusan program pendidikan strata dua (S2) dan strata tiga (S3) kedinasan dengan lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi. Dari hasil *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan terkait pertanyaan penelitian kedua yang diajukan dalam penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa informasi atau data yang dapat ungkap, yaitu sebagai berikut:
3. Adanya ketidakkonsistenan implementasi Perkap No.6 tahun 2016 oleh implementator program di tingkat Mabes, yakni Lemdiklat dan As SDM Polri, yang kemudian berimplikasi pada menurunnya animo calon peserta Program Penyetaraan/matrikulasi.
4. Masa studi yang dianggap terlalu lama sehingga dianggap bisa mengganggu perkembangan karir personil calon peserta program penyetaraan/matrikulasi.
5. Adanya pertimbangan jauh dari keluarga, karena akan menempu pendidikan S2 dan S3 di STIK.
6. Biaya hidup yang tidak ditanggung oleh lembaga. Berbeda dengan program beasiswa yang ditawarkan oleh Polri yang bekerjasama dengan pihak-pihak luar penyedia beasiswa (misalnya program beasiswa LPDP, beasiswa kerjasama antara Polri dan UI dan beberapa Yayasan di Indonesia.
   * 1. Preferensi anggota Polri untuk mengikuti program pendidikan pengembangan pada program S2 dan S3 STIK, yaitu antara lain:
7. Implementasi Perkap 6 tahun 2016 tentang Penyetaraan Lulusan Program Pendidikan Strata dua dan Strata Tiga Kedinasan dengan Lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi yang menjadi payung hukum program penyetaraan lulusan program pendidikan strata dua (S2) dan strata tiga (S3) kedinasan dengan lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi seyogiyanya diimplementasikan secara konsisten.
8. Peserta didik program pendidikan strata dua (S2) dan strata tiga (S3) kedinasan, khususnya yang dilaksanakan di STIK menginginkan adanya perhatian yang lebih dalam hal kesejahteraan.
9. Sistem perkuliahan sebaiknya dilakukan dengan *blended learning*.
10. Tunjangan jabatan sebaiknya tidak dikurangi dan disamakan dengan tingkat atau golongan personil yang terbawah.
11. Agar matrikulasi ditiadakan karena terdapat duplikasi materi pelajaran yang diberikan di masing-masing program pendidikan S2 dan S3.
12. Lulusan S2 dan S3 kedinasan agar diberikan beberapa kemudahan dalam hal test seleksi masuk Sespimmen dan Sespimti.
13. **Kepolisian Daerah Jawa Barat**

Pada wilayah hukum Polda Jawa Barat lokasi penelitian dilakukan di 7 (tujuh) Polres, yaitu masing-masing Polres Karawang, Purwakarta, Indramayu, Cirebon Kota, Cirebon Kabupaten, Kuningan, Cimahi, Bandung, dan Polresta Bandung. Adapun temuan penelitian berdasarkan hasil *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan terkait pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian di Plda Jawa barat dan Polres jajaran, adalah sebagai berikut:

* + 1. Implementasi penyetaraan lulusan program pendidikan Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3) kedinasan dengan lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) melalui Perkap 06/2016 belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa temuan-temuan penelitian, seperti:

1. Distribusi dan sosialisasi Perkap 06/2016 belum berjalan dengan baik di tingkat kewilayahan (Polda dan Polres) di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
2. Distribusi dan sosialisasi Perkap 06/2016 belum berjalan dengan baik di tingkat kewilayahan (Polda dan Polres) di wilayah hukum Polda Jawa Barat. berimplikasi terhadap kurangnya pemahaman isi dan maksud perkap 6 tahun 2016 oleh pelaksana di tingkat Polda (Biro SDM) dan dan tingkat Polres (Kabag SDM), kalaupun ada yang tahu tentang Perkap 6 tahun 2016 pemahaman mereka sangat beragam.
   * 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penyetaraan lulusan program pendidikan strata dua (S2) dan strata tiga (S3) kedinasan dengan lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi yang menyebabkan implemementasi perkap ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan adalah sebagai berikut:
3. Ketidakkonsistenan dalam implementasi Perkap No.6 tahun 2016, di mana ada beberapa periode program matrikulasi yang ditawarkan tidak berjalan.
4. Karir senior yang alumni program Pendidikan S2/S3 kedinasan yang tidak mendapatkan penempatan sebagaimana mestinya sebagai bentuk pengembangan karir.
5. Masa studi yang dianggap terlalu lama sehingga dirasakan mengganggu perkembangan karir personil.
6. Pertimbangan jauh dari keluarga.
7. Biaya hidup yang tidak ditanggung oleh lembaga yang berbeda dengan program beasiswa yang ditawarkan oleh Polri yang bekerjasama dengan pihak-pihak luar penyedia beasiswa (misalnya program beasiswa LPDP, beasiswa kerjasama antara Polri dan UI dan beberapa Yayasan di Indonesia.
   * 1. Preferensi anggota Polri untuk mengikuti program pendidikan pengembangan pada program S2 dan S3 STIK, yaitu antara lain:
8. Perkap 6 tahun 2016 yang menjadi payung hukum program penyetaraan lulusan program pendidikan strata dua (S2) dan strata tiga (S3) kedinasan dengan lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi seyogiyanya diimplementasikan secara konsisten.
9. Secara konten atau substansi Perkap 06/2016 terkait program Penyetaraan Lulusan Program Pendidikan Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3) Kedinasan dengan Lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) mendapat respon positif dari anggota Polri sebagai jalur alternatif atau pintu masuk mengikuti Sespim dengan jalur matrikulasi. Kepastian binkar setelah lulus S2/S3, kepastian penyertaan dan kemudahan tes ikut kursus kepemimpinan di sespimen/sespimti, bantuan *living cost* yg S2/S3 STIK.
10. Peserta didik program pendidikan strata dua (S2) dan strata tiga (S3) kedinasan, khususnya yang dilaksanakan di STIK menginginkan adanya perhatian yang lebih dalam hal kesejahteraan melalui pemberian dana/uang saku/biaya hidup dan bentuk dukungan pendanaan lainnya.
11. Sistem perkuliahan sebaiknya dilakukan dengan *blended learning*.
12. Tunjangan jabatan sebaiknya tidak dikurangi dan kalau bisa disamakan dengan tingkat atau golongan personil yang bersangkutan.
13. Bagi lulusan S2 dan S3 kedinasan agar diberikan beberapa kemudahan dalam hal test seleksi masuk Sespimmen dan Sespimti.
14. **Kepolisian Daerah Metro Jaya**

Berdasar data kualitatif yang diperoleh melalui pendalaman dengan teknik *focus group discussion* (FGD), dapat diungkap fakta atau gejala terkait kondisi faktual implementasi Perkap nomor 6 tahun 2016, factor-faktor yang mempengaruhi dan prefernsi calon peserta penyataraan program pendidikan Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3) kedinasan dengan lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) di Polda Metro Jaya dan Polres jajaran. Adapun fakta atau gejala tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

* + 1. Implementasi penyetaraan lulusan program pendidikan Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3) kedinasan dengan lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) melalui Perkap 06/2016 mendapat respon dan tanggapan positif atas materi yang diatur meskipun kebijakan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa temuan-temuan penelitian, seperti:

1. Perkap 06/2016 belum banyak diketahui secara lengkap dan ada permasalahan dalam distribusi dan sosialisasi ke tingkat kewilayahan yaitu Polda dan Polres-Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
2. Isi Perkap 06/2016 terkait program Penyetaraan Lulusan Program Pendidikan Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3) Kedinasan dengan Lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) belum tersosialiasi kepada anggota Polri yang potensial untuk mengikuti program pendidikan S2 dan S3 tersebut.
3. Tujuan penyetaraan dalam upaya peningkatan animo ke S2 dan S3, sulit direalisasikan jika kesempatan mengikuti Sespim masih terbatas.
   * 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penyetaraan lulusan program pendidikan strata dua (S2) dan strata tiga (S3) kedinasan dengan lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi yang menyebabkan implemementasi perkap ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan adalah sebagai berikut:
     2. Ketidakkonsistenan implementasi Perkap No.6 tahun 2016.
     3. Adanya multi persepsi terkait perkap no.6 tahun 2016, persepsi yang berkembang S2 dan S3 tidak bisa disetarakan/disejajarkan dikarenakan jenis pendidikan yang berbeda. Istilah matrikulasi dalam penyetaraan Binkar S2 dan S3 dengan Sespima dan Sespimti secara psikologis menunjukan S2 atau S3 keberadaannya lebih rendah dibanding Sespima dan Sespimti.
     4. Lamanya masa studi yang dianggap terlalu lama sehingga dianggap bisa mengganggu perkembangan karir personil.
     5. Pertimbangan jauh dari keluarga.
     6. Lepas jabatan.
     7. Biaya hidup yang tidak ditanggung oleh lembaga yang berbeda dengan program beasiswa yang ditawarkan oleh Polri yang bekerjasama dengan pihak-pihak luar penyedia beasiswa (misalnya program beasiswa LPDP, beasiswa kerjasama antara Polri dan UI dan beberapa Yayasan di Indonesia.
     8. Preferensi anggota Polri untuk mengikuti program pendidikan pengembangan pada program S2 dan S3 STIK, yaitu antara lain:
4. Perkap 6 tahun 2016 yang menjadi payung hukum program penyetaraan lulusan program pendidikan strata dua (S2) dan strata tiga (S3) kedinasan dengan lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi seyogiyanya diimplementasikan secara konsisten.
5. Penyetaraan Binkar lulusan S2 dan S3 dipahami sebagai hak yang setara dengan Binkar yang diperoleh lulusan Sespima dan Sespimti, dengan catatan mengikuti program matrikulasi untuk pemilikan kompetensi manajerial dan kepemimpinan.
6. Peserta didik program pendidikan strata dua (S2) dan strata tiga (S3) kedinasan, khususnya yang dilaksanakan di STIK menginginkan adanya perhatian yang lebih dalam hal kesejahteraan.
7. Sistem perkuliahan sebaiknya dilakukan dengan *blended learning*.
8. Tunjangan jabatan sebaiknya tidak dikurangi dan disamakan dengan tingkat atau golongan personil yang bersangkutan.
9. Preferensi studi diluar STIK tidak mensyaratkan adanya jenjang kepangkatan tertentu.

**Implementasi Penyetaraan lulusan Program pendidikan strata dua (S2) dan strata tiga (S3) kedinasan dengan lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimen) dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti)**

1. Pemahaman Anggota Polri Terhadap Program Penyetaraan

Payung hukum yang digunakan dalam Penyetaraan lulusan Srata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) Kedinasan dengan lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespomen) dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) adalan Perkap No. 06, Tahun 2016, tentang Penyetaraan Lulusan Program Pendidikan S2 dan S2 Kedinasan dengan Lulusan Sespimen dan Sespimti.

Peraturan tersebut bersumber dari hasil FGD di tiga Polda Wilayah Hukum Sumatra Barat, Jawa Barat dan DKI Jakarta, belum terdistribusikan dan diterima oleh anggota Polri calon peserta penyetaraan baik di tingkat Polda maupun Polres, bahkan di tingkat Pusat. Sebagian besar besar responden menyatakan pernah mendengar adanya Perkap tersebut, namun belum menerima dan membaca secara langsung. Informasi tentang adanya program penyetaraan diperoleh dari sumber individu/perorangan (kakak angkatan, teman seangkatan) secara verbal. Informasi yang diperoleh pun tidak lengkap.

Hampir semua responden di tiga wilayah hukum Polda, menyatakan belum pernah menerima/mengikuti sosialisasi tentang Perkap tersebut baik di tingkat Polda maupun Pores. Implikasi tidak terdistribusikan dan tidak adanya sosialisasi tentang Perkap tersebut kepada para calon peserta matrikulasi (*target group)*, menjadikan sebagian besar mereka memahami isi Perkap secara beragam, bahkan sama sekali tidak memahami maksud dan tujuan Perkap tersebut. Keterbatasan pemahaman terhadap isi dan maksud perkap No. 6 tahun 2016 oleh pelaksana di tingkat Polda (Biro SDM) dan tingkat Polres (Kabag SDM), menjadikan program penyetaraan sebagai upaya peningkatan animo pelanjutan studi kedinasan ke S2 dan S3 tidak berdampak atau tidak berhasil.

Substansi Perkap No. 06 Tahun 2016 tentang penyetaraan, mendapat respon positif dari anggota Polri sebagai jalur alternatif atau pintu masuk mengikuti Sespimmen/Sespimti dengan jalur matrikulasi, dengan catatan, kepastian kemudahan keikutsertaan mengikuti Sespimen/sespimti, serta kepastian Binkar setelah lulus S2/S3. Namun sebenarnya harapan responden, kesetaraan Binkar S2/S3 dengan Sepimen/Sespimti, tanpa harus mengikuti program kesetaraan. Program S2/S3 merupakan alternatif Binkar yang memiliki hak sama dengan lulusan Sepimen dan Sespimti.

Penyetaraan Binkar lulusan S2 dan S3 dipahami sebagai hak yang setara dengan Binkar yang diperoleh lulusan Sespima dan Sespimti, dengan catatan mengikuti program matrikulasi untuk pemilikan kompetensi manajerial dan kepemimpinan. Penyetaraan Binkar sebenarnya bukan penyetaraan pendidikan, tapi dengan diharuskan mengikuti program penyetaraan dan matrikulasi pada Sespimen dan Sespimti, secara psikologis program S2 atau S3 keberadaannya lebih rendah dibanding Sespimen dan Sespimti. Padahal masa studi dan beban studi S2 (minimal 2 tahun), S3 (minimal 3 tahun) lebih lama dibanding Sespimen dan Sespimti yang membutuhkan waktu 7 bulan (1600 jp), walau keduanya sama lepas jabatan. Kondisi psikilogis ini berdampak terhadap kurang ketertarikan anggota Polri untuk menempuh pendidikan kedinasan S2 dan S3 di STIK-PTIK.

Perkap tidak konsisten diimplementasikan, seperti tidak diakui dan diketahui keberadaannya. Pembukaan program penyetaraan dengan matrikulasi timbul tenggelam dalam setiap tahunnya, bahkan dalam dua tahun terakhir tidak diselenggarakan. Ketidak jelasan penyelenggaraan program penyetaraan tersebut berimplikasi terhadap keraguan para calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan pada Program S2 dan S3 Kedinasan, khususnya di STIK- PTIK. Tujuan penyetaraan dalam upaya peningkatan animo ke S2 dan S3, sulit direalisasikan jika kesempatan mengikuti penyetaraan masih terbatas.

1. Penyelenggaraan Program Penyetaraan

Peminat S2 pada umumnya adalah lulusan S1 STIK dengan penempatan di luar Pulau Jawa dan Sumatera atau daerah yang kurang diminati, dan sudah lama berdinas di daerah tersebut. Termotivasi masuk sekolah kedinasan di S2 STIK, berharap setelah lulus ditempatkan di daerah yang diinginkan, selain memanfaatkan waktu untuk kumpul atau dekat dengan keluarga, anak istri yang tinggal di sekitar atau dekat Jakarta. Hampir sama sekali tak ada yang berminat dan bercita cita menjadi akademisi atau ahli di bidang Ilmu Kepolisian. Implikasinya, hanya beberapa orang saja yang berminat melanjutkan pendidikan ke jenjang S3, sehingga animo masuk S3 STIK PTIK sangat rendah, kurang dari formasi yang ada.

Terjadi diskrepansi kompetensi dari kedua jenis pendidikan menjadi masalah tersendiri dalam penetapan capaian kompetensi dan profil lulusan S2 dan S3 sebagai pendidikan akademik yang berorientasi menghasilkan akademisi berkeahlian ilmu kepolisian. Sedangkan Sespima dan Sespimpti adalah pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang berorientasi menghasilkan para pemimpin tingkat menegah dan tinggi yang memilik kompetensi manajerial dan kepemimpinan di bidang tugasnya. Implikasinya, pada saat mata kuliah S2 dan S3 disandingkan dengan mata kuliah Sespimmen dan Sespimti menjadi tidak relevan, sehingga jika dilakukan Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL) terhadap program pendidikan kedinasan yang beragam, menjadikan masing-masing peserta harus menempuh mata kuliah yang berbeda beda. Penetapan matakuliah dengan sistem paket, yang diarahkan pada kebijakan, manajemen dan kepemimpinan menjadi kurang tepat jika latar pendidikan S2 dan S3 berlatar ilmu administrasi negara atau ilmu manajemen.

Beban belajar program penyetaraan sebanyak 200 Jp. Mata kuliah yang ditempuh terkait dengan manajemen dan kepemimpinan, yang diampu para pengajar/nara sumber para pejabat tinggi, atau para ahli di bidangnya. Pembelajaran dengan mata kuliah yang sudah dipaketkan, dilaksanakan bersama dengan peserta reguler, dengan penugasan berbeda, lebih ringan dari peserta reguler (NKP 6 dan Nastrap).

Adaptabilitas lulusan S2 dan S3 dalam kegiatan akademik dinilai kurang oleh para dosen Sespimen dan Sespimti, terutama dalam penyelesaian tugas *polecy breaf*, *maind mapping* dan NKP. Hal ini diakibatkan tradisi belajar dan tata cara penulisan karya ilmiah yang berbeda. Sedianya penulisan karya ilmiah bersifat universal, relatif sama di mana pun, walau dengan selingkung yang berbeda, sehingga tidak menjadi masalah bagi penulis karya ilmiah di mana pun. Menurut responden Dosen, hasil belajar lulusan S2 dan S3 tidak lebih baik dari peserta reguler. Walau demikian, dalam penulisan karya ilmiah lulusan S2 dan S3 lebih baik dari peserta reguler.

Untuk keberhasilan capaian kompetensi lulusan S2 dan S3 yang setara dengan lulusan Sespimen dan Sespimti, pihak Sespimen dan Sespimti memberikan layanan akademik khusus kepada para peserta penyetaraan dengan pemberian bimbingan dan pendampingan yang bersifat individual melalui Kelompok Belajar (Pokjar). Kegiatan dilakukan setiap hari Kamis, dengan materi terkait pemetaan dan taskap serta pembuatan *polecy brief*. Dibimbing oleh Widiaiswara (WI). Satu orang WI membimbing 4 orang peserta.

1. Tindak lanjut dari Program Penyetaraan

Ketidak konsistenan penyelenggaraan penyetaraan, diikuti dengan ketidak setaraan Binkar lulusan S2/S3 yang sesungguhnya, di mana lulusan S2 dan S3 kedinasan seharusnya memiliki kesempatan yang sama dengan para lulusan Sespimen dan Sespimti dalam penempatan dengan kedudukannya. Menurut beberapa responden, peluang Binkar (penempatan dan jabatan) lulusan Sespimen dan Sespimti lebih baik dibanding lulusan S2 dan S3 yang mengikuti penyetaraan. Karir senior alumni program S2/S3 kedinasan tidak mendapatkan penempatan sebagaimana mestinya sebagai bentuk pengembangan karir. Kondisi ini diduga berpengaruh terhadap minat anggota Polri untuk mengikuti pendidikan kedinasan S2 dan S3 di STIK-PTIK.

**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyetaraan lulusan Program pendidikan S2 dan S3 Kedinasan dengan lulusan Sespimen dan Sespimti**

1. **Persepsi Terhadap Perkap No.6, tahun tahun 2016 dan Konsistensi Penyelenggraan**

Program penyetaraan, dipersepsi kurang tepat, karena pada dasarnya program S2 dan S3 tidak bisa disetarakan/disejajarkan dengan Sespimen dan Sespimti. Kedua jenis pendidikan tersebut berbeda jalur dan kefungsiannya. Selain itu istilah matrikulasi dalam penyetaraan Binkar S2 dan S3 dengan Sespima dan Sespimti secara psikologis dipersepsi telah memposisikan program S2 atau S3 keberadaannya lebih rendah dibanding Sespimen dan Sespimti. Selain itu, ketidakkonsistenan implementasi Perkap No.6 tahun 2016 oleh implementator program di tingkat Mabes, yakni Lemdiklat dan As SDM Polri, berimplikasi pada animo calon peserta mengikuti program S2 dan S3 rendah.

1. **Penyelenggaraan S2 dan S3 Kedinasan**

Masa studi S2 dan S3 di STIK dianggap terlalu lama (2-5 tahun) berpotensi mengganggu pengembangan karir, harus meningggalkan keluarga, melepas jabatan, berimplikasi terhadap kehilangan tunjangan jabatan, serta ketidak jelasan karir setelah selesai pendidikan, menjadi pertimbangan berat anggota Polri untuk mengambil kesempatan melanjutkan pendidikan kedinasan di S2/S3 STIK PTIK. Banyak anggota Polri lebih memilih melanjutkan pendidikan kedinasan di luar STIK-PTIK seperti UI, UGM, Unair. Alasan mendasar adalah walau memperoleh beasiswa sama besarnya dengan kuliah di STIK-PTIK, namun memiliki keleluasaan waktu seperti mahasiswa pada umumnya, memiliki relasi dan jejaring di luar Polri, tidak harus tinggal di asrama dengan protokol ketat. Pelanjutan pendidikan ke luar negeri melalui jalur besiswa LPDP menjadi pilihan yang sangat menarik, terutama ke Inggris, karena masa tempuh pendidikan hanya setahun. Pengalaman belajar di luar negeri dengan prestise yang tinggi dan beasiswa yang memadai menjadi pilihan terbaik.

Ada alternatif yang dianggap lebih menarik dibanding S2 STIK-PTIK, yaitu Sesko Angkatan Darat dengan memperoleh Ijazah Sesko yang setara dengan Sespimen, sekaligus dapat menempuh pendidikan program S2 sehingga memperoleh gelar Magister Pertahanan. Selain itu ternyata banyak diantara anggota Polri mengambil S2 dan S3 nonkedinasan tanpa beasiswa, dengan alasan tidak meninggalkan jabatan, dapat memanfaatkan waktu di sela kedinasan, menambah relasi dan jejaring, dan memperoleh ilmu yang lebih beragam, selain ada pilihan belajar secara daring dan *blanded learning,* walau menyadari tidak diakui sebagai Binkar. Kondisi tersebut merupakan salah satu penyebab S2 dan S3 STIK-PTIK bukan menjadi pilihan utama, sehingga animo masuk S2 dan S3 STIK-PTIK rendah.

Besar beasiswa yang diperoleh pendidikan kedinasan (biaya hidup) di STIK dan PTIK sebenarnya sama besarnya dengan beasiswa kedinasan di luar STIK dan PTIK bagi mahasiswa umum sekalipun. Namun di luar PTIK dan STIK memiliki peluang untuk memperoleh tambahan biaya melalui hibah penulisan tesis dan disertasi dari Dikti, perguruan tinggi tempat kuliah, sponsor atau atau lembaga lain, selain terlibat dalam penelitian dosen atau dalam kegiatan kampus.

Informasi adanya kebijakan lulusan S2 dan S3 ditempatkan di Lemdiklatpol juga menjadi salah satu penyebab ketidaktertarikan untuk melanjutkan ke S2 dan S3 STIK-PTIK. Hal tersebut karena karir dalam dunia pendidikan bukan pilihan dan tidak pernah dibayangkan sebelumnya, bahkan dianggap menyimpang dari cita-cita sebagai polisi yang sebenarnya. Selain itu penghargaan dalam bentuk tunjangan, remunerasi atau pendapatan lainnya kurang menarik dibanding jika bertugas di kewilayahan sebagai pembina fungsi.

Kurang diapresiasinya lulusan S2 dan S3 STIK dengan tidak adanya kemudahan untuk mengikuti Sespimen/Sespimti, serta ketidakcepatan dalam penempatan dan pemosisian dalam jabatan yang menarik, membuat para anggota Polri merasa tidak tertarik untuk melanjutkan studi S2 dan S3 STIK-PTIK.

**Preferensi anggota Polri untuk Mengikuti Pendidikan Program S2/S3 STIK**

Alasan tidak mau S2 STIK

1. S2, dan S3 setara dengan SESPIM, tidak harus ikut penyetaraan.
2. Selama belajar memperoleh tunjangan belajar dan tunjangan lainnya yang dapat mendukung penyelesaian studi (hibah penyelesaian studi, *living cost*, dll).
3. Pemberian jalur pengembangan karir khusus bagi lulusan S2 dan S3.
4. Preferensi studi diluar STIK tidak mensyaratkan adanya jenjang kepangkatan tertentu.

**Catatan Lapangan FGD**

Implementasi Penyetaraan lulusan Program pendidikan strata dua (S2) dan strata tiga (S3) kedinasan di Sespim

1. Persepsi responden tentang program penyetaraan
2. Perkap No 6 Tahun 2016 tentang Penyetaraan Binkar belum tersosialisasi terhadap personil di wilayah. Informasi tentang hal tersebut diperoleh melalui informasi langsung secara verbal dari rekan kerja.
3. Penyetaraan Binkar lulusan S2 dan S3 difahami sebagai hak yang setara dengan Binkar yang diperoleh lulusan Sespima dan Sespimti, dengan catatan mengikuti program matrikulasi untuk pemilikan kompetensi manajerial dan kepemimpinan.
4. S2 dan S3 tidak bisa disetarakan/disejajarkan dikarenakan jenis pendidikan yang berbeda.
5. S1 dan S2 merupakan pendidikan akademik, sedangkan Sespima dan Sespimti adalah pendidikan bagi personil yang akan atau sedang menduduki jabatan tertentu.
6. Tujuan, profil, kompetensi yang berbeda.
7. Masa dan beban studi berbeda. S2 (minimal 2 tahun), S3 (minimal 3 tahun) lepas jabatan, memperoleh gelar.
8. Masa dan beban studi Sespim 7 bulan (1600 jp), lepas jabatan, memperoleh ijazah.
9. Istilah matrikulasi dalam penyetaraan Binkar S2 dan S3 dengan Sespima dan Sespimti secara psikologis menunjukan S2 atau S3 keberadaannya lebih rendah dibanding Sespima dan Sespimti.
10. Tujuan penyetaraan dalam upaya peningkatan animo ke S2 dan S3, sulit direalisasikan jika kesempatan mengikuti Sespim masih terbatas.
11. Penyelenggaraan penyetaraan
    1. Perkap tidak konsisten diimplementasikan, bahkan tidak diakui dan diketahui keberadaannya.
    2. Pembukaan program matrikulasi timbul tenggelam, bahkan 2 tahun tidak diselenggarakan.
    3. Kompetensi, masa studi dan beban belajar.
       1. Diskrepansi kompetensi dari kedua jenis pendidikan menjadi masalah tertentu dalam penetapan capaian kompetensi.
       2. Mata kuliah S2 dan S3 tidak relevan dengan matakuliah SESPIM, dikarenakan profil dan capaian pembelajaran lulusan berbeda.
       3. Belum dilakukan RPL terhadap ragam program kedinasan yang berbeda-beda, sehingga penetapan matakuliah yang ditempuh ditetapkan secara paket, yang diarahkan pada kebijakan, manajemen dan kepemimpinan.
    4. Pembelajaran
       1. Beban belajar berjumlah 200 Jp
       2. Mata pelajaran yang ditempuh terkait dengan substansi manajerial dan leadership, dengan Narsum para pejabat tinggi.
       3. Mapel dengan Narsum dari dalam, tidak diikutu.
       4. Penugasan NKP sebanyak 6 dan Nastrap.
    5. Adaptabilitas lulusan S2 dan S3 dalam kegiatan akademik
       1. Keterlambatan adaptasi dalam penyelesaian tugas (*policy brief, maind mapping* dan NKP)
       2. Hasil belajar tidak lebih baik dari reguler
       3. Penulisan akademik lebih baik, tapi penguasaan substansi fungsi kepolisian rendah
    6. pelayanan akademik
12. Diberi bimbingan secara khusus
13. Ditetapkan pokjar(setiap Kamis ada pendampingan)
14. Diberikan pembimbing (WI) terkait dengan tugas-tugas, 1 pembimning menangani 4 orang untuk *policy brief*, pemetaan dan taskap
15. Faktor- faktor yang mempengaruhi penyetaraan.
16. Perkap tentang penyetaraan belum tersosialisasikan kepada personil di wilayah.
17. Terdapat perbedaan persepsi tentang penyetaraan Binkar, yang berimplikasi terhadap penyelenggraan matrikulasi.
18. Tidak adanya jaminan penyetaraan dilaksanakan, sehingga peluang untuk mengikuti Sespim menjadi tidak ada.
19. Tidak diberi kemudahan untuk memperoleh kesempatan mengikuti Sespim.
20. Alasan tidak mau S2 STIK.
21. Tidak lulus seleksi.
22. Biaya hidup tinggi, sementara tunjangan belajar tidak memadai.
23. Membutuhkan waktu lama, kehilangan peluang karena lepas jabatan.
24. Jauh dengan keluarga, karena harus tinggal di asrama.
25. Tidak ada kepastian yang menjamin karir.
26. Lulusan terbaik, ditempatkan di Lemdiklat.
27. Tidak memiliki keleluasaan beraktifitas seperti mengikuti perkuliahan di tempat lain.
28. Penyetaraan yang ditawarkan tidak memiliki nilai jual, karena resikonya lebih tinggi.
29. Bila mengikuti Sespim, tidak memiliki Ijazah, tapi hanya berupa sertifikat.
30. Ada pilihan Binkar lain selain S2, yaitu Sesko (langsung S2) dan PKN.
31. Kurang memberi peluang untuk membangun jejaring.
32. Ada ketidak adilan dalam Binkar terhadap lulusan S2 dan S3.
33. Harapan kelulusan S2 dan S3

S2, dan S3 setara dengan SESPIM, tidak harus ikut penyetaraan

1. Selama belajar memperoleh tunjangan belajar dan tunjangan lainnya yang dapat mendukung penyelesaian studi (hibah penyelesaian studi, lifing cost, dll).
2. Pemberian jalur pengembangan karir khusus bagi lulusan S2 dan S3.

**Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan

Implementasi penyetaraan lulusan program pendidikan Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3) kedinasan dengan lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) melalui Perkap 06/2016 mendapat respon dan tanggapan positis atas materi yang diatur meskipun kebijakan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa temuan-temuan penelitian, seperti:

* 1. Survei menggambarkan persepsi positif atas urgensi peningkatan kualitas personil melalui pendidikan akademik dan pengembangan jalur lainnya.
  2. Perkap 06/2016 belum banyak diketahui secara lengkap dan ada permasalahan dalam sosialisasi ke polres-polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
  3. Isi Perkap 06/2016 terkait program Penyetaraan Lulusan Program Pendidikan Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3) Kedinasan dengan Lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) belum tersosialiasi kepada anggota Polri yang potensial untuk mengikuti program pendidikan S2 dan S3 tersebut.
  4. Penyetaraan Binkar lulusan S2 dan S3 dipahami sebagai hak yang setara dengan Binkar yang diperoleh lulusan Sespima dan Sespimti, dengan catatan mengikuti program matrikulasi untuk pemilikan kompetensi manajerial dan kepemimpinan.
  5. S2 dan S3 tidak bisa disetarakan/disejajarkan dikarenakan jenis pendidikan yang berbeda.
  6. Istilah matrikulasi dalam penyetaraan Binkar S2 dan S3 dengan Sespima dan Sespimti secara psikologis menunjukan S2 atau S3 keberadaannya lebih rendah dibanding Sespima dan Sespimti.
  7. Tujuan penyetaraan dalam upaya peningkatan animo ke S2 dan S3, sulit direalisasikan jika kesempatan mengikuti Sespim masih terbatas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penyetaraan lulusan program pendidikan strata dua (S2) dan strata tiga (S3) kedinasan dengan lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi yang menyebabkan implemementasi perkap ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. ketidakkonsistenan implementasi Perkap No.6 tahun 2016.
2. lamanya masa studi yang dianggap terlalu lama sehingga dianggap bisa mengganggu perkembangan karir personil.
3. pertimbangan jauh dari keluarga; lepas jabatan.
4. biaya hidup yang tidak ditanggung oleh lembaga yang berbeda dengan program beasiswa yang ditawarkan oleh Polri yang bekerjasama dengan pihak-pihak luar penyedia beasiswa (misalnya program beasiswa LPDP, beasiswa kerjasama antara Polri dan UI dan beberapa Yayasan di Indonesia.

Mengacu kepada hasil survei melalui *Google Form* dan hasil FGD ditemukan beberapa preferensi anggota Polri untuk mengikuti program pendidikan pengembangan pada program S2 dan S3 STIK, yaitu antara lain:

1. Perkap 6 tahun 2016 yang menjadi payung hukum program penyetaraan lulusan program pendidikan strata dua (S2) dan strata tiga (S3) kedinasan dengan lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi seyogiyanya diimplementasikan secara konsisten.
2. Peserta didik program pendidikan strata dua (S2) dan strata tiga (S3) kedinasan, khususnya yang dilaksanakan di STIK menginginkan adanya perhatian yang lebih dalam hal kesejahteraan.
3. Sistem perkuliahan sebaiknya dilakukan dengan *blended learning*.
4. Tunjangan jabatan sebaiknya tidak dikurangi dan disamakan dengan tingkat atau golongan personil yang terbawah.
5. Preferensi studi di luar STIK tidak mensyaratkan adanya jenjang kepangkatan tertentu.

Saran

Rekomendasi sebagai upaya perbaikan atas implementasi Perkap 6 Tahun 2016 yaitu:

1. perlunya sosialisasi secara sistematis bagi anggota terkait Perkap 6 Tahun 2016 sehingga maksud dan isi dapat dipahami dengan baik.
2. pelaksanan Perkap secara terprogram dan konsisten, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di antara para imlementator di tingkat Polda (Karo SDM), dan Polres (Kabag. SDM), serta calon Peserta Penyetaraan sebagai target group dari Perkap 6/2016.
3. perbaikan mekanisme koordinasi antar aktor dalam implementasi Perkap yaitu Lemdikpol, As SSDM, Sespim dan STIK.
4. perlu pertimbangan untuk membuat skema kluster dalam kebijakan matrikulasi dengan variasi S2 dan S3 STIK sebagai prioritas karena memiliki linearitas tertinggi.

**Daftar Pustaka**

Anderson, L., & Krathwohl, D. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives.* New York: Longman.

Araral, E., Fritzen, S., Howlett, M., Ramesh, M., & Wu, X. (2013). Routledge Handbook of Public Policy. New York: Routledge.

AUN-QA. (2015). *Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0.* Bangkok: ASEAN University Network.

Blakemore, B. and Simpson, K., 2010. A comparison of the effectiveness of pre-and post- employment modes of higher education for student police officers. *The police journal*, 83 (1), 29–41.

Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2018 yang diterbitkan oleh Dirjen Belmawa Kemenristekdikti.

Creswell, J. W. (2009). Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. London: Sage Publications.

Daniel, A. M., & Paul, A. S. (1989). Implementation and Public Policy : With a New Postscript. New York: University Press of America.

Dye, T. R. (2016). Understanding Public Policy : Fifteenth Edition. New York: Pearson Education.

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2018). *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Edisi III Tahun 2018.* Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.

Peraturan PresidenNomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. (2012, Agustus 10). Pendidikan Tinggi. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. (2012, Januari 17). KerangkaKualifikasi Nasional Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Provus, M. M. (1969). *The Discrepancy Evaluation Model: An Approach to Local Program Improvement and Development.* Washingto D.C.: Pittsburgh Public Schools. Retrieved July 14, 2016, from [http://eric.ed.gov/?id=ED030957.](http://eric.ed.gov/?id=ED030957)

Undang-UndangNomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Undang-UndangNomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

**PENATAAN KURIKULUM PENDIDIKAN PENGEMBANGAN UMUM STIK PTIK (S1, S2, S3) GUNA PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS SDM POLRI YANG UNGGUL DI ERA *POLICE 4.0***

**1Novi Indah Earlyanti,\* 2M. Erwan, 3Endry Boeriswati, 4Nurhattati**

**1,2Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK) South Jakarta, Indonesia 12160**

**3,4Universitas Negeri Jakarta, East Jakarta, Indonesia, 13220**

**e-mail:** [**noviindahearlyanti@stik-ptik.ac.id**](mailto:noviindahearlyanti@stik-ptik.ac.id)

**Abstrak**

Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, sikap, ketrampilan, hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden RI. Kemudian Kapolri menetapkan sebagai Program Kebijakan Transformasi menuju Polri yang Presisi, yaitu meningkatkan kapasitas SDM Polri yang unggul di era 4.0 melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Tuntutan Polisi masa kini dan mendatang harus memiliki pengetahuan adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Maka diperlukan kesiapan pendidikan berbasis kompetensi, yang memiliki pemahaman, pemanfaatan dan penggunaan *Internet of Things*, *augmented reality* dan *Artifical Intelligence*. Penelitian ini bertujuan untuk mengadakan tinjaun kurikulum yang telah berjalan dan mengembangkan kurikulum masa depan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini menggunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif untuk memperkuat hasil perhitungan. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara, studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adanya harapan masyarakat terhadap profil polisi yang dihasilkan oleh lulusan STIK yang mampu memelihara keamanan, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, para lulusan mampu menjalankan tugas dan berperan ganda sebagai penegak hukum dan pekerja sosial. Selain itu STIK dapat menghasilkan polisi masa depan yang mampu berpikir kritis, mengutamakan pencegahan, berintegritas, berkarakter kuat, dan terus belajar mengikuti dinamika yang berkembang di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan kurikulum STIK perlu memperhatikan variabel input dan luaran, perlu memiliki landasan pendidikan karakter, perlu mendeskripsikan profil lulusan secara operasional dan terukur, perlu pembenahan pada capaian pembelajaran lulusan agar dapat memayungi capaian pembelajaran mata kuliah.

***Kata kunci :* *kurikulum; pendidikan pengembangan; sumber daya manusia***

***Abstract***

*Education is an investment in human resources who have knowledge, attitudes, skills, this is in line with the priority programs of the President of the Republic of Indonesia. Then the National Police Chief established a Transformation Policy Program towards a Precise National Police, namely increasing the capacity of superior National Police human resources in the 4.0 era through the implementation of education and training. Current and future police demands must have adaptive knowledge of developments in science and technology. So competency-based educational readiness is needed, which has an understanding, utilization and use of the Internet of Things, augmented reality and Artificial Intelligence. The aim of this research is to conduct a review of existing curricula and develop future curricula that are in line with developments in science and technology. The research approach used is a quantitative approach supported by qualitative data to strengthen the calculation results. Data collection techniquesusing questionnaires, interviews, document studies. The results of this research are the public's expectations regarding the police profile produced by STIK graduates who are able to maintain security, enforce the law, provide protection, protection and service to the community in order to maintain domestic security, the graduates are able to carry out their duties and play a dual role as law enforcers. and social workers. Apart from that, STIK can produce future police who are able to think critically, prioritize prevention, have integrity, have strong character, and continue to learn to follow the dynamics that develop in society. It can be concluded that in preparing the STIK Curriculum, it is necessary to pay attention to input and output variables, it needs to have a basis for character education, it needs to describe graduate profiles operationally and measurably, it needs to improve the learning outcomes of graduates so that it can cover the learning outcomes of the courses.*

***Keywords: curriculum; development education; human resources***

**Pendahuluan**

Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, sikap, ketrampilan, Hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden RI. Kemudian Kapolri menetapkan sebagai Program Kebijakan Transformasi menuju Polri yang Presisi, yaitu meningkatkan kapasitas SDM Polri yang unggul di era 4.0 melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dimana polisi masa kini dan masa depan adalah polisi yang memiliki pengetahuan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu pendidikan kepolisian harus dapat membekali lulusannya dengan pengatahuan adaptif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di masa kini dan masa depan. Pendidikan kepolisian merupakan pendidikan keprofesionalan yang menghasilkan polisi professional dan menekankan pada pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat sangat penting untuk memastikan polisi menghadapi dinamika perubahan masyarakat yang kompleks (Blakemore dan Simpson 2010). Pendidikan kepolisian di Indonesia, salah satunya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang merupakan jenis pendidikan akademik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menyatakan pendidikan akademik di tingkat pendidikan tinggi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Pendidikan akademik mengutamakan peningkatan mutu dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan. Pendidikan akademik diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pendidikan akademik terdiri atas Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana. Program Pasca Sarjana meliputi Program Magister dan Program Doktor. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian adalah pendidikan akademik, maka diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 pasal 25 dan 26 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pendidikan POLRI mengacu standar nasional pendidikan tinggi dan pengembangan capaian pembelajaran mengacu pada KKNI, maka pengembangan kurikulum pun mengacu SNDIKTI dan KKNI.

Pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri atas tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar (Ornstein & Hunkins, 2014, p.128). Kurikulum dikembangkan untuk menentukan pengalaman atau capaian apa yang akan diperoleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Kurikulum dapat didefinisikan secara luas sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman dari peserta didik. Pandangan ini menganggap hampir semua hal di satuan pendidikan adalah merupakan bagian dari kurikulum (Allan C.Orstein, 2004). Kurikulum sebagai “ruh” pendidikan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan secara inovatif, dinamis, berkala dan berkelanjutan. Ini merupakan tanggapan terhadap perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) (*scientific vision*), kompetensi kebutuhan yang diperlukan masyarakat (*societal needs*), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder needs*). Seiring dengan perkembangan IPTEKS, memungkinkan dunia pendidikan tidak bisa terlena pada kurikulum yang sudah ada. Diperlukan adanya peninjauan atas kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi saat ini dan masa yang akan datang, dengan melakukan penyelarasan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, sosial, dan budaya. Hal ini dapat terlihat dalam kurun waktu enam tahun, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sudah berubah tiga kali (Suryaman, 2020), yakni: Permenristek Dikti Nomor 49 Tahun 2014–Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015–Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

Pengembangan kurikulum harus pula memperhatikan kebutuhan pembelajaran Era Industri 4.0 dan *Society* 5.0. Konsep pendidikan yang dibangun pada Era Revolusi industri 4.0 yaitu digitalisasi dan komputerisasi. *Era Society 5.0* dalam dunia pendidikan menekankan pada pendidikan karakter, moral, dan keteladanan. Hal ini dikarenakan ilmu yang dimiliki dapat digantikan oleh teknologi sedangkan penerapan *soft skill* maupun *hard skill* yang dimiliki tiap peserta didik tidak dapat digantikan oleh teknologi. Dalam hal ini diperlukan kesiapan dalam hal pendidikan berbasis kompetensi, pemahaman dan pemanfaatan IoT (*Internet of Things*), pemanfaatan *augmented reality* dan penggunaan serta pemanfaatan AI (*Artifical Intelligence*).

STIK mengadakan tinjaun kurikulum yang telah berjalan dan mengembangkan kurikulum masa depan yang sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi yang ada. Oleh karena itu STIK perlu mengetahui relevansi lulusan dengan kebutuhan masyarakat dan harapan terhadap profesi polisi yang professional. STIK sebagai perguruan tinggi juga menerapkan kebijakan Permendikbud 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Merdeka berarti mampu mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai bidang keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan diambil. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era industri 4.0. Penelitian ini diorientasikan pada penataan ulang kurikulum untuk “menyesuaikan” dengan kebijakan pemerintah dan kemajuan masyarakat global. Maka penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penataan kurikulum pendidikan pengembangan umum STIK-PTIK di era 4.0 untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang unggul.

**Tinjauan Literatur**

Pada abad 21peserta didik dituntut memiliki kecakapan dan keterampilan baik *hard skill* maupun *soft skill* yang mumpuni agar dapat terjun ke dunia pekerjaan dan siap berkompetisi dengan negara lain. Keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada abad 21 menurut Bernie Trilling dan Charles Fadel (2009:48): *“the core subjects and interdisciplinary 21st century themes are surrounded by three sets of skills most in demand in the 21st century: (i) learning and innovation skills, (ii) information, media and technology skills, (iii) life and career skills*”. National Education Association (2002) juga menyatakan bahwa terdapat 18 macam 21st Century Skills yang perlu dibekalkan pada setiap individu, dimana salah satunya ialah *Learning and Innovation Skills* yang terdiridari 4 aspek, yaitu *critical thinking* (berpikir kritis), *communication* (komunikasi), *collaboration* (kolaborasi/ kerjasama), dan *creativity* (kreativitas). *Learning and Innovation Skills 4 Cs* dapat dikuasai melalui pendidikan. Oleh sebab itu diperlukan suatu kurikulum yang dapat mengakomodir semua kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada suatu program pendidikan. Pada zaman Romawi kuno kurilulum merupakan kata yang digunakan untuk lintasan pacu kereta. “Julius Caesar” sebagai kaisar Romawi pada saat itu, tidak akan menyangka jika istilah kurikulum akan berkembang menjadi istilah rumit dan khas yang ada dalam bidang pendidikan seperti dewasa ini. Pengertian kurikulum menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Harold B. Alberty (1965) memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggungjawab sekolah *(all of the activities that are provided for the students by the school).* Kurikulum tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas saja, tetapi mencakup juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar kelas.
2. Saylor, Alexander, dan Lewis (1974) yang menganggap kurikulum sebagai segala upaya yang dilakukan sekolah untuk mestimuli siswa agar belajar, baik dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah.
3. Henry C. Morris (1940), “….*the content of instruction without reference to instructional ways or means”*
4. Peter F. Oliva (1997:12), “…*curriculum it self is a construct or concept, a verbalization of an extremely complex idea or set of ideas”.*
5. Hilda Taba (1962), “…..*A curriculum is a plan for learning; therefore, what is known about the learning process and the development of the individual has bearing on the shaping of curriculum”*

Dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 1 ayat (19), konstitusi menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi kurikulum dalam pendidikan tidak lain merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Fungsi kurikulum bagi masyarakat bisa mengetahui apakah pengetahuan, sikap, dan nilai serta keterampilan yang dibutuhkannya relevan atau tidak dengan kurikulum suatu sekolah tersebut. Perubahan kurikulum adalah suatu keniscayaan mengingat *no change no future*, menyadari perkembangan kurikulum lebih diarahkan pada upaya pemberdayaan peserta didik agar mampu secara aktif dan mandiri mempelajari materi pelajaran itu di luar kelas bahkan di luar sekolah. Caswel & Compbell dalam Ansyar (1989) menemukan bahwa sangat kecilnya kesesuaian antara kurikulum formal (dokumen) dengan implementasinya di lapangan. Kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.

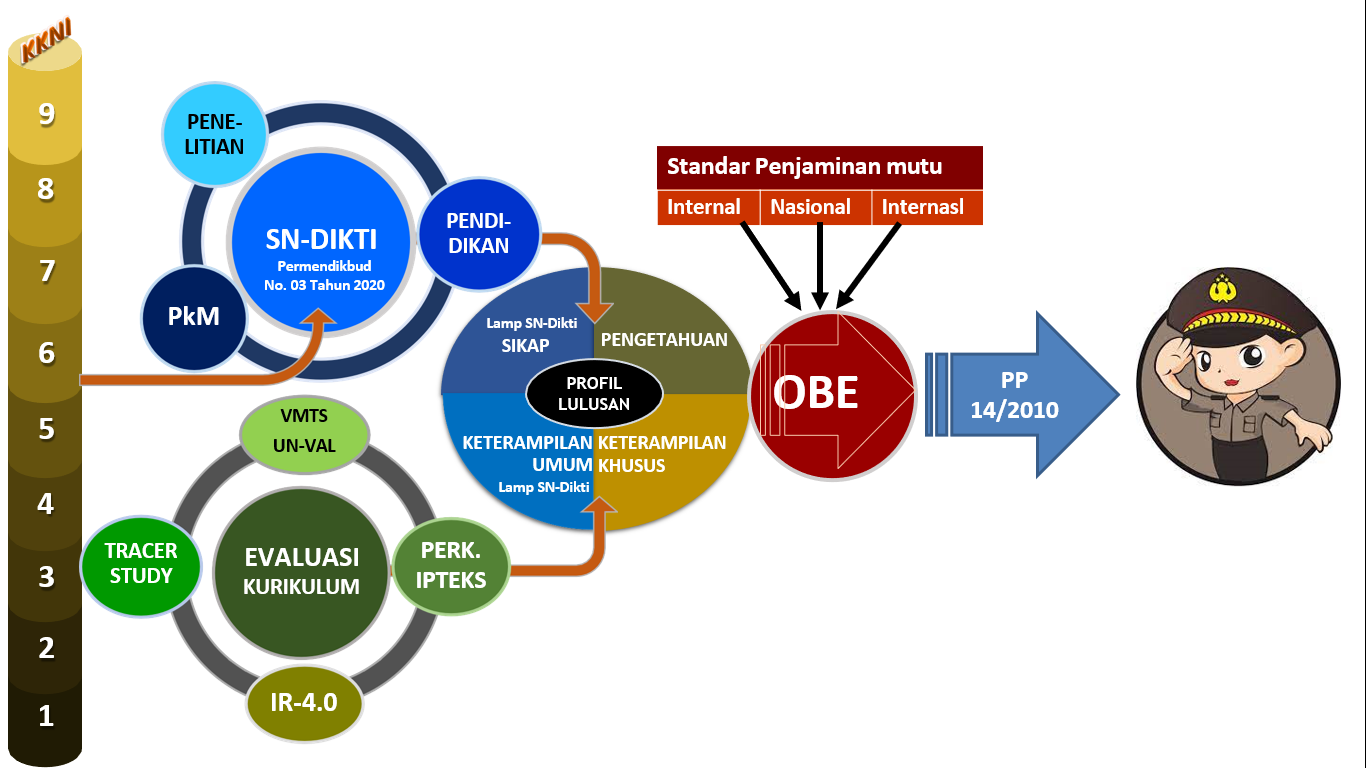
Landasan pengembangan Kurikulum KKNI menggunakan framework pembelajaran abad ke-21 yang menurut (BSNP:2010) adalah: (a) Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*critical-thinking and problem-solving skills*), mampu berpikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah; (b) Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (*communication and collaboration skills*), mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak; (c) Kemampuan mencipta dan membaharui (*creativity and innovation skills*), mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif; (d) Literasi teknologi informasi dan komunikasi *(information and communications technology literacy*), mampu memanfaatkan teknolog informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari; (g) Kemampuan belajar kontekstual (*contextual learning skills*), mampu menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi, dan (h) Kemampuan informasi dan literasi media, mampu memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan beragam pihak dalam mata pelajaran yang diajarkan pada peserta didik di setiap jenjang pendidikan.

Di sisi lain paradigma pedagogi 21 dalam kurikulum adalah: (1) Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dari yang semula berpusat pada guru; (2) Peserta didik diarahkan untuk lebih aktif menyelidiki, berpikir kritis daripada hanya faktual semata; (3) Penggunaan alat multi media dalam pembelajaran; (4) pembelajaran yang bersifat interaktif dan kooperatif, tidak hanya dari satu arah; (5) pengetahuan multidisiplin dari yang semula mempelajari dari satu sisi pandang ilmu; (6) pembelajaran berbasis tim untuk menuju lingkungan jejaring; serta (7) adanya pertukaran pengetahuan antara pengajar dan peserta didik, tidak selalu penyampaian pengetahuan.

Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut, di mana lulusannya akan siap menerima perubahan peran manusia dalam pekerjaan di era industry 4.0, di mana sudah terjadi pergeseran pekerjaan atau *job shifting*. Semua orang yang memiliki *background* akademik tidak lagi bergantung pada pekerjaan yang sesuai dengan gelarnya saja. Profesi lama bisa akan hilang dan pekerjaan baru akan datang. Inilah yang disebut dengan *disruption technology* atau gangguan teknologi yang berdampak munculnya profesi atau bidang pekerjaan baru yang berbasis pada kombinas iteknologi antara lain: (1) *Internet of Things*, (2) *Artificial Intelligence*, (3) *New Materials*, (4) *Big Data*, (5) *Robotics*, (6) *Augmented Reality*, (7) *Cloud Computing,* (8) *Additive Manufacturing 3D Printing*, (9) *Nanotech & Biotec*h, (10) *Genetic Editing*, (11) *E-Learning* di mana hal ini akan diintergrasikan dalam pembelajaran dan pengajar mengetahui bahwa hal tersebut telah ditumbuhkan pada peserta didiknya.

Kurikulum pendidikan tinggi didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Evaluasi kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder needs*) yang responsif terhadap kondisi VUCA (*Volatile, Uncertain, Complexity,* dan *Ambiguity*) dalam perkembangan lingkungan yang makin kompleks dan tidak pasti. Meskipun awalnya istilah ini dikenal di dunia militer (tahun 90-an) dan bisnis (sekitar tahun 2018), namun dunia pendidikan juga perlu memperhatikan kondisi ini. Kurikulum kekinian adalah perangkat pembelajaran yang mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kehidupan masyarakat, dan kebutuhan pengguna. Pengembangan kurikulum juga harus memiliki prinsip khusus dalam mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi. Secara umum prinsip pengembangan kurikulum kekinian di perguruan tinggi harus memperhatiakan prinsip relevansi, efektivitas, efisiensi, kontinuitas, dan fleksibilitas.

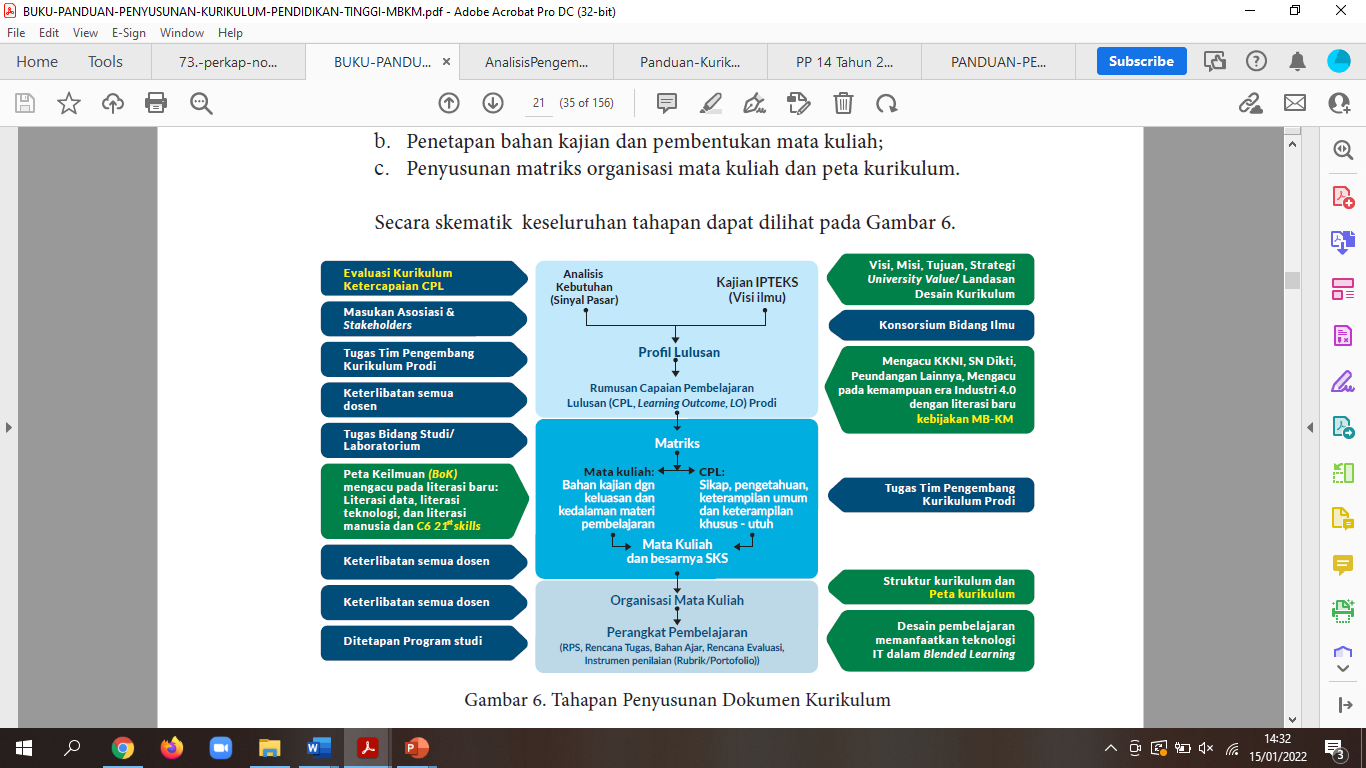
Kurikulum kekinian merupakan kurikulum yang mengakomodasi perkembangan IPTEK dan peradaban masyarakat. Pendekatan kurikulum kekinian adalah kurikulum yang beroreintasi pada luaran atau *Outcome based Education* (OBE). Dalam Kurikulum OBE (*Outcome-Based Education*) dikenal istilah Program Education Outcome.



**Sumber: Hasil olahan Penulis**

**Gambar 1. Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah Tinggi IlmuKepolisian, 2022.**

Komponen kurikulum terdiri atas profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, mata kuliah, pembelajaran, dan penilaian. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Bahan Kajian (*subject matters*) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 2001:12-13). Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (SKS). Dengan demikian mata kuliah digunakan untuk mencapai CPL.

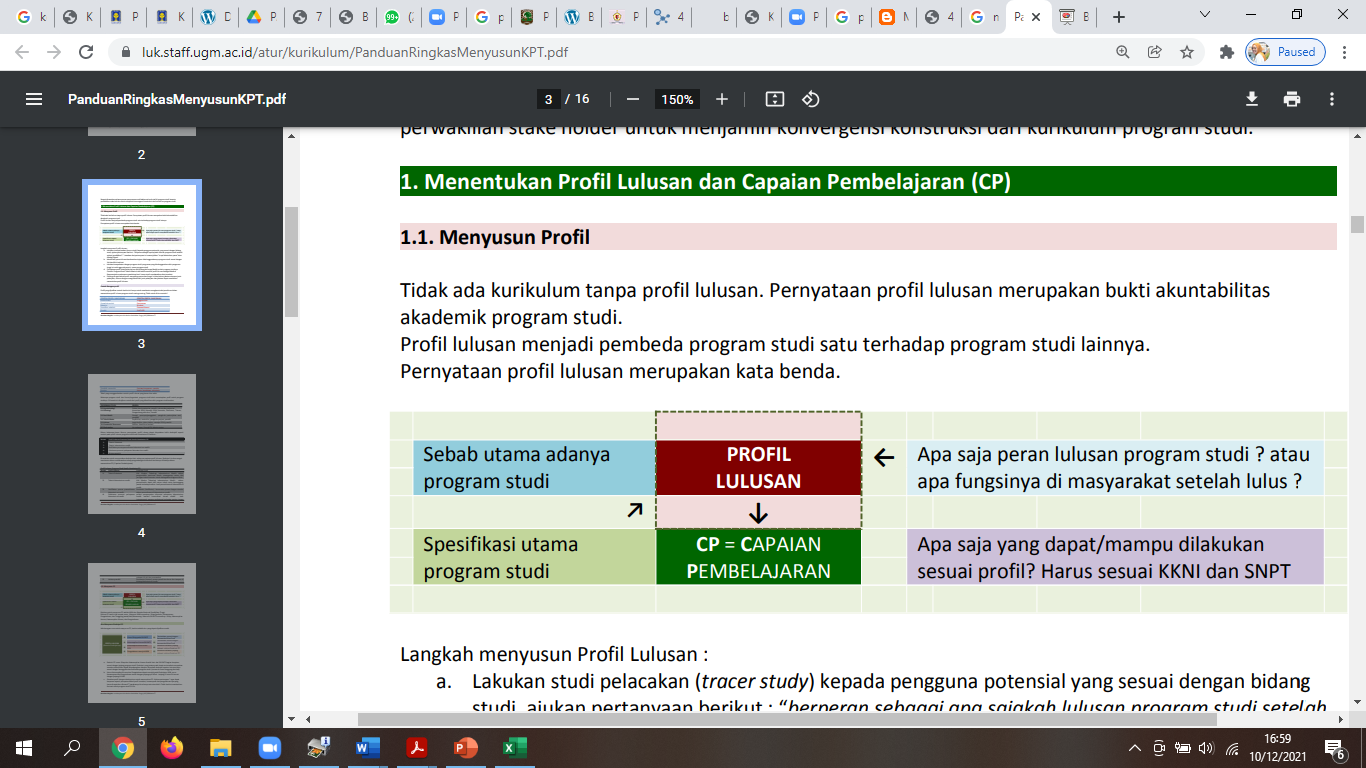


**Sumber: Hasil olahan Penulis**

**Gambar 2. Analisa Kebutuhan Sinyal Pasar**

Untuk mengetahui relevansi lulusan dengan kebutuhan masyarakat, program studi selaku pengembang kurikulum senantiasa melakukan evaluasi kurikulum. Evaluasi ini gunanya untuk meperoleh umpan balik dari pengguna. Oleh karena itu, kurikulum Prodi perlu ditinjau secara berkala untuk mengetahui relevansi kurikulum terhadap kompetensi lulusan yang dibutuhkan oleh pasar. Kurikulum prodi memiliki masa berlaku maksimal 5 (lima) tahun. Sebelum masa berlaku habis, Prodi wajib melakukan peninjauan kurikulum. Dengan demikian, peninjauan kurikulum harus dilakukan oleh Prodi sekurang kurangnya dalam waktu 5 (Lima) tahun sejak kurikulum diberlakukan. Apabila dirasa perlu, peninjauan kurikulum dapat dilakukan dalam waktu lebih cepat. Hasil dari peninjauan kurikulum adalah pengembangan kurikulum, yang dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu reorientasi dan rekonstruksi kurikulum.

Tidak ada kurikulum tanpa ada profil lulusan. Profil lulusan merupakan bukti akuntabilitas akademik program studi. Profil lulusan menjadi pembeda program studi satu terhadap program studi lainnya. Profil lulusan adalah deskripsi mengenai atribut, mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap diperoleh dari proses pembelajaran di program studi sebagai bekal lulusan untuk menempuh studi lanjut atau bekerja pada masa yang akan datang. Lulusan Prodi dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan standar Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). CPL memuat multi kemampuan minimal yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan serangkaian pengalaman belajar (internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan khusus, dan umum) yang membentuk keutuhan untuk mendukung pencapaian profil lulusan. Kompetensi lulusan dideskripsikan dalam bentuk CPL yang dikelompokkan kedalam 4 aspek, yaitu: sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. Tingkat kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan lulusan program studi sesuai dengan stratanya, Program Sarjana = Jenjang Kualifikasi 6, Program Spesialis = Jenjang Kualifikasi 7, Program Magister = Jenjang Kualifikasi 8, Program Doktor = Jenjang Kualifikasi 9.



**Sumber: Hasil olahan Penulis, 2023**

**Gambar 3. Profil Lulusan dan CPL**

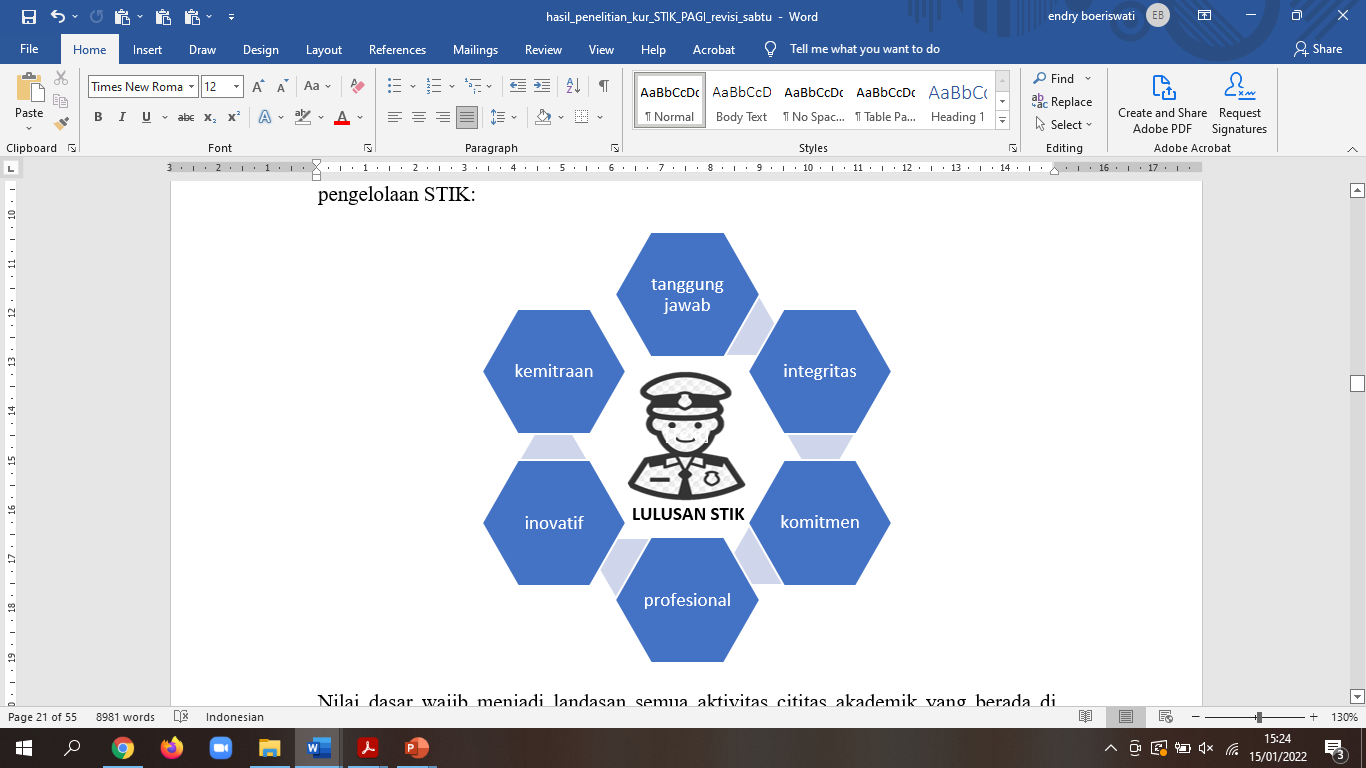
Perlu dirumuskan terlebih dahulu *Body of Knowledge* (BoK) yang mencakup keseluruhan dari bahan kajian yang akan dipelajari pada suatu program studi. Dengan merumuskan BoK dapat diidentifikasikan topik umum bahan kajian yang dipelajari dalam suatu bidang studi (penciri bidang studi) serta topik spesifik yang menjadi fokus pada suatu bidang studi dan membedakan prodi tersebut dengan prodi lainnya (penciri program studi).

**Metodologi Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif untuk memperkuat hasil perhitungan. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara, dan studi dokumen. Neuman (2014) membagi teknik pengumpulan data menjadi dua kategori sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, yaitu kuantitatif mengumpulkan data dalam bentuk digital dan kualitatif mengumpulkan data dalam bentuk teks atau gambar. Kuesioner yang digunakanndalam penelitian ini adalah kuesioner dengan skalaasikap kategori *Likert*. Seperti yanggdikemukakan oleh Sugiyono (2013: 132) bahwa: Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Responden Penelitian adalah para alumni STIK-PTIK program S1, S2, dan S3 yang berdinas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Metro Jaya. Untuk sumber informan yang diwawancara adalah para Kapolda, PJU Polda, dan Alumni S1, S2 dan S3 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang bertugas di Polda Jawa Tengah, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Metro Jaya. Para PJU Lemdiklat dan SDM Mabes Polri. Para Kapolres, Para PJU Polres, dan Alumni S1, S2 dan S3 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang bertugas di Polres di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Metro Jaya.

**Hasil dan Pembahasan**

*University value* merupakan nilai dasar universitas dalam menjalankan program pendidikan. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian memiliki *university value* yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Bab II Identitas Bagian Kesatu Nama, Kedudukan, Hari Jadi, dan Nilai Dasar, ayat (4) yaitu: Nilai dasar penyelenggaraan dan pengelolaan STIK. Nilai dasar wajib menjadi landasan semua aktivitas cititas akademik yang berada di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian tertuang dalam landasan kurikulum dan pedoman akademik.

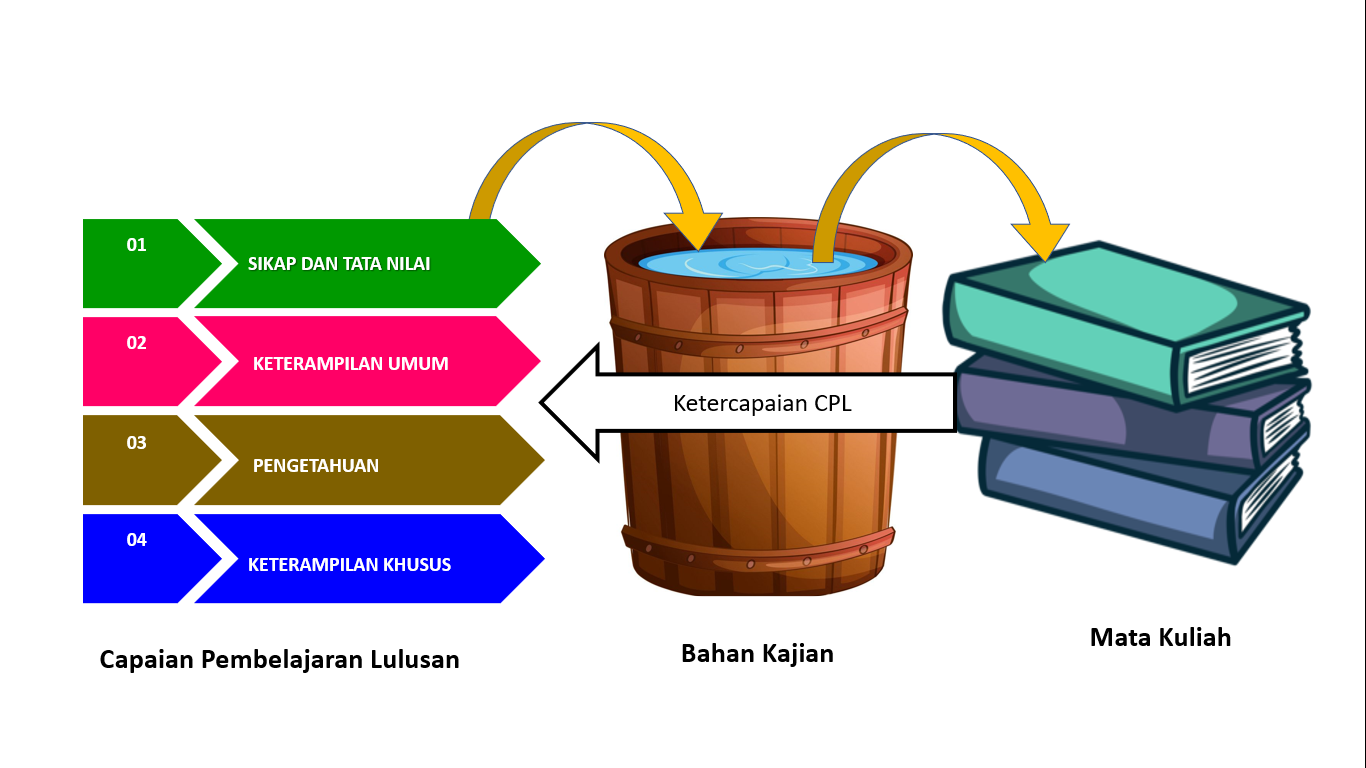


**Sumber: Hasil olahan Penulis, 2022**

**Gambar 4. Profil Lulusan STIK**

Nilai dasar STIK wajib termuat dalam Profil lulusan, yang mana profil lulusan merupakan kompetensi yang dimiliki lulusan dalam bidang pekerjaan yang dibentuk melalui perkuliahan. Adapun deskripsi Profil Lulusan Program Sarjana Ilmu Kepolisian STIK menurut alumni telah terpenuhi yang dinyatakan oleh 96% responden.

Nilai dasar ini telah diimplentasikan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) berupa sikap yang wajib dibentuk dalam matakuliah dan suasana akademik di lingkungan program studi. CPL adalah multi kemampuan minimal yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan serangkaian pengalaman belajar (internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan khusus, dan keterampilan umum) yang membentuk keutuhan. CPL Program Sarjana STIK ditetapkan berdasarkan Kep/34/III/2021 mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dijadikan acuan menetapkan kedalaman dan keluasan bahan kajian. Bahan kajian yang dipilih harus menggambarkan keutuhan badan keilmuan (*body of knowledge*) dari prodi dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu dan teknologi yang terkait. CPL program studi merupakan jabaran lengkap profil lulusan yang berkenaan dengan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah lulus. Hasil kuesioner menyatakan bahwa 92,2% responden merasakan bahwa mata kuliah yang ada di program S1 memuat unsur CPL yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Sementara ada7,8% yang menyatakan kurang memuat unsur CPL.



**Sumber: Hasil olahan Penulis, 2022**

**Gambar 5. Ketercapaian CPL**

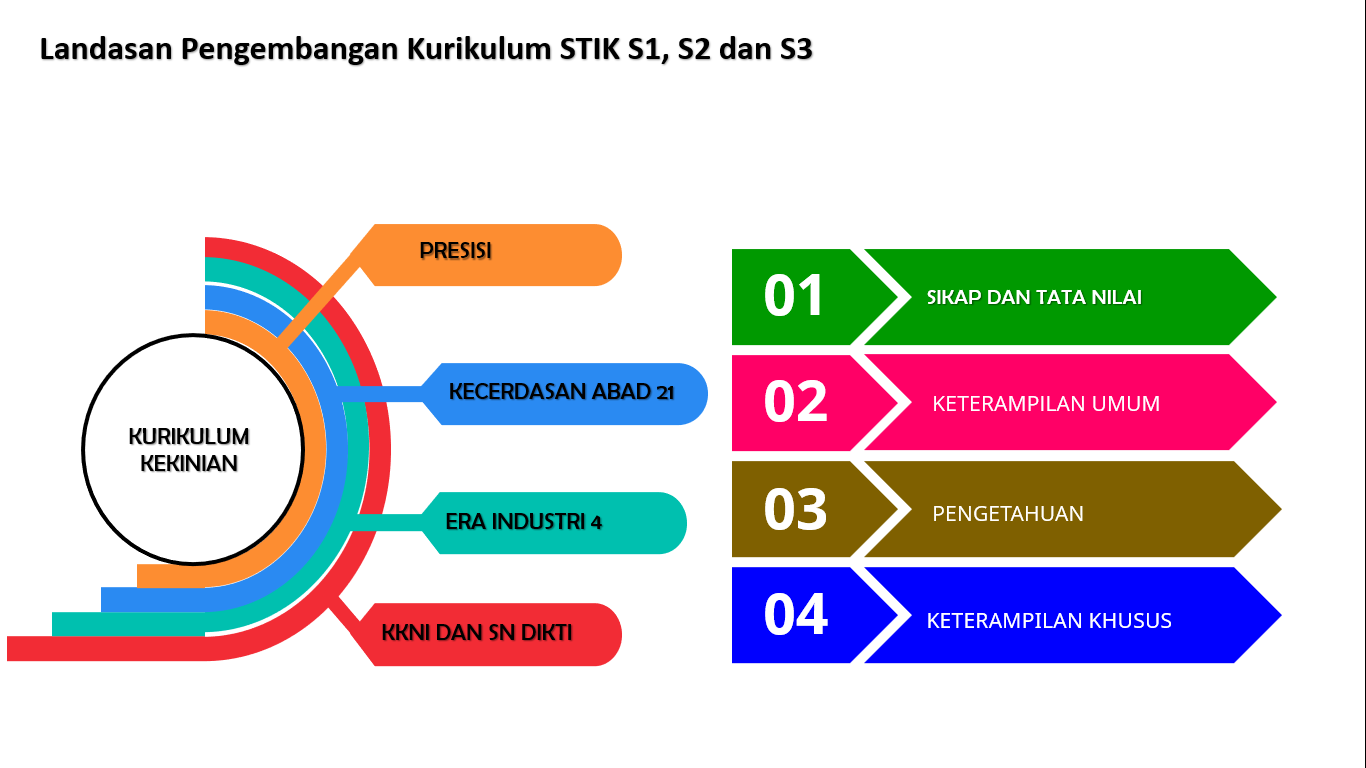
Kebijakan akademik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi telah terakomodasi, sehingga upaya pencapaian tujuan STIK dapat terwujud, yaitu menciptakan lulusan yang utuh yang memiliki kompetensi keilmuan dan kecerdasan pribadi dan sosial sehingga dapat berperan dalam masyarakat dan kehidupan. Nilai-nilai tersebut dirumuskan dalam capaian pembelajaran universitas/*University Learning Outcome* (ULO) atau capaian pembelajaran universitas. Lulusan mampu menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial *(sosial worker),* pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian), harapan masyarakat terhadap profil polisi yang dihasilkan oleh STIK adalah polisi yang mampu memelihara keamanan, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polisi masa depan yang mampu berpikir kritis (*critical thinking*), mengutamakan pencegahan (*prevention first*), berintegritas dan berkarakter kuat *(integrity and character*), dan polisi dituntut untuk terus belajar karena dinamika yang berkembang di masyarakat seperti perkembangan era industry 4.0, society 5.0, serta masyarakat digital.

Model pendidikan karakter di perguruan tinggi melibatkan empat pilar yaitu (1) pengajaran dan kegiatan belajar di dalam kelas, (2) kegiatan di seluruh lingkungan kampus, (3) UKM kegiatan, termasuk kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler, dan (4) kegiatan sehari-hari. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan karakter STIK perlu mengembangkan *grand design* pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan serta menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Nilai-nilai karakter yang diterapkan di STIK sebagai lembaga pendidikan kepolisian, hanya memilih pendidikan nilai-nilai karakter inti (*core values*) yang akan dikembangkan dalam implementasi pendidikan karakter. Penyelenggaraan pendidikan karakter di STIK diusulkan dilakukan secara terpadu melalui tiga jalur, yaitu: terintegrasi dalam pembelajaran, manajemen program studi, serta pada kegiatan kemahasiswaan. Integrasi yang dilakukan juga memperhatikan aspek kekinian seperti muatan Presisi, kecerdasan abad 21 (*critical thinking, collaboration, creative thinking, character education, citizenship, and communication*), era Industri 4.0 (ICT), dan regulasi pengembanan kurikulum yang menjadi acuan penyusunan CPL. Cakupan kecerdasan abad 21 dalam kegiatan akademik di perguruan tinggi meliputi:

1. *Knowledge of the natural world and human cultures and societies*, penguasaan keilmuan termasuk pengetahuan alam, budaya dan kemasyarakatan, kepribadian, dan kemampuan adaptasi.
2. *Intellectual and practical skills,*  keterampilan intelektual termasuk kemampuan penelitian, analisis, evaluasi, berpikir kritis dan kreatif, komunikasi tulis dan lisan, literasi kuantitatif, literasi informasi, kerja tim dan kemampuan pemecahan masalah.
3. *Personal and social responsibility*, termasuk kemampuan bertindak etis dan pemahaman antar budaya dan kompetensi untuk berpartisipasi dalam masyarakat global, pengetahuan sipil dan keterlibatan secara lokal maupun global, serta kebiasaan refleksi diri yang kritis dan pembelajaran seumur hidup.
4. *Ability to integrate knowledge and skills*, termasuk kemampuan mensintesiskan dan mempresentasikan, menghubungkan pemikiran intradisipliner dan interdisipliner, serta menghubungkan secara global.
5. *Capacities of effective practice*, termasuk kreativitas dan imajinasi, mengelola diri, ketahanan dan ketekunan, dan kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain di semua perbedaan dan untuk mengelola kompleksitas dan ketidakpastian.

Sebagai penciri kecerdasan abad 21 adalah *internet of things* (IoT). IoTdan Industri 4.0 merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas konektivitas internet antara benda-benda di sekitar kita dengan aktivitas/pekerjaan secara otomatis melalui pertukaran data yang sangat cepat. Seluruh sistem tersebut terhubung dalam jaringan siber dan fisik dengan memanfaatkan komputer (*cloud computing*). Kecerdasan abad 21 dapat menyeimbangkan pada pengembangan kurikulum yang dihasilkan oleh STIK, di mana harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kurikulum dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir kritis dan kreatif, keterampilan sosial, akademik, dan spiritual secara holistik. Karenanya, isi kurikulum harus memberi kesempatan kepada mahasiswa berinteraksi secara langsung dengan lingkungan dan mengkondisikan mahasiswa untuk menjadi peka dan tanggap terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Pengembangan kurikulum melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan untuk mengetahui bahwa kurikulum telah mengakomodasi kebutuhan lulusan dalam menjalankan profesinya perlu melihat relevansi dengan dunia pekerjaan. Tingkat relevansi matakuliah dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian 54,4% sangat sesuai (skor 10) dan 22,3% sesuai (skor 9) dan 17,5 skor 8. Hal ini menunjukkan bahwa mata kuliah tersebut memiliki relevansi yang baik.

Prinsip relevansi kurikulum ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu serasi antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi atau pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik, strategi atau metode yang digunakan serta alat penilaian untuk melihat ketercapain tujuan. Relevansi internal ini menunjukan keutuhan suatu kurikulum. Relevansi eksternal yaitu tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum itu sendiri relevan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Responden menyatakan membentuk sikap dalam pekerjaan sebesar 69,9% ; menyatakan kelompok mata kuliah sebesar 80% ; membentuk sikap dalam bekerja sebesar 24,3 % ; demikian pula dengan kontribusi dalam pembentukan pengetahuan dan keterampilan 63,6%. Berdasarkan temuan, dapat disimpulkan bahwa semua mata kuliah di Program Sarjana STIK memberikan kontribusi pembentukan sikap, pengetahuan, keterampilan rata-rata 70%- 80%.



**Sumber: Hasil olahan Penulis, 2022**

**Gambar 6. Kurikulum Kekinian**

Relevansi kurikulum secara internal dan eksternal dapat terlihat pada profil lulusan, yang merupakan bukti akuntabilitas akademik program studi dan menjadi penciri keunggulan yang ditetapkan oleh program studi. Profil lulusan STIK sebagai lembaga pendidikan kedinasan yang mana keahlian lulusan merupakan pengembangan kedinasan yaitu bidang kepolisian.

Adapun profil lulusan program Sarjana adalah (1). Pimpinan tingkat menengah pada organisasi KOD adalah sarjana ilmu kepolisian yang mampu menjalankan fungsi kepemimpinan pada KOD di Era 4.0. (2). Penyelidik professional Sarjana Ilmu Kepolisian yang mampu melaksanakan dan mengaplikasikan ilmu, teknik dan taktik, serta metode penyelidikan dan penyidikan dalam proses penanganan perkara. (3). Ilmuwan kepolisian adalah sarjana ilmu kepolisian yang mampu mengembangkan konsep-konsep ilmu kepolisian dalam melaksanakan tugas.

**Table. 1 Profil Lulusan STIK**

|  |  |
| --- | --- |
| **Unsur-Unsur Profil Lulusan** | **Pernyataan Lulusan** |
| Bidang kesarjanaan yang ditekuni | Sarjana Ilmu Kepolisian telah terpenuhi namun perandalam pekerjaan lulusan tidak konsisten dalam satu bidang sehingga ilmu yang ditekuni selama kuliah bersifat umum sulit untuk menjadi spesialisasi. |
| Kemampuan utama yang harus dikuasai lulusan program studi | menguasai ilmu yang terdapat dalam bidang kajian program studi. Program Studi yang ditawarkan bersifat makro. Namun demikian lulusan menyadari mengingat setelah lulusan kompetensi yang diaplikasikan tidak dalam satus pesialisasi keilmuan. |
| Pengembangan kemampuan utama yang membentuk keutuhan kapabilitas lulusan program studi | mampu menerapkan ilmunya untuk memecahkan masalah yang terdapat pada bidang studi-bidang studi secara inovatif berlandaskan nilai-nilai Pancasila |

**Sumber: Hasil Olahan Penulis**

Profil lulusan program Magister dapat dipenuhi oleh mata kuliah yang diberikan pada proses pembelajaran. Kompetensi yang termuat melalui matakuliah untuk pemenuhan profil lulusan sebagai pemimpin dan manajer tingkat menengah di kepolisian sangat membutuhkan kemampuan pengambilan keputusan yang kritis dan akurat, dan kemampuan pemecahan masalah serta pengembangan solusi pada permasalahan di masyarakat perlu penguatan dalam semua matakuliah sesuai dengan materi kuliah. Sesuai dengan standar kompetensi yang tertuang dalam KKNI level 8 yaitu kemampuan kerja yang harus terbentuk adalah: *mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset sehingga menghasilkan karya inovatif dan teruji* terbentuk melalui penulisan tesis. Dan untuk data untuk profil program Doktor tidak ditemukan di lapangan saat penelitian, karena tidak terdapat responden yang mewakili lulusan program doktor. Deskripsi yang dinyatakan dalam profil lulusan program studi Sarjana, Magister, dan Doktor perlu penyesuaian dengan memperhatikan bidang dalam jenjang pendidikan, kemampuan utama lulusan, dan kemampuan tambahan yang ditawarkan, sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan profil lulusan secara gamblang, maka diperlukan pula tenaga pendidik yang dapat memberikan ilmu pengetahuan sesuai kajian ilmu yang dibutuhkan agar peserta didik dapat menguasai Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Sains (IPTEKS) serta mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang bermoral tinggi dan berbudaya demokratis. Perguruan Tinggi berfungsi sebagai produsen utama sumber daya manusia bagi kebutuhan masyarakat dan untuk dapat meningkatkan, menyebarluaskan, dan mengembangkan IPTEKS. Adapun tugas utama tenaga pendidik (dosen) adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan, dosen harus memiliki kedalaman spiritual keagamaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang harus dihayati, dikuasai, dan diteladani.
2. Tugas pendidikan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen, termasuk dosen yang sudah meraih jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar (Professor) tetap harus melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib menunaikan beban kerja pada pendidikan, pengajaran dan penelitian dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester pada jenjang Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), maupun Strata 3 (S3), pada perguruan tinggi tempat bertugas. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja yang dimaksud sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
   1. kegiatan pokok dosen mencakup:
      1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
      2. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
      3. pembimbingan dan pelatihan;
      4. penelitian; dan
      5. Pengabdian kepada masyarakat;
   2. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
   3. kegiatan penunjang.

Dosen juga perlu memperhatikan motode pembelajaran yang tepat diberikan kepada mahasiswa. Metode dalam bentuk *Cases Based* dan *Project Based* dianggap efektif diberikan, sehingga mahasiswa mendapat pengalaman langsung dari kondisi real di lapangan yang diperoleh dari tempat tugas sebelumnya yang bisa didiskusikan dan juga mendatangkan praktisi untuk ikut mengajar pada mata kuliah yang sesuai dengan bidang ilmu. Hal ini sesuai dengan konsep kampus merdeka dan program Kementrian Pendidikan Kebudayaaan, Riset dan Teknologi yang tertuang dalam 8 IKU Perguruan Tinggi khususnya pada IKU 4 yaitu praktisi mengajar di dalam kampus dan IKU 7 kelas kolaboratif dengan lembaga yang relevan sebagai internalisasi mata kuliah dengan pengalaman di lapangan.

Metode pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa, pada akhirnya perlu dilakukan evaluasi untuk melihat ketercapaian hasil pembelajaran yang diterima mahasiswa. Bentuk evaluasi dengan memberikan penilaian proses yang dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Penilaian ini dapat mendeskripsikan hasil belajar mahasiswa, sehingga dapat diketahui kelebihan, kekurangan dan mengetahui keberhasilan dari proses pembelajaran. Komponen penilaian yang diharapakan berbasis kompetensi, maka setiap kompetensi mahasiswa mendapat umpan balik. Komponen penilaian terdiri atas UTS, UAS, kuis, dan project, sedangkan untuk kuis hendaknya diberikan pada akhir setiap kompetensi.

**Kesimpulan dan Saran**

Pembenahan kurikulum perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri untuk lebih mensinergikan pencapaian visi dan misi, dan perlu memperhatikan variabel input dan luaran. Pendidikan karakter perlu menjadi nilai universitas sebagai nilai dasar penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, dan menjadi *hidden curriculum* dalam mata kuliah dan pembiasaan kegiatan akademik. Sehingga perlu ada peninjauan kejelasan peran lulusan dalam fungsi tugas lulusan yang beragam, yang terimplementasi pada pengaturan mata kuliah terkait dengan proposi SKS dan penguatan jenis mata kuliah yang dibutuhkan di lapangan. Serta menyempurnakan sistem penilaian yang ditetapkan berdasarkan keputusan STIK. Dimana penilaian merupakan umpan balik bagi lembaga dan mahasiswa, fungsi umpan balik yang ada belum maksimal dilakukan oleh STIK.

Dirasa perlu melakukan penyusunan Sisdik Polri sebagai rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh dan terpadu dengan kebijakan tata kelola kurikulum STIK dibedakan dengan satuan pendidikan lainnya. Perlu adanya penyamaan persepsi terhadap kebijakan akademik dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bersama dengan Lembaga Sistem Pendidikan di Polri untuk penyusunan profil lulusan, capaian pembelajaran, pembentukan mata kuliah, bahan ajar, dan penilaian. Serta adanya *value university* sebagai landasan pendidikan program sarjana, magister, dan doktor dalam bentuk pilar pendidikan, meliputi (a) professional akademik, (b) kesadaran sosial, (c) kepedulian lingkungan, (d) kemandirian dan inovatif, dan (e) etika dan moral. Pilar pendidikan ini digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan mahasiswa.

**Daftar Pustaka**

Anderson, L., & Krathwohl, D. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives.* New York: Longman.

AUN-QA. (2015). *Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0.* Bangkok: ASEAN University Network.

Blakemore, B. and Simpson, K., 2010. A comparison of the effectiveness of pre-and post-employment modes of higher education for student police officers. *The police journal*, 83 (1), 29–41.

Bin, J. O. (2015, Desember 24). *Living Better*. (AUN-QA Network) Retrieved Maret 2016, 2016, from http://livingbetterforhappiness.blogspot.co.id/2015/12/the-ten-principles-behind-aun-qa-model.html.

Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2018 yang diterbitkan oleh Dirjen Belmawa Kemenristekdikti.

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2018). *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Edisi III Tahun 2018.* Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). Penerapan KerangkaKualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2015). Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. (2018, Oktober 30). Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 TentangStandar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018*. Jakarta, DKI, Indonesia: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.

Peraturan PresidenNomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Peraturan Rektor nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembelajaran di Lingkungan Universitas Islam Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. (2012, Agustus 10). Pendidikan Tinggi. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. (2012, Januari 17). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Provus, M. M. (1969). *The Discrepancy Evaluation Model: An Approach to Local Program Improvement and Development.* Washingto D.C.: Pittsburgh Public Schools. Retrieved July 14, 2016, from http://eric.ed.gov/?id=ED030957.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-UndangNomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

**ANALISIS MOTIVASI TERORIS PEREMPUAN INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF TEORI IDENTIFIKASI DIFERENSIAL**

**1Alfira Yulisza Atry Hutabarat, 2Nadia Utami Larasati**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta 12260**

**e-mail:** [1943500791@student.budiluhur.ac.id](mailto:1943500791@student.budiluhur.ac.id)

**Abstrak**

Terorisme merupakan salah satu kasus kejahatan yang seringkali menarik perhatian khalayak. Ada beragam alasan yang mendasari para pelaku teror menjalankan aksinya. Pelaku terorisme biasanya didominasi oleh laki-laki. Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai teroris perempuan di Indonesia, khususnya mengenai motivasi yang mendasari tindakan mereka. Teori *Differential Identification* yang dikemukakan oleh Daniel Glaser akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis motivasi dari para teroris perempuan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian dengan pengumpulan data melalui studi data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai studi terdahulu dan dokumen hasil penelitian tentang keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme pada enam wilayah Polda yang dilakukan oleh CTRS-PTIK. Penelitian ini menunjukkan bahwa aksi teror yang dilakukan oleh perempuan maupun keterlibatan perempuan dalam terorisme didasari oleh rasa pengabdian kepada keluarga, yang dominasinya berasal dari laki-laki atau biasa disebut budaya patriarki dan dilatarbelakangi oleh paham fanatisme agama yang berbuntut pada pengidentifikasian diri kepada kelompok yang mengaku sebagai umat islam yang paling benar. Teroris perempuan dikonstruksi oleh lingkungan sosial mereka dan yang mereka identifikasikan sebagai bagian dari dirinya.

***Kata kunci: teroris perempuan, motivasi, tteori identifikasi diferensial***

***Abstract***

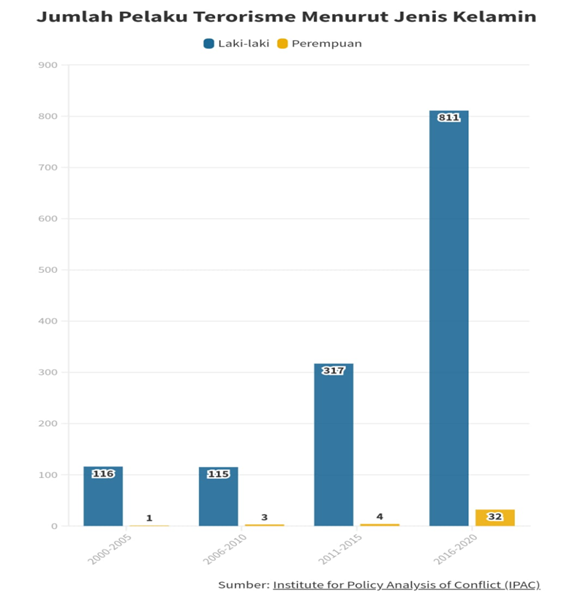
*Terrorism is a crime that often attracts public attention. There are various reasons that underlie the terrorists carry out their actions. The perpetrators of terrorism are usually dominated by men. In this paper, we will discuss women terrorists in Indonesia, especially regarding the motivations underlying their actions. The Differential Identification Theory put forward by Daniel Glaser will be used in this study to analyze the motivations of female terrorists. A qualitative approach is used in research by collecting data through secondary data studies. Secondary data was obtained from various previous studies and research documents of the involvement of women in acts of terrorism in six Polda areas conducted by CTRS-PTIK. This research shows that acts of terror committed by women and women's involvement in terrorism are based on a sense of devotion to the family, whose domination comes from men or commonly known as patriarchal culture and is motivated by religious fanaticism which leads to self-identification with groups that claim to be the truest Muslims. Female terrorists are constructed by their social environment and what they identify as part of themselves.*

***Keywords: women terrorist; motivation; differential identification theory***

**Pendahuluan**

Pelaku kejahatan di masa kini seringkali tidak lagi dibatasi oleh gender, termasuk juga aksi teror. Asumsi seseorang mengejar perilaku kriminal sejauh dia mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang nyata atau imajiner yang dari sudut pandangnya perilaku kriminalnya tampaknya dapat diterima, yang berkembang selama ini adalah, teroris selalu laki-laki. Hal ini karena adanya stereotip gender dan teroris perempuan yang berjumlah sedikit. Padahal kenyataannya, perempuan selalu menjadi bagian dari gerakan teroris baik sebagai pendukung maupun pejuang (Banks, 2019). Di beberapa bagian dunia, hampir separuh aksi teroris sekarang dilakukan oleh perempuan, meskipun proporsi perempuan yang terlibat bervariasi tergantung organisasi teroris tertentu dan medan konfliknya (Jacques & Taylor, 2009). Di banyak wilayah konflik di seluruh dunia, partisipasi perempuan dalam ekstremisme kekerasan merupakan ciri utama dari apa yang disebut sebagai “Terorisme Baru” (Laster & Erez, 2015).

Sebagai contoh, kasus teroris perempuan di Indonesia yang dalam beberapa tahun ini baru-baru terjadi di antaranya wanita muda bernama [Zakiah Aini](https://www.suara.com/tag/zakiah-aini) (25), teroris wanita yang tewas saat menyerbu gedung Mabes Polri, Jakarta, pada tanggal 31 Maret 2021. [Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo](https://www.suara.com/tag/kapolri-jenderal-listyo-sigit-prabowo) menyatakan bahwa wanita muda tersebut sempat melepaskan enam kali tembakan kepada petugas (suara.com, 2021). Kemudian jika ditarik mundur, pada tahun 2018 terdapat kasus serangan bom bunuh diri yang dilakukan oleh perempuan, yang juga membawa 2 anaknya ikut serta dalam meledakkan diri. Wakapolrestabes Surabaya, Ajun Komisaris Besar Benny Pramono mengatakan ibu dan dua anaknya berupaya masuk ruang kebaktian gereja dan sempat dihalau oleh seorang sekuriti di pintu masuk GKI jalan Diponegoro, Surabaya, sebelum kemudian ketiganya meledakkan diri di halaman gereja (bbc.com, 2018).



**Sumber: institute for policy analysis of conflict (IPAC)**

**Gambar 1 Data jumlah pelaku terorisme**

Laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa ada 370 tersangka terorisme di tanah air pada 2021. Sedangkan, jumlah tersangka terorisme pada tahun 2020 sebanyak 232 tersangka. Dalam hal ini artinya, terdapat signifikansi sebesar 59,48% pada tahun 2021 dibanding tahun 2020. Meskipun meningkat, jumlah aksi teror menurun 7 kasus atau sebesar 53,8% dibanding tahun 2020. Rinciannya, kasus teror terjadi sebanyak 13 aksi pada 2020, sedangkan hanya ada 6 aksi terorisme pada 2021. Sementara, pada sepanjang tahun 2022, dilansir dari tvonenews.com (Susilo, 2023) terdapat 247 tersangka teroris yang ditangkap oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Tersangka teroris tersebut terdiri dari 97 kelompok JI, 70 kelompok Anshor Daulah, 46 kelompok JAD, 28 kelompok NII, 4 kelompok MIT, 1 tersangka *lone wolf* dan 1  tersangka *foreign terorist fighter* (Susilo, 2023)*.*



**Sumber: BNPT**

**Gambar 2 Data jumlah perempuan dalam terorisme**

Dilansir dari ruangobrol.id (2022), menurut Leebarty Taskarina, seorang kandidat doktor di Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2022, data pengadilan menunjukkan bahwa hingga saat ini ada total 59 perempuan yang terlibat dalam kasus terorisme di Indonesia dan menghadapi konsekuensi hukum. Berdasarkan putusan pengadilan, 43 perempuan telah menjalani proses peradilan pidana. Dari jumlah tersebut, 20 orang masih berstatus sebagai narapidana terorisme, sedangkan 23 orang lainnya telah menjadi mantan narapidana terorisme. Selain itu, terdapat 16 orang perempuan yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam enam tahun terakhir, terutama dalam rentang tahun 2016-2020, dengan tercatat 31 terdakwa perempuan dalam kasus terorisme.

Ada berbagai macam alasan yang memberi motivasi bagi perempuan untuk masuk dalam dunia terorisme. Misalnya faktor keluarga, lingkungan sosial, agama, kondisi lahir di pengungsian, pemenjaraan, merasa menjadi korban, ingin menjadi pahlawan, merasa benci dan marah (Post, Sprinzak, & Denny, 2003). Seperti yang dikatakan Stahelski (2004), teroris itu dibuat, bukan dilahirkan, yang kontruksinya dikontribusikan oleh berbagai faktor psikologis dan sosial.

Setiap anggota dari organisasi teroris melakukan kekerasan untuk memenuhi keinginan atau keyakinannya sendiri atau mewakili konstituen yang diyakininya menjadi korban negara atau kelompok lain, oleh karena itu, dalam organisasi tertentu, akan ada banyak ideologi dan motivasi individu dan organisasi yang memengaruhi tindakan teroris. Anne Speckhard (2008), Direktur *International Center for the Study of Violent Extremism*, menyebutkan bahwa teroris perempuan tidak termotivasi oleh gerakan feminis. Dia mengartikulasikan bahwa penindasan masyarakat memainkan peran kecil untuk menjadi anggota organisasi teror. Dia menyatakan bahwa mereka dimotivasi oleh zona konflik trauma, balas dendam, nasionalisme dan ekspresi kemarahan masyarakat. Stereotip tentang teroris termasuk asumsi yang keliru mengenai kewarasan, riwayat perilaku yang anti sosial, kemiskinan, atau penyalahgunaan narkoba dan alkohol, seringkali, kelompok teroris menggunakan asumsi ini untuk keuntungan mereka (Bloom, 2019).

Saat melihat partisipasi perempuan dalam organisasi teroris, penting untuk mencatat faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keputusan mereka untuk terlibat dalam kelompok tersebut. Berdasarkan wawancara ekstensif dengan teroris perempuan dan keluarga serta teman mereka di berbagai titik masalah di seluruh dunia yaitu Sri Lanka, Jerman, Somalia Palestina, Chechnya, Indonesia, Israel, Irak, and Turki, dalam buku *Bombshell: The Many Faces of Women Terrorists* (2011), Mia Bloom mengembangkan tipologi empat (ditambah satu) motivasi yang tumpang tindih mengapa perempuan memilih untuk terlibat dalam aktivitas terorisme. Hal tersebut adalah balas dendam (kehilangan orang penting atau keluhan politik lainnya), penebusan (wanita secara sukarela melakukan bom bunuh diri untuk menghapus cacat moral, biasanya akibat kontak seksual yang karena atau diduga di luar pernikahan yang menodai "kehormatan keluarga"), rasa hormat (kekaguman dari warga Palestina lainnya atas kontribusi mereka yang terhormat untuk perjuangan), dan hubungan (dengan pria yang terlibat dalam terorisme).

Dari uraian tersebut, peran perempuan, dalam kaitannya dengan organisasi teroris, hingga saat ini khususnya di Indonesia belum diteliti secara signifikan dan juga tidak ada banyak informasi mengenai apa yang memotivasi keterlibatan mereka. Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan mengenai motivasi teroris perempuan dilihat dari perspektif teori identifikasi diferensial. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang alasan perempuan di Indonesia memutuskan untuk mengambil dan melanjutkan perilaku berbasis kekerasan yaitu aksi terorisme yang berkaitan dengan aspek psikologi, sosial dan tindak kriminal.

**Tinjauan Literatur**

**Teroris**

Terorisme adalah fenomena global yang mudah dikenali tetapi sulit untuk didefinisikan. Para sarjana di seluruh dunia menggambarkan definisi terorisme sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi dan politik mereka. Mereka yang terkena masalah sosial dan ekonomi mengkonseptualisasikan terorisme sebagai konflik dalam masyarakat antara yang kaya dan yang tidak, Sedangkan mereka yang mengalami penggunaan taktik teror untuk mendapatkan jarak tempuh politik menganggapnya sebagai fenomena politik. Karena hal itu kata 'terorisme' diinterpretasikan sesuai dengan kepentingan yang berbeda (Prabha, 2000).

Sementara itu definisi sempit mengenai terorisme yang dikemukakan olehTeichman (1989) adalah:

*Terrorism consists of violent actions carried out for political or other social purposes, including some large-scale mercenary purposes, by individuals or groups, having an aim which might be either good or bad, but carried out by means of either or both of the following: (1) attacks on innocent or neutral or randomly chosen people, or (2) using means which involve atrocities, e.g. torture, cruel killings, or mutilation of the living or the dead, committed against randomly or nonrandomly chosen people who may be either innocent or not (*terjemahan bebas: Terorisme terdiri dari tindakan kekerasan yang dilakukan untuk tujuan politik atau sosial lainnya, termasuk beberapa tujuan tentara bayaran skala besar, oleh individu atau kelompok, memiliki tujuan yang mungkin baik atau buruk, tetapi dilakukan melalui salah satu atau kedua hal berikut: (1) serangan terhadap orang yang tidak bersalah atau netral atau dipilih secara acak, atau (2) menggunakan cara-cara yang melibatkan kekejaman, mis. penyiksaan, pembunuhan kejam, atau mutilasi hidup atau mati, dilakukan terhadap orang-orang yang dipilih secara acak atau tidak acak yang mungkin tidak bersalah atau tidak.)

Laman FBI (*Federal Bureau of Investigation*) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis terorisme, yaitu:

1. Terorisme Internasional—kekerasan, tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu dan/atau kelompok yang terinspirasi oleh, atau terkait dengan, organisasi atau negara teroris asing yang ditunjuk (disponsori oleh negara).
2. Terorisme Domestik—kekerasan, tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu dan/atau kelompok untuk tujuan ideologis lebih lanjut yang berasal dari pengaruh domestik, seperti yang bersifat politik, agama, sosial, ras, atau lingkungan.

Mahon (2022) mengemukakan bahwa terlepas dari penelitian ekstensif tentang terorisme, kita masih jauh dari menemukan titik temu dalam definisi terorisme. Para sarjana tidak setuju pada hampir semua hal yang berhubungan dengan terorisme, dan seperti yang dengan tepat dicatat oleh Michael Kronenwetter (2004, hlm. 4), "satu hal yang kita tahu pasti: terorisme itu salah". Beberapa sarjana percaya bahwa menciptakan definisi universal terorisme tidak dapat dihindari (Ganor, 2002; Hoffman, 1984); yang lain berpendapat bahwa ini hampir mustahil untuk dilakukan (Bruce, 2013; Homolar & A. Rodríguez-Merino, 2019; Martini & Njoku, 2017; Richards, 2012). Beberapa penelitian difokuskan pada dilema negara vs aktor non-negara, dengan alasan bahwa setiap definisi terorisme yang dibuat oleh pemerintah bersifat mementingkan diri sendiri; dengan demikian, kata-kata itu mau tidak mau harus digunakan untuk melayani dan melindungi pemerintah (Kronenwetter, 2004; Meisels, 2009). Para sarjana dan praktisi sama-sama terus meneliti dan berteori tentang terorisme, dan salah satu cara memandang terorisme adalah pendekatan untuk mengkategorikan ancaman sebagai tradisional dan non-tradisional.

**Teroris Perempuan**

Hal yang terlintas pertama kali ketika memikirkan peran perempuan dalam terorisme adalah status mereka sebagai korban, sebagai individu yang direndahkan karena alasan politik atau agama (Weinberg & Eubank, 2011). Gagasan mengenai perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih *“nurturing”* (mengasuh) telah ada untuk jangka waktu yang cukup signifikan. Oleh karena itu, ketika perempuan menjadi pelaku kekerasan, ada tingkat keheranan masyarakat yang lebih besar dibandingkan jika laki-laki yang menjadi seorang pelaku. Namun, seiring berkembangnya zaman, peran dan keterlibatan perempuan juga ikut mengalami perubahan, bahkan di tempat atau daerah di mana kesenjangan gender lebih menonjol. Sebelum tahun 1973, lebih dari sepertiga wanita di angkatan bertugas sebagai perawat atau pekerjaan terkait kesehatan lainnya. Sejak tahun 1973, persentase posisi dan pekerjaan militer yang terbuka bagi perempuan meningkat di semua angkatan, yang memungkinkan perempuan memiliki pilihan yang lebih beragam dalam dinas militer mereka. Sejak tahun 2001, perempuan semakin terlibat dalam kegiatan militer yang sebelumnya terlarang bagi mereka (Amara, 2014). Hal ini tak hanya berlaku bagi perempuan yang terlibat dalam aksi militer, tetapi juga dalam organisasi teroris. Kelompok teroris terdiri dari sejumlah posisi dan peran yang menandakan tingkat keterlibatan, mulai dari peran pendukung hingga tugas operasional yang khusus.

Dalam buku Rex A. Hudson (1999), data dari Russell dan Miller menunjukkan bahwa teroris yang dikaji sebagian besar adalah laki-laki, tetapi mereka juga mencatat peran dukungan sekunder yang dimainkan oleh perempuan di sebagian besar organisasi teroris khususnya Tupamaros Uruguay dan beberapa kelompok Eropa. Misalnya mereka menunjukkan banyak wanita bergabung dengan kelompok teroris Jerman pada 1970-an dan 1980-an, yaitu bahwa sepertiga personel dari RAF (*Red Army Faction*) dan *June Second Movement* merupakan perempuan, dan hampir 60 persen dari RAF dan *June Second Movement* yang tersebar luas pada Agustus 1976 adalah wanita. Fokus sudut pandang mengenai terorisme sebagian besar adalah laki-laki juga kemudian telah dipertanyakan oleh bukti bahwa keterlibatan perempuan semakin meluas “secara ideologis, logistik, dan regional” (Cunningham, 2003). Meskipun bergantung pada organisasi terorisnya, perempuan telah aktif dalam berbagai peran dalam kelompok mereka. Perempuan telah beralih dari yang hanya peran di balik layar menjadi peran di garis depan, posisi yang dicangkup seperti logistik, perekrutan anggota, sebagai pelaku bom bunuh diri, dan yang tak luput yaitu peran menjadi pemimpin operasional.

**Motivasi**

Robert H. Gault dalam bukunya *Criminology* (1932)*,* menerangkan bahwa *many of our experiences have been forgotten as far as ability to recall them voluntarily is concerned, but their residue remains as the core of affective attitudes which are easily touched off and made effective when the appropriate occasion arises.* Terjemahan bebas: banyak dari pengalaman kita telah dilupakan sejauh menyangkut kemampuan untuk mengingatnya secara sukarela, tetapi residunya tetap menjadi inti dari sikap afektif yang mudah disentuh dan dibuat efektif ketika kesempatan yang tepat muncul.

Gault membahas bagaimana "sikap" sebagai latar belakang motif dan tindakan seseorang. Sementara itu, Wladimir Eliasberg dalam bukunya *Rec htspflege Und Psychologie* (1933), dimana ia mengembangkan teori motivasi sebagai penggerak utama di balik tindakan seseorang. Motivasi adalah landasan umum di mana psikiater dan pengacara dapat mendapatkan titik temu untuk mengatasi kesenjangan antara praduga biologis dan fiksi, di satu sisi, dan hukum di sisi lainnya (Eliasberg, 1952).

Istilah motivasi (*motivation*) berasal dari bahasa latin yakni *movere*, yang berarti “menggerakkan” (*to move*). Menurut RA. Supriyono, motivasi adalah kemampuan untuk berbuat sesuatu sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan, dorongan untuk berbuat sesuatu. Dua motif terlibat langsung dalam sebuah prediksi perilaku, yaitu adalah motif implisit dan eksplisit. Motif implisit dan eksplisit adalah faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Motif implisit mengacu pada dorongan spontan yang mendorong seseorang untuk bertindak, sering kali terkait dengan kinerja tugas dan didorong oleh insentif yang terkait dengan tugas itu sendiri. Di sisi lain, motif eksplisit diekspresikan melalui pilihan yang disengaja dan lebih sering dipengaruhi oleh faktor eksternal. Individu dengan motif implisit yang kuat cenderung menetapkan standar internal yang tinggi dan memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai tujuan. Mereka mungkin memiliki motivasi yang intrinsik dan tidak bergantung pada penghargaan eksternal. Di sisi lain, individu dengan motif eksplisit lebih mungkin dipengaruhi oleh alasan ekstrinsik, seperti penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Kedua motif ini sering bekerja secara bersama-sama dalam menentukan perilaku individu dan hasrat mereka. Kombinasi motif implisit dan eksplisit dapat mempengaruhi arah dan intensitas tindakan yang diambil oleh individu. Beberapa orang mungkin memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai tujuan dan juga mematuhi norma sosial, sementara yang lain mungkin lebih cenderung mengejar tujuan mereka secara individual dan mengabaikan norma-norma sosial (Brunstein & Maier, 2005).

Supriyono (2003) menjelaskan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh kekuatan stimuli, baik yang bersifat intrinsik yang ada dalam diri individu maupun stimuli eksternal. Stimuli intrinsik merupakan faktor-faktor internal seperti minat, kebutuhan, dan nilai-nilai yang ada pada individu itu sendiri. Sementara itu, stimuli eksternal dapat berupa hadiah, pengakuan, atau tekanan sosial yang datang dari lingkungan luar. Namun, motivasi sebenarnya mencerminkan reaksi individu terhadap stimuli tersebut. Artinya, setiap individu akan memberikan respons yang berbeda terhadap stimuli yang sama, tergantung pada faktor-faktor unik yang ada dalam dirinya, seperti pengalaman, kepribadian, dan tujuan pribadi. Stimuli eksternal dapat mempengaruhi motivasi seseorang, tetapi bagaimana seseorang merespons dan memproses stimuli tersebut akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal yang khas bagi individu tersebut. Dengan demikian, motivasi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara stimuli eksternal dan faktor-faktor intrinsik individu. Perbedaan individu dalam memproses dan merespons stimuli tersebut akan menghasilkan variasi dalam tingkat motivasi dan arah tindakan yang diambil oleh setiap individu.

Pengerucutan dari istilah motivasi adalah suatu hal yang menggambarkan mengapa seseorang berbuat atau mengerjakan sesuatu. Motivasi merupakan pendorong di balik tindakan yang dilakukan manusia. Motivasi adalah proses yang memulai, memandu, dan mempertahankan perilaku yang berorientasi pada tujuan, yang kemudian menyebabkan seseorang bertindak dengan cara yang membuatnya lebih dekat dengan hal yang dituju. Motivasi melibatkan konstelasi keyakinan, persepsi, nilai, minat, dan tindakan yang semuanya berkaitan dengan erat. Sehingga hasilnya adalah berbagai pendekatan motivasi dapat berfokus pada perilaku kognitif (seperti pemantauan dan penggunaan strategi), aspek non-kognitif (seperti persepsi, keyakinan, dan sikap), atau keduanya yang kemudian hal tersebut dapat mengaktifkan berbagai perilaku manusia.

**Teori Identifikasi Diferensial (*Differential Identification Theory*)**

Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini adalah teori identifikasi diferensial, yang dikemukakan oleh Daniel Gleser pada tahun 1956. Teori identifikasi diferensial dari Glaser merupakan teori yang formulasinya dibangun di atas teori asosiasi diferensial (*Differential Association Theory*) milik Edwin Sutherland (1934). Dalam teorinya, Sutherland menjelaskan bahwa individu mempelajari nilai-nilai, sikap, teknik, dan motif perilaku kriminal melalui interaksi dengan orang lain, di mana besaran dampak yang dihasilkan bergantung pada seringnya frekuensi dan banyaknya durasi interaksi. Dalam perkembangan asosiasi diferensial, Sutherland mendukung teori tersebut dengan bukti bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dan partisipasi dalam kelompok pribadi yang erat atau akrab. Identifikasi diferensial tidak memerlukan partisipasi semacam itu. Teori identifikasi diferensial, pada intinya, adalah bahwa:

*“a person pursues criminal behavior to the extent that he identifies himself with real or imaginary persons from whose perspective his criminal behavior seems acceptable.” (terjemahan bebas:* *seseorang mengejar perilaku kriminal sejauh dia mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang nyata atau imajiner yang dari sudut pandangnya perilaku kriminalnya tampaknya dapat diterima.)*

Teori identifikasi diferensial adalah teori yang memusatkan perhatian pada interaksi di mana terjadi pilihan model perilaku, termasuk interaksi individu dengan dirinya sendiri dalam merasionalisasi perilakunya (Matthews, 1968). Glaser mengonseptualisasikan ulang teori asosiasi diferensial milik Sutherland (1934). Glaser menggambarkan kata “identifikasi” dengan sedikit tidak konvensional yaitu adalah "pilihan orang lain, dari perspektif siapa kita melihat perilaku kita sendiri." (Glaser, 1956). Teori identifikasi diferensial dari Glaser yang formulasinya dibangun di atas teori asosiasi diferensial milik Sutherland, meningkatkan "citra mekanistik" individu yang didorong ke perilaku kriminal atau nonkriminal dengan menentang kekuatan lingkungan. Teori Glaser menganggap individu sebagai peserta yang lebih aktif dan sukarela dalam proses pembelajaran kriminal. Kelompok kriminal bersama dengan faktor lingkungan lain di luar individu hanya relevan "sejauh mereka dapat ditunjukkan untuk mempengaruhi pilihan orang lain dari sudut pandang mana individu memandang perilakunya sendiri" (Glaser, 1956). Sebagian besar orang dalam masyarakat kita diyakini mengidentifikasi diri mereka dengan kriminal dan non-kriminal dalam perjalanan hidup mereka. Identifikasi kriminal dapat terjadi, misalnya, selama pengalaman langsung dalam kelompok yang menyimpang, melalui acuan positif pada peran kriminal yang digambarkan di media massa, atau sebagai reaksi negatif terhadap kekuatan yang menentang suatu kejahatan. Keluarga mungkin adalah kelompok acuan nonkriminal utama, bahkan untuk para penjahat.

Dalam arti lain, Glaser mengemukakan, identifikasi terjadi ketika seseorang mengembangkan kasih sayang terhadap orang nyata atau imajiner yang mereka anggap mirip dengan diri mereka sendiri. Kesamaan ini bisa sesederhana milik kelompok ras, etnis, atau kelas sosial yang sama atau berbagi jenis kelamin yang sama (Stratton, 1967). Intinya, teori identifikasi diferensial Glaser berpendapat bahwa perilaku menyimpang atau kriminal dipelajari dari orang asing dan bukan orang asing berdasarkan sejauh mana individu mengidentifikasi dengan diri mereka sendiri daripada berdasarkan frekuensi kontak dengan orang-orang nyata atau imajiner. Identifikasi diferensial memperlakukan kejahatan sebagai bentuk perilaku sukarela (yaitu, antisipatif), bukan sebagai suatu hal yang kebetulan. Kemudian, masyarakat terdiri dari *"reference groups"* yang dengannya individu mengevaluasi diri mereka sendiri dan perilaku mereka sendiri. Kelompok ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai, sikap, dan keyakinan individu. Seseorang mungkin tidak benar-benar termasuk dalam *"reference groups"* itu, tetapi kelompok itulah yang memberikan teladan bagi perilaku yang menghasilkan suatu tindakan yang dimodelkan bersifat kriminal atau nakal (Studocu, 2021).

**Metodologi Penelitian**

Tulisan dalam kajian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan istilah umum untuk serangkaian sikap dan strategi untuk melakukan penyelidikan yang ditujukan untuk menemukan bagaimana manusia memahami, mengalami, menafsirkan, dan menghasilkan dunia sosial (Sandelowski, 2004). Penelitian dilakukan secara deskriptif yang di mana penelitian kualitatif deskriptif analitis ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan secara deskripsi mengenai pola, kasus, hingga gambaran mengenai keadaan atau kondisi masyarakat yang secara langsung terjadi dalam masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah studi literatur dan wawancara. Sumber data dan informasi yang digunakan dalam studi literatur adalah sumber data sekunder, seperti studi literatur, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Metode ini melibatkan membaca, menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi berbagai buku, laporan penelitian, jurnal, surat kabar, majalah, dan sumber informasi online. Data dan informasi yang diperoleh juga meliputi data yang dikeluarkan oleh kepolisian dan lembaga lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen ini dipilah, disajikan, dan dinarasikan secara berurutan untuk memperkuat hubungan antara satu fakta dengan fakta lainnya, serta antara satu data dengan data lainnya. Tujuannya adalah untuk mengaitkan gejala atau fenomena satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memperkuat dan membuktikan argumen yang ada serta menjawab pertanyaan teoritis yang diajukan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode studi literatur, peneliti dapat mengumpulkan bukti dan mendukung argumentasi yang ada, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan teoritis yang menjadi fokus penelitian.

Tempat penelitian dilaksanakan di *Center of Terrorism and Radicalism Studies* (CTRS)– PTIK yaitu, Ketua CTRS Firman Fadillah. Wawancara dilakukan sebagai bentuk konfirmasi atas hasil penelitian “Keterlibatan Perempuan dalam Aksi Terorisme di Indonesia” di enam wilayah polda yang dilakukan oleh para anggota CTRS pada 5 September 2018 sampai dengan 8 Oktober 2018.

**Hasil dan Pembahasan**

**Kondisi Umum Terorisme di Indonesia**

Kasus terorisme di Indonesia pada 5 tahun belakangan dijelaskan dalam konferensi pers oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol. Ibnu Suhaendra. Beliau mengatakan bahwa ancaman terorisme dalam kurun waktu 2017 - 2022 bergerak fluktuatif. Yaitu meningkat pada 2019, lalu menurun pada 2020, dan meningkat kembali pada 2022, hal tersebut berdasarkan laporan GTI (*Global Terrorism Index*) tahun 2022 (BNPT, 2022). Kasus terorisme bukanlah hal baru yang terjadi di Indonesia mengingat Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang terkait terorisme.

Jika berbicara mengenai aksi terorisme, yang tidak luput dalam pembahasan adalah mengenai radikalisme. Menurut Ariwidodo (2017), radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan (Pangemanan, 2022). Sejarah radikalisme di Indonesia mulai mencuat pada pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi. Garis radikal diawali sejak S.M. Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) yang juga disebut Darul Islam (DI) pada 7 Agustus 1949. Kemudian dijelaskan oleh Sulastiana dalam seminar publik dengan tema *“Responses to Terrorism and Transnational Crime in Southeast Asia: Canada, Interpol, and Indonesia*.” Tren terorisme di Indonesia dapat dibagi menjadi empat periode yang berbeda dalam sejarah. Periode pertama terjadi pada masa DI/TII antara tahun 1949 hingga 1954, di mana kelompok ini berusaha untuk membentuk Negara Islam Indonesia. Pimpinan gerakan ini meliputi Kahar Muzakar di Sulawesi, Kartosuwiryo di Jawa Barat, dan Daud Bireuh di Aceh. Kemudian, tren terorisme berubah pada periode Jamaah Islamiyyah yang dimulai pada tahun 1983 dan dipimpin oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir. Kelompok terorisme ini pertama kali muncul di Pondok Pesantren Al Mukmin di Sukoharjo, dan mereka menyebarkan paham radikal mereka melalui pesantren tersebut. Jamaah Islamiyah tetap aktif di Indonesia hingga awal tahun 2000-an dan terlibat dalam serangan teror seperti Bom Bali 1, Bom Bali 2, Bom di Kedutaan Besar Australia, dan Bom JW Marriott. Periode selanjutnya adalah periode terorisme yang terkait dengan ISIS. Teroris-teroris ini terpengaruh oleh gerakan terorisme global yang berpusat di Iran dan Suriah (Universitas Indonesia, 2018). Radikalisme muncul dari berbagai poros seperti sosial, ekonomi, dan politik. Namun, berdasarkan tren terorisme yang disebutkan, fenomena radikalisme di Indonesia seringkali disandarkan oleh paham keagamaan.

**Teroris Perempuan di Beberapa Negara**

1. **Belahan Afrika**

Berbagai tindak kekerasan yang dialami setelah kemerdekaan di Nigeria mengambil dimensi baru pada tahun 2009 dengan munculnya kegiatan teroris di bagian utara negara tersebut. Tindakan terorisme domestik yang dikaitkan dengan sekte Islam yang populer disebut "Boko Haram" ini telah menarik perhatian pemerintah Nigeria dan komunitas internasional untuk membatasi ancaman terorisme. Boko Haram memiliki ideologi yang didasarkan pada Islam Sunni fundamentalis, dan niat mereka adalah untuk mendirikan negara Islam di Nigeria dan membersihkan negara dari setiap dan semua pengaruh Barat (Uzochukwu, 2014). Boko Haram telah menggunakan perempuan dan anak perempuan untuk banyak tujuan operasionalnya (Adedire, Ake, & Olowojolu, 2016).

Mia Bloom dan Hilary Matfess menjelaskan bahwa, sebagian besar perempuan dalam organisasi Boko Haram tidak berpartisipasi atas kemauan mereka sendiri. Distribusi perempuan dalam organisasi Boko Haram dilakukan dengan cara penculikan. Mereka digunakan untuk meningkatkan kohesi pemberontak, menambah kapasitas reproduksi, melakukan serangan, menjaga ketertiban di dalam kamp, ​​dan sebagai alat tawar-menawar dengan pemerintah Nigeria. Beberapa perempuan dan anak perempuan menderita trauma ganda penculikan dan eksploitasi seksual, serta upaya untuk mengubah mereka menjadi ideologi Boko Haram melalui cuci otak dan pemaparan propaganda yang konsisten. Maka dari itu, mereka tidak bisa menetapkan apakah perempuan yang menjadi korban benar-benar diradikalisasi, apakah perempuan yang terkait dengan pemberontak mungkin memiliki ideologi dan tujuan yang sama dengan laki-laki, atau apakah perempuan tersebut menderita trauma parah, yang menyebabkan suatu bentuk “Stockholm Sindrom." (Bloom & Matfess, Women as Symbols and Swords in Boko Haram’s Terror, 2016).

1. **Belahan Eropa**

Adanya aksi terorisme di belahan bumi eropa kebanyakan dilatar belakangi oleh keadaaan dan ideologi politik. Terdapat kelompok grup militant sayap kiri barat yang menarik sejumlah besar wanita sebagai anggotanya. Pada tahun 1970-an, *the Red Army Faction* (RAF) menjadi identik dengan terorisme di Jerman Barat. Orang-orang RAF mempercayai bahwa melawan negara yang mereka sebut dengan fasis merupakan hak mereka. Dan mereka menghalalkan segala cara yang ada termasuk dengan menggunakan kekerasan demi membuat suara mereka didengar. Kelompok RAF lahir dari gerakan protes radikal mahasiswa universitas Jerman pada tahun 1960-an, yang mencela Amerika Serikat sebagai kekuatan imperialis dan mencirikan pemerintah Jerman Barat sebagai peninggalan fasis dari era Nazi. Selama 28 tahun, Jerman Barat berhadapan dengan RAF, meskipun organisasi teroris kecil namun sangat mudah beradaptasi yang terus berevolusi untuk menghadapi tindakan balasan yang dikerahkan untuk melawannya (Weil, 2017). Dalam buku *Shoot the Women First* (1991) disebutkan sekitar lima puluh persen dari keanggotaan RAF dan sekitar delapan puluh persen dari pendukung RAF adalah wanita (MacDonald, 1991).

Selain RAF di Jerman Barat, ada juga kelompok bersenjata internasional yang dikenal sebagai *Irish Republican Army* (IRA) atau disebut juga *Provisional Irish Republican Army* (PIRA). Kelompok ini didirikan pada tahun 1919 sebagai penerus dari *Volunteers* Irlandia, sebuah organisasi militan nasionalis yang didirikan pada tahun 1913. Konflik yang mereka hadapi berkaitan dengan status enam kabupaten di Ulster Utara, apakah harus tetap menjadi bagian dari Inggris atau diberikan kemerdekaan (Fritz, 2001). IRA terbagi menjadi sayap "*Official*" dan "*Provisional*". Meskipun keduanya memiliki komitmen terhadap republik sosialis Irlandia yang bersatu, sayap *Official* cenderung mengutamakan taktik parlementer dan menghindari kekerasan setelah tahun 1972. Sementara itu, sayap *Provisional* atau yang dikenal sebagai "*Provos*", percaya bahwa kekerasan, terutama tindakan terorisme, merupakan bagian penting dalam perjuangan untuk membebaskan Irlandia dari kekuasaan Inggris (Arthur & Cowell-Meyers, 2023).

Dalam buku *Death in the Shape of a Young Girl*  (2015) menjelaskan mengenai wanita Jerman Barat yang melakukan kekerasan politik pada tahun 1970-an. Kemarahan mereka atas warisan politik fasisme dan kolonialisme negara mereka, membuat mereka mengangkat senjata dan percaya bahwa revolusi menggunakan kekerasan akan menyebabkan perubahan sosial. Banyak yang memahami tindakan kekerasan mereka sebagai batu loncatan menuju pembebasan yang lebih luas dari hal yang dibatasi oleh norma gender (Melzer, 2015). Lebih lanjut, Melzer menjelaskan bahwa masalah utama kekerasan politik perempuan di Jerman Barat adalah bahwa para partisipan mendapati diri mereka berseberangan dari dominan ideologi feminis yaitu menjunjung tinggi peran sosial perempuan sebagai pembawa damai. Bahwasannya pandangan stereotip tentang perempuan yang melakukan kekerasan muncul, terutama bahwa perempuan revolusioner dimotivasi oleh pengabdian seksual kepada laki-laki revolusioner, yang semakin menegaskan pandangan bahwa perempuan yang dipolitisasi entah bagaimana bertindak melawan watak alami mereka.

Terdapat juga kelompok teroris *the Chechen Black Widows* yang ada di Chechnya. Chechnya adalah republik Rusia Selatan yang ingin melepaskan diri dari Konfederasi Rusia. Wanita memainkan peran cukup signifikan di kelompok tersebut. Dijelaskan dalam (Speckhard & Akhmedova, 2006) bahwa wanita Chechnya telah aktif sejak awal sebagai pelaku bom bunuh diri. Mereka tidak tampak dipaksa, dibius, atau dibujuk untuk melakukan tindakan ini. Sebaliknya, mereka merekrut diri sendiri atas dasar mencari cara untuk menegakkan keadilan sosial, balas dendam, dan peperangan melawan apa yang mereka anggap sebagai musuh bangsa mereka. Dalam penelitiannya Speckhard dan Akhmedova menerangkan bahwa semua wanita dalam sampelnya secara pribadi sangat trauma dan kehilangan karena kematian yang kejam di keluarga dekat mereka atau semua tentang mereka, dan meyakini bahwa itulah dasar dari alasan mereka bergabung dalam organisasi tersebut.

1. **Belahan Asia**

Terbentuknya Al-Qaeda tidak lepas dari invasi Soviet ke Afghanistan pada tahun 1979. Pada tahun 1988, Osama bin Laden mendirikan Al Qaeda dari jaringan veteran Arab dan asing lainnya dari pemberontakan Afghanistan melawan Uni Soviet, dengan tujuan mendukung Islam yang kemudian menyebabkan konflik di seluruh dunia (Congressional Research Service, 2022). Awalnya Al Qaeda melarang wanita berada di garis depan medan tempur tetapi kemudian, organisasi tersebut menjadi sadar akan manfaat keterlibatan perempuan dalam organisasi mereka. Mereka tidak hanya efektif sebagai perekrut dan pendukung ideologi, tetapi juga sebagai pendukung operasional.

Pada April 2013 dibentuk *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang kemudian menjadi kelompok jihad utama yang memerangi pasukan pemerintah di Suriah dan membangun kekuatan militer di Irak. Dalam hal ideologi, ISIS lebih dekat dengan Al Qaeda daripada kebanyakan kelompok lain yang beroperasi di wilayah di mana kedua organisasi tersebut aktif. Kedekatan ideologis ini, misalnya, dinyatakan dalam dukungan mereka untuk pemisahan gender sepenuhnya, norma hubungan gender yang sangat ketat, jihad kekerasan, takfir, penentangan mereka terhadap pemimpin politik sekuler lokal dan operasi militer asing di daerah tersebut (Eggert, 2015). Ketika Al Qaeda yang pada awalnya melarang wanita berperang di medan perang, *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) mendorong wanita untuk berpartisipasi dalam jihad dan menjadi martir, meskipun wanita ISIS memiliki peran pendukung yang sama seperti wanita jihadis Al Qaeda.

Dalam (McGinn, 2019) dijelaskan bahwa sebagian besar wanita yang terlibat dalam al Qaeda berasal atau menikah dengan keluarga Al Qaeda. Para wanita sering mendukung suami, saudara laki-laki, dan kerabat laki-laki mereka. Kemudian untuk ISIS, alasan perempuan dan anak perempuan tertarik masuk kedalam ISIS berkisar pada faktor yang sama dengan laki-laki: keterasingan, ketidaksetaraan, petualangan, dan daya tarik tujuan mulia. Tidak ada perbedaan spesifik gender yang besar antara motivasi wanita dan pria, kecuali sedikit perbedaan di mana wanita bergabung melalui keterlibatan dalam hubungan romantis dengan pria. ISIS menganggap keluarga sebagai konsep penting dalam membangun 'kekhalifahan', terutama untuk menyediakan generasi pejuang berikutnya. Ketentuan bagi perempuan untuk berfungsi terutama sebagai ibu rumah tangga dimiliki oleh kelompok AL Qaeda, tertuang dalam majalahnya yaitu majalah Al-Shamikhah ('wanita agung') setebal 31 halaman, yang diterbitkan pada Maret 2011. Isi majalah ini menyarankan perempuan untuk menutup diri, menemukan pria yang tepat, dan pastikan untuk menikah dengan seorang mujahid (pejuang suci). Hingga Maret 2019, ketika kehilangan bagian terakhir dari wilayahnya, ISIS telah merekrut ribuan anak muda dari Barat, dengan sebagian besar rekrutan adalah perempuan.

**Berbagai Macam Motivasi Perempuan Bergabung ke dalam Terorisme**

Literatur yang ada tentang perempuan dan terorisme memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana motivasi teroris perempuan. Para peneliti telah mencoba menemukan akar penyebab sikap radikalis dan ekstrimisme dari para teroris perempuan dengan berfokus pada hubungan keluarga, perjalanan hidup yang traumatis, dan latar belakang ideologi. Bukti menunjukkan bahwa perempuan bergabung dengan organisasi teroris karena berbagai motif termasuk alasan politik, ideologi/agama, dan alasan pribadi.

1. **Alasan Politik**

Beberapa perempuan bukan bagian yang dapat disebut sebagai korban kelompok teroris dan mereka berkemungkinan mengambil berbagai peran yang berbeda tergantung pada ideologi kelompok yang diikuti. Misalnya, sementara beberapa wanita hanya mendukung kelompok radikal tersebut dengan mendidik anak-anak mereka sebagai ibu dari pejuang generasi mendatang, yang lain mungkin bertanggung jawab atas operasi mematikan dan menjadi martir.

Literatur yang ada mengenai keterlibatan perempuan dan terorisme memberikan penyebab yang beragam dan kompleks tentang alasan dan motivasi yang mendorong perempuan untuk terlibat dalam radikalisme berbasis kekerasan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa teroris wanita termotivasi oleh pemikiran revolusioner, contohnya apa yang ada pada kelompok teroris RAF dan IRA. Weinberg dan Eubank menghasilkan penelitian yang membantah anggapan bahwa 'pendidikan bukan satu-satunya solusi untuk mencegah perempuan dari organisasi teroris' serta meruntuhkan prasangka tentang 'laju serangan teroris lebih besar untuk perempuan yang kurang berpendidikan.' (Weinberg & Eubank, Italian Women Terrorists, 1987). Teroris perempuan revolusioner lebih berdedikasi dan pragmatis daripada teroris laki-laki dan profil mereka tidak sesuai dengan perempuan korban terorisme karena kebanyakan dari mereka membantu militan bersenjata atas kemauan mereka sendiri.

1. **Alasan Ideologi**

Kemudian, agama menjadi salah satu penyebab terkuat yang memotivasi perempuan untuk aksi bom bunuh diri dan terror, seperti yang dilakukan para teroris perempuan anggota organisasi Al Qaeda dan ISIS. Organisasi tersebut telah berhasil memengaruhi perempuan berdasarkan filosofi agama mereka tentang kekhalifahan. Para perempuan ini percaya bahwa tindakan kekerasan teroris dan bunuh diri akan memajukan tujuan organisasi teroris dan menguntungkan jihad global. Kata jihad merupakan kata yang terdapat dalam Al-Quran yang mengandung pengertian “berjuang”. Banyak jihadis pelaku bom bunuh diri diyakinkan bahwa sebelum tetes darah pertama mereka menyentuh tanah, mereka sudah duduk di samping Tuhan (Allah), tidak merasakan sakit, dan yang akan dirasakan adalah sebuah kebahagiaan (Bloom, 2011).

1. **Alasan Pribadi**

Jacques dan Taylor dalam buku yang berjudul *“Male and Female Suicide Bombers: Different Sexes, Different Reasons?”* (2008) menjelaskan bahwa sementara teroris bunuh diri laki-laki dimotivasi oleh ide-ide agama atau nasionalis, teroris perempuan sebagian besar didorong oleh alasan pribadi. Pemerkosaan, kawin paksa, peculikan dan kehilangan orang yang dicintai adalah beberapa penyebab pribadi yang mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam insiden terror, seperti yang dilakukan oleh para perempuan di Boko Haram dan the *Chechen Black Widows*. Bloom berpendapat bahwa balas dendam adalah keinginan untuk menimbulkan pembalasan yang mendorong perempuan untuk terlibat dalam aksi teror. Ketika perempuan diperkosa, kehilangan anggota keluarga dari orang yang dicintai, mereka terlibat dalam aksi teror dan ingin balas dendam. Teroris perempuan juga mencoba menebus diri dengan melakukan tindakan pengorbanan diri. Beberapa wanita menyembunyikan rahasia memalukan dan menganggap menjadi pelaku bom bunuh diri sebagai tindakan terhormat (Bloom, Bombshell: Women and Terrorism, 2011).

**Teroris Perempuan Indonesia dan Identifikasi Dirinya**

Indonesia sebagai negara yang berlandasakan ketuhanan menjadi sasaran empuk bagi terorisme yang berlandaskan ideologi keagamaan untuk masuk dan melebarkan sayapnya. Propaganda yang menggunakan agama sebagai alat sering kali berhasil menarik minat orang Indonesia, termasuk perempuan, untuk terlibat dalam aksi teror. Peran perempuan dalam terorisme memiliki variasi yang luas, mulai dari peran sebagai perantara atau pelindung teroris laki-laki, hingga menjadi aktor utama dan pelaku aktif dalam aksi teror. Perubahan ini didasarkan pada konsep jihad baru yang menganggap bahwa kewajiban jihad tidak hanya berlaku bagi laki-laki Muslim, tetapi juga berlaku untuk perempuan Muslim.

Pada sejarah panjang terorisme di Indonesia, dari tren pertama hingga sampai tren Jamaah Islamiyah, yang menjadi pelaku, martir dan eksekutor aksi terorisme didominasi oleh laki-laki. Sementara, keterlibatan perempuan dalam pusaran terorisme yaitu hanya sebagai perantara maupun sebagai pelindung dari para pelaku laki-laki. Beberapa perempuan yang pada saat itu terlibat dalam terorisme dan telah dijatuhi hukum pidana diantaranya; Putri Munawaroh, Munfiatun, Ariana Rahma (istri-istri dari Nurdin M. Top), Inggrid Wahyu Cahyaningsih (istri Sugeng Waluyo pelaku bom Cimanggis), Rasidah binti Subari (istri Husaini bin Ismail pelaku bom Singapura), Ruqayah binti Husen (istri Umar Patek), Deni Carmelita (Istri Pepi Fernando pelaku bom buku dan bom Serpong), Rosmawati dan Nurul Azmy Tibyani (kelompok Santoso) (Bhakti, 2016). Namun pada saat ISIS eksis, diketahui bahwa keterlibatan teroris perempuan di Indonesia tak hanya sebagai pemeran pembantu lagi. Fenomena para istri mendukung dan melindungi suaminya dalam menjalankan aksi terorisme, sesuai dengan pernyataan dari (Glaser, 1956) yang menerangkan bahwa keluarga dapat menjadi kelompok acuan utama dalam mengindentifikasikan diri. Orang-orang dapat mengidentifikasi diri mereka dengan kriminal selama pengalaman langsung dalam kelompok yang menyimpang.

Adanya organisasi teroris ISIS (*Islamic State of Iraq and Syiria*) telah menjadi sebuah ancaman yang sangat berbahaya bagi stabilitas keamanan negara maupun keberlangsungan hidup beragama. Tumbuhnya kelompok ISIS, terutama di Indonesia, merupakan hasil dari keberhasilan propaganda yang dilakukan oleh ideolog radikal mereka. Sementara target ISIS dalam merekrut anggota sebagai aktor utama operasi tidak lagi terbatas pada laki-laki saja. Kelompok ini berhasil menarik minat perempuan untuk bergabung dengan gerakan mereka. Menanggapi hal ini, Komnas Perempuan menyatakan bahwa terjadi pemanfaatan strategis peran perempuan sebagai ibu dalam mentransmisikan ideologi radikal serta mempersiapkan anak-anak untuk menjadi martir (Rachman, 2018). Peran perempuan dalam aksi teror ISIS dapat dilihat dimulai dari kejadian pengeboman gereja pada tahun 2018 lalu di Surabaya dengan perempuan sebagai otak atau aktor utama yang melibatkan anak dan suaminya (Halim & Adnan, 2018). Namun, disamping atas peristiwa bahwa perempuan Indonesia menjadi aktor operasional bom bunuh diri, Ketua dari *Center of Terrorism and Radicalism Studies* (CTRS) – PTIK menerangkan bahwa “tidak ada perempuan di Indonesia sebagai pelaku utama teroris. Perempuan hanya sebagai pelaku pendukung (kaki tangan), dan di Indonesia orientasi motivasi teroris perempuan mengikuti dominasi patriarki” (Fadillah, 2023). Sejalan dengan hasil penelitian dari CTRS – PTIK terkait “Keterlibatan Perempuan dalam Aksi Terorisme di Indonesia”, yaitu menerangkan bahwa motivasi yang melatarbelakangi para perempuan ikut dalam pusaran terorisme adalah dominasi laki-laki yang merupakan kepala keluarga, disertai dengan doktrin yang sudah mengurat-akar bahwa istri harus mendukung dan mengikuti perintah suami/laki-laki.

Kemudian, majalah Tempo melakukan wawancara dengan dua pelaku perempuan dalam aksi terorisme, yaitu Siska dan Dita. Mereka menjelaskan bahwa mereka merasa simpati terhadap para terpidana teroris dalam perjuangan melawan "thaghut". "Thaghut" yang mereka maksud adalah pemerintah Indonesia, termasuk polisi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut mereka, sistem demokrasi yang ada di Indonesia dianggap sebagai sesuatu yang diharamkan. ISIS berhasil menjangkau mereka melalui koneksi daring dan media sosial (Tempo, 2018). Jika dihubungkan kembali dengan teori Glaser, identifikasi terjadi ketika seseorang mengembangkan kasih sayang terhadap orang nyata atau imajiner yang mereka anggap mirip dengan diri mereka sendiri. Kesamaan ini bisa sesederhana milik kelompok ras, etnis, atau kelas sosial yang sama atau berbagi jenis kelamin yang sama (Stratton, 1967), dalam hal ini kesamaan yang mereka miliki yaitu kepercayaan agama. Lalu, para perempuan tersebut ditumbuhi rasa simpati dan kagum atas pemikiran-pemikiran dan ideologi yang ditawarkan oleh organisasi teroris tersebut, membuat mereka sukarela dalam melakukan aksi kriminal ektrimis kekerasan. Hubungan pelaku teroris perempuan seperti Siska dan Dita membuktikan juga bahwa perilaku menyimpang atau kriminal dipelajari berdasarkan pengaruh dari sejauh mana masing-masing individu mengidentifikasi orang/kelompok tersebut dengan diri mereka sendiri, tidak berdasarkan frekuensi kontak. Hal tersebut dibuktikan dengan bagaimana kedua perempuan tersebut mengadopsi paham radikal hanya dari jaringan internet dan perangkat pesan instan.

Dalam konteks tulisan ini, dapat diketahui bahwa teroris perempuan tidak dilahirkan sebagai teroris, mereka adalah bagian dari masyarakat dan bagian dari bagaimana mereka mengidentifikasi diri mereka. Dengan kata lain, teroris perempuan dikonstruksi oleh masyarakat tempat mereka dilahirkan dan yang mereka identifikasikan sebagai bagian dari dirinya.

**Kesimpulan dan Rekomendasi**

Teroris perempuan terkadang lahir dari aktivis di kamp-kamp pengungsi dan dibangun oleh lingkungan yang keras dan traumatis. Oleh karena itu, mereka para perempuan yang terlahir dalam kondisi lingkungan tersebut biasanya dimotivasi oleh balas dendam, frustrasi yang besar dan kemarahan.

Keterlibatan perempuan Indonesia dalam kelompok teroris dimotivasi oleh beberapa hal. Diantaranya adalah dilatarbelakangi adanya orang terdekat (biasanya suami/keluarga) yang merupakan anggota kelompok teroris, pernyataan dari (Glaser, 1956) yang menerangkan bahwa keluarga dapat menjadi kelompok acuan utama dalam mengindentifikasikan diri, lalu selain itu dilatarbelakangi oleh paham dan fanatisme agama, dan juga pengidentifikasian diri kepada kelompok yang mengaku sebagai umat islam yang paling benar kemudian mendorong mereka untuk terlibat lebih jauh dalam kelompok terorisme.

Jaringan teroris di Indonesia juga melibatkan perempuan tidak hanya dalam ranah privat/domestik atau sebatas pendukung tidak langsung, tetapi juga di ranah publik contohnya menjadi martir bom bunuh diri. Kendati demikian, walaupun terdapat teroris perempuan yang senantiasa dengan sukarela mengangkat senjata dan melakukan aksi ekstrimis kekerasan, perlu juga dipahami bahwa terorisme masih menjadi kiprah dan permainan laki-laki dan perempuan telah mengorbankan diri mereka dalam hal ini sebagai senjata laki-laki.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan, maka penting untuk mencegah perempuan terlibat dalam kegiatan terorisme. Berdasarkan penyebab motivasi perempuan Indonesia terlibat aktivitas terorisme, maka pencegahannya adalah memperkuat nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan menjunjung tinggi persatuan, kebhinekaan, dan keadilan sosial. Kemudian mendidik perempuan tentang bahaya terorisme dan konsekuensi dari keterlibatannya, dalam kegiatan tersebut bisa menggunakan teks-teks agama untuk mengedukasi perempuan tentang bahaya radikalisme dan cara pencegahannya. Perempuan bisa menjadi garda terdepan melawan radikalisme dalam keluarga. Oleh karena itu, penguatan peran perempuan dalam keluarga sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang bahaya radikalisme.

Kemudian dalam kebijakan hukum kontra-terorisme, jika didasarkan oleh hasil penelitian bahwa pelaku teroris perempuan di Indonesia masih dominan terpengaruh oleh budaya patriarki, maka pengkajian dampak kebijakan kontra-terorisme terhadap perempuan, khususnya dalam hal hak asasi manusia dan kesetaraan gender perlu ditelaah lebih lanjut. Penelitian dapat dilakukan untuk mengkaji dampak kekerasan berbasis gender terhadap keterlibatan perempuan dalam terorisme dan cara pencegahannya

**Daftar Pustaka**

Adedire, S. A., Ake, M., & Olowojolu, O. (2016). Combating Terrorism and Insurgency in Nigeria: an International Collaborations Against Boko Haram. *Fountain University Journal of Management and Social Sciences*, 67-74.

Amara, J. (2014). Roles and challenges of women in the military. *Psychosocial Interventions for Veterans: A Guide for the Non-Military Mental Health Clinician*.

Arthur, P., & Cowell-Meyers, K. (2023, Mei 5). *Irish Republican Army*. From britannica.com: https://www.britannica.com/topic/Irish-Republican-Army

Banks, C. (2019). Introduction: Women, Gender, and Terrorism:Gendering Terrorism. *Women & Criminal Justice*, 181-187.

Bayar, Z. (2019). The Role of Women in Terrorism. *Dissertations, Theses, Capstone Projects*, 1-75.

bbc.com. (2018, Mei 13). *Serangan bom di tiga gereja Surabaya: Pelaku bom bunuh diri 'perempuan yang membawa dua anak'*. Retrieved Desember 8, 2022 from bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44097913

Bhakti, M. A. (2016). *Perempuan dan Terorisme.* PAKAR.

Bloom, M. (2011). *Bombshell: The Many Faces of Women Terrorists.* London: Hurst Publishers.

Bloom, M. (2011). *Bombshell: Women and Terrorism.* University of Pennsylvania Press.

Bloom, M., & Matfess, H. (2016). Women as Symbols and Swords in Boko Haram’s Terror. 105-121.

BNPT. (2022, Maret 21). *Laporkan Analisis Perkembangan Aksi Terorisme di Indonesia, BNPT Melalui Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Hadiri RDP dengan Komisi III DPR RI*. From bnpt.go.id: https://www.bnpt.go.id/laporkan-analisis-perkembangan-aksi-terorisme-di-indonesia-bnpt-melalui-deputi-bidang-penindakan-dan-pembinaan-kemampuan-hadiri-rdp-dengan-komisi-iii-dpr-ri

Brunstein, J. C., & Maier, G. W. (2005). Implicit and Self-Attributed Motives to Achieve: Two Separate but Interacting Needs. *Journal of Personality and Social Psychology*, 205-222.

Congressional Research Service. (2022). *Al Qaeda: Background, Current Status, and U.S. Policy.* Congressional Research Service.

Cunningham, K. J. (2003). Cross-Regional Trends in Female Terrorism. *Studies in Conflict & Terrorism*, 171-195.

Eggert, J. P. (2015). Women Fighters in the "Islamic State" and Al-Qaida in Iraq: A Comparative Analysis. *Berliner Wissenschafts-Verlag*, 363-380.

Eliasberg, W. ( 1952). Urge and Motivation in Criminology. *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, 319-322.

Eliasberg, W. (1933). *Rechtspflege und Psychologie.* Verlag nicht ermittelbar.

Fadillah, F. (2023, Maret 10). Keterlibatan Perempuan dalam Terorisme di Indonesia. (A. Y. Hutabarat, Interviewer)

FBI. (n.d.). *Terrorism Definitions - FBI*. From fbi.gov: https://www.fbi.gov/investigate/terrorism

Fritz, A. J. (2001). Terrorists or freedom fighters : an analysis of the Irish Republican Army in Northern Ireland with respect to the idea of just war . *honors theses*, 1-62.

Gault, R. H. (1932). *Criminology.* D.C. Heath and Company.

Glaser, D. (1956). Criminality Theories and Behavioral Images. *American Journal of Sociology*, 433-444.

Halim, A., & Adnan, A. M. (2018). Problematika Hukum dan Ideologi Islam Radikal [Studi Bom Bunuh Diri Surabaya]. *Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 31-61.

Hudson, R. A. (1999). *The Sociology and Psychology of Terrorism: Who Becomes Terrorist and Why.* Washington, D.C.: Federal Research Division Libray of congress.

Jacques, K., & Taylor, P. (2008). Male and Female Suicide Bombers: Different Sexes, Different Reasons? *Studies in Conflict and Terrorism*, 304-326.

Jacques, K., & Taylor, P. J. (2009). Female Terrorism: A Review. *Terrorism and Political Violence*, 499-515.

Laster, K., & Erez, E. (2015). Sisters in Terrorism? Exploding Stereotypes. *Women & Criminal Justice*, 83-99.

MacDonald, E. (1991). *Shoot the Women First.* Random House.

Mahon, A. (2022). Defining Terrorism: how Ambiguous Definitions and Vague Classifications Open Doors for Power Acquisition. *Journal of Global Strategic Studies*, 84-97.

Matthews, V. M. (1968). Differential Identification: An Empirical Note. *University of California Press Journal*, 376-383.

McGinn, J. (2019, Agustus 2019). *Female Radicalisation: Why do Women join ISIS?* From lse.ac.uk: https://blogs.lse.ac.uk/mec/2019/08/15/female-radicalisation-why-do-women-join-isis/

Melzer, P. (2015). *Death in the Shape of a Young Girl: Women's Political Violence in the Red Army Faction.* New York: New York University Press.

Mughis, A. (2022, Maret 31). *ruangobrol.id*. From Ancaman Keterlibatan Perempuan dalam Aksi Terorisme di Indonesia: https://ruangobrol.id/2022/03/31/ulasan/ancaman-keterlibatan-perempuan-dalam-aksi-terorisme-di-indonesia/

Ola, T. P. (2020). Understanding the Roles of W Understanding the Roles of Women in Boko Har omen in Boko Haram’s Terrorism. *Journal of International Women's Studies*, 1-12.

Pangemanan, J. I. (2022, Oktober 20). *Radikalisme Adalah: Pengertian, Ciri-ciri, dan Solusi*. From mediaindonesia.com: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/531176/radikalisme-adalah-pengertian-ciri-ciri-dan-solusi

Post, J. M., Sprinzak, E., & Denny, L. M. (2003). The Terrorists in Their Own Words: Interviews with 35 Incarcerated Middle Eastern Terrorists. *Terrorism and Political Violence*, 171-184.

Prabha, D. K. (2000). Defining Terrorism. *Strategic Analysis: A Monthly Journal of the IDSA*, Vol. XXIV No. 1.

Rachman, D. A. (2018, Mei 17). *Tren Penggunaan Perempuan dalam Aksi Terorisme Harus Ditekan*. From nasional.kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2018/05/17/ 08145381/tren-penggunaan-perempuan-dalam-aksi-terorisme-harus-ditekan?page=a

Sandelowski, M. (2004). Using qualitative research. *Qualitative Health Research*, 1366-1386.

Speckhard, A. (2008). The Emergence of Female Suicide Terrorists. *Studies in Conflict & Terrorism*, 995-1023.

Speckhard, A., & Akhmedova, K. (2006). Black Widows: The Chechen Female Suicide Terrorists. *Female suicide bombers: Dying for equality?*, 63-80.

Stahelski, A. (2004). Terrorists are made, not born: Creating terrorists using social psychological conditioning. *The Online Journal of Homeland Security*.

Stratton, J. R. (1967). Differential Identification and Attitudes toward the Law. *Social Forces*, 256-262.

studocu. (2021). *studocu.com.* Retrieved Februari 23, 2023 from Differential Identification and Anticipation Theories: https://www.studocu.com/en-us/document/community-college-of-baltimore-county/comparative-crime-and-criminal-justice/differential-identification-and-anticipation-theories/20662037

suara.com. (2021, Maret 31). *Teroris Wanita Serang Mabes Polri, Zakiah Sempat Pura-pura Tanya Kantor Pos*. Retrieved Desember 8, 2022 from suara.com: https://www.suara.com/news/2021/03/31/212158/teroris-wanita-serang-mabes-polri-zakiah-sempat-pura-pura-tanya-kantor-pos

Susilo, I. (2023, Januari 1). *tvonenews.com*. From 247 Teroris Dari Berbagai Kelompok Ditangkap Densus 88 Sepanjang Tahun 2022: https://www.tvonenews.com/berita/nasional/91532-247-teroris-dari-berbagai-kelompok-ditangkap-densus-88-sepanjang-tahun-2022?page=all

Teichman, J. (1989). How to Define Terrorism. *Philosophy*, 505-517.

Tempo, T. L. (2018). Investigasi: Paham Radikal di Kampus Kita. In *Majalah Tempo* (p. 48). Tempo.

Universitas Indonesia. (2018, Maret 13). *Menelaah Tren Terorisme di Indonesia dari Masa ke Masa*. From ui.ac.id: https://www.ui.ac.id/menelaah-tren-terorisme-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/

Weil, A. (2017). The Red Army Faction: Understanding a Measured Government Response to an Adaptive Terrorist Threat. *The Cornell International Affairs Review*, 129-159.

Weinberg, L., & Eubank, W. (2011). Women’s Involvement in Terrorism. *Gender Issues*, 22-49.

Weinberg, L., & Eubank, W. L. (1987). Italian Women Terrorists. *Terrorism*, 241–262.

**PEMAHAMAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI POLRI DALAM**

**STRUKTUR ORGANISASI SISTEM KENEGARAAN**

**1Sugiri, 2Syafruddin,**

**1,2Program Studi Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12160**

**e-mail: ghirie2789@gmail.com**

**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca tentang kedudukan dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Polri, dalam struktur organisasi kenegaraan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Data-data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan terhadap beberapa dokumen untuk mengetahui kedudukan kepolisian dalam struktur organisasi negara, dan bagaimana fungsi kepolisian dalam sistim pemerintahan negara. Hasil-hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian kepustakaan ini mengungkapkan bahwa (i) mencermati hukum positif di Indonesia minimal ada empat instrumen hukum yang mengatur tentang kedudukan Polri, yakni Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/ 2000, Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Polri; dan (ii) lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat, di mana polisi berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Di samping itu polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Kemandirian polisi sangat diperlukan terutama dalam pelaksanaan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

***Kata kunci: kepolisian; struktur organisasi negara***

**Abstract**

*This article aims to provide readers with an understanding of the position and function of the Indonesian National Police, also known as Polri, in the state organizational structure. The author employs the qualitative approach using the descriptive analysis method. This research data is obtained through the literature study of several documents to determine the position of the police in the state organizational structure, and how the police function in the state government system. The results of the research using the literature research method reveal that (i) looking at positive law in Indonesia there are at least four legal instruments that regulate the position of the National Police, namely: the decree of Indonesian People Assymbly (MPR RI Decree) No. VII/MPR/2000, Presidential Decree No. 89 of 2000, Law No. 2 of 2002 concerning Polri, and Presidential Decree No. 70 of 2002 concerning the Organization of the Work Procedures of Polri; and (ii) police institution is very much needed by the community, where the police function to maintain security and public order. In addition to that the police also play a role as law enforcement agent. Police independence is very necessary, especially in carrying out their duties as law enforcement officers.*

***Keywords: police; state organizational structure***

**Pendahuluan**

Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan perkembangan kejahatan, pengertian kepolisian menjadi berkembang tidak lagi terbatas pada arti harfiah atau polisi *an sich,* akan tetapi arti kepolisian yang mencakup fungsi, tugas dan wewenang, lembaga (organ)*,* bahkan petugas dan jabatan *(ambt)* serta administrasi. Dalam buku ”*Polizeirecht”* yang diterjemahkan oleh Momo Kelana dalam Abdussalam (1972: 20) sebagaimana telah dibahas di muka, dijelaskan bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yaitu: (i) Polisi dalam arti formal adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian; dan (ii) Polisi dalam arti material adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.

Perubahan paradigma polisi sipil atau non militer yang berfungsi menjalankan salah satu fungsi pemerintahan menyebabkan kedudukan kepolisian dalam organisasi negara menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan professional sebagai syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik *(good governance).* Pemerintahan yang baik dapat terwujud manakala didukung oleh penyelenggara fungsi pemerintahan yang baik. Dengan demikian, penyelenggaraan kepolisian yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan akan dapat mendukung pemerintahan yang baik bila terwujud kepolisian yang baik(*good police).* Oleh karena itu juga, ketika kedudukan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan paradigma baru polisi sipil atau non militer dalam sistem pemerintahan Indonesia, maka hal ini perlu dikaji secara ilmiah dengan berpijak pada konsep Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Hal ini perlu dilakukan agar dapat ditentukan kedudukan kepolisian berada pada posisi yang ideal berdasarkan ketatanegaraan, sehingga kepolisian benar-benar menjadi lembaga yang mandiri, modern, proporsional dan profesional sejalan dengan tuntutan dan harapan masyarakat yang bertumpu pada kepolisian yang baik (*good police*) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan uraian di atas, Penulis dapat merumuskan permasalahan tulisan kajian ini sebagai berikut: (i) Bagaimana kedudukan kepolisian dalam struktur organisasi negara? dan (ii) Bagaimana fungsi kepolisian dalam sistem pemerintahan negara?

**Tinjauan Literatur**

**Polisi dan Kepolisian**

Ditinjau dari segi etimologis, istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan. Sebagai contoh, di Yunani istilah polisi dikenal dengan sebutan “*politeia,*” di Inggris “*police*” juga dikenal adanya istilah “*constable*”, di Jerman “*polizei*, di Amerika dikenal dengan “*sheriff”*, di Belanda “*politie*”, di Jepang dengan istilah “*koban*” dan “*chuzaisho*” walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota, dan *chuzaisho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni “*politeia*”. Kata “*politeia*” ini digunakan sebagai judul buku pertama Plato, yakni “*Politeia*” yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya: suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat dan tempat di mana keadilan dijunjung tinggi (Azhari, 1995: 19).

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia, sebagaimana ditulis oleh Fandi (<https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-polri/>). Polri adalah singkatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejarah Polri dimulai sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Saat itu, kepolisian yang ada masih merupakan bagian dari kepolisian Belanda yang bernama Koninklijke Nederlandse Politie (KNP).

**Hukum Kepolisian**

Secara etimologis, hukum kepolisian berasal dari bahasa Belanda “*Politie Recht”*, Jerman “*PolizeiRechts*” dan Inggris “*Police Law*”, yang kemudian di Indonesia disinonimkan menjadi “Hukum Kepolisian.” Istilah hukum kepolisian terdiri dari dua suku kata “hukum” dan “kepolisian” yang masing-masing kata diberi makna secara terpisah. Jika berpijak pada istilah, hukum adalah suatu norma atau kaidah yang berisi larangan dan perintah yang mengatur kehidupan manusia, dan kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka dapat ditarik pemahaman bahwa hukum kepolisian adalah kaidah atau norma yang mengatur tentang lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai pendukung pemaknaan istilah hukum kepolisian, berikut kutipan beberapa pendapat, antara lain Bill Drews dan Gerhard Wacke, yang mengartikan “*polizei recht*” sebagai hukum yang mengatur hakekat polisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepada polisi, juga untuk memberi kewenangan secara khusus baik terhadap orang maupun terhadap benda (Momo Kelana, 1975). Apa yang dikemukakan oleh Drews dan Wacke dalam memaknai hukum kepolisian tersebut telah menyentuh pada suatu nilai yang dalam, yakni hakekat polisi yang telah masuk pada tataran dan ranah filsafah tentang eksistensi lembaga dan fungsi polisi. Dasar pemikiran tersebut tidak menutup kemungkinan sebagai embrio lahirnya filsafat kepolisian yang fokus kajiannya pada hakekat kepolisian. Hal ini sejalan dengan dinamika dan perkembangan ilmu dan perkembangan filsafat *ontology, epistemology* maupun *axiology.* Selain itu, hal ini juga sesuai dengan konsekuensi dan konsistensi bahwa kepolisian merupakan suatu cabang ilmu.

**Lingkup Hukum Kepolisian**

Beberapa penulis telah melakukan pemetaan batas wilayah kajian hukum kepolisian. Walaupun demikian, belum ada kesamaan, namun pemetaan ini dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dalam memahami lingkup hukum kepolisian. Sebagai contoh, pendapat Drews dan Wacke yang memetakan “*polizei recht*” sebagai lingkup kajian hukum kepolisian, yang meliputi: (1) hakekat polisi; (2) dasar-dasar hukum umum yang mengatur kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepolisian; dan (3) dasar-dasar hukum yang mengatur kewenangan secara khusus. Memo Kelana (1975: 26) dalam kesempatan lain juga mengemukakan bahwa obyek hukum kepolisian meliputi: (1) tugas polisi; (2) organ polisi; dan (3) hubungan antara organ polisi dan tugasnya.

Beranjak dari beberapa definisi tentang hukum kepolisian dan analisa konsep dasar hukum administrasi serta arti dari pemerintahan, maka wilayah dan obyek kajian hukum kepolisian dapat dibedakan menjadi dua, yakni lingkup hukum kepolisian secara luas dan secara sempit. Lingkup hukum kepolisian secara luas meliputi:

1. Hakekat kepolisian;
2. Lembaga atau organisasi kepolisian yang mencakup:
3. Kedudukan;
4. Struktur;
5. Hubungan organisasi; dan
6. Personil kepolisian.
7. Fungsi kepolisian dan kekuasaan kepolisian;
8. Landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan fungsi dan kekuasaan kepolisian (tugas dan wewenang);
9. Pengawasan dalam penyelenggaraan kepolisian;
10. Tanggunggugat penyelenggaraan fungsi, dan kekuasaan kepolisian.

Sedangkan lingkup hukum kepolisian secara sempit, hanya mencakup tentang landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan, fungsi, dan kekuasaan kepolisian atau tugas dan wewenang kepolisian.

**Metodologi Penelitian**

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk mendapatkan konsep, teori, doktrin serta pendapat atau pemikiran konseptual keilmuan, Penulis menelaah beberapa buku-buku literatur serta perundang-undangan yang ada hubungannya dengan obyek penelitian, yaitu kedudukan kepolisian dalam organisasi negara Indonesia. Khususnya UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri. Penelitian ini bersifat deskriptif karena tulisan ini akan menggambarkan dan melukiskan adanya azas-azas atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**Kedudukan kepolisian dalam struktur organisasi negara**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, struktur adalah cara bagaimana sesuatu disusun; susunan atau bangunan (Poerwadarminta, 1994: 965). Dari arti struktur tersebut dapat dipahami bahwa struktur organisasi mengandung arti suatu susunan, atau bangunan dari organisasi yang terdiri dari bagian-bagian, di mana bagian yang satu dengan yang lain saling terkait dan berhubungan untuk mendukung tujuan organisasi secara penuh. Dengan demikian struktur organisasi kepolisian dapat dipahami sebagai suatu susunan atau bangunan dari organisasi kepolisian untuk mencapai suatu tujuan. Susunan tersebut diatur secara berjenjang yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasi.

Setiap organisasi dapat dipastikan telah mempunyai struktur baik secara formal maupun secara informal. Struktur formal meliputi bagan organisasi dan garis otoritas, misalnya: kepala, wakil kepala, kepala-kepala bidang, sub-sub bidang dan lain-lain. Menurut Berger, struktur informal dari organisasi ini berfungsi untuk mempertahankan sistem organisasi dengan melancarkan situasi yang sulit, dan mengisi ketimpangan yang ditinggalkan terbuka oleh prosedur formal. Pada sisi lain, Hughes menambahkan, bahwa organisasi informal menjadi sebuah pola tetapi lebih bersifat individual dan cara bertindak perorangan. Berpijak pada pendapat Berger dan Hughes di atas, kajian terhadap struktur organisasi ini ditekankan pada struktur formal, yakni bagan dari organisasi dan garis otoritas organisasi kepolisian. Beranjak dari pengertian organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Waldo, bahwa organisasi adalah struktur antar hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang formal dan kebiasaan di dalam suatu sistem administrasi. Maka, hubungan antara kepolisian pusat dan daerah merupakan hubungan yang berdasarkan atas wewenang formal dan sistem administrasi. Hal ini berarti bahwa wewenang yang melekat berdasarkan ketentuan UU untuk mengatur, melaksanakan tugas dan wewenang organisasi yang tersusun dalam satu sistem administrasi.

Asumsi dasar tentang organisasi ini sebagaimana yang dikemukakan oleh para pemikir aliran struktural modem, seperti Tom Bum, Stalker, Peter M. Blau dan beberapa pendukung lainnya. Mereka mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu institusi yang rasional dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perilaku organisasi yang rasional dapat dicapai dengan baik melalui suatu sistem aturan yang jelas dan otoritas yang formal. Atas dasar asumsi tersebut dapat dicermati, bahwa organisasi kepolisian adalah institusi rasional yang eksistensinya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memiliki otoritas sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Hal ini untuk memudahkan pengendalian organisasi, namun resiko dari penjenjangan susunan organisasi ini akan menjadikan sistem pengendalian bercorak komando sehingga akan dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian sebagai pengemban profesi.

Secara teoritis, pembagian daerah hukum terkonsep akan pentingnya pembagian kewenangan berdasarkan daerah dan batas tanggung jawab. Model pembagian kewenangan antara pusat dan daerah ini mengingatkan pada suatu konsep pemerintahan dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sebuah negara kesatuan, kedua sistem ini menurut Hoessein harus dalam posisi seimbang dan tidak mungkin memilih salah satu karena akan terjadi anarkhi. Oleh karena itu diambil jalan tengah, yakni desentralisasi dan sentralisasi. Menurut Litvack & Seddon (2003, 17-18) desentralisasi adalah *the transfer of authority and responsibility of public function from central government to subordinate or quasi-independent government organization or he prevatesector,* yaitu transfer kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi publik, transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat kepada pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintah yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta. Dengan melihat lembaga kepolisian adalah kepolisian nasional yang terpusat di markas besar, sedangkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya terkonsep pembagian daerah hukum, maka hubungan kepolisian tingkat Mabes Polri dengan kepolisian di tingkat propinsi (polda) menganut sistem desentralisasi administrasi dan sentralisasi secara seimbang.

Konsep sentralisasi tercermin pada sistem pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) serta kenaikan pangkat tertentu yang menjadi otoritas Mabes Polri, pelaporan atas tanggung jawab penyelenggaraan kepolisian di tingkat daerah, distribusi sarana dan prasarana serta anggaran, sedangkan desentralisasi tercermin dari adanya pembagian daerah hukum, pengoperasionalan anggaran dan pendelegasian wewenang terbatas. Pendelegasian wewenang mabes kepada polda ini adalah merupakan salah satu bentuk desentralisasi administrasi, sebagaimana pembagian tipe desentralisasi. Desentralisasi administrasi yang dimaksud adalah transfer kegiatan atau aktivitas pemerintahan pusat kepada pejabat-pejabat di tingkat daerah dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien. Demikian halnya penjenjangan organisasi kepolisian tingkat Mabes Polri kepada polda adalah merupakan transfer aktivitas atau kewenangan yang telah dipilih dan dipilah oleh pusat (Mabes) untuk dilaksanakan oleh jenjang organisasi di bawahnya, yakni polda dan berjenjang ke tingkat polwil sampai polres.

Penjenjangan struktur organisasi dari tingkat Mabes sampai tingkat kewilayahan pada dasarnya ditekankan pada pembagian daerah hukum dan tanggungjawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi, di mana masing-masing jenjang memiliki struktur organisasi sendiri yang memiliki garis hubungan vertikal dari atas ke bawah (*top down*) dan dengan sistem pertanggungjawaban dari bawah ke atas (*bottom* up). Jenjang organisasi tersebut terdiri dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Mabes Polri berada di tingkat pusat, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah, disingkat Polda berada di daerah dalam struktur di bawah, Kepolisian Wilayah (Polwil) berada di wilayah dan di bawah polda, Kepolisian Resort (Polres) berada di bawah Polwil, bahkan sampai tingkat Kepolisian Sektor (Polsek). Hal ini merupakan sebuah mata rantai yang tidak terputus sehingga segala pertanggungjawaban penyelenggaraan kepolisian oleh organisasi tingkat bawah dilakukan berjenjang sampai tingkat atas (Mabes Polri), seperti polsek bertanggungjawab kepada polres; polres bertanggungjawab kepada polwil; polwil bertanggungjawab kepada polda; dan polda bertanggungjawab kepada organisasi di tingkat mabes, baik secara struktural maupun fungsional. Selain itu hubungan yang bersifat horizontal atau menyamping dengan organisasi kepolisian tingkat daerah bersifat koordinatif atau bantuan, misalnya polda dengan polda, polwil dengan polwil hingga tingkat polres dan polsek dalam satu daerah maupun di luar daerah.

Kepres No. 70 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri menjelaskan organisasi kepolisian disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan [vide: pasal 3 ayat (1), (2) dan (3)]. Jenjang di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri dan ditingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda. Di tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki jenjang ke kesatuan wilayah yang disebut dan disingkat Polwil/Polwiltabes, Polres/Polresta dan Polsek/Polsekta yang setiap jenjang atau tingkatan memiliki unsur-unsur. Keppres No. 70 tahun 2002 tersebut juga menyebutkan bahwa struktur organisasi di tingkat Mabes Polri memiliki unsur-unsur yang terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan;
2. Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf;
3. Unsur Pelaksana Pendidikan dan atau/Pelaksana Staf Khusus;
4. Unsur Pelaksana Utama Pusat;
5. Satuan organisasi penunjang lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari Kepres No. 70 tahun 2002, dikeluarkan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Polri yang kemudian dirubah dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/30AT/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/ 2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Polri, dan keluarnya Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Itwasum Polri, Divpropam Polri serta Baintelkam Polri. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tersebut mengatur satuan-satuan organisasi pada tingkat Mabes Polri. Namun demikian belum memuat Organisasi dan Tata Kerja Itwasum Polri, Divpropam dan Baintelkan Polri dengan segala perubahannya. Maka kemudian dikeluarkan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 sebagai penyempurnaannya. Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Polri berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53A/2002 tanggal 17 Oktober 2002. Selain jenjang di tingkat Mabes Polri untuk jenjang di tingkat kewilayahan diatur dalam Pasal 26 Keppres No. 70 Tahun 2002 yang substansinya mengatur tentang Struktur Organisasi dan Unsur-unsur di tingkat Polda, dan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/54/X/ 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Unsur-unsur pada tingkat polda adalah:

1. Unsur Pimpinan;
2. Unsur Pembantu Pimpinan/Pelaksana;
3. Staf;
4. Unsur Pelaksana Pendidikan/Staf;
5. Khusus dan Pelayanan;
6. Unsur Pelaksana Utama; dan
7. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan Staf Kewilayahan Polri Wilayah yang disingkat Polwil.

Tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu fungsi pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikaitkan dengan rumusan Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas pokok kepolisian, sehingga fungsi kepolisian juga sebagai tugas pokok kepolisian. Dengan demikian, tugas pokok kepolisian dapat dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Istilah pemerintah di sini mengandung arti sebagai organ/badan/alat perlengkapan negara yang diserahi pemerintahan, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kepentingan umum sehingga fungsi pemerintahan adalah fungsi dari lembaga pemerintah yang dijalankan untuk mendukung tujuan negara, karena pemerintah dalam arti sempit merupakan salah satu unsur dari sistem ketatanegaraan.

Pada sisi lain, tugas pokok kepolisian yang dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian sebagaimana telah dijelaskan di muka, dijalankan tertuju pada terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Berpijak pada teori pembagian kekuasaan dan sistem pemerintahan presidensiil, fungsi pemerintahan diselenggarakan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, sehingga Presiden bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu mengkaji tentang kedudukan kepolisian yang didasarkan pada fungsi utamanya, tidak dapat di pisahkan dengan fungsi utama pemerintah yang dipimpin oleh Presiden. Dikaji dari cara memperoleh wewenang, kewenangan kepolisian diperoleh secara atributif, artinya wewenang tersebut bersumber pada UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2002 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Philippus M. Hadjon mengatakan, bahwa wewenang atributif artinya wewenang yang bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari negara hukum, supremasi hukum dan pemerintahan yang menganut sistem presidensiil yang harus menempatkan semua lembaga kenegaraan berada di bawah UUD 1945, seperti dikemukakan oleh Soewoto Mulyosudarmo (2004: 7) bahwa konsekuensi dari sistem presidensil yaitu sebagai sistem yang menempatkan semua lembaga kenegaraan berada di bawah UUD 1945. Selain itu, dalam sistem pemerintahan presidensiil, Presiden bertanggungjawab atas penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum.

Kedudukan kepolisian tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UUD 1945. Hal ini berbeda dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang diatur secara tegas dalam Pasal 10 UUD 1945, yakni Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Akan tetapi ketentuan dalam Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut pembentukan undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya. Maka konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 tersebut adalah dibentuk UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, di mana di dalam UU dimaksud lembaga kepolisian diposisikan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Disamping itu ada beberapa instrumen hukum yang sebelum lahirnya UU No. 2 Tahun 2002 telah mengatur tentang kedudukan lembaga Polri di bawah Presiden, seperti Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri.

Jika dilihat dari sejarah perkembangan pemikiran dan upaya untuk memposisikan kepolisian, ada suatu proses perjuangan dan pertentangan yang serius antar beberapa lembaga yang menginginkan kepolisian berada di bawah lembaganya, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman dan Jaksa Agung. Bahwa sesudah pengakuan kedaulatan timbul dua persoalan yang saling berkait tentang posisi kepolisian nasional:

1. Kementerian manakah yang seharusnya berwenang atas angkatan kepolisian. Dalam hal ini, Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri masing-masing ingin memasukkan kepolisian di bawah wewenangnya
2. Pihak-pihak lain yang mengusulkan agar kepolisian tetap di bawah kekuasaan Perdana Menteri atau dibentuk kementerian baru, yakni Kementerian Keamanan yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Tarik menarik terjadi karena adanya suatu anggapan, bahwa membawahi kepolisian akan memperkuat kekuasaan dan prestise Kementerian bersangkutan yang berhasil memenangkannya, sehingga persaingan untuk itu semakin menjadi sengit.

Pergulatan memposisikan lembaga kepolisian tetap berlanjut, dan yang terakhir terjadi di era reformasi dengan dikeluarkannya Tap. MPR RI No. VI/MPR/2000, Tap. MPR No. VII/MPR/2000 dan dibentuknya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, sehingga Polri diposisikan kedudukannya di bawah Presiden. Namun demikian perdebatan inipun juga belum berakhir. Dalam teori ketatanegaraan, bagi negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil negara dipimpin oleh seorang Presiden dalam jabatannya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Dikaitkan dengan makna kepolisian sebagai “alat negara” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, berarti kepolisian dalam menjalankan wewenangnya berada di bawah Presiden selaku Kepala Negara. Pada sisi lain, fungsi kepolisian yang mengemban salah satu “fungsi pemerintahan” mengandung makna bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kepolisian, terutama tugas dan wewenang di bidang keamanan dan ketertiban. Sebagaimana dikatakan oleh Bagir Manan, bahwa Presiden adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara. Penyelenggaraan administrasi negara meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi yang dikelompokkan ke dalam:

1. Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum;
2. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain;
3. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan;
4. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Pasal 6 ayat (1) Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Polri adalah alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, terutama di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Konsekuensi dari menjalankan salah satu fungsi pemerintahan tersebut, maka kedudukan kepolisian berada di bawah Presiden yang secara ketatanegaraan tugas pemerintahan tersebut adalah merupakan tugas lembaga eksekutif yang dikepalai oleh Presiden. Namun demikian, perdebatan kedudukan kepolisian di bawah Presiden masih terus berlanjut untuk memposisikan posisi lembaga kepolisian yang ideal sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sebagai wacana dan pertimbangan dalam menempatkan kepolisian pada kedudukan yang ideal, dikemukakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Secara filosofis—eksistensi eksistensi fungsi kepolisian telah ada sebelum dibentuknya organ kepolisian karena fungsi kepolisian melekat pada kehidupan manusia, yakni menciptakan rasa aman, tenteram dan tertib dalam kehidupan sehari-harinya.
2. Secara teoritis—kepolisian sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Kata “alat negara” dapat dimaknai sebagai sarana negara ini ada tiga: sarana hukum, sarana orang dan sarana kebendaan yang digunakan sebagai pendukung atau penunjang dalam penyelenggaraan suatu negara. Dengan demikian kepolisian sebagai alat negara mengandung arti bahwa kepolisian merupakan sarana penyelenggaraan negara yang penekanannya pada sumber daya manusia (orang) yang dalam operasionalnya sangat dipengaruhi di mana lembaga tersebut diposisikan.
3. Secara yuridis—wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, karena tugas dan wewenang penyelenggaraan kepolisian telah diatur dan bersumber pada konstitusi, yakni diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, walaupun tindak lanjutnya perlu di atur dalam undang-undang.

Susunan yang dimaksud dalam bahasan ini adalah jenjang kesatuan yang ada dalam organisasi, bukan struktur organisasi dalam tiap-tiap jenjang. Susunan kepolisian adalah jenjang kesatuan kepolisian dalam menjalankan organisasi kepolisian dari tingkat pusat sampai daerah. Landasan yuridis susunan kepolisian ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 yang substansinya, sebagai berikut:

1. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayahan;
2. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri;
3. Organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda.

Berorientasi pada tehnis operasional kepolisian dengan konsep mengedepankan fungsi pembinaan masyarakat melalui pembinaan dan kemitraan serta *community policing*, setelah dilakukan validasi dan pengurangan kewenangan operasional terhadap beberapa Kepolisian Wilayah (Polwil), maka perlu dibentuk Pos-Pos Polisi di tingkat Kelurahan/Desa sebagai pendamping dan pembina pejabat keamanan tingkat Kelurahan/Desa yang kemudian menyentuh pada keamanan tingkat RW, RT atau Dusun (Sadjijono, 2005: 323-324). Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002, bahwa Polri adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Memaknai istilah kepolisian nasional dengan meminjam konsep pemaknaan bahwa hukum nasional adalah hukum yang berlaku secara nasional yang dihadapkan dengan hukum yang berlaku secara lokal, yaitu hukum adat, hukum nasional sebagai hukum yang dinyatakan berlaku secara nasional oleh pembentuk undang-undang nasional. Pada sisi lain, Solly Lubis (1997: 7) dalam membahas tentang pembangunan hukum nasional dan wawasan nasional mengatakan bahwa:

Pembangunan hukum nasional dan wawasan nasional merupakan satu paket yang berangkat dari titik tolak strategi yang sama, yakni konsep dan cita-cita negara kesatuan, yang cenderung membela dan mempertahankan kelestarian dan keutuhan negara bangsa (*nation-state*) Indonesia.

Berpijak pada pemaknaan istilah “hukum nasional” di atas, istilah “kepolisian nasional” dapat dimaknai sebagai satu kesatuan kepolisian yang dimiliki oleh bangsa (*nation*) secara nasional tidak terpisah-pisahkan secara lokal atau kedaerahan dan tersentral pada kepolisian pusat. Jadi, kepolisian nasional di sini mengandung arti bukan merupakan kepolisian lokal yang terpisahkan dan berdiri sendiri pada tiap-tiap lokal atau daerah. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri menjelaskan adanya pembagian wilayah hukum. Pembagian wilayah hukum ini adalah membagi wilayah atau daerah dengan menentukan batas daerah yang menjadi area dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum dan menjadi tanggungjawabnya. Batas wilayah hukum berkaitan erat dengan luas wilayah atau daerah dalam suatu kesatuan kepolisian sehingga dalam lingkup wilayah yang telah ditentukan menjadi beban tanggungjawabnya secara hukum, seperti contoh daerah propinsi Jawa Timur dengan batas-batas: sebelah selatan Samudera Indonesia, sebelah barat Propinsi Jawa Tengah; sebelah utara Laut Jawa; dan sebelah timur Selat Bali merupakan daerah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Dengan demikian, luas wilayah dalam suatu daerah propinsi merupakan daerah hukum suatu kepolisian propinsi (Polda) dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.

Daerah hukum berkaitan erat dengan pembagian kewenangan satuan kepolisian berdasarkan penjenjangan satuan, sehingga semakin kecil kesatuan semakin sempit daerah hukumnya dan semakin terbatas wewenangnya. Pendelegasian tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan di muka dilakukan secara berjenjang, seperti tugas dan wewenang kepolisian pusat (mabes) delegasi wewenang kepada kepolisian propinsi (polda), tugas dan wewenang kepolisian propinsi sebagian didelegasikan kepada kepolisian wilayah (polwil) dan selanjutnya kepada kepolisian kabupaten/kota (polres/polresta), polres kepada kepolisian sektor (polsek) demikian seterusnya. Pembagian kewenangan ini dirumuskan dalam Pasal 26 ayat (2) Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 yang substansinya “Pola bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

**Fungsi kepolisian dalam sistem pemerintahan negara**

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun kelompok masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas. Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* (sistem peradilan pidana) bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi. Negara dapat berjalan dengan baik tanpa tentara, tetapi tidak demikian jika polisi tidak terdapat dalam negara bersangkutan. Jepang dan Kosta Rika (Amerika Latin) tidak mempunyai tentara tetapi kehidupan masyarakatnya dapat berjalan aman, tenteram dan damai karena di kedua negara tersebut terdapat institusi kepolisian yang bertugas memelihara kamtibmas (Sadjijono, 2007: 319).

Mengingat urgennya keberadaan polisi, maka sudah selayaknya jika polisi diberikan kemandirian dalam menjalankan tugas selaku pemelihara kamtibmas dan sebagai aparat penegak hukum. Tanpa kemandirian, polisi tidak akan dapat menjalankan tugas dengan baik. Polri—sejak bergulirnya angin reformasi—terus dibenahi seiring dengan kebutuhan jaman dan perkembangan masyarakat. Semula, Polri merupakan bagian dari militer bersama matra yang lain, yaitu TNI AD, TNI AU dan TNI AL. Dimasukkannya Polri dalam ABRI menjadikan pengembangan kelembagaan maupun personil Polri tidak mandiri karena sering diintervensi dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai aparat penegak hukum. Apabila suatu kasus melibatkan atau mempunyai keterkaitan kepentingan dengan matra ABRI (TNI) yang lain, maka kinerja Polri tidak dapat berjalan dengan baik. Fakta sejarah membuktikan betapa Polri tidak berdaya menangani kasus yang di dalamnya terdapat kepentingan matra ABRI yang lain. Sebagai contoh adalah penanganan kasus pembunuhan Marsinah, kasus penculikan aktivis pro demokrasi oleh Kopasus, kasus pembunuhan Udin (wartawan Harian Bernas, Yogyakarta), kasus Trisakti dan Semanggi, dan lain-lain.

Menempatkan Polri sebagai bagian dari ABRI merupakan satu-satunya model kepolisian di dunia. Di negara manapun di seluruh dunia institusi kepolisian bersifat mandiri dan tidak menjadi subordinat institusi militer. Kenyataan demikian menjadikan kerjasama antara Polri dengan kepolisian negara lain tidak dapat berjalan normal. Negara lain tidak mau bekerjasama dengan Polri karena merupakan bagian dari militer dengan sifat destruktif, defensif, dan offensif, sementara sifat hakiki dari polisi adalah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Melihat kenyataan seringnya kinerja Polri diintervensi lembaga ekstra yudisial, kemudian muncul keinginan agar Polri dipisahkan dari ABRI. Maka, sejak 1 April 1999 Polri dipisahkan dari ABRI. Selanjutnya. melalui Kepres No. 89/2000, sejak 1 Juli 2000 Polri ditempatkan langsung di bawah Presiden. Kepres tersebut kemudian dikukuhkan menjadi Tap MPR No. VII/2000 yang menempatkan Polri berada di bawah Presiden, kemudian dikukuhkan melalui UU Polri No. 2 tahun 2002 tentang Polri. Kemandirian Polri sangat diperlukan terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum (Pidana). Peradilan pidana bertujuan memulihkan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat tindak kejahatan. Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana, polisi mutlak memiliki kemandirian agar bebas dari intervensi kekuasaan ekstra yudisiil. Tanpa kemandirian mustahil polisi mampu menjalankan tugas dengan baik sebagai aparat penegak hukum (Sadjijono, 2007: 340).

Aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan telah mandiri, sehingga mereka dapat dengan bebas menjalankan tugas dalam peradilan pidana. Perangkat hukum yang ada telah menjamin kemandirian lembaga tersebut, yaitu UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; UU No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman; UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, telah memberikan jaminan kemerdekaan bagi jaksa dan hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Sementara UU Polri baru diubah pada bulan Januari 2002 melalui UU No. 2 Tahun 2002. Itupun dilakukan setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, yakni sejak institusi Polri dijadikan bulan-bulanan atau diobok-obok oleh Presiden Abdurahman Wahid. Ketidaksinkronan regulasi bagi institusi Polri dimanfaatkan oleh penguasa untuk melakukan intervensi ke tubuh Polri. Di samping itu juga melemahkan kinerja dan keberadaan (posisi) Polri di samping aparat penegak hukum yang lain. Tidak jarang aparat polisi mengalami kesulitan melaksanakan tugas manakala terbentur kekuasaan ekstra yudisiil di luar dirinya yang melakukan kooptasi dalam pelaksanaan tugas polisi. Kendati polisi mempunyai diskresi dalam menjalankan tugas, adanya belenggu struktural dan kelembagaan tersebut tidak memungkinkan polisi untuk mengembangkan diskresinya dengan baik. Padahal, diskresi polisi tersebut dapat dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai *order maintenance* maupun sebagai *official law enforcement* (Sadjijono, 2007: 341).

Secara historis sebenarnya keberadaan lembaga kepolisian pernah berdiri sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 D Tahun 1946 tanggal 1 Juli 1946, kepolisian ditempatkan di bawah Perdana Menteri. Namun kemudian Polri ditempatkan di bawah kendali militer berdasarkan Penetapan Dewan Pertahanan Negara No. 112 tanggal 1 Agustus 1947. Kondisi tersebut terus dipertahankan dalam UU No. 20 Tahun 1982 tentang Hankam dan UU No. 28 Tahun 1997 tentang Polri. Namun, berdasarkan Kepres No. 89 Tahun 2000 yang kemudian dikukuhkan melalui Tap MPR No. VII/2000 kemandirian Polri sudah dijamin, lalu dikukuhkan melalui UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri.

Kebijakan memandirikan Polri dengan menempatkan langsung di bawah Presiden berarti menyamakan kedudukan polisi dengan penegak hukum yang lain. Kejaksaan sejak lama sudah merupakan lembaga tersendiri yang terlepas dari departemen (menteri) dan berada langsung di bawah presiden. Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Lembaga peradilan malah lebih mandiri dan bebas karena berada di luar kekuasaan eksekutif. Lembaga peradilan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang kebebasan dan kemandiriannya dijamin oleh Pasal 24 UUD 1945 (Sadjijono, 2007: 341).

**Wewenang kepolisian menurut Tap. MPR RI No. VI/MPR/ 2000**

Keluarnya Tap MPR RI No. VI/MPR/2000 memberikan perubahan yang prinsip bagi eksistensi Polri dan sekaligus menegaskan perbedaan peran kepolisian dengan tentara, dan disamping itu memisahkan secara tegas eksistensi lembaga TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan Polri, sehingga tidak ada lagi lembaga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai wadah untuk mengintegrasikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri.

Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 menetapkan, bahwa “Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara,” sedangkan “Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.” Di sini ada perbedaan peran yang sangat mendasar antara TNI dan Polri, di mana TNI memiliki peran dalam “pertahanan negara”, sedangkan Polri “memelihara keamanan.” Yang dimaksud pertahanan negara adalah sebagai *protector*, yakni menjaga dan memelihara kedaulatan negara dan integritas bangsa dengan menangkal segala kegiatan dan tindakan yang mengancam keutuhan dan keselamatan negara dan bangsa, baik yang datangnya dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sedangkan “memelihara keamanan,” mengandung makna menjaga terpeliharanya situasi dan kondisi bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan, dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian akan terjaminnya segala kepentingan, atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum (Brotodiredjo, 1984: 7).

Pertahanan negara jelas menjadi tanggung jawab TNI, sedangkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam negeri menjadi tanggung jawab Polri. Walaupun dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan harus bekerjasama dan saling membantu, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3) Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000. Namun demikian, peran tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga. Hal ini sebagai konsekuensi logis adanya pemisahan secara kelembagaan antara TNI dan Polri.

**Wewenang kepolisian menurut Tap MPR RI No. VII/MPR/2000**

Keluarnya Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai tindak lanjut dari Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 khususnya pasal 3 ayat (1) yang menetapkan “Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Sehingga Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 ini mengatur lebih rinci dan jelas peran TNI dan peran Polri. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan inti peran dari Polri, yakni “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Dan dalam menjalankan perannya tersebut wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional.

Setelah keluarnya Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang pemisahan secara kelembagaan antara TNI dan Polri berikut perannya masing-masing yang jelas berbeda dan dipisahkan serta dipertanggungjawabkan oleh masingmasing lembaga. Peran kepolisian di atas adalah sebagai peran pokok, selain itu masih ada peran-peran yang lain yang bersifat khusus, yakni berkaitan dengan negara dalam keadaan darurat, keikutsertaannya sebagai Interpol dan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai mana dirumuskan dalam Pasal 9 ayat (1), (2) dan ayat (3) Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 yang subtansinya sebagai berikut:

* 1. apabila negara dalam keadaan darurat memberikan bantuan kepada TNI;
  2. turut serta secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota *International Criminal Police Organization* atau *Interpol*;
  3. membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (*peace keeping operation*) di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berkaitan dengan keikutsertaannya dalam penyelenggaraan negara, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis serta tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

**Wewenang kepolisian menurut UUD 1945**

Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tugas dan wewenang kepolisian dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang rumusannya sebagai berikut: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Rumusan fungsi kepolisian dalam UUD 1945 ini memiliki dua makna, yakni fungsi yang melekat sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tugas yang dijalankan, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dari rumusan ini dapat dimaknai, pada tataran akhir pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dapat terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Aman dalam arti perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis, perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari resiko dan perasaan damai lahiriah dan batiniah, atau bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung atau tersembunyi, dan tidak mengandung resiko sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahsa Indonesia (1994: 29).

Dalam mewujudkan situasi dan kondisi aman dan tertib tersebut diselenggarakan melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan penegakan hukum. Tugas memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat adalah merupakan tugas-tugas sosial, sedangkan penegakan hukum merupakan tugas yustisiil. Tugas dan wewenang kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 tersebut adalah merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan Ketetapan MPR RI No. III/MPR/ 2000 merupakan sumber hukum yang tertinggi. Sehingga secara teoritis, bahwa pengaturan tentang fungsi dan eksistensi kepolisian yang diatur dalam sumber hukum yang lain tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis (*grondwet*).

**Wewenang Kepolisian Menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri**

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri ini adalah merupakan tindak lanjut dan amanat dari Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, khususnya Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan, “Hal-hal yang menyangkut Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara lengkap dan terperinci diatur lebih lanjut dalam undang-undang secara terpisah.” Oleh karena itu Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 merupakan undang-undang yang khusus mengatur tentang Polri secara kelembagaan, di antaranya meliputi: eksistensi, fungsi, tugas dan wewenang maupun bantuan, hubungan dan kerjasama kepolisian.

Dalam undang-undang tersebut, fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 berbunyi, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Adalah merupakan tugas dan wewenang kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya secara kelembagaan. Sedangkan perannya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, merupakan keikutsertaannya dalam menjalankan fungsi pemerintahan, dimana tugas dan wewenang dimaksud merupakan salah satu tugas dan wewenang pemerintah, karena dibentuknya Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanyaketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang merupakan tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah.

Dari konsep tugas dan wewenang Polri di atas, bermuara pada terbentuknya suatu negara yang sejahtera adil dan makmur sebagaimana yang menjadi cita-cita dan tujuan negarayang tersurat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga tujuan akhir diselenggarakannya tugas dan wewenang kepolisian, untuk menciptakan dan atau mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil dan makmur. Di sinilah yang dimaksudkan fungsi kepolisian adalah salah satu tugas dan wewenang pemerintahan negara, karena tugas menciptakan kondisi dimaksud adalah merupakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah atau negara yang didelegasikan kepada Polri.

**Wewenang Kepolisian Menurut Keppres No. 89 Tahun 2000**

Keputusan Presiden adalah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan, sehingga fungsi kepolisian yang diatur di dalam Keputusan Presiden juga merupakan legalisasi tentang tugas dan wewenang kepolisian, namun Keputusan Presiden dimaksud memiliki urutan yang lebih rendah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Tata Urutan Perundang-undangan yang dicabut dengan Tap MPR No. I/MPR/2003 dan ditindaklanjuti dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Tugas dan wewenang kepolisian dalam Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 dirumuskan dalam Pasal 1, yang substansinya berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yangmempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri.” Keputusan Presiden dimaksud semakin menguatkan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan, yang dapat dimaknai sebagai lembaga eksekutif atau pelaksana undang-undang. Tugas pokok kepolisian yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 sangat berbeda dengan rumusan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002, tugas pokok kepolisian dirumuskan, sebagai berikut:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan tugas pokok kepolisian yang dirumuskan dalam Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 meliputi: menegakkan hukum; ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri.

Perbedaan tugas pokok kepolisian yang ada dalam kedua peraturan perundangundangan tersebut, secara praktis tidak menimbulkan permasalahan, akan tetapi secara konseptual akan dapat mengkaburkan makna tugas dan wewenang, fungsi dan tugas pokok. Oleh karena itu rumusan yang ada dalam Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 harus direvisi dan disesuaikan dengan rumusan tugas pokok kepolisian yang ada dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002, mengingat di dalam urutan perundang-undangan, undang-undang hierarkhinya lebih tinggi dari Keputusan Presiden dan ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak terdapat klausul yang saling bertentangan yang menimbulkan konflik norma. Konsep tugas dan wewenang kepolisian di Indonesia dirumuskan dalam Pasal 2 Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/200 tentang Pemisahan TNI dan Polri, Pasal 6 ayat (1) Ketetapan MPR RI No. VII/ MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Pasal 2 dan Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, secara khusus dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Polri. Apabila dicermati dan dikaji secara mendalam, rumusan dalam Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000, Ketetapan MPR RI No. VII/ MPR/2002, dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang merumuskan bahwa Polri adalah “alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat,” mengandung suatu penafsiran bahwa kepolisian adalah sebagai “alat penguasa Negara” khususnya dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut *Black’s Law Dictionary*, Negara diartikan, sebagai “*the political system of a body of people who are politically organized*” dan Negara adalah suatu organisasi kekuasaan (Suhino, 1986: 149). Negara adalah organisasi yang dapat memaksa kehendaknya (Abu Daud Busroh, 2001: 1). Mengingat Negara dipegang oleh seorang Kepala Negara yang diangkat ataupun dipilih untuk dan sebagai pemegang jabatan “politik”, maka kepolisian sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat oleh pemegang jabatan politik yang sedang berkuasa, baik untuk kepentingan politik maupun kepentingan bangsa. Berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Rumusan di dalam Pasal 2 ini menekankan fungsi pemerintahan, di mana kepolisian mengemban salah satu fungsi pemerintahan yang ada. Fungsi kepolisian tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas dan wewenang kepolisian, baik tugas dan wewenang preventif maupun represif. Luasnya lingkup tugas dan wewenang menyelenggarakan pemerintahan ini sejalan dengan semakin luasnya tugas-tugas dan wewenang negara, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. penyelenggaraan administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum;
2. menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain;
3. menyelenggarakan administrasi negara di bidang pelayanan umum; dan
4. menyelenggarakan administrasi Negara di bidang kesejahteraan umum, dan lain-lain.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dimaksud, salah satu fungsi yang diemban oleh kepolisian masuk pada penyelenggaraan administrasi negara di bidang keamanan dan ketertiban umum, di mana tugas dan wewenang memelihara, menjaga, dan menegakkan keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas dan wewenang paling awal dan tradisional setiap pemerintahan. Akan tetapi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum bukan semata-mata fungsi sebagai penyelenggaraan administrasi negara, karena pemegang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang bertugas memutus perkarapun juga memelihara, menjaga dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum, termasuk peradilan pidana, karena peradilan pidana juga mengemban fungsi untuk menjaga, memulihkan keamanan dan ketertiban umum. Walaupun demikian penyelenggaraan administrasi negara tetap memegang utama dan menjalankan tugas dan wewenang, baik preventif maupun represif, sedangkan *judiciary* hanyalah tugas dan wewenang represif saja. Menurut Philipus M. Hadjon (6-8), fungsi pemerintahan tersebut secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan, antara lain: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan- tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya. Salah satu fungsi pemerintahan yang diemban oleh kepolisian adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang tehnisnya melalui perizinan, pengesahan, persetujuan, pengawasan atau control, penyelidikan dan menuntut pelanggaran dan lain-lain.

**Kesimpulan dan Saran**

Mencermati hukum positif di Indonesia minimal ada empat instrumen hukum yang mengatur tentang kedudukan Polri, yakni: Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/ 2000, Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Polisi berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Disamping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Kemandirian polisi sangat diperlukan terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum. Dalam UUD 1945, Pasal 30 ayat (4) menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Sedangkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dijelaskan, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Di sini ditekankan pada fungsi pemerintahan, di mana Polri mengemban salah satu fungsi pemerintahan yang ada. Fungsi kepolisian tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas dan wewenang kepolisian, baik tugas dan wewenang preventif maupun represif.

Dampak pemisahan Polri dari TNI, di samping memandirikan Polri juga membawa beban berat. Polri harus bertanggungjawab penuh atas situasi kamtibmas dalam negeri. Sementara TNI tidak boleh ikut campur, kecuali jika situasi sangat kacau dan atas permintaan Polri TNI dapat memberikan bantuan.

Maraknya aksi unjuk rasa akibat euphoria demokrasi membuat Polri harus mencurahkan perhatian agar tidak terjadi bentrok fisik antar kelompok massa. Masih maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa dan aktivis yang kadang kala keluar dari koridor hukum dan menimbulkan bentrokan dengan aparat. Sesuai UU No. 9/1998, demonstrasi tidak boleh dilakukan sembarangan, namun harus mematuhi aturan dan mekanisme yang telah ditentukan. Tetapi aturan main tersebut sering dilanggar sehingga merepotkan Polri dalam menertibkannya

**Daftar Pustaka**

Addink, G.H., *Principles of Good Governance,* Utrecht Uni­versity, the Netherlands, 2003

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum,* Pustaka Prima, Jakarta, 1988.

Arsyad, A. Mukti, dkk., *Amandemen UUD1945 Antara Teks dan Konteks Dalam Negara Yang Sedang Berubah,* Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Kedua, 2000.

Asmara, Galang. Disertasi. Judul: *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Ombudsman Ditinjau Dari System Pemerintah dan Sistem Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia,* Program Pascasarjana Unair Surabaya, 2003.

Azhari. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya,* UIPress, Jakarta, 1995.

Brotodiredjo, Soebroto. *Asas-asas Wewenang Kepolisian, Sedikit Tentang Hukum Kepolisian Di Indonesia, Menyongsong Undang-undang Kepolisian Yang Baru*, Bunga Rampai, PTIK Jakarta, 1984.

Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-3, 2001.

Effendi, Lutfi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bayu Media, Malang, 2004.

Hadjon, Philipus M. dalam papernya berjudul “*Tentang Wewenang*”, tanpa tahun.

Hazairin dalam Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia,* LPIP, Yogyakarta, 2002.

Henry, Campbell Black, *Black’s Law Dictionary with Pronunciations*, Fifth Edition, West Publishing & Co. USA, 1979.

Kantaprawira, Rusadi, makalah dalam Lokakarya *Profesionalisme dan Kemandirian Polri,* Bandung, tanggal 34 Agustus 1998.

KoesparmonoIrsan, dalam Eko Prasetyo, dkk., *Polisi Masyarakat dan Negara,* Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.

Litvack & Seddon dalam Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Managemen Pemerintahan Daerah*, Fokusmedia, Cet. Keempat, Bandung, 2003.

Lubis Solly, dalam kumpulan karya ilmiah para pakar hukum editor I Made Widnyana, *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Erasco, Bandung, 1997.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian Suatu Studi Historis Komperatif,* PTIK, Jakarta, 1972.

Mutyosudarmo Soewoto, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Assosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans*, Malang, 2004.

Nieuwenhuis dalam Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Edisi Kedua, 2001.

Hadjon, Philipus M. *Analisis Terhadap RUU Administrasi Pemerintahan,* disampaikan dalam Forum Sosialisasi RUU Administrasi Pemerintahan tanggal 15 Juni 2005 di Surabaya.

Purwodarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Sadjijono, M. Khoidin. *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang, Yogyakarta, 2007. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Edisi kesatu, Yogyakarta, 2005.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, LaksBang Mediatama, Surabaya, 2008.

Indriyanto, Seno Adji. Artikel dengan judul “*Polisi Profesional”, “Violence Culture”* dimuat dalam harian Kompas tanggal 4 Mei 2004.

Suhino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Vollenhoven van dalam Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1981.

**Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan**

Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 tentang Ketentuan Pokok Hamkam.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri,

Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Internet**

<https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-polri/>

# ***CROWD POLICING* GUNA MENCEGAH KONFLIK TAWURAN DALAM RANGKA MEMELIHARA KAMTIBMAS YANG KONDUSIF**

**Didi Dewantoro**

**Peserta Didik Sespimmen Lemdiklat Polri Dikreg 63 Tahun 2023, Lembang 40391, Indonesia**

**e-mail: didi.dewantoro63@gmail.com**

**Abstrak**

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ‘suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum sehingga tercapainya serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam rangka menangkal, mencegah, serta menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum serta bentuk-bentuk lainnya yang meresahkan masyarakat”. Ada begitu banyak ancaman terhadap kamtibmas, Salah satunya yaitu konflik tawuran. Adapun di wilayah hukum Polres Tegal, ancaman gangguan kamtibmas yang kerap kali terjadi dan terus berulang hingga menimbulkan korban jiwa adalah konflik tawuran yang terjadi antar pelajar. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Polres Tegal telah berupaya mencegah terjadinya konflik tawuran, namun masih belum optimal. Penulis merekomendasikan Polres Tegal untuk mengambil tindakan yang komprehensif dalam memelihara Kamtibmas yang kondusif dengan mencegah terjadinya konflik tawuran antar pelajar dengan cara melaksanakan *crowd policing*.

***Kata kunci: pemolisian kerumunan; keamanan dan ketertiban masyarakat; tawuran***

***Abstract***

*Security and public order according to Article 1 of Law Number 2 of 2002 concerning Polri (Indonesian National Police) is "A dynamic condition of society as one of prerequisites for implementation of national development process in order to achieve national goals, characterized by ensuring security, order and upholding of law so as to achieve establishment of peace which contains ability to foster and develop potential and strength of society in order to ward off, prevent and overcome all forms of law violations and other forms that disturb society". In Tegal Police jurisdiction, threat of disruption to public order and community security that frequently occurs and often causing fatalities, is brawls between students. Tegal Police have tried to prevent brawls from occurring, but still not optimal. For this reason, Tegal Police need to take comprehensive action to maintain conducive social security and order by preventing brawls between students by implementing crowd policing.*

***Keywords: brawls; crowd policing; security and public order***

**Pendahuluan**

Era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perubahan kondisi lingkungan menjadi VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Istilah ini juga dapat digunakan untuk kata sifat (gejolak, tidak pasti, kompleks, dan ambigu). Istilah VUCA ini sendiri berasal dari US Army War College untuk menggambarkan situasi di Perang Dingin. Sejak itu, konsep VUCA telah diadopsi oleh perusahaan dan organisasi di banyak industri dan sektor untuk memandu kepemimpinan dan perencanaan strategis (<https://www.gramedia.com/best-seller/vuca/>). Situasi yang bergejolak, tidak pasti, kompleks dan ambigu telah berdampak pada perkembangan lingkungan strategis yang dinamis pada tataran global yang berpengaruh terhadap situasi dan kondisi keamanan berbagai negara yang ada di dunia. Dinamika sosial yang terjadi akibat VUCA merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sehingga memunculkan ancaman gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dan kejahatan jenis baru yang bermunculan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, setiap negara harus dapat mengantisipasi kondisi yang dinamis saat ini. Kondisi tersebut tentunya mempengaruhi situasi dan kondisi keamanan dalam negeri bangsa Indonesia yang berdampak pada pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yang menjadi semakin dinamis dan tidak menentu arahnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu lembaga pemerintah non departemen—berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002—diberi tanggung jawab untuk menangani dan mencegah masalah-masalah yang ditimbulkan oleh VUCA di atas. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam Pasal 13 dari UU RI No. 2/2002, yaitu “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas.” Salah satu ancaman gangguan kamtibmas yang paling rawan pada saat ini adalah konflik sosial. Konflik sosial yang sering terjadi dan terus terjadi berulang kali hingga menimbulkan korban jiwa di wilayah hukum Polres Tegal adalah konflik tawuran yang terjadi antar pelajar. Polres Tegal—sebagai perpanjangan tangan Polri pada tingkat KOD (Komando Operasional Dasar)—harus dapat menuntaskan konflik antar pelajar tersebut. Selama ini Polres Tegal terus berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya konflik tawuran antar pelajar yang terjadi. Namun, seperti sudah menjadi sebuah budaya, meski sudah dibasmi berkali-kali namun konflik tawuran antar pelajar ini masih terus saja terjadi sampai saat ini.

Hal ini patut diduga sangat erat kaitannya dengan belum ditemukannya akar permasalahan terkait konflik tawuran antar pelajar. Selain itu, model pemolisian yang telah diterapkan oleh Polres Tegal saat ini masih belum tepat sasaran dalam mencegah terjadinya konflik tawuran tersebut. Pada sisi lain, Polres Tegal telah berupaya menerapkan pemolisian kerumunan (*crowd policing*) yang berfokus pada mencegah dan membubarkan (*dispersing*) pelajar yang berkerumun (*assembling*). Namun, pelaksanaan pemolisian kerumunan tersebut masih belum terlaksana dengan optimal apabila ditinjau dengan menggunakan pendekatan perspektif *balanced scorecard* dengan aspek pembelajaran dan pertumbuhan, proses bisnis, pelanggan (masyarakat), dan *stakeholders* (para pemangku kepentingan).

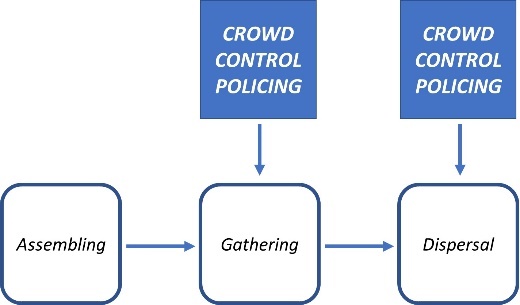
Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis dapat merumuskan permasalahan kajian ini sebagai berikut: “Bagaimana *crowd policing* yang dapat mencegah terjadinya konflik tawuran agar dapat memelihara kamtibmas yang kondusif.” Sementara itu, tujuan penulisan ini adalah untuk menemukan pola pemolisian kerumunan (*crowd policing*) yang tepat untuk mencari akar permasalahan konflik tawuran antar pelajar agar dapat mencegah terjadinya konflik tawuran antar pelajar yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal yang terus berulang hingga menimbulkan korban jiwa.

**Tinjauan Literatur**

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu perspektif *balanced scorecard*. Rasidi dan Sadmoko (2019) menjelaskan bahwa ‘*balanced scorecard’* digunakan untuk menciptakan suatu gabungan pengukuran strategis, pengukuran finansial dan non-finansial serta pengukuran ekstern dan intern pengukuran perusahaan dan dipandang menjadi empat kategori perspektif, yaitu: *learning and growth perspective*, *internal business process perspective*, *customer perspective*, serta *stakeholders perspective*. Keempat perspektif ini saling berhubungan dalam sebab akibat sebagai cara untuk menerjemahkan strategi ke dalam tindakan.” Teori kedua yang digunakan Penulis adalah teori SDO (Sumber Daya Organisasi). Solihin (2012) menyatakan bahwa “organisasi terdiri atas berbagai sumber daya organisasi, yaitu sumber daya manusia, keuangan, dan logistik, yang mana sumber daya organisasi ini dikelola secara konsisten dan sistematis agar mampu mendukung tercapainya tujuan/target organisasi secara efektif.” Teori ketiga yang digunakan oleh Penulis adalah teori Manajemen Bisnis. Follet dalam Gesi, dkk., (2019) menyatakan bahwa “manajemen bisnis merupakan sebuah seni dalam proses bisnis untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dengan kata lain, seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan.” Teori keempat yang digunakan dalam penulisan kajian ini adalah teori kepuasan pelanggan. Tjiptono dalam Sumarsid dan Paryanti (2022) mengatakan bahwa “kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja (hasil) suatu produk dengan harapan-harapannya.” Teori kelima yaitu menggunakan teori administrasi negara. Siagian dalam Aneta (2012) menjelaskan bahwa “Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Situasi dan kondisi lingkungan VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*), yaitu lingkungan yang bergejolak, tidak pasti, kompleks dan ambigu saat ini, yang ditambah dengan dampak negatif perkembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), tidak jarang telah memicu konflik di tengah masyarakat yang dapat mengancam Kamtibmas. Jika pada zaman dahulu konflik di tengah masyarakat terjadi akibat gesekan yang terjadi secara langsung, maka pada saat ini pemicu konflik dapat berasal dari gesekan yang terjadi di dunia maya, di mana hal tersebut sangat sulit teridentifikasi dan tak jarang merembet pada konflik secara langsung di dunia nyata bahkan hingga menyebabkan konflik tawuran yang melibatkan banyak massa. Bahkan banyak ditemukan hanya akibat perselisihan yang terjadi di dunia maya antara dua orang, tetapi teman-teman yang berselisih saling mendukung temannya, hingga akhirnya konflik yang awalnya hanya dua orang membesar menjadi antara dua kelompok.

Konflik tawuran juga identik dengan kerumunan. Menurut Challanger, dkk., dalam Wibowo (2018), “kerumunan merupakan sekumpulan banyak orang, yang berkumpul dalam suatu lokasi tertentu dan secara bersama-sama dalam lingkungan, untuk selama periode waktu tertentu dan terukur, mereka mempunyai tujuan yang sama dan perilaku yang serupa dan berperilaku sesuai kelompoknya serta berinteraksi satu sama lain dalam sekumpulan orang, di mana fenomena kerumunan tersebut pada sisi negatif dapat berdampak terhadap kekerasan dan kerusuhan yang mengganggu keamanan.” Kerumunan merupakan suatu kumpulan (*gathering*) dari banyak atau sedikit orang yang untuk sementara berkumpul. Kelompok kecil tersebut biasanya terdiri dari teman-teman, anggota keluarga, atau orang yang saling mengenal satu sama lain. Para individu-individu tidak berasumsi tentang adanya rasa tidak saling mengetahui dalam suasana kerumunan. Para individu mengetahui yang menyertai kelompoknya, dan mereka yang hadir dalam suatu perkumpulan telah hadir dari komunitas yang sama. Kumpulan ini lebih merupakan proses yang artinya mereka dimulai dari awal berkumpul sampai tahap akhir berkumpul seperti yang direfleksikan dalam Gambar 1 berikut ini:



**Sumber: Wibowo, A. (2018:207). Perpolisian Kerumunan Pada Pertandingan**

**Sepak Bola di Indonesia, PTIK, hal. 207**

**Gambar 1. Tahapan Proses Perkumpulan**

Berdasarkan Gambar 5 di atas, dapat dijelaskan bahwa proses dimulainya perkumpulan/perkerumunan (*assembling*) yaitu merupakan pergerakan orang-orang dari lokasi yang berbeda menuju lokasi yang sama dalam periode waktu tertentu. Proses ini menentukan peserta yang partisipasi dalam perkumpulan atau pertemuan. Perkumpulan orang-orang tersebut merupakan hasil dari kegiatan yang memiliki tujuan tertentu dan merupakan tindakan kolektif yang memiliki kompleksitas, dan cenderung telah direncanakan dan diorganisir sebelumnya. Kemudian muncul tahap proses pertemuan (*gathering*), yaitu proses berkumpulnya orang-orang dan kelompok orang dalam suatu lokasi dan peristiwa yang sama dan mempunyai tindakan yang sama. Akhirnya, muncul tahapan proses pembubaran kerumunan (*dispersal*), yaitu fase terakhir dalam perkumpulan sementara dari sekelompok orang. Fase ini menyangkut pergerakan orang-orang dari satu lokasi yang sama ke tempat yang satu atau lebih alternatif lokasi. Tahapan pembubaran merupakan tahapan akhir dari suatu kumpulan orang-orang yang dapat terjadi secara rutin, *emergency* dan berbasis paksaan. Maka dari itu, kerumunan dapat mengarah pada hal-hal negatif, yang salah satunya yaitu terjadinya tawuran.

Seperti halnya konflik, tawuran pelajar merupakan kerumunan yang dinamis dan memiliki berbagai makna sebagaimana peristiwa tawuran pelajar. Kegiatan ini diawali dari para pelajar yang berkumpul dari berbagai latar belakang kemudian berkumpul secara bersama sama di sekolah dengan tujuan yang sama untuk belajar (*gathering*). Dengan perilaku yang berbeda-beda sesuai dengan kelompoknya dan juga berinteraksi satu sama yang lain dalam sekumpulan pelajar, kerumunan atau sekumpulan pelajar dapat berubah menjadi fenomena negatif apabila ada faktor-faktor pemicu yang muncul baik dari dalam maupun dari luar kerumunan pelajar, sehingga muncul kekerasan kolektif yang tidak terkendali meskipun orang-orangnya dapat dikenal dan dipahami. Dalam hal ini pemicu tawuran pelajar bisa disebabkan karena pengaruh dari senior atau alumni yang telah lulus sekolah, namun masih menanamkan kebencian untuk mengajak tawuran dengan pelajar dari sekolah lain.

### Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang menggambarkan fakta lapangan yang ada. Untuk pengumpulan dan pengolahan data/fakta yang berkaitan dengan kondisi lingkungan eksternal dan lingkungan internal organisasi menggunakan teknik *Environmental Scanning* (ES) dan *Organizational Health Audit* (OHA) yang dikemukakan oleh Riyanto (2022). Selain itu, Penulis juga menggunakan beberapa metode lain untuk mengumpulkan data, seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Sedangkan untuk menganalisis data atau fakta, Penulis menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities*, dan *Threats*) yang menurut Riyanto (2022) digunakan untuk memilih faktor yang dianggap paling berpengaruh.

### Hasil dan Pembahasan

Hasil wawancara yang dilakukan melalui lembaran kuesioner kepada beberapa pelajar mengungkapkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tawuran antar pelajar di antaranya adalah adanya salah paham, perebutan kekuasaan wilayah, saling ejek di media sosial, ada provokator, ada dendam pribadi atau antar sekolah, adanya adu domba dan ajakan dari senior alumni sekolah (*stimulus factor*). Pelajar yang terlibat tawuran sudah hilang rasionalitasnya, hilang jati diri sebagai individu, hilang tanggung jawab karena ada anonimitas, serta ada kekerasan kolektif. Kejadian tawuran yang melibatkan pelajar SMP di Kabupaten Tegal dengan korban satu pelajar kelas tiga meninggal dunia menunjukkan bahwa pelajar yang terlibat sudah hilang tanggung jawab sebagai individu, hilang rasionalitasnya, tega melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam kepada lawannya yang sesama pelajar SMP hingga korban meninggal dunia. Para pelajar SMP yang sudah janjian melalui media sosial, kemudian berkerumun sehingga menciptakan kumpulan bersama sama, yang hilang karakter kepribadian individunya lantaran ingin menjadi bagian dari karakter kolektif yang isi pikirannya sama yaitu saling menyerang sampai ada yang kalah.

Pada konteks konflik tawuran pelajar, kepolisian dapat mengidentifikasi kerumunan atau sekumpulan pelajar yang cenderung merusak dan melakukan vandalisme, dapat ditelusuri pola terbentuknya kerumunan dari masing-masing pelajar yang terlibat tawuran. Dalam perilaku kerumunan pelajar terdapat kumpulan (*gathering*) yang merupakan proses permulaan, pertengahan, dan akhir terjadinya tawuran pelajar. Para pelajar yang berkumpul saling mengenal satu dengan yang lain, dan saling tahu apa yang akan mereka lalukan setelahnya, bahkan mereka sudah merencanakan tawuran yang akan dilakukan. Hasil wawancara melalui kuesioner didapatkan bahwa lokasi tawuran sudah ditentukan biasanya daerah yang sepi, lokasi kumpul sebelum tawuran, senjata yang digunakan disembunyikan, dan waktu yang tepat untuk tawuran. Sehingga kumpulan pelajar yang terlibat tawuran merupakan proses, yang artinya dimulai dari awal berkumpul sampai tahap akhir berkumpul.

Pergerakan para pelajar yang terlibat tawuran, saat bubar (*dispersal*) dari sekolah sesaat setelah selesai proses belajar menuju lokasi yang telah ditentukan, pada waktu-waktu tertentu, cenderung telah direncanakan dan diorganisir sebelumnya, kemudian melakukan pertemuan yaitu proses berkumpul pada lokasi yang telah ditentukan dengan tindakan yang sama. Tahap bubaran pelajar juga merupakan tahapan yang krusial yang perlu menjadi perhatian dari kepolisian untuk diantisipasi agar tidak terjadi tawuran pelajar.

Sebelum beranjak ke Kabupaten Tegal, Penulis akan menyajikan data-data tentang propinsi-propinsi di Indonesia yang menempati urutan tertinggi dalam hal tawuran pelajar. Berdasarkan Tabel 1 di bawah, terlihat bahwa secara nasional, Propinsi Jawa Tengah masuk ke dalam delapan propinsi dengan tingkat tawuran tertinggi.

**Tabel 1. Data Tawuran Nasional**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Provinsi | Jumlah |
| 1. | Jawa Barat | 37 |
| 2. | Sumatera Utara | 15 |
| 3. | Maluku | 15 |
| 4. | NTT | 14 |
| 5. | DKI Jakarta | 13 |
| 6. | Maluku Utara | 11 |
| 7. | Jawa Timur | 11 |
| 8. | Jawa Tengah | 10 |

**Sumber:** [**https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/28/tawuran-pelajar-paling-banyak-**](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/28/tawuran-pelajar-paling-banyak-)

**terjadi-di-jawa-barat**

Sementara itu, dari seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdapat sepuluh kabupaten yang memiliki tingkat terjadinya tawuran paling tinggi, di mana salah satunya adalah Kabupaten Tegal. Meskipun berada pada urutan terakhir dalam Tabel 1 di atas, kondisi tawuran yang terjadi di Propinsi Jawa Tengah umumnya dan Kabupaten Tegal pada khususnya sudah kian mengkhawatirkan karena sampai menimbulkan kerugian baik kerugian materiil hingga adanya korban jiwa akibat tawuran antar pelajar tersebut. Adapun jumlah kasus tawuran yang terjadi di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 di bawah menunjukkan bahwa pada tahun 2021, di mana saat pandemi Covid-19 masih mewabah, terjadi sebanyak 7 kasus tawuran. Kemudian pada tahun 2022 kasus tersebut meningkat secara drastis menjadi sebanyak 30 kasus tawuran, dan selama bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2023 (periode enam bulan) terjadi sebanyak 12 kasus.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan didapatkan informasi bahwa salah satu penyebab terjadi konflik tawuran yaitu saling singgung di media sosial yang kemudian merembet ke dunia nyata serta menimbulkan konflik tawuran dan menelan korban hingga meninggal dunia. Selain itu, ada pengaruh dari para alumni sekolah yang mengajak para pelajar untuk ikut serta terlibat tawuran.

**Tabel 2. Data Jumlah Tawuran di Kabupaten Tegal**

| No. | Tahun | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2021 | 7 |
| 2. | 2022 | 30 |
| 3. | 2023 (Jan-Jun) | 15 |

**Sumber: Data Satintelkam Polres Tegal Tahun 2021-2023.**

Angka-angka yang ada pada Tabel 2 walaupun kelihatan sederhana perlu diatensi oleh Polri, khususnya Polres Tegal agar konflik-konflik yang sama yang lebih banyak dan berskala lebih besar dapat dicegah di masa mendatang, khususnya tawuran antar pelajar yang terjadi di Kabupaten Tegal yang sudah kian meresahkan dan bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Memang perlu diakui bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran, sehingga permasalahan tawuran ini menjadi permasalahan yang kompleks dan perlu adanya sinergi dan kolaborasi antar berbagai pihak agar dapat menuntaskan permasalahan konflik tawuran hingga tuntas sampai ke akar-akarnya. Menyikapi hal tersebut, selama ini Polres Tegal telah dan terus berupaya mencegah konflik tawuran antar pelajar tersebut dengan menggunakan berbagai cara, antara lain melaksanakan *crowd policing* (pemolisian kerumunan) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. ***Crowd policing* dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan**

Polres Tegal memiliki personel fungsi operasional yang bertugas untuk mencegah konflik tawuran. Fungsi yang dikedepankan antara lain fungsi Samapta, Binmas, Humas, Intelkam, Reskrim, dan Resnarkoba. Adapun jumlah personel fungsi operasional Polres Tegal yaitu sebanyak 442 personel, sedangkan DSP (Daftar Susunan Personel) yang seharusnya—berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek—berjumlah 965 personel, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 523 personel.

Berdasarkan aspek pengetahuan personel, dari 442 personel satuan fungsi operasional, 132 di antaranya sudah berlatar belakang pendidikan sarjana, 4 orang Diploma 3, dan sisanya 306 personel masih berlatar belakang pendidikan sekolah menengah atas. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kurangnya wawasan personel untuk mengetahui bagaimana mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan tawuran mulai dari identifikasi akar permasalahan tawuran hingga bagaimana solusi untuk mencegah terjadinya tawuran.

Berdasarkan latar belakang aspek keterampilan, dari 442 personel satuan fungsi operasional, baru 118 personel yang sudah mengikuti dikjur/dikbangspes/prolat terkait bidang fungsinya masing-masing. Sedangkan sisanya sebanyak 324 personel belum pernah sama sekali mengikuti dikjur/dikbangspes/prolat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap lemahnya kemampuan dan penguasaan dari personel untuk memunculkan inovasi-inovasi yang komprehensif dan *out of the box* untuk mengatasi akar permasalahan tawuran, sehingga kegiatan pemolisian hanya sekedar kegiatan rutin saja seperti patroli, penyuluhan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang anggaran, rencana anggaran untuk pencegahan konflik tawuran tidak tertulis dan langsung disebutkan dalam mata anggaran. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan konflik tawuran menggunakan anggaran rutin dari tiap-tiap Satker operasional dalam bentuk kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan.

Jika dilihat dari aspek sarana dan prasarana, Polres Tegal belum memiliki sarana dan prasarana penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor pemicu munculnya kerumunan yang mengarah pada tawuran dengan menggunakan sistem intelijen media yang bisa menganalisis unggahan-unggahan di media sosial yang mengarah pada munculnya tawuran. Polres Tegal juga belum memiliki *command center* untuk memonitor pergerakan kendaraan patroli yang melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka mencegah terjadinya tawuran. Adapun untuk kelengkapan kendaraan patroli sudah terdapat unit GPS (*Global positioning system*) di setiap kendaraan patroli roda empat, tetapi monitor dan kontrol pergerakan kendaraan belum terpusat karena belum adanya *command center*.

1. ***Crowd policing* dari perspektif proses internal**

Dalam tahap persiapan dan perencanaan, Polres Tegal telah memiliki persiapan dan perencanaan untuk kegiatan pemolisian guna mencegah konflik tawuran. Adapun perencanaan tersebut dibuat berdasarkan hasil perkiraan intelijen yang dituangkan ke dalam berbagai kegiatan pemolisian dalam mencegah konflik tawuran. Selain itu, Polres Tegal telah memiliki pemetaan dan identifikasi serta pola terjadinya tawuran serta sekolah-sekolah yang siswanya rawan melakukan tawuran. Polres Tegal telah melakukan identifikasi pola terjadinya tawuran, sebagai berikut:

1. apabila kerumunan anak sekolah di luar jam sekolah dan lebih dari 10 orang serta berada di tempat-tempat yang sudah dipetakan;
2. berkerumun namun tidak ada giat ekstrakurikuler dari pihak sekolah dan di luar jam belajar;
3. *monitoring* media sosial anak- anak sekolah, seperti grup FB, Twitter, IG dan Tik Tok;
4. pihak sekolah diminta memberikan info seputar tawuran pelajar kepada Polres;
5. menyebar laporan polisi melalui 110 dan nomor telepon Polres Tegal ke masyarakat;
6. apabila saat didekati kerumunan pelajar melarikan diri, maka sudah dapat diidentifikasikan mereka akan melakukan tawuran; dan
7. apabila saat dilakukan pemeriksaan ditemukan alat-alat seperti keling, senjata tajam dan alat berbahaya lainnya.

Selain itu, Polres Tegal juga telah memiliki pemetaan terhadap sekolah yang pelajarnya pernah/sering terlibat tawuran dengan gambaran sebagai berikut:

**Tabel 3. Pemetaan Sekolah Rawan Tawuran 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| No. | Nama Sekolah |
| 1. | SMK Pertanian Slawi |
| 2. | SMK Islamiyah Adiwerna |
| 3. | SMK Bakti Praja Dukuhwaru |
| 4. | SMK BP Pangkah |
| 5. | SMK Peristek Pangkah |
| 6. | SMK Diponegoro Lebak Siu |
| 7. | SMK Nurul Ulum Lebak Siu |
| 8. | SMKN 2 Slawi |
| 9. | SMAN 3 Slawi |
| 10. | SMAN 2 Slawi |
| 11. | SMP Terbuka 2 Slawi |
| 12. | SMP 1 Dukuhwaru |
| 13. | SMP Ma’rif NU |

**Sumber: Laporan Perkiraan Keadaan (Kirka) Satintelkam Polres Tegal Tahun 2023**

Berdasarkan hasil identifikasi pola dan pemetaan sekolah-sekolah rawan terlibat tawuran dari Satker Intelkam, Polres Tegal, maka setiap satker operasional Polres Tegal diminta dan sudah membuat rencana pencegahan atau preventif untuk melaksanakan giat patroli, sambang, patroli skala besar, dan melakukan razia gabungan secara acak di sekolah-sekolah yang ada pada Tabel 3 di atas.

Perencanaan yang sudah dibuat pada tiap-tiap Satker Polres Tegal ternyata tidak didukung adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) yang baku dan tertulis, bagaimana tindak lanjut dan penanganan pelajar yang terlibat tawuran. Pengembangan Langkah-langkah yang dilakukan untuk penanganan tawuran pelajar ini melibatkan beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut:

1. melakukan identifikasi dan menganalisis masalah terkait tawuran pelajar, mengevaluasi dampak sosial, keamanan dan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari tawuran pelajar;
2. penyusunan tim yang melibatkan semua satuan kerja sampai dengan polsek jajaran serta bekerja sama dengan lembaga pendidikan, Pemda dan komunitas;
3. menyusun rencana kegiatan yang rinci termasuk strategi pencegahan, penegakan hukum, pembinaan, dan rehabilitasi;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelajar yang terlibat tawuran;
5. memperbaiki dan menyesuaikan rencana kegiatan berdasarkan hasil evaluasi;
6. melakukan edukasi dengan melibatkan masyarakat tentang dampak negatif dan pentingnya peran aktif dalam mengatasi tawuran; dan
7. mendorong partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan positif, untuk mengajak terwujudnya keamanan dan ketertiban.

Selain itu, kegiatan evaluasi dan monitoring perkembangan perilaku pelajar yang terlibat tawuran pada bulan Oktober tahun 2022 telah dilakukan kepada 36 anak pelajar SMK N 2 Slawi yang terlibat tawuran pada bulan September tahun 2022. Pada tahap ini juga Polres Tegal telah melakukan upaya pencegahan dengan membuat inovasi yaitu program “Duta Pelajar Anti Tawuran.” Walaupun demikian, program ini masih belum optimal, karena setelah pembentukannya, tidak ada keberlanjutan program kepada pelajar yang terpilih terkait apa yang harus dilakukan dan tidak serentak dilakukan di semua sekolah di Kabupaten Tegal.

Edukasi dengan melibatkan masyarakat dilaksanakan oleh seluruh bhabinkamtibmas polsek jajaran agar masyarakat ikut berperan aktif dalam mencegah tawuran pelajar. Untuk mencegah tawuran, bhabinkamtibmas wajib sambang dan melakukan koordinasi ke seluruh sekolah di Kabupaten Tegal. Para bhabinkamtibmas dapat memberikan saran untuk lebih peduli terhadap pelajar sekolah dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat.

Tahap penerapan/implementasi dibagi ke dalam 3 tahapan. Tahap pertama, yaitu tahap pencegahan konflik. Pada tahap ini Polres Tegal telah melakukan berbagai kegiatan dengan rincian: 120 kegiatan preemtif dan preventif sepanjang tahun 2020; 104 kegiatan preemtif dan preventif pada tahun 2021; dan 97 kegiatan preemtif dan preventif pada tahun 2022. Jumlah kegiatan pemolisian yang menurun ini menjadi salah satu penyebab pencegahan konflik tawuran menjadi tidak maksimal. Kegiatan yang dilakukan pada saat ada *event* tertentu pada tahap *gathering*, tidak menyentuh pada akar masalah, kenapa tawuran bisa terjadi. Meskipun kegiatan pemolisian sudah dilakukan pada saat adanya kerumunan atau kumpulan (*gathering*), kegiatan sebelum terjadi kerumunan atau proses sebelum berkumpul (*assembling*) belum tersentuh. Selain itu, saat ini kegiatan preemtif, dan preventif masih sebatas dilakukan di dunia nyata saja, belum ada kegiatan pengawasan di media sosial terhadap unggahan maupun komentar yang mengarah pada aksi tawuran.

Sedangkan dalam tahap penghentian konflik, Polres Tegal selalu melakukan respons cepat apabila terjadi tawuran, mencari tahu pelajar dari sekolah mana yang terlibat, mempertemukan kepala sekolah dari kedua belah pihak, dan menyepakati langkah-langkah penanganan yang diambil terutama untuk meredam emosi para pihak yang terlibat tawuran. Kemudian Polres Tegal harus menemukan solusi penyelesaian konflik tawuran dengan memperhatikan kearifan dari kedua belah pihak. Sebagai tindak lanjut pertemuan para pihak yang terlibat tawuran, belum pernah ada nota kesepakatan bersama atau ikrar dari semua pelajar untuk tidak terlibat dalam konflik tawuran, serta pembinaan konseling dan *mapping* psikologi pelajar untuk mengetahui potensi dan kondisi pelajar agar tidak terlibat tawuran.

Sedangkan pada tahap pemulihan pasca konflik, ketika para pelaku tawuran telah tertangkap, Polres Tegal melakukan pemanggilan orang tua masing-masing pelaku tawuran, dan semua pelaku termasuk orang tua pelaku tawuran diberikan pembinaan agar tidak terlibat tawuran dan untuk orang tuanya diberikan pembinaan agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap anaknya sehingga tidak ikut terlibat tawuran.

Selain itu pada tahap ini, Polres Tegal memberikan pembinaan kepada para pelaku tawuran untuk membuat perjanjian agar tidak melakukan tawuran lagi, dan apabila ada anak yang sudah pernah melakukan tawuran, maka dilakukan *monitoring* dan pemantauan secara khusus terhadap pelaku tawuran tersebut. Saat ini terdapat 36 pelajar dari SMK Negeri 2 Slawi yang dimonitor oleh Polres Tegal dan pihak sekolah yang pernah terlibat aksi tawuran.

Lalu pada tahap pemantauan dan evaluasi, Polres Tegal telah melakukan analisis dan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan pemolisian guna mencegah konflik tawuran, Analisa dan evaluasi dilakukan dengan cara melihat indikator keberhasilan dalam mencegah terjadinya tawuran, jumlah pelajar yang terlibat, yang menjadi korban tawuran, serta program *monitoring* dan pembinaan terhadap pelajar yang terlibat dalam tawuran.

Evaluasi juga mencakup seberapa efektifkah program pemolisian yang dilakukan untuk mencegah tawuran, apakah program pencegahan, penegakan hukum, pembinaan dan edukasi sudah dapat mencegah terjadinya tawuran, termasuk bagaimana pelibatan instansi terkait dalam mencegah terjadinya tawuran.

Berdasarkan data-data yang ada, kejadian tawuran pelajar di Kabupaten Tegal setiap tahun mengalami peningkatan jumlah dan korban. Bahkan pada awal tahun 2023 sampai dengan bulan Maret sudah ada 7 kejadian dengan korban meninggal dunia ada 3 pelajar. Kemudian jumlah kegiatan pemolisian untuk mencegah tawuran juga lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya, termasuk kegiatan evaluasi yang hanya dilakukan 2 kali dalam satu tahun.

1. ***Crowd policing* dari perspektif pelanggan (masyarakat)**

Berdasarkan hasil kuesioner dengan responden masyarakat Kabupaten Tegal, dari 156 responden, 85 responden menyatakan Polres Tegal sudah baik dalam mencegah dan menangani konflik tawuran, sedangkan 56 responden menyatakan perlu adanya peningkatan kinerja Polres Tegal dalam mencegah konflik tawuran, dan sisanya sebanyak 15 responden menyatakan Polres Tegal masih kurang baik dalam mencegah dan menanggulangi konflik tawuran. Selain itu, saat ini masyarakat telah melihat dan menilai upaya atau kinerja yang dilakukan oleh Polres Tegal dalam mencegah konflik tawuran belum maksimal dan perlu ditingkatkan, terbukti dengan masih adanya konflik tawuran yang terjadi bahkan sampai timbul korban meninggal dunia dari pelajar.

Kritik dan saran kepada Polres Tegal terkait pencegahan konflik tawuran, dari responden tentunya perlu menjadi atensi bagi Polres Tegal agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam mencegah konflik tawuran melalui berbagai model pemolisian pada akar masalah (*assembling*) yang efektif sebelum muncul menjadi tawuran, supaya permasalahan tawuran ini dapat menurun intensitasnya bahkan sampai tidak ada lagi kasus tawuran yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal.

1. ***Crowd policing* dari perspektif *stakeholder.***

Untuk dapat mencegah dan menanggulangi konflik tawuran hingga ke akar-akarnya, Polres Tegal tidak dapat bergerak sendiri. Perlu adanya kerja sama dengan segenap *stakeholder* yang ada di wilayah hukum Polres Tegal agar dapat saling melengkapi kekurangan instansi masing-masing dalam mencegah konflik tawuran.

Komunikasi antara Polres Tegal dengan *stakeholder* dituangkan dalam bentuk FGD (*Focus Group Discussion*) yang dilakukan hanya sekali dalam setahun selama Tahun 2020 hingga Tahun 2022. Kegiatan FGD Polres Tegal dengan *stakeholder* di antaranya diikuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, DPRD Kabupaten Tegal, Dinas Pendidikan, dan perwakilan SMA/SMK masih belum intens dilakukan, yaitu setiap tahun hanya dilakukan sekali saja, hal ini tentunya berdampak pada belum terbangunnya kesamaan persepsi dalam mencegah konflik tawuran yang sudah kerap kali terjadi di Kabupaten Tegal.

Hasil FGD pun belum ada kesepakatan mengenai langkah nyata apa yang harus dilakukan, belum ada perubahan sikap mulai dari pemahaman terhadap isu tawuran, penyebab dan pemicu tawuran, peran dan tanggung jawab *stakeholder*, program pencegahan, koordinasi dan kolaborasi, pemantauan dan evaluasi, kebijakan dan regulasi, dan rencana tindakan bersama, serta keterlibatan masyarakat dalam membantu mencegah konflik tawuran.

Adapun koordinasi yang dilakukan oleh Polres Tegal dengan *stakeholder* untuk membahas isu konflik tawuran antar pelajar yaitu dilakukan sebanyak 21 kali pada Tahun 2020, 16 kali Tahun 2021, dan 14 kali Tahun 2022. Banyaknya kasus tawuran yang melibatkan pelajar SMA, DPRD Kabupaten Tegal tidak bisa berbuat banyak, karena kewenangan daerah, hanya sampai tingkat SMP saja, sedangkan SMA, SMK, dan sederajat kewenangannya berada di provinsi, sehingga tidak bisa membuat regulasi khusus untuk mencegah tawuran, dan harus berasal dari provinsi. Sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan provinsi agar dapat membuat kebijakan khusus untuk mencegah tawuran. Kurangnya koordinasi yang dilakukan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal dan pihak sekolah menyebabkan kurangnya pertukaran informasi terkait perilaku para pelajar maupun latar belakang para pelajar yang terindikasi sering mengikuti tawuran, sehingga dalam pengawasan terhadap pelajar masih dilakukan secara parsial atau masing-masing instansi, dinas pendidikan dan pihak sekolah, hanya dapat mengawasi saat di dalam sekolah, selepasnya di luar sekolah, pihak sekolah sudah tidak bisa lagi melakukan pengawasan karena sudah di luar kewenangan dinas pendidikan maupun pihak sekolah.

Adapun kegiatan kolaborasi yang dilakukan oleh Polres Tegal dengan *stakeholder* hanya sebatas pada kegiatan FGD, patroli bersama, dan sosialisasi tentang bahaya tawuran. Sementara kolaborasi untuk mencari dan menyelesaikan akar masalah belum sepenuhnya dilaksanakan, antara lain kemitraan dalam program pencegahan, penggunaan anggota polisi sosial, kampanye kesadaran publik, tim tanggap konflik, pembentukan kelompok advokasi, perencanaan krisis bersama, pendidikan dan latihan bersama, serta evaluasi bersama dan perbaikan.

Kegiatan kolaborasi yang dilakukan belum bisa mencegah munculnya kejadian tawuran. Kolaborasi hanya dilakukan pada proses *gathering* setelah ada tawuran, belum menyentuh pada proses *assembling* untuk mendeteksi dari awal potensi munculnya kerumunan yang mengarah pada tawuran.

Hasil penelitian ini didasari pada hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Andry Wibowo pada tahun 2018 dengan judul “Perpolisian Kerumunan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia, Studi Kasus: Konflik Viking (Suporter Persib) Dan Jakmania (Suporter Persija)”. Penulisan karya tulis ini membahas terkait perpolisian/pemolisian kerumunan pada pertandingan sepak bola, di mana ada korelasi/kaitan dengan penelitian saat ini yang sama-sama membahas perpolisian/pemolisian untuk mengidentifikasi kerumunan guna mencegah terjadinya konflik. Di mana, tahapan untuk mencegah konflik ini berada pada fase *assembling* atau berkumpul, sehingga kegiatan perpolisian/pemolisian berfokus pada membubarkan kerumunan sebelum terjadinya konflik.

**Kesimpulan dan Saran**

*Crowd policing* yang digunakan untuk mencegah konflik tawuran antar pelajar dalam rangka memelihara kamtibmas yang kondusif masih belum optimal, ditinjau dari pendekatan perspektif *balanced scorecard,* antara lain perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan (masyarakat), dan perspektif *stakeholder*.

Pimpinan pada jajaran Polda Jawa Tengah, khususnya Polres Tegal perlu mengambil langkah-langkah strategis yang komprehensif dengan melakukan strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang sebagai upaya pencegahan peningkatan eskalasi konflik tawuran; mengantisipasi dampak negatif media sosial; meningkatkan pelaksanaan deteksi dini, meningkatkan pelaksanaan intelijen media; menginisiasi pembentukan tim advokasi, penggalangan alumni sekolah, meningkatkan kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal membuat kebijakan yang mengatur sanksi tegas terhadap siswa yang melakukan tawuran, memanfaatkan perkembangan teknologi, meningkatkan pola pemolisian yang proaktif dan *problem solving*; mengembangkan lebih lanjut program duta pelajar anti tawuran. Serta membangun platform yang dapat memudahkan akses masyarakat, mempercepat respons polisi, *real time* 24/7 dan meningkatkan efisiensi operasional, seperti program Polisi Sigap (POLSI), dan memasukkan program “Bela Negara dan Pengenalan Hukum” pada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

**Daftar Pustaka**

Aneta, A. (2012). Perkembangan Teori Administrasi Negara. *Jurnal Inovasi, Vol.9(No.1)*. pp.1-24. ISSN: 1693-9034.

Gesi, B., dkk. (2019). Manajemen dan Eksekutif. *Jurnal Manajemen, Vol.3(No.2)*. pp.51-66. ISSN: 2303-3495.

Rasidi dan Sadmoko, R. (2019). Penerapan Konsep *Balanced Scorecard* Dalam Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.45(No.2).* pp.189-202.

Riyanto, S. (2022). *Analisis Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Solihin, I. (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Sumarsid dan Paryanti, A. B. (2022). Pengaruh Kualitas Layanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Grabfood (Studi Wilayah Kecamatan Setiabudi. *Jurnal Ilmiah M-Progress, Vol.12(No.1)*. pp.70-83.

Wibowo, A. (2018). *Perpolisian Kerumunan Pada Pertandingan Sepak Bola di Indonesia*. PTIK.

<https://www.gramedia.com/best-seller/vuca/>

***ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND INTERNET OF THINGS (IOT):***

***THREATS OR FUTURE FOR THE POLICE?***

**1Alfin Reza Syahputra\*, 2Bagus Aditya, 3Zulaikha Sari Handayani**

**1Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, South Jakarta, Indonesia 12160**

**2,3Telkom University, Bandung Regency, Indonesia 40257**

**e-mail:** [alfinrezas@gmail.com](mailto:alfinrezas@gmail.com), 2[goesaditya@telkomuniversity.ac.id](mailto:goesaditya@telkomuniversity.ac.id), 3[zulaisarikha@gmail.com](mailto:zulaisarikha@gmail.com)

**Abstract**

This study examined the impact of Artificial Intelligence (AI) and Internet of Things (IoT) technologies in policing from the perspective of challenges, threats, and readiness. This study adapted a systematic literature review with data obtained from journals and previous research articles in 2020 – 2023. Previous studies concluded that crime is the shadow of civilization; therefore, the police must be able to keep up with the times. The development of an increasingly modern civilization causes more complex crime, AI and IoT will cause unimaginable crime potential. Countries all over the world have invested in the development of AI and IoT technologies for crime prevention and detection. The idea behind this investment is to make the crime predictable and detectable, allowing the police to enforce the law exactly and properly. AI systems are expected to overcome several human deficiencies, such as consistency in analyzing situations from multiple data sources, especially millions of data points from IoT devices.

***Keyword: AI; IoT; crime; smart policing; predictive policing***

**Introduction**

In recent years, Artificial Intelligence (AI) and Internet of Things (IoT) have become an exciting focus of research to address system security issues across sectors. AI is an interdisciplinary research area that offers technological breakthroughs related to security systems (Apsara *et al*., 2020). Many investments were conducted in AI technology development to deal with security challenges in daily life, such as statistical data management, medicines, and transportation. Available data from key sectors, such as e-commerce, business, and government, provides important contributions to the development of machine learning and algorithmic solutions related to system security (Ahmad *et al*., 2021).

IoT is also a technology that is vital for controlling user security and privacy. IoT technology enables machines to obtain relevant information and process it consistently (Green, 2019). IoT is crucial to maintaining customer security and privacy in a security context. Furthermore, the concept of intelligence integrated into IoT technology is also a relevant factor (Blythe et al., 2019). Effective and secure communication in the IoT network becomes crucial throughout implementation. In the IoT context, communication protocols such as ZigBee, Bluetooth, Sigfox, Wi-Fi, and Z-Wave have gained popularity (Yigitcanlar *et al*., 2020).

However, like other technologies, AI and IoT also have security and privacy related challenges. IoT network security involves issues such as availability, data integrity, confidentiality, and authentication, which can hinder operational efficiency, resilience, and throughput (Osoba & Welser, 2017). To ensure the sustainability and scope of IoT network, security and privacy issues need to be addressed seriously. In order to address upcoming security threats, it is necessary to carry out comprehensive research on improving existing communication protocols and integrating AI-based solutions into IoT technology (Correia & Matos, 2021).

In addition, crime remains a part of the future and civilization’s development in the context of police and law enforcement. The advancement of civilization is frequently correlated with an

increase in crime rates (Caldwell *et al*., 2020). Police have undergone significant changes over the years, and various policing models have been tested and implemented. Security has always been a multifaceted topic, and police scholars and practitioners have had extensive discussions regarding how the modern police should respond to crime (Haque & Tasmin, 2020). In the operation of institutions and police practices, AI has played an increasingly important role, such as in the utilization of risk assessment algorithms, facial recognition technology, and predictive analytics systems (Khan *et al*., 2022). Data-driven approaches to crime resolution are also trending in crime resolution, with the machine’s ability to identify patterns and discover connections that may take longer for humans (Tundis *et al*., 2020).

In this context, this study aims to explore the role and potential of AI and IoT in accomplishing system security challenges, with a focus on policing context implementation. By understanding the potential and risks of these technologies, we can develop an effective approach to dealing with future security challenges. As a result, the authors will conduct research on AI and IoT: A threats or a future for the police in this study.

**Research Methodology**

The literature review in this study was conducted through a systematic search of international journals and proceedings databases. The literature search techniques use keywords that correspond to research questions. The list of keywords that will be used as the basis for literature searches is AI, IoT, predictive policing and smart policing. Search for articles in English with publication years limited to the last 3 years (2020-2023) and articles on the potential and threats of AI and IoT that impact the security sector and its development.

**Results And Discussions**

**Research Result: Scheme or Diagram (PRISMA)**

Figure 1. Describe the process of selecting articles using the Preferred Reporting Systematic Reviews and Meta-analysis (PRISMA) guidelines. The initial search revealed that the number of articles from 2020-2023 is 479 articles. The screening article comes next, a total of 37 papers have been advanced to the next level. The quality of the articles was evaluated so that as many as 37 articles were synthesized in the final report from the literature.



Duplication of articles checked, filtered based on abstract headings, and keywords.

Identification

Screening

Article Meets Inclusion Requirements

Articles identified through databases: Google Scholar, Research gate, Science Direct

Search Limitation: English language articles. Published in 2020 to 2023 (n=479)

Synthesized Articles

Search results that are not processed again (n=416)

Filter the articles by viewing the the entire texts (n= 35)



Articles were read in full text (n= 35)



**Source: Processed by Author, 2023**

**Figure 1. PRISMA Diagram**

The researcher selected the obtained articles and extracted data on each article from each database. The results of the article are reviewed regarding AI and IoT: threat or future for the police.

**Table 1. AI and IoT: Threat or Future for the Police**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Researcher** | **Objectives** | **Result** |
| (Akthar, 2022) | To create and discover the effectiveness of remote spy robot using the Internet of Things | A remote spy robot is a "detachable" robot that acts as an "insider" in a variety of military, police, security, and rescue operations. It can be applied in hazardous, hostile, or closed environments. These robots have critical visual intelligence that can save lives and reduce property damage. |
| (Frank *et al*., 2022) | To detail the new form of attack accurately and detect the temperature around DRAM carrier device. | Attacks can only be carried out by compromising IoT software without requiring hardware modification or physical access. This inspection can be performed at a temperature resolution of up to 0.5◦C in the range of 0◦C to 70◦C. It even works on devices that do not have a specific temperature sensor. |
| (Huang *et al*., 2022) | To describe and analyze the potential and challenges of convergence between Artificial Intelligence (AI) and Internet of Things (IoT) convergent in the context of smart law enforcement or smart policing. | Convergence between Artificial Intelligence (AI) and Internet of Things (IoT) in the context of smart law enforcement or smart policing. The author focuses on how the integration of AI and IoT can improve operational effectiveness and law enforcement performance. |
| (Ahmad *et al*., 2021) | To evaluate and reduce the range of attacks on IoT devices | There are four main techniques to protect the IoT environment: Edge Computing, Fog Computing, Block Chain, and Machine Learning. |
| (King *et al*., 2020) | To discover predictable AI threats. Provide a synthesis of current and possible solutions for ethics, policymakers, and law enforcement organizations. | AI as an autonomous intelligent body. There is an interdisciplinary analysis of threats and anticipated solutions related to Artificial Intelligence (AI) crimes. |
| (Tundis *et al*., 2020) | To detect and track real-world criminals using IoT systems | A system based on social IoT devices will be developed to support real-world detection and tracking of criminals. The proposed model and algorithm specified above have been evaluated via a simulator to demonstrate the logic of the system's functioning, while the functionality of the application has been assessed through user studies conducted on a group of 30 users. |
| (Caldwell *et al*., 2020) | To identify possible applications of the Artificial Intelligence (AI) and related technologies in criminal acts | To create a catalog of potential criminal and terror threats arising from increased adoption and power of artificial intelligence, and to rank these threats in terms of expected victim loss, criminal advantage, criminal achievement, and difficulty of defeat. Eighteen threat categories were identified and evaluated. The top five out of six ratings have broad social impact, such as involving fake content generated by AI or can operate on a large scale through the use of AI automation; the sixth is the misuse of driverless vehicle technology for terrorist attacks. |
| (Afzal & Panagiotopoulos, 2020) | Smart policing can be an increasingly in-demand field in government research management and digital public. | Previous work has focused on social media communication or predictive policing. While this review identifies several new applications related to new forms of data and their appropriate role for policing. This research developed a framework for demonstrating the relationship between the smart data use with police approaches and strategies. |
| (Sandhu & Fussey, 2021) | Officers will rely on computer software and smartphone apps to instruct them about where and who to police, just like Uber drivers rely on similar technology to instruct them about passenger pick-up points. | Many police officers have detailed awareness of the limitations of predictive technology, those caused by errors and biases in data input. This awareness has caused many officers to develop a skeptical attitude toward predictive technology, in some cases, these officers have expressed a reluctance to use predictive technology. |

**Source: Processed by Author, 2023**

**AI and IoT Become Threats and Potential Crimes**

AI can be involved in crime in various ways. Most obviously, AI can be used as a tool to facilitate criminal action against real-world targets: predicting the behavior of people or institutions to discover and exploit vulnerabilities; generating fake content to be used in blackmail or to defame reputation; committing acts that the criminal perpetrators cannot or do not want to do for reasons of danger, physical size, reaction speed, and so on. Despite its new methods, the crime itself may be the traditional types of theft, blackmail, intimidation, terror (Caldwell *et al*., 2020). Hacking and data theft can be used as remote criminal action modes. Making the data owner as a target, the victim even appears to be a criminal, while the actual perpetrator hides using a fake identity, using someone else’s data to commit crimes. Even when tracking is done, the found data is fake and does not identify the actual perpetrator.

Amid the accelerated application of digital automation over the past five years, the risk of cyberattacks continues to rise. Examples of threats and potential crimes include audio or video impersonation, driverless vehicles as weapons, tailored phishing, disrupting AI-controlled systems, AI-authored fake news, large-scale blackmail, military robots, snake oil, learning based cyber-attacks, autonomous attack drones, data poisoning, online eviction, tricking face recognition, burglar bots, market bombing, evading AI detection, bias exploitation, AI-assisted stalking, and forgery. With the marks of the case, efforts are needed to increase awareness and knowledge to the public to stay alert (Caldwell *et al*., 2020).

Alternatively, AI system itself can become targets of criminal activity by avoiding protection systems that present obstacles to crime, avoiding detection or prosecution of crimes that have been committed, or causing trusted or critical systems to fail or behave inappropriately to cause damage or undermine public trust. AI can also easily provide context for crime. Fraudulent activity may rely on the victim's belief that some AI functions are possible, even if they are not or are possible but not actually used in fraud (Jones, 2022).

The extent to which the diversity of these crimes can be enhanced by AI applications depends heavily on how much this technology has an impact on the computing environment. While robotics is growing rapidly, AI is more involved in digital crimes such as banking fraud than battles in pubs. Preference for the digital world over the physical world is a weak defense, even though contemporary societies rely heavily on complex computing networks, not only for finance and commerce but also all forms of communications, politics, news, employment, and social relations (Rigano, 2019). People now spend most of their lives online, getting most of their information there, and their online activities can build and destroy their reputation. This trend is likely to continue in the future. Such an online environment, where data is property and information power, is perfectly suited for exploitation by AI-based criminal activities that can lead to substantial real-world consequences (Madia, 2023).

In addition, unlike many traditional crimes, crimes in the digital realm are often highly replicable: once developed, techniques can be shared, replicated, or even sold, enabling potential marketing of criminal techniques or the provision of "crime as a service". This can lead to a decrease in technological barriers as criminals can redirect more challenging aspects of their AI-based crimes (McDaniel & Pease, 2021).

Security issues can develop in the IoT, which can be used to sabotage smart homes or internet-connected applications. Then for espionage or spying, internet-connected devices (IoT) can be remotely controlled, can harm, injure, kill, or burn. Smart cars can be controlled and then engineered like a broken machine or suicide. Doctrinarians use music and stories used by the perpetrator to influence the victim, commonly referred to as manipulation. IoT and AI in the future will be adapted across the lines and aspects of human civilization’s life. Of course, crimes through IoT and AI can have high levels of danger like biological and chemical weapons are even more dangerous.

Today's AI with deep blue and deep learning can beat the world's grandmaster chess players. Win other games with exponential learning. There is no doubt that AI can be smarter than humans. Intelligent AI (Super AI) in the future can even commit its own crimes with the help of IoT as legs, hands, and bodies. From crime with minimal impact to disruption of national security (as in the “Eagle Eye” movie).

**AI and IoT are the Future for the Police in Smart Policing and Predictive Policing**

As with the adoption of Artificial Intelligence and Internet of Things, there are questions to be asked and answered and issues to be addressed. Law enforcement agencies around the world are grappling with this and trying to find the right balance to leverage the benefits of this technology to combat and resolve crimes while maintaining privacy and security (Huang et al., 2022). Not only that, but also the emergence of various other types of attacks to steal user information and personal data from IoT devices. Security and emergency management are other applications of personal data from IoT systems (Gabriel, 2022). Most current military operations, mainly in the field of mining, use most machines for such tasks or even install wireless sensors to prevent unauthorized access to prohibited areas. In most buildings, wireless sensors are installed to handle theft activity, control lighting systems, water systems, and more (Byun et al., 2014).

As with edge computing, data transmission is carried out via a network or device. Data movements are less than cloud computing and this will reduce security issues. Another issue is data compliance in some countries, so they do not want to share data with other countries and have some restrictions (Gkougkoudis *et al*., 2022). Therefore, with the use of edge computing, data compliance problems will be solved. As a result, if the user does not have a fast internet connection and everything needs to be sent to the cloud server, then the waiting time for the cloud server's response will be long enough to affect the security of a person or group (Blythe & Johnson, 2021).

The infrastructure of each city is becoming more and more smart as governments try to make their country grow very rapidly. More intelligent and connected infrastructure in countries provides real-time information to government officials (Frank *et al*., 2022). With the help of AI, real-time information can help detect crimes as soon as they occur. In the realm of police investigation, for example, solving complicated murder cases requires persistent investigation (Joh, 2019). When police officers visited the court, they took photos of where the crime occurred. The photos are used to find clues and evidence that can help unlock new links to the crime (King *et al*., 2020). An AI-enabled system can help detect clues from police photos. For example, a toy or gun from the crime scene, captured in photo, can be searched in police databases to find out if the same toy or gun was used in previous murders. This may not definitively link the previous offenders to current crimes, but it will open up a path of investigation worth trying (Ghosh *et al*., 2018).

Disruption in addition to being rapid, also affects various productivity in life as well as social order. When the control or management of disruption is unable to balance or leave behind various counter-productive things that disrupt social order will emerge. In this situation, it is necessary to think about how the police and policing are able to deal with disruption proactively and solve problems. According to Moon *et al*. (2017) in the digital era or industrial revolution 4.0 which also leads to society 5.0, the policing model, in addition to morals and modern smart professionals is able to run smartly. In line with this, the smart policing model is implemented using regional approach models, the functional model, and the impact model on bureaucratic problems and society. Implemented for routine, special, and contingency police services. Smart policing in the implementation of conventional policing, e-policing and forensic policing.

In smart policing, support for research and development as well as laboratory development is critical and fundamental. Research is a crucial aspect of conceptualizing and reasoning logically in numerous ways. The smart policing model can be conceptualized, physically developed, technically, scientifically, and in terms of infrastructure and systems, as well as curriculum and education (Mukherjee & Halder, 2020).

Crime is an accumulation of patterns; it is not random. AI and IoT can support precise pattern reading. Utilizing AI technology can help with content monitoring. Monitoring content can help with prediction. In the end, crime prediction will ultimately help crime prevention (Banerjee *et al*., 2015). AI can help police monitor a person's digital footprint and detect unusual activity. The purpose of the police is not to enforce the law but rather to establish a sense of security, achieving security by preventing things that interfere with security, one of which is the prevention of crime and potential crimes. The police can accurately reduce crime with the application of AI and IoT in crime prevention and detection (Michael Flynn, 2020). The use of AI in crime prevention and detection carries some inherent risks in addition to the advantages of IoT and AI. For example, a person may be identified as a criminal or suspect of criminal activity based on racial biases that may be inadvertently fed into AI and IoT systems (Comiter, 2019). To establish whether or not integrating AI and IoT to prevent crime is strategically appropriate, such risks must be evaluated in an open and transparent manner (Akthar, 2022).

In addition, AI and IOT are beneficial for predictive policing, which has the potential to involve areas beyond the criminal problem. Traffic management, for example, is well suited for predictive policing. High-frequency traffic data with consistent regularity patterns is an essential resource for policing activities in traffic flow regulation, including the mitigation or even avoidance of traffic accidents. Predictive policing includes mass demonstrations and forest and land fires that follow cyclical patterns all over time (Seldadyo *et al*., 2021). Data on the movement of bank account financial transactions that are possible or potentially profiled by some criminal acts, such as radicalism and terrorism, also contains certain patterns that can be explored through predictive policing. In fact, digital data on community mobility recorded, for example, by Google Mobility Index or telecommunication networks, plays an important role in predictive policing (Madia, 2023). Such data is useful not only in normal situations but also in pandemic situations when mobility and crowd restriction policies are implemented, a violation of which would be considered illegal. Predictive policing is technological on the microscale. Data from various sources, including in various forms, including various forms, such as searching, producing, recording, and sensing activities. This data is used in predictive policing to develop forecast about outcomes, followed by policing actions (McDaniel & Pease, 2021).

Cyberspace, like the universe, is a wider network. Crimes committed on the deep web have not been widely tracked or exposed (Riadi & Rusydi Umar, 2017). To avoid crimes caused by AI intelligence (Super AI), the police must develop Super AI as a virtual police force. The police must develop Super AI as a virtual police force. The development of Super AI as a virtual police force that is capable of investigating, analyzing, and anticipating crimes in cyberspace (surface web, deep web, dark web). Furthermore, Super AI Police has control over Super AI, which can conduct crimes on its own. Police personnel monitor the system and take preventive and enforcement actions, which are carried out by humans utilizing traditional means or technology. No crime is perfect, nor is technology, and no crime utilizing technology is perfect. To eradicate crime, the police must prepare methods, steps, technology, human resources, experts.

**The police are behind the crime?**

Today's police force must be able to see how this civilization is going and what the future holds. As described by Bratton, *et al*. (2009: 3) suggest that we understand predictive policing as "forward-thinking crime prevention" that "links technology, management practices, real-time data analysis, problem solving, and informed policing to produce good outcomes - reduced crime, efficient agencies, and modern, innovative policing". Bratton, *et al*. Also detailing the elements of predictive policing include integrated information and operations, seeing the big picture, and advanced analytics and technology.

The actualization of the use of AI-based technology (super-AI) will help the police to adapt to civilization and implement predictive policing in an effort to prevent crime and reduce all possibilities that cause security and order instability.

In realizing social order characterized by the maintenance of security and public order as well as domestic security. The police are often in a race with crime. Police often lag behind crime. Especially in the current era of industrial revolution which makes shifts and changes faster. Since the era of the industrial revolution 4.0, technological development has reached a stage that human civilization may not have imagined before, very fast. Industry 4.0 applies IoT in the manufacturing workspace and then analyses the big data collected in cloud storage to efficiently improve autonomy and cybersecurity levels (Nahavandi, 2019). Even now, we are really looking at the transition to the industrial revolution 5.0 era. Nahavandi (2019) states that industry 5.0 will be a synergy between humans and autonomous machines. Autonomous labor will be responsive and aware of human intentions and desires. Humanity will work together with robots, not only without fear but also with peace of mind, knowing that their robotic co-workers understand them adequately and have the ability to collaborate effectively with humans.

Industry 5.0 will revolutionize manufacturing systems worldwide by removing tedious, dirty and repetitive tasks from human workers wherever possible. Robots and intelligent systems will permeate manufacturing supply chains and factory floors to an unprecedented degree Nahavandi (2019). What about the police? Police agencies, police education centers, police, and any agency, organization, or private sector that performs police functions must be prepared from now on to face this change. Of course, it will also be followed by changes/shifts in civilization and crime.

AI and IoT as one that provides a fundamental change in the phenomenon of crime in the future as well as the potential for the police to take a step ahead of crime, if it is indeed a concern for policy makers and executive managers in the police.

From now on, police forces should initiate and collaborate on research, academic studies with interdisciplinary and transdisciplinary approaches, and even evaluate policing models and policies. Police agencies around the world, academics, the private sector, and other police functionaries, must think about it and take steps from now on to dismiss the assertion that the police are always lagging behind crime, because in the future they will face the same context of challenges.

In the future, the police will be faced with crimes in the real world, crimes in cyberspace, or both. Thus, the public will demand the police to provide security and services in the real and virtual worlds, while maintaining human rights and privacy. Meanwhile, crime has evolved. In the real world with conventional crime, fiscal crime, white-collar crime, water crime, environmental crime, cross-border crime, extraordinary crime, and others. In the virtual world, it has utilized AI, IoT, digital financial technology (cryptocurrency or others), data theft, privacy violations, and cybercrime that results in real-world crimes.

If grouped together, the police in the future will be faced with conventional crimes, crimes using technology, crimes resulting from technological failures, crimes by technology itself at its will, and maintaining security and order in the real and virtual worlds. The boundaries of the real world are very clear, the police jurisdiction is based on the country or state or city. Cyberspace, on the other hand, has no boundaries. So police agencies must collaborate, not shift responsibility, co-opt jurisdiction or be indifferent to cyberspace.

**Conclusions and Recommendations**

The higher the crime rate, the more advanced a civilization. In the future, crime will make use of advanced technologies like as AI and IoT, which can be used to discover and analyze victims (victim behavior), as a tool for crime, to make criminals anonymous, and even to construct criminal profiles that appear like other people. This potential crime is not limited to criminal actions; it can potentially affect public order and national security, even have a connection with other countries. This is a threat and challenge for the police, and if they do not act from now on, it will be too late to overcome it. The police must take one step ahead of crime by investing in AI and IoT for crime prevention and detection, case disclosure, public order, and national security concerns. The idea behind this investment is that crimes can be easily predicted and detected using AI systems, and criminals can be tracked using a mix of AI and IoT systems. The convergence of criminal intelligence and national security needs based on AI and IoT is now required.

**References**

Abed, A. K., & Anupam, A. (2022). Review ofsecurity issues in Internet ofThings and artificial intelligence-driven solutions. *Wiley*, 1–18. https://doi.org/10.1002/spy2.285

Afzal, M., & Panagiotopoulos, P. (2020). Smart Policing: A Critical Review of the Literature. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, *12219 LNCS*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57599-1\_5

Ahmad, I., Niazy, M. S., Ziar, R. A., & Khan, S. (2021). Survey on IoT: Security threats and applications. *Journal of Robotics and Control (JRC)*, *2*(1), 42–46. https://doi.org/10.18196/jrc.2150

Akthar, M. S. (2022). Long Range Spy Robot Using Internet of Things. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, *10*(6), 2954–2962. https://doi.org/10.22214/ijraset.2022.44489

Apsara, G., Amrithha, D., Ramya, R., & Chitra, R. (2020). Spy Robot Surveillance System using IoT. *International Journal of Innovative Research in Electrical, Electronics, Instrumentation and Control Engineering*, *8*(6), 128–133. https://doi.org/10.17148/IJIREEICE.2020.8627

Ashby, M. (2023). Forecasting crime trends to support police strategic decision making. *CrimRxiv*.

Banerjee, S., Van Hentenryck, P., & Cebrian, M. (2015). Competitive dynamics between criminals and law enforcement explains the super-linear scaling of crime in cities. *Palgrave Communications*, *1*. https://doi.org/10.1057/palcomms.2015.22

Blythe, J. M., & Johnson, S. D. (2021). A systematic review of crime facilitated by the consumer Internet of Things. *Security Journal*, *34*(1), 97–125. https://doi.org/10.1057/s41284-019-00211-8

Blythe, J. M., Sombatruang, N., & Johnson, S. D. (2019). What security features and crime prevention advice is communicated in consumer IoT device manuals and support pages? *Journal of Cybersecurity*, *5*(1), 1–10. https://doi.org/10.1093/cybsec/tyz005

Bratton W., Morgan J., & Malinowski S. (2009). *Fighting Crime in the Information Age: The Promise of Predictive Policing*. Available at https://publicintelligence.net/lapd-research-paper-fighting-crime-in-the-information-age-the-promise-of-predictive-policing/ (accessed 11 November 2023)

Byun, J. Y., Nasridinov, A., & Park, Y. H. (2014). Internet of things for smart crime detection. *Contemporary Engineering Sciences*, *7*(13–16), 749–754. https://doi.org/10.12988/ces.2014.4685

Caldwell, M., Andrews, J. T. A., Tanay, T., & Griffin, L. D. (2020). AI-enabled future crime. *Crime Science*, *9*(1), 1–13. https://doi.org/10.1186/s40163-020-00123-8

Comiter, M. (2019). Attacking artificial intelligence: AI’s security vulnerability and what policymakers can do about it. *Belfer Center for Science and International Affairs | Harvard Kennedy Schhool*, *August*.

College of Policing. 2020. *Preparing policing for future challenges and demands*. Retrieved from https://www.college.police.uk/article/preparing-policing-future-challenges-and-demands

Correia, M. J., & Matos, F. (2021). The impact of artificial intelligence on innovation management: A literature review. *Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE*, 222–230. https://doi.org/10.34190/EIE.21.225

Frank, F., Xiong, W., Anagnostopoulos, N. A., Schaller, A., Arul, T., Koushanfar, F., Katzenbeisser, S., Ruhrmair, U., & Szefer, J. (2022). *Abusing Commodity DRAMs in IoT Devices to Remotely Spy on Temperature*. 1–14.

Gabriel, I. (2022). Toward a Theory of Justice for Artificial Intelligence. *Daedalus*, *151*(2), 218–231. https://doi.org/10.1162/DAED\_a\_01911

Ghosh, A., Chakraborty, D., & Law, A. (2018). Artificial Intelligence in Internet of Things. *The Institution of Engineering and Technology*, 1–11.

Gkougkoudis, G., Pissanidis, D., & Demertzis, K. (2022). Intelligence-Led Policing and the New Technologies Adopted by the Hellenic Police. *Digital*, *2*(2), 143–163. https://doi.org/10.3390/digital2020009

Green, B. (2019). The Smart Enough City. In *The Smart Enough City* (Issue May). https://doi.org/10.7551/mitpress/11555.001.0001

Haque, A. K. M. B., & Tasmin, S. (2020). Security Threats and Research Challenges of IoT - A Review. *Journal of Engineering Advancements*, *01*(04), 170–182. https://doi.org/10.38032/jea.2020.04.008

Huang, C.-H., Chou, T.-C., & Wu, S.-H. (2022). Towards Convergence of AI and IoT for Smart Policing. *Journal of Global Information Management*, *29*(6), 1–21. https://doi.org/10.4018/jgim.296260

Joh, E. E. (2019). Policing the smart city. *International Journal of Law in Context*, *15*(2), 177–182. https://doi.org/10.1017/S1744552319000107

Jones, N. (2022). A Mixed Methods Social Network Analysis of San Diego Law Enforcement Task Forces and Agencies. *International Journal of Police Science*, *1*(2), 70–97. https://doi.org/10.56331/487529/ijps6

Khan, J. I., Khan, J., Ali, F., Ullah, F., Bacha, J., & Lee, S. (2022). Artificial Intelligence and Internet of Things (AI-IoT) Technologies in Response to COVID-19 Pandemic: A Systematic Review. *IEEE Access*, *10*, 62613–62660. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3181605

King, T. C., Aggarwal, N., Taddeo, M., & Floridi, L. (2020). Artificial Intelligence Crime: An Interdisciplinary Analysis of Foreseeable Threats and Solutions. In *Science and Engineering Ethics* (Vol. 26, Issue 1). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/s11948-018-00081-0

Madia, J. D. (2023). Review of Predictive Policing and Artificial I ntelligence. *International Journal of Police Science*, *1*(1), 1–3.

McDaniel, J. L. M., & Pease, K. G. (2021). Policing, AI and choice architecture. In *Predictive Policing and Artificial Intelligence*. https://doi.org/10.4324/9780429265365-5

Michael Flynn. (2020). Urban Future with a Purpose. *Green Planning of Public Spaces*, 22–25.

Moon, H. Bin, Choi, H., Lee, J., & Lee, K. S. (2017). Attitudes in Korea toward introducing smart policing technologies: Differences between the general public and police officers. *Sustainability (Switzerland)*, *9*(10). https://doi.org/10.3390/su9101921

Mukherjee, A., & Halder, R. (2020). PoliceChain: Blockchain-Based Smart Policing System for Smart Cities. *ACM International Conference Proceeding Series*. https://doi.org/10.1145/3433174.3433618

Nahavandi, S. (2019). Industry 5.0—A human-centric solution. *Sustainability*, *11*(16), 4371.

Osoba, O., & Welser, W. (2017). The Risks of Artificial Intelligence to Security and the Future of Work. *The Risks of Artificial Intelligence to Security and the Future of Work*. https://doi.org/10.7249/pe237

Riadi, I., & Rusydi Umar, I. M. N. (2017). Forensic Analysis of Digital Evidence on Frozen Solid State Drives Using the National Institute of Standards and Technology (NIST) Method. *Jurnal Insand Comtech*, *2*(2).

Rigano, C. (2019). Intelligence To Address Criminal “ I. *National Institute of Justice*, *Vol. 3*(No. 280), 1–10.

Sandhu, A., & Fussey, P. (2021). The ‘uberization of policing’? How police negotiate and operationalise predictive policing technology. *Policing and Society*, *31*(1). https://doi.org/10.1080/10439463.2020.1803315

Seldadyo, H., Sudarto, E. R., & Sonta, A. (2021). Predictive Policing: Current and Future Policing. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3906–3913.

Tundis, A., Kaleem, H., & Mühlhäuser, M. (2020). Detecting and tracking criminals in the real world through an IoT-based system. *Sensors (Switzerland)*, *20*(13), 1–27. https://doi.org/10.3390/s20133795

Yigitcanlar, T., Desouza, K. C., Butler, L., & Roozkhosh, F. (2020). Contributions and risks of artificial intelligence (AI) in building smarter cities: Insights from a systematic review of the literature. *Energies*, *13*(6). https://doi.org/10.3390/en13061473

**PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**1Rudy Kosasih Marlin Sembiring, 2Halimah**

**1,2Program Studi Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 12160**

**e-mail:** [sembiringrudy43@gmail.com](mailto:sembiringrudy43@gmail.com)

**Abstrak**

Selain sebagai pelindung, pengayom dan pelayan Masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri juga memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penegak hukum. Untuk memahami nilai-nilai penegakan hukum yang dianggap sebagai moral utama—yang tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002—Polri memerlukan pendekatan filosofis. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polri menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum dalam pengaturan tugas dan fungsi Polri sebagai penegak hukum adalah tugas yang utama, Kepolisian merupakan pintu masuk dalam penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian sebagai *gatekeepers* (penjaga gerbang) SPP (Sistem Peradilan Pidana) memiliki peran sentral karena SPP dimulai dari kepolisian. Banyak terjadi pelanggaran hukum yang diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, namun ada juga pelanggarang yang belum bisa terselesaikan dengan alasan yang beragam. Artikel ini juga bertujuan untuk menelaah *progres* peranan kepolisian dalam SPP di Indonesia. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, di mana data-data diambil melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sampai saat ini kepolisian dalam melakukan penegakan hukum masih belum maksimal sehingga adan beberapa pelanggaran yang masih belum ditegakkan. Penulis merekomendasikan agar kepolisian dapat melaksanakan Pasal 5 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan secara maksimal sehinga perkembangan SPP sebagaimana yang diharapkan dapat direalisasikan.

***Kata kunci: peran kepolisian; penegakan hukum; sistem peradilan pidana***

***Abstract***

*Apart from being the protectors and servants of public, Indonesian National Police, also known as Polri, also has the main duties and functions as the law enforcement. In order to understand the values of law enforcement which are considered to be the main morals—stated in Police Law Number 2 of 2002—Polri requires a philosophical approach. The article aims to explore how law enforcement carried out by Polri shows that legal values in regulating the duties and functions of Polri as law enforcers are the main task, Polri is the entry point for law enforcement in Indonesia. As the gatekeepers of CJS (Criminal Justice System), Polri has a central role because CJS starts from the police. There are many legal violations that are processed in accordance with applicable laws in Indonesia, but there are also violations that cannot be enforced for various reasons. The article also aims to examine the progress of the role of the police in CJS in Indonesia. The author employs the qualitative approach using the descriptive analysis method, where data is taken through literature study. The results of the research show that until now the police are still not maximizing their enforcement of the law, so there are several violations that have not yet been enforced. The author recommends that the police can implement Article 5 of Polri Chief's Regulation (Perkap) Number 14 of 2012 concerning Investigation Management to the maximum so that the expected development of CJS can be realized.*

***Keywords: police role; law enforcement; criminal justice system***

**Pendahuluan**

Penegakkan hukum di manapun di seluruh dunia membutuhkan kepolisian untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga penerapan hukum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Tidak ada satupun negara tanpa polisi, sekalipun tugas dan fungsinya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Sebagai contoh, Amerika Serikat, di mana kepolisian bertugas dan berfungsi sebagai polisi negara bagian saja dan tidak terkait dengan pemerintah pusat. Lembaga kepolisian di Amerika Serikat disusun dalam tiga tingkat, yaitu federal, negara bagian, dan lokal. Konstitusi negara ini tidak mengatur bentuk kepolisian terpusat, dan yang menyelenggarakan fungsi kepolisian secara utuh adalah pemerintah lokal dan negara bagian, sedangkan untuk urusan kejahatan khusus seperti sabotase, mata-mata dan lain lain, diselenggarakan oleh kepolisian federal seperti FBI, US DEA, US Marshal, dan US Attorney General, dan US Secret Service. Kepolisian Amerika Serikat berada di bawah departemen dan tidak berada di bawah presiden langsung seperti di Indonesia (Aziz, 2011). Pemerintah negara bagian yang dikepalai seorang gubernur juga mengeluarkan peraturan perundangan-undangan sendiri, sehingga tugas dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga kepolisian tersebut hanya sebatas wilayah negara bagian atau kota/*country* di mana lembaga kepolisian itu berada sehingga tidak ada standar profesionalisme yang terintegrasi*.*

Parameter standard profesionalisme pada lembaga-lembaga kepolisian daerah tidak sama karena setiap pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan membuat peraturan perundang-undangan sendiri. Hal ini menyebabkan antar lembaga kepolisian negara bagian tidak memiliki standar profesionalisme yang sama (Aziz, 2011). Beralih ke Inggris, kepolisian di negara ini diadopsi dari model polisi bayaran *Marine Police* yang dibentuk oleh swasta. Tugas dan fungsi kepolisian sangat dibatasi hanya untuk memerangi kejahatan. Kepolisian tidak boleh mencampuri kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh prinsip individualistik yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Inggris. Sementara di Belanda, setelah tahun 1993 terjadi penyatuan/integrasi badan kepolisian (polisi kota dan polisi kerajaan) menjadi kepolisian nasional. Kepolisian nasional ini berkedudukan di bawah Mendagri, Marsose di bawah Menteri Pertahanan dan Polisi Regio berada di bawah masing-masing Gubernur. Dengan demikian, tugas dan fungsi kepolisian di negara ini sangat berbeda dengan kepolisian di Indonesia, yang bertugas dan berfungsi sebagai penegak hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas (Aziz, 2011). Tugas pokok dan fungsi sebagai pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan HAM (Hak Azasi Manusia). Dengan kata lain, kepolisian harus bertindak secara professional dan memegang teguh kode etik profesi secara ketat dan keras sehingga tidak terjerumus ke dalam prilaku yang dibenci masyarakat.

Hal yang sangat berbeda dapat terlihat di Indonesia, di mana masyarakat dan polisi memiliki keterkaitan satu sama lain. Kepolisian berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat apabila dilihat dari tugas dan fungsinya sebagaimana dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief (2005), “Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*social worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Undang-Undang Kepolisian Indonesia, yaitu No. 2/2002 bertujuan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi HAM (Pasal 4, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), yang harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Riwanto, & Gumbira, 2017).

Dewasa ini persoalan penegakan hukum semakin marak dibicarakan baik melalui media cetak maupun media elektronik. Masyarakat juga semakin kritis dan korektif terhadap masalah penegakan hukum di Indonesia. Kompleksitas masalah penegakan hukum apabila dipandang dari berbagai sudut kajian menurut berbagai pihak senantiasa saling koreksi, dalam penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di samping hal tersebut, tujuan penegakan hukum adalah untuk tercapainya kedamaian dalam masyarakat. Suatu penegakan hukum dikatakan fungsional apabila tujuan tersebut telah tercapai, sehingga jika dilihat dari keseluruhan, maka penegakan hukum merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, penegakan hukum yang baik adalah apabila terdapat keselarasan antara nilai-nilai yang dituangkan dalam kaidah-kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan dengan perilaku manusia sebagai pelaksananya.

Secara yuridis dan faktual, subsistem SPP sebagai pengemban kekuasaan penegakan hukum tidak bernaung dalam satu atap kekuasaan yudikatif. Kepolisian dan kejaksaan sebagai dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan di samping lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana di bawah kendali kekuasaan pemerintah. Dilihat dari perspektif konstitusi, secara kelembagaan ketiga lembaga pengemban fungsi yudikatif tersebut adalah organ eksekutif di bawah subordinasi kekuasaan eksekutif. Kalau secara konstitusional kekuasaan kehakiman diakui sebagai kekuasaan yang merdeka, tentunya subsistem penyelenggara kekuasaan kehakiman di bidang penegakan hukum pidanapun harus berada dalam satu atap atau dalam satu ranah kekuasaan yudikatif.

Adalah suatu fakta yang tidak bisa dibantah bahwa di Indonesia banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Namun ada juga pelanggarang yang belum bisa terselesaikan dengan alasan yang beragam. Dewasa ini, kriminalitas seolah-olah tidak lagi mampu dibendung perkembangannya, masalah yang timbul tidak hanya sebagai kriminalitas dalam ruang lingkup pidana, tetapi harus dipandang juga sebagai masalah sosial. Hal ini dikarenakan kejahatan tidak hanya melibatkan satu dua orang di dalam praktiknya, tetapi terkadang melibatkan dan merugikan masyarakat dalam ruang lingkup yang jauh lebih besar. Penanggulangan kriminal yang semakin berkembang tidak dapat dilakukan dengan usaha represif saja, melainkan harus disertai dengan usaha preventif. Kedua hal tersebut haruslah dapat berjalan seimbang. Memang diperlukan efek jera bagi mereka yang telah melakukan tindak kriminal serta diperlukan efek takut untuk berbuat kriminal bagi mereka yang belum melakukan. Usaha preventif ini harus gencar dilakukan agar tingkat kriminal di Indonesia tidak terus meningkat. Usaha ini dapat dilakukan oleh semua aparat peradilan pidana, terutama kepolisian. Kepolisian sebagai *gatekeepers* SPP memiliki peran sentral, karena SPP dimulai dari kepolisian. Sebagai pemegang peran sentral dalam SPP, kepolisian harus mengupayakan agar usaha preventif dan represif dalam menanggulangi kriminalitas berjalan dengan sebaik-baiknya, terlebih lagi mengingat bahwa pihak kepolisian merupakan pihak yang sudah seharusnya dapat dipercaya oleh masyrakat. Pihak kepolisianlah yang berada di tengah-tengah masyarakat serta dianggap mampu memberikan rasa aman dan perlindungan yang tepat bagi masyarakat serta memastikan tercapainya kepastian hukum di masyarakat. Persoalan yang dikemukakan di atas mengisyaratkan keterkaitan dan kompleksitas permasalahan hukum yang muncul dari subsistem kepolisian selaku pintu masuk dalam penegakan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis progres peran kepolisian dalam SPP.

**Tinjauan Literatur**

**Istilah, tugas dan peran kepolisian**

Istilah polisi dikenal melalui konsep *Catur Praja* dan Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu: *Bestuur, Politie, Rechtspraak,* dan *Regeling.* Dengan demikian *Politie* dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari *Bestuur* dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini, polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban.

Charles Reith, dalam bukunya *The Blind Eye of History* sebagaimana dikutip di dalam majalah *Bhayangkara* mengemukakan bahwa polisi adalah tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Dalam *Encyclopaedia and Social Science* dikemukakan bahwa polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pada pengawasan keseharian umum.

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* W.J.S. Poerwodarmita (2002: 549) mengemukakan bahwa istilah polisi mengandung pengertian sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, dan merupakan pegawai negari yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam pengertian ini, istilah polisi mengandung dua pengertian makna polisi: tugas dan sebagai organnya. Polisi adalah aparat penegak hukum dan menjaga kamtibmas yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki agar kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu akan semakin kuat kesadaran hukum dan semakin kabur kewibawaan kepolisian, akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat.

Berdasarkan tugasnya, Polri adalah kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Kapolri. Pada awal mulanya, Polri adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002, kepolisian mengalami banyak kendala karena berhadapan langsung dengan Masyarakat. Kepolisian terkadang merasakan hubungan yang kurang baik dengan masyarakat yang dilayaninya. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit karena memerlukan proses komunikasi dan kontak sosial serta kemauan masing-masing anggota polisi. Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih. Kalau polisi sekarang sebagai aparat penegak hukum (yang menjalankan tugas/kekuasaan penyelidikan/penyidikan) dimasukkan dalam lingkungan kekuasaan pengadilan, diharapkan kepada kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum haruslah mandiri dan lebih terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana (Barda Arief Nawawi, 2008: 50).

Sebagai pelindung, pengayoman dan pelayan masyarakat, polisi harus bersikap santun, menghargai HAM, dan mengedepankan cara-cara yang manusiawi untuk memecahkan persoalan kejahatan dan problem sosial. Inilah yang dapat disebut sebagai kepolisian yang ideal. Polisi sipil dan demokratis. polisi yang dekat dan dicintai masyarakat. Menyangkut masalah polisi atau kepolisian yang ideal ini, sesaat setelah dilantik sebagai Kapolri, Jenderal Tito Karnavian mencanangkan *tagline* “Polisi Promoter” atau polisi profesional, modern, dan tepercaya. Proyeksi tagline ini mewakili dan mencerminkan seluruh rangkaian agenda, program prioritas, kebijakan, dan komitmen Kapolri dalam upaya membangun Polri yang jauh lebih baik. Kepolisian Indonesia saat ini sedang berproses menuju sosok yang ideal. Perlahan tapi pasti, semua jajaran kepolisian Indonesia bertekad merubah diri kearah paradigma baru polisi yang professional. Polisi yang Promoter juga diharapkan mempunyai kapasitas, kapabilitas, kualifikasi, dan kompetensi polisi yang unggul dan mumpuni, juga berkemampuan menjaga independensi Institusi dalam menjalankan tugas. Polisi yang Promoter adalah polisi yang sanggup memodernisasi *mindset*, *culture set*, strategi, instrumentasi, dan infrastruktur yang dimiliki dengan mengedepankan pendekatan humanis saat bertugas, yang tetap menjaga sikap dan sifat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, yang berupaya membangun popularitas pribadi dan institusinya dengan menjalin kemitraan dan melakukan pendekatan masyarakat secara simpatik dan empatik, serta berkomitmen meneguhkan integritasnya sehingga melahirkan kepercayaan Masyarakat (<https://nasional.tempo.co/read/804483/gambaran-ideal-polisi-di-masa-mendatang>).

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Tugas utama kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar negeri. Sedangkan dalam UU Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwasanya tugas pokok kepolisian adalah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakan hukum; dan (3) memberikann perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (https://sahrulparawie.wordpress.com/2016/05/15/makalah-tugas-pokok-dan wewenang-kepolisian).

Undang-Undang Nomor 2/2002 juga menjelaskan bahwa kepolisian berperan sebagai penganyom dan penjaga ketertiban masyarakat. Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated* CJS, di tangan polisilah diharapkan kasus-kasus kriminalitas dapat dibuat terang sehingga dapat mengurangi gelapnya kasus kejahatan. Hal ini diungkapkan oleh Simons dalam bukunya *Learboek Nederlands Strafrecht*, bahwa kepolisian *is maybe defined as the capacity the police officer to select from among a number of legal and illegal courses of action while perfoming deir duties* (Bailey, 1995: 206).

Penulis berpendapat bahwa fungsi polisi yang sangat umum sebagai aparat negara yang menjaga keamanan, ketertiban, pengayoman dan melindungi masyarakat sebagaimana juga diuangkapkan oleh Lestari dalam makalahnya pada lama http://dokumen.tips/documents/makalahtugas-dan-peranan-polisi.html, sehingga masyarakat merasa aman dan damai. Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang *carut marut*. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukanya sebagai pelindung masyarakat.

Menurut Soejono Sukanto, peran atau peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (*role theory*) yang dikutip oleh Setiawan mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu.” Menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan situasi-situasi lain relatif bebas (*independent*), tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut. Jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi. Rahardjo menjelaskan bahwa peranan dapat dibedakan menjadi empat macam (Daniaty, 2019), yaitu:

1. Peranan pilihan (*achieved role*)—peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.
2. Peranan bawaan (*acriber role*)—peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karna usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karena faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
3. Peranan yang diharapkan (*expected role*)—peranan yang dilaksanakan sesuai *dengan* ketentuan yang telah ditetapkan Bersama. Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
4. Peranan yang *disesuaikan* (*actual role*)—peranan yang disesuaikan dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.

**Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49>). Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Arliman, 2019: 10). Setiadi (2018: 4) mengemukakan bahwa penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum adalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja (Setadi, 2018: 5). Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan (Setiadi, 2018: 4). Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Setiadi, 2018: 5).

Adapun tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dalam masyarakat, pemberdayaan hukum, dan pengembangan budaya hukum, (<https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum>). Sebagai salah satu lembaga penegakan hukum, Polri memiliki tugas sebagai berikut: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat (<https://news.detik.com/berita/d-6899076/penegakan-hukum-di-indonesia-pengertian-fungsi-dan-contoh-lembaganya>). Laman yang sama menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Polri melakukan beberapa hal di masyarakat yaitu: melaksanakan pengaturan pada pelaksanaan kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran, dan ketaatan pada hukum; ikut dalam pembinaan hukum nasional; dan berpartisipasi dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum.

**Sistem Peradilan Pidana**

Situs <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat> menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene Inlaands Regelement* (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Kemudian pada tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 23 Desember 1981. Presiden Republik Indonesia mensahkan RUU tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa SPP terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan UU (Harahap, 2009: 90).

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan SPP (Effendi, 2013: 145). Sistem pradilan pidana Indonesia mengenal 3 pendekatan: normatif, administratif, dan sosial (Atmasasmita, 1996: 14). Sistem peradilan pidana juga dikenal dengan istilah CJS (*Criminal Justice System*) yang pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam CJS. *Criminal Justice System* ini muncul seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja pada organisasi kepolisian (*law enforcement*) sebagaimana dijelaskan oleh Romli Atmasasmita (1996: 9). Kegagalan ini disebabkan pada saat itu kepolisian menghadapi berbagai kendala dalam penanggulangan kejahatan, baik yang bersifat operasional maupun prosedur hukum. Kendala tersebut menyebabkan hasil yang tidak optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas dan mencegah kejahatan yang terjadi. Bahkan pada waktu tertentu tingkat kejahatan menjadi semakin meningkat.

Berdasarkan hal tersebut penanggulangan kejahatan mulai menggunakan pendekatan sistem yang dikenal dengan CJS. Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Keseluruhan proses itu bekerja dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan berpengaruh antara satu dengan yang lain. Dalam SPP tersebut bekerja beberapa komponen fungsi atau subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama.

**Metodologi Penelitian**

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk mendapatkan konsep, teori, doktrin serta pendapat atau pemikiran konseptual keilmuan, Penulis juga menelaah beberapa buku-buku literatur serta perundang-undangan yang ada hubungannya dengan obyek penelitian, yaitu peran kepolisian dalam organisasi negara Indonesia, khususnya UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan studi dokumen.

**Hasil dan Pembahasan**

**Pengaturan tugas dan fungsi kepolisian**

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2/2002 tentang Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

“Alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Kata polisi berasal dari istilah bahasa Yunani kuno “*politeia”* yang berarti pemerintahan suatu *polis* atau kota (Brotodirejo, 1989). Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan (Poerwadarminta, 1985). Secara yuridis, sebagaimana diatur`dalam ketentuan UU No. 2/2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing masayarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, ada tiga hal mendasar yang menjadi tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam *Tribrata* maupun *Catur Prasetya* Polri, yaitu (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002).

Untuk memelihara keamanan fungsi utama kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang. Fungsi menegakkan hukum pada kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh, ketika polisi menerima laporan adanya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), maka terdapat beberapa tindakan polisi yang harus dilakukan: pertama, menindak lanjuti kasus laporan curanmor dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dan seterusnya; kedua, memperketat unit patroli jalan supaya masyarakat merasa terlindungi; dan ketiga, melakukan upaya hukum yang tegas bagi pelaku curanmor supaya terdapat efek jera.

Istilah penegak hukum (*law enforcement officer*)dalam arti sempit hanya berarti polisi dan dalam arti yang lebih luas mencakup jaksa, hakim dan pengacara *(advokat)*. Dalam pengertian luas terakhir ini dapat dipergunakan terjemahan dari *rechthandhaving*, yang artinya penegakkan hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilainilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakkan hukum tidak bisa terlepas dari HAM (Najwan, 2010).

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan dengan:

“keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan gangguan lainnya yang dapat meresahkan Masyarakat.’

Sedangkan fungsi dan tugas kepolisian selanjutnya yang ditetapkan dalam UU No. 2/2002 tentang Polri sebagai berikut:

1. Pasal 2 UU No. 2/2002, fungsi kepolisian adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”;
2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2/2002, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlingdungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”;
3. Pasal 14 UU No. 2/2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2/2002, bertugas:
4. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
5. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
6. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
7. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
8. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
9. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pengawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa; dan
10. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

Ketiga pasal di atas menunjukkan bahwa pada prinsipnya kepolisian Indonesia dibentuk sebagai agen perubahan. Kapolri Idham Aziz dalam suatu kesempatan menyatakan bahwa polisi diharapkan dapat menjadi agen perubahan pada saat menjalankan tugasnya (Kapolri.id., 2020). Kepolisian bukan hanya sebagai alat untuk menumpas kejahatan, tetapi juga sebagai pemimpin yang baik melalui proses, dan yang ditempa berbagai tahapan hingga menghasilkan karakter *leadership* yang diinginkan*.* Tantangan yang dihadapi Polri ke depan juga semakin rumit dan kompleks sehingga diperlukan pemimpin yang mumpuni, kaya pengalaman dan berani mengambil keputusan serta berintegritas tinggi (Beritasatu.com, 2017). Peran kepolisian yang paling penting adalah sebagai penegak hukum sebab peran inilah yang menjadi standar maju mundurnya setiap negara dari aspek HAM. Indonesia dapat disebut sebagai negara maju apabila penegakkan hukumnya menjunjung tinggi HAM.

Masalah kompleks lainnya yang dihadapi Polri adalah bahwa konsep HAM ini berbeda-beda pada setiap negara karena masing-masing wilayah memiliki nilai yang berbeda terhadap manusia, meskipun ada nilai-nilai HAM yang bersifat Universal. Sebagai contoh, negara Amerika Serikat yang menganut liberalisme dan negara Inggris yang menganut individualism. Kedua negara ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam menafsirkan HAM. Dengan dasar liberalisme maka akan muncul kapitalisme dan meterialisme, di mana terjadi persaingan bebas dan monopoli ekonomi. Sedangkan di Inggris dominasi individulistik menyebabkkan “tidak boleh ada pembatasan pada hak individu” sampai pada suatu saat mereka menyadari bahwa hak individupun harus ada batasnya.

Permasalahan utama penegakkan hukum adalah bahwa hukum tidak berada pada ruang hampa (Rahardjo, 1993) tapi ada masyarakat yang menjadi adressat hukum. Maka, penegakkan hukum dalam masyarakat tidak semata-mata berarti penyesuaian masyarakat dengan hukum, melainkan bagaimana hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat (Wignjosoebroto, 2002). Hukum tidak dapat diterapkan begitu saja semata-mata demi hukum.

**Status dan peran Polri dalam perspektif SPP**

Status atau eksistensi kepolisian dalam perspektif SPP sudah jelas, yaitu sebagai bagian yang integral dari SPP. Secara internasional hal ini pun terlihat dalam laporan Kongres PBB ke-5 tahun 1975 tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,* khususnya dalam membicarakan masalah "*the emerging roles of the police and other law enforcement agencies"* yang menegaskan *It was recognized that the police were a component of the larger system of criminal justice which operated against criminality.* Dunia mengakui bahwa polisi adalah komponen dari SPP yang lebih besar yang beroperasi melawan kriminalitas.

Status Polri sebagai komponen/ unsur/ subsistem dari SPP sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini, baik dalam KUHAP maupun dalam UU Kepolisian No. 28/1997 yang saat ini sudah diganti dengan UU No. 2/2002, yaitu sebagai "penyelidik dan penyidik.” Secara ideal memang Polri diberi status sebagai penegak hukum yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, karena SPP merupakan implementasi dari kekuasaan kehakiman. Dengan kata lain, SPP pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan kehakiman di bidang peradilan pidana.

Kalau kekuasaan kehakiman diartikan hanya sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, seperti tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 4/2004, maka perumusan demikian memberi kesan sempit bahwa kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan peradilan atau kekuasaan mengadili. Menurut hemat penulis, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum/ undang-undang. Dalam perspektif SPP, kekuasan kehakiman diimplementasikan dengan empat tahap, yaitu:

1. Kekuasaan penyidikan
2. Kekuasaan penuntutan
3. Kekuasaan mengadili
4. Kekuasaan pelaksaan putusan/ pidana

Keempat tahap itu merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana (SPP yang integral) sebagaimana dijelaskan Daniaty (2019: 48-49). Penegakan hukum sebagai salah satu permasalahan umum sedikitnya menampilkan dua aspek, yaitu: (i) sebagai usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum, dan (ii) sebagai suatu usaha manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan. Dalam hubungan inilah tampil para penegak hukum sebagai orang yang dituntut untuk memiliki kualitas kejiwaan, pengetahuan dan keterampilan tentu agar usaha penegak hukum itu berhasil.

Penegakan hukum mendekatkan hukum sebagai “*sollen gesetze”* kepada kehidupan sehari-hari. Pada saat itulah hukum mendapat kesempatan untuk diuji oleh dan diterapkan pada dunia kenyataan sehari-hari. Terjadilah di sini suatu proses interaksi yang melibatkan empat unsur, yaitu:

1. Kemauan hukum—tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum.
2. Tindakan para penegak hukum.
3. Struktur penegak hukum.
4. Pengaruh atau bekerjanya ketentuan-ketentuan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari (Rahardjo, 1987: 26).

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance)* maka kondisi tersebut menunjukan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif (Sunarso, 2014: 195). Dalam KUHAP tercantum mengenai siapa saja yang boleh melakukan penyidikan dan penyelidikan, di mana yang boleh melakukan penyidikan disebut dengan penyidik diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP yang menyatakan bahwa, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Sedangkan yang berhak melakukan penyelidikan yang kemudian disebut dengan penyelidik, diatur dalam Pasal 1 butir 4 yang berbunyi, “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” Berikut ini Penulis mencoba menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyelidik dan penyidik sebagai berikut:

1. **Pengertian Penyidikan**

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti.”

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
4. tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

1. **Pengertian Penyidik**

Penyidik, menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan pejabat PNS (Penyidik Negeri Sipil). Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

1. Pejabat Penyidik Polri—Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:
2. Penyidik Penuh adalah pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh,” harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

* sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
* atau yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua; dan
* ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

1. Penyidik Pembantu menurut Pasal 10 KUHAP adalah Pejabat Kepolisan Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

* sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
* atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a); dan
* diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

1. Penyidik PNS

Penyidik PNS diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu PNS yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat PNS hanya terbatas sepanjang yang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik PNS sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.”

1. **Tugas dan kewenangan penyidikan yang ditentukan di dalam KUHAP**

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan peyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Yang menjadi pokok permasalahan di sini adalah bahwa dalam teori efektifitas hukum disebutkan agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Setelah adanya para penegak hukum (penyidik) Penulis melihat bahwa masih ada hukum (peraturan-peraturan) yang belum ditegakkan, yang artinya penegak hukum dalam menjalankan peraturan perundang-undangan tidak selalu bisa sampai ke tahap penyidikan dengan alasan yang bermacam-macam.

Ada beberapa contoh kasus yang sangat sering terjadi tetapi sampai saat ini belum ada penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut. Sebagai contoh, salah satu satwa yang di gemari orang serta dapat dijadikan bahan makanan untuk sebagian masyarakat di Kota Ambon adalah satwa kuskus (*phalanger spp*). Binatang ini adalah salah satu mamalia berkantung dengan ekor yang panjang dan juga merupakan bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai hargannya sehingga kelestariannya perlu dijaga melaluai berbagai upaya perlindungan. Secara rinci peraturan tentang satwa ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Selanjutnya ada Pasal 21 Undang-Undang No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berisikan tentang larangan bagi setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, dan larangan untuk memindahkan satwa dilindungi baik di dalam maupun di luar Indonesia. Larangan tersebut juga termasuk untuk kulit, tubuh, bagian-bagian lain, telur, dan sarang satwa yang dilindungi. Pasal 40 ayat (2) juga menyebutkan hahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berikut ini juga ada kasus yang belum ditindak hingga saat ini, yaitu salah satu bentuk pelanggaran yang saat ini terjadi di Indonesia, khususnya di Maluku yaitu penolakan uang koin rupiah dari pecahan Rp. 200 sampai dengan pecahan yang terendah. Padahal sampai saat ini belum ada larangan untuk tidak menggunakan uang koin pecahan Rp. 200 sampai dengan pecahan terendah dari pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia yang mempunyai wewenang penuh menetapkan punggunaan alat pembayaran (Undang-Undang Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia Pasal 15 Ayat (1)). Pelanggaran ini sangat sering ditemui terutama di Kota Ambon dan apabila masyarakat tidak mau menerima atau menolak uang pecahan koin tersebut, maka akan terjadi pelanggaran hukum sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7/2011 tentang Mata Uang, yang berbunyi:

Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Salah satu alasan yang pernah Penulis dengar adalah tidak ada laporan dari masyarakat bahwa telah terjadinya tindak pidana. Alasan ini dapat terbantahkan bahwa kepolisian dalam melakukan penegakkan hukum harus lebih maksimal dan tidak untuk menunggu laporan dari masyarakat, mengingat polisi bisa membuat laporan dengan menggunakan laporan model A sesuai yang tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan. Pasal 5 (1) Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari:

1. Laporan Polisi Model A—Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
2. Laporan Polisi Model B—Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Perlu juga melihat Pasal 102 KUHAP sebagai berikut:

1. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
2. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
3. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik daerah hukum.

Secara umum, SPP mengenal ada tiga model pendekatan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian kajian literatur di atas, yakni pendekatan normatif, administratif, dan social (Anwar, 2009: 39). Pendekatan *normatif* memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) sebagai institusi pelaksana perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan *administratif* memandang keempat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, di mana sistem yang digunakan adalah sistem administrasi. Sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan keempat bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam kaitannya dengan hal di atas, pendekatan normatif dalam sitem peradilan pidana ini tidak di implementasikan oleh para penegak hukum (polri), mengapa demikian, karena dalam pendekatan *normatif* para penegak hukum (kepolisisan, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) sebagai institusi pelaksana perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Sub sistem kepolisian dalam hal ini tidak menjalankan peraturan perundang-undangan secara sempurna, artinya kepolisian yang dimaksudkan sekarang ini hanya menjalakankan peraturan perundang-undangan seadanya. Sebagai contoh Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan. (1) Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari: a. Laporan Polisi Model A; dan b. Laporan Polisi Model B. (2) Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. (3) Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat. Polisi dalam prakteknya hanya menunggu laporan/pengaduan dari masyarakat sesuai dengan laporan model B yang tertuang dalam Perkap di atas. Akan tetapi ada beberapa kasus yang telah Penulis sebutkan di atas mengenai kasus pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi di kota Ambon, dan kasus penolakan penggunaan mata uang pecahan kecil di Maluku. Hal itu berarti bahwa kasus-kasus semacam ini sudah membudaya dan menjadi hal yang wajar, padahal kasus tersebut ada ketentuan/sanksi pidananya. Dalam penerapan SPP perlu juga diterapkan model *crime control*, yang didasarkan atas anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku kriminal, dan ini adalah tujuan utama dari SPP, karena hal yang paling diutamakan adalah ketertiban umum dan efesiensi.

**Kesimpulan dan Saran**

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum, dan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi polisi yang sangat umum adalah aparat negara yang menjaga keamanan, ketertiban, pengayoman dan melindungi masyarakat. Tugas pokok kepolisian tersebut semuanya harus tercapai bukan salah satunya atau hanya dua saja di antara ketiga tugas pokok tersebut yang tercapai, karena apabila hanya satu saja tidak tercapai maka yang keduanya dianggap tidak mungkin. Contohnya tugas polisi memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bagaimana caranya polisi memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ialah polisi harus menegakkan hukum yang menjadi salah satu tugas dari kepolisian. Sebaliknya jika polisi dalam menjalankan tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat juga harus menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum agar terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. pada umumnya berbicara mengenai system peradilan pidana berarti berbicaara soal penegakan hukum.

Polisi adalah ujung tombak, yang juga dapat disebut sebagai pintu masuk dalam sebuah *integrated criminal justice system*, di tangan polisilah diharapkan lebih mampu mengurangi gelapnya sebuah kasus kejahatan. Peranan kepolisian juga dipandang sangat penting sehingga perlu ada perkembangan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukanaya sebagai penegak hukum (penyidik). Namun perlu ditekankan kembali bahwa sampai saat ini polisi dalam melakukan penegakan hukum masih belum maksimal sehingga beberapa pelanggaran yang masih sering terjadi belum ditegakkan. Kiranya pihak kepolisian dapat melaksanakan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan sehinga perkembangan SPP dapat direalisasikan.

**Daftar Pustaka**

Ansorie. Hukum Acara Pidana, Bandung: Angkasa, 1990.

Anwar, Yesmil. Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009

Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Prenada Media, 2008.

Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Jakarta: Bina Cipta, 1996.

Daniaty, Kurnia Rahma. “Mengkaji Kembali Peran Dan Fungi Polri Dalam Era Reformasi,” (Makalah), Diakses pada tanggal 21 Mei 2019

Effendi, Tolib. Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Yogyakara: Pustaka Yustisia, 2013.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hal. 90. 2

Lam, STR John May. The Police of Briatai, Terjemahan, Majalah Bhayangkara.

Lestari, Ayu. “Tugas dan Peranan Polisi” (Makalah), http://dokumen.tips/ documents/ makalah-tugas-dan-peranan-polisi.html ,diakses pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 02:00 WIB.

Parawie, Sahrul. “Tugas dan Wewenang Pokok Kepolisian,” (Makalah), https: //sahrulparawie.wordpress.com/2016/05/15/makalah-tugas-pokok-dan wewenang-kepolisian, (diakses tanggal 21 Mei 2019).

Rahardjo, Satjipto. Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini. Simposium Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1987.

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 TentangKUHAP

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Setiadi, Wicipto Setiadi. Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. Majalan Hukum Nasional, Vo. 48 No. 2 Tahun 2018.

Sunarso, Siswanto. Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Laurensius Arliman. Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia. Dialogia Iuridica, Vol. 11 No. 1, 2019, hal. 10

**ANALISIS PATROLI PERINTIS PRESISI**

**POLRES METRO TANGERANG KOTA MENGGUNAKAN**

***BROKEN WINDOW THEORY***

## 1Bondan Anugrah, 2Arsenius Wisnu, 3Aji Patria Perkasa

**1,2,3Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta 12260**

## E-mail: 1943501013@student.budiluhur.ac.id

**Abstrak**

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), negara membentuk sebuah institusi yang disebut kepolisian. Kerusakan fisik lingkungan di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota memberikan persepsi kepada pelaku atau calon pelaku kejahatan bahwa daerah tersebut rentan terhadap kejahatan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran serta fungsi tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Tangerang Kota mengenai proses pencegahan dan pemeliharaan Kamtibmas. Penelitian ini menggunakan teori broken window sebagai dukungan analisinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Dengan tidak memandang besar kecilnya tindak kriminal, hasil penelitian menunjukan bahwa penurunan tingkat kriminalitas yang terdapat dalam bagan laporan Polres Metro Tangerang Kota merupakan hasil dari kerja sama yang baik yang dilakukan antara institusi kepolisian dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan inti dari terori broken window yakni merupakan perwujudan dari keinginan petugas penjaga keamanan dalam hal ini yaitu institusi Polri untuk bersikap mengayomi, tanggap, dan responsif terhadap segala peluang timbulnya kekacauan dan kriminalitas.

***Kata kunci: teori broken window; patroli perintis presisi; pencegahan kejahatan***

***Abstract***

*In maintaining public security and order (kamtibmas), the state establishes an institution called the police. The physical damage to the environment in the jurisdiction of the Tangerang City Metro Police gives the perception to perpetrators or potential criminals that the area is vulnerable to crime. This paper aims to find out how the roles and functions of the Tangerang City Police Perintis Presisi Patrol Team regarding the process of preventing and maintaining Kamtibmas. This study uses the broken window theory as support for its analysis. The research method uses a qualitative approach and a descriptive research type. Data collection techniques used in this study were observation and interviews. Regardless of the size of the crime, the results of the study show that the decrease in the crime rate contained in the report chart of the Tangerang City Metro Police is the result of good cooperation between the police and the community. This is in line with the core of the broken window theory which is a manifestation of the wishes of security guards, in this case, the Polri institution, to be protective, responsive and responsive to all opportunities for chaos and crime from arise.*

***Keywords: broken window theory; perintis presisi patrol; crime prevention***

## Pendahuluan

Kejahatan maupun penyimpangan dari standar yang dapat diterima secara sosial secara umum, telah ada di semua masyarakat sejak zaman kuno. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur dari pokok kesatu dari hukum pidana (Moeljatno, 1993). Dosen senior Kriminologi Universitas Terbuka Inggris, Dr. David Scott menenerangkan konsep dan aspek kejahatan merupakan konsep yang kontroversial, tanpa definisi yang disepakati secara universal. Namun, pendekatan yang paling lugas adalah dari sudut pandang legalistik, di mana kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, khususnya hukum pidana. Hal tersebut melibatkan aspek-aspek tertentu, termasuk kerugian pidana dan kesalahan pidana. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap sebagai kejahatan ketika melanggar norma hukum dan dapat dikenakan sanksi hukuman, seperti penjara atau denda (OpenLearn, 2019). Untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, diperlukan adanya sistem hukum yang berfungsi untuk menegakkan aturan dan menghukum pelaku kejahatan. Sistem hukum yang efektif dan efisien dapat membantu mengurangi angka kejahatan dan meningkatkan keamanan serta ketertiban masyarakat. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, negara membentuk sebuah institusi yang disebut kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dibentuk pada tanggal 1 Juli 1946. Pada periode setelah kemerdekaan, Polri menerapkan sejumlah aturan dan menjalin hubungan kelembagaan dengan berbagai pihak. Fungsi dan tugas kepolisian memegang peran penting sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat.

Merujuk pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama kepolisian meliputi:

1. Tugas pembinaan masyarakat, dilakukan dengan pendekatan secara sosial serta mutualisme untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum.
2. Tugas di bidang preventif, meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk memberi perlindungan serta pertolongan.
3. Tugas di bidang represif justisil, yang berkaitan dengan penyidikan dan penyelidikan pada tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Tugas kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif atau pencegahan kejahatan (Utama, 2019). Salah satu kegiatan tugas preventif kepolisian adalah patroli. Patroli berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat maupun pelanggaran hukum dalam rangka upaya memelihara sekaligus meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ihwal dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) disusun secara berjenjang dari tingkat pusat hingga wilayah. Organisasi di tingkat pusat disebut Markas Besar (Mabes Polri). Sementara organisasi di tingkat wilayah, organisasi Polri dibagi dalam tiga bagian, yaitu Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resort atau (Polres), dan Kepolisian Sektor atau (Polsek). Dalam rangka mewujudkan fungsi kepolisian, salah satu kepolisian daerah di Indonesia yaitu adalah Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) melakukan inovasi dan menciptakan program preventif kejahatan, yaitu program Patroli Perintis Presisi yang resmi dibentuk pada tanggal 13 Januari 2022.

Tim Patroli Perintis Presisi memiliki peran yang besar dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan di Jakarta. Melansir dari Tribratanews (2023), Kapolda Metro Jaya pada periode tahun 2020-2023, Irjen. Pol. Fadil Imran, menyatakan bahwa program tersebut dibentuk dengan harapan menjadi garda terdepan dalam pencegahan kejahatan. Dalam pelaksanaannya terdapat sekitar 300 personel tim Patroli Perintis Presisi yang bertugas. Berdasarkan data sepanjang tahun 2021, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, 79% kejahatan yang terjadi adalah kejahatan konvensional dan 35% persennya merupakan kejahatan jalanan (Aprilia, 2022). Tim Patroli Perintis Polda Metro Jaya juga bermula dari tuntutan masyarakat terkait keamanan dan pengantisipasian kejahatan di malam hari. Kejahatan yang menjadi perhatian utama dalam program tersebut adalah kejahatan berupa gangguan potensi Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang diantaranya seperti tawuran, narkoba, mabuk-mabukan, dan lokasi rawan begal jalanan, balap liar, serta kelompok lainnya yang dianggap meresahkan warga. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran dalam konfrensi pers akhir tahun 2021, meyebutkan, secara umum kasus tindak pidana di wilayah hukum Polda Metro Jaya di tahun 2021 ini berjumlah 32.400 kasus. Kasus pencurian dan kekerasan (curat) terdapat 1.419 kasus. Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) 949 kasus. Kasus penganiayaan 718 kasus, dan kasus kejahatan siber (*cyber crime*) 762 kasus (Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, 2021).

Polda Metro Jaya memiliki tim Patroli Perintis Presisi yang tersebar di setiap jajaran Kepolisian Resort (Polres) di wilayah hukumnya. Salah satu Kepolisian Resort yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya adalah Polres Metro Tangerang Kota yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Tangerang. Berdasarkan data kejadian tindak pidana di wilayah kota Tangerang pada tahun 2021 terdapat total 3.624 tindak pidana kejahatan. Polres Metro Tangerang Kota berperan aktif dalam menjalankan program-program pemerintah terkait dengan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks ini, peran Patroli Perintis Presisi di Polres Metro Tangerang Kota dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya fenomena kejahatan, khususnya kejahatan yang menjadi ancaman Kamtibmas di wilayah tersebut. Patroli Perintis Presisi adalah suatu bentuk patroli yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan analisis data untuk menentukan daerah-daerah yang rentan terjadi tindak kejahatan.

Dalam perspektif *Broken Window*, tindakan Patroli Perintis Presisi dinilai dapat membantu mencegah terjadinya *Broken Window* di wilayah tersebut, karena lingkungan yang terawat dan aman akan memberikan kesan bahwa ada yang mengawasi dan peduli terhadap lingkungan tersebut, sehingga pelaku kejahatan akan merasa tidak nyaman atau segan untuk melakukan tindakan kriminalitas di lingkungan tersebut. *Broken Window* adalah sebuah teori kriminologi yang menyatakan bahwa tindakan kriminalitas cenderung meningkat pada daerah atau lingkungan yang terlihat tidak terawat atau rusak. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa keadaan lingkungan yang rusak dan tidak terawat dapat menciptakan kesan bahwa tidak ada yang mengawasi atau peduli terhadap lingkungan tersebut, sehingga orang yang memiliki niat jahat akan merasa bebas melakukan kejahatan tanpa takut terdeteksi. *Broken window theory* di sini yang dalam buku Wortley dan Townsley (2017) sebagai bagian dari kriminologi lingkungan, kemudian dihubungkan dengan sistem pencegahan kejahatan berbasis kemasyarakatan atau biasa disebut *community policing*.

Dari uraian tersebut, tulisan ini mencoba untuk menganalisis peran dan fungsi tim Patroli Perintis Presisi mengenai proses pencegahan dan pemeliharaan ketertiban serta keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. Permasalahan penelitian ini yang didasarkan pada fakta tersebut dirumuskan menjadi: Bagaimana peran dan fungsi Patroli Perintis Presisi dalam optimalisasi pencegahan dan pemeliharaan ketertiban serta kemanan masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami Patroli Perintisi Presisi yang dianalisis menggunakan *broken window theory*. Studi ini diharapkan untuk membuka wawasan ilmiah tentang Patroli Perintis Presisi dalam ranah akademik.

## Tinjauan Literatur

**Patroli Perintis Presisi**

Setiap pelaksanaan tugas-tugas kepolisian memiliki landasan dan dasar hukumnya. Pelaksanaan kegiatan patroli oleh Tim Patroli Perintis Presisi dilakukan berdasarkan pada petunjuk pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 Tentang Patroli pada pasal 22 tentang pelaksanaan patroli menggunakan kendaraan bermotor roda dua sebagai berikut:

1. melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran patroli;
2. mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tertentu sehingga Petugas Patroli dapat melakukan berbagai kegiatan metode Patroli;
3. membentuk formasi berbanjar, dalam hal Patroli berjumlah dua unit kendaraan Patroli atau lebih;
4. dapat dilakukan dengan berboncengan;
5. memiliki sertifikasi mengemudi yang sah;
6. menggunakan alat pelindung kepala helm;
7. dalam hal patroli pada malam hari dan/atau pencahayaan kurang, petugas patroli menggunakan jaket keselamatan (suspender reflector);
8. menyalakan lampu kendaraan dan lampu rotator;
9. membunyikan sirine pendek dan/atau klakson kendaraan;
10. berhenti di berbagai tempat secara acak, bervariasi dan berbeda untuk berdialog dan mengamati untuk mendapatkan informasi yang penting tentang situasi Kamtibmas; dan
11. melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal situasi yang berpotensi ataupun terjadi gangguan Kamtibmas dan/atau Kamseltibcar Lantas.

Tim Patroli Perintis Presisi memiliki 2 tugas pokok dan fungsi, yaitu adalah patroli dan sosialisasi. Patroli, yaitu dalam mencegah terjadinya kekacauan atau kriminalitas di jam-jam rawan. Sosialisasi, yaitu berupa himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dan komunitas setempat dalam pemeliharan keamanan dan ketertiban masyarakat.

***Community Policing* (Pemolisian Masyarakat)**

Fokus masyarakat terhadap pemolisian muncul sebagai pendekatan baru setelah penelitian yang dilakukan pada tahun 1970-an, yang menemukan adanya manfaat dalam peningkatan interaksi antara warga dan polisi (Kelling & Moore, 1988). Anggota komunitas kemudian dianggap sebagai "co-producer keselamatan publik", sementara polisi tidak lagi hanya bereaksi terhadap keadaan darurat, tetapi merupakan "diagnostik utama dan koordinator perawatan" dalam perang melawan kejahatan (Bayley & Shearing, 1996).

Skolnick dan Bayley (1988) mengidentifikasi empat elemen yang diperlukan untuk formula *community policing*:

1. pencegahan kejahatan berbasis komunitas;
2. reorientasi kegiatan patroli untuk menekankan pelayanan non-darurat;
3. peningkatan akuntabilitas kepada publik, dan;
4. desentralisasi komando.

Sementara itu, Gary W. Cordner (2014) menerangkan elemen penting dari *community policing* yaitu interaksi yang positif (*positive interaction*), kemitraan (*partnership*),dan pemecahan masalah (*problem solving*). Pendekatan pemolisian masyarakat mengkonseptualisasika peranannya sebagai salah satu pelayanan masyarakat atau komunitas, dimana masalah diselesaikan secara kolaboratif dengan semua pihak yang berkepentingan. Layanan tingkat komunitas adalah intervensi yang berfokus pada lingkungan yang lebih luas yang bertujuan untuk memperkuat komunitas dan memupuk kohesi dan ekasi kolektif, sekaligus mengurangi disorganisasi sosial (Sampson, 2012). Dalam hal ini warga negara atau masyarakat bukan hanya objek rujukan penegakan hukum, tetapi dapat menyuarakan keprihatinan mereka dan meminta pertanggungjawaban polisi atas tindakan yang dilakukan. Pemolisian Masyarakat atau Pemolisian Berwawasan Lingkungan dapat didefinisikan sebagai pendekatan pemolisian yang mengakui kemandirian dan tanggung jawab bersama antara polisi dan masyarakat dalam memastikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua warga negara (Kabage, 2019).

Chryisnanda DL (2011) juga menjelaskan bahwa *community policing* adalah sebuah filosofi dan sebuah strategi operasional yang mendorong terciptanya satu kemitraan baru antara masyarakat dan polisi. Polisi dan masyarakat bekerja bersama-sama sebagai mitra dalam mengidentifikasi, menentukan prioritas dan menyelesaikan masalah-masalah baru, seperti tindak kejahatan, penyalahgunaan obat-obatan, ketakutan akan tindak kejahatan, ketidak-tertiban sosial dan fisik, dan seluruh kekurangan di masyarakat, dengan tujan untuk meningkatkan seluruh kualitas hidup di wilayah tersebut.

***Broken Window Theory* (Teori Jendela Pecah)**

Pada tahun 1969, Philip G. Zimbardo, seorang psikolog sosial Stanford menerbitkan penelitian yang menjadi dasar *broken window theory*, kemudian teori tersebut dikenalkan dalam artikel Atlantik tahun 1982 yang ditulis oleh James Q. Wilson dan George L. Kelling. Kedua ilmuwan sosial ini menggunakan artikel Zimbardo dengan argumennya yaitu, *"Jika sebuah jendela di sebuah gedung rusak dan dibiarkan tidak diperbaiki, semua jendela lainnya akan segera rusak."*

*Broken window* menjadi metafora yang sangat kuat dan berpengaruh baik dalam pemolisian maupun dalam diskusi populer tentang kejahatan dan kekacauan, sering ditampilkan sebagai komponen kunci atau versi yang lebih berotot dari *community policing* (Reisig & Kane, 2014). *Broken window theory*menyatakan bahwa tanda-tanda yang terlihat dari kejahatan dan kekacauan sipil, seperti jendela pecah maupun vandalisme, bergelandangan, minum alkohol di tempat umum, *jaywalking* (tindakan menyebrang jalan dengan cara yang illegal dan tidak aman), dan menaiki transportasi umum dengan cara ilegal (tidak membayar tiket atau ongkos), semua hal tersebut menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih mempromosikan kejahatan dan kekacauan (Wilson & Kelling, 1982).

Menurut *broken window theory*, persepsi dari kekacauan yang meningkat, *fear of crime* yang meningkat dan berkurangnya kontrol sosial masyarakat adalah penghambat yang signifikan dari partisipasi publik dalam pencegahan kejahatan yang timbul secara langsung dari kekhawatiran akan keselamatan pribadi dan rasa sia-sia yang berkaitan dengan upaya yang diperlukan (Ren, Zhao, & He, 2017).

Dalam buku (Wortley & Townsley, 2017) dijelaskan delapan gagasan inti dalam memahami argumen *broken window theory* yang diambil dari artikel asli, yaitu:

1. Kekacauan dan *fear of crime* sangat berkaitan.
2. Polisi (dalam contoh yang diberikan, petugas patroli jalan kaki) merundingkan peraturan jalan. “Orang jalanan” terlibat dalam negosiasi aturan tersebut.
3. Lingkungan yang berbeda memiliki aturan yang berbeda.
4. Gangguan yang tidak tertangani menyebabkan rusaknya kontrol komunitas.
5. Area di mana kontrol masyarakat rusak rentan terhadap invasi kriminal.
6. Hakikat peran polisi dalam menjaga ketertiban adalah memperkuat mekanisme kontrol informal masyarakat itu sendiri.
7. Masalah muncul tidak begitu banyak dari orang-orang yang tidak teratur seperti halnya dari jemaah sejumlah besar orang yang tidak tertib.
8. Lingkungan yang berbeda memiliki kapasitas yang berbeda untuk mengelola kekacauan

**Sumber: hasil olahan Penulis, 2023**

**Gambar 1. Model konsep *Broken Window Theory***

Kesimpulan yang dapat diambil dari teori ini, Wortley dan Townsley mengutip James Q. Wilson dan Kelling (2006):

*“broken windows menghasilkan dua hal, yang satu yaitu hal bagus yang tidak dapat disangkal dan satu lainnya adalah hal yang mungkin efektif. Hasil tersebut mendorong polisi untuk menjaga ketertiban umum dengan serius, sesuatu yang sangat diinginkan oleh mayoritas orang, dan meningkatkan kemungkinan bahwa lebih banyak ketertiban berarti lebih sedikit kejahatan. Tujuan pertama tidak membutuhkan bukti. Hal yang kedua, dan sejauh ini sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak ketertiban umum (bersama dengan faktor lainnya) dikaitkan dengan kurangnya predator kejahatan jalanan”* (Wortley & Townsley, 2017)

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan istilah umum untuk serangkaian sikap dan strategi untuk melakukan penyelidikan yang ditujukan untuk menemukan bagaimana manusia memahami, mengalami, menafsirkan, dan menghasilkan dunia sosial (Sandelowski, 2004). Penelitian kualitatif adalah suatu proses penyelidikan naturalistik yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial secara alami (Hendryadi, Tricahyadinata , & Zannati, 2019). Penulisan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana penelitian ini difokuskan pada permasalahan dengan tujuan untuk menjelaskan fakta mengenai keadaan lapangan dalam implementasi Patroli Perintis Presisi di wilayah hukum Polres Metro Tangerang kota. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu dengan observasi lapangan dan wawancara anggota kepolisian Polres Metro Tangerang Kota, dan data sekunder, yaitu studi literatur berupa buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu dengan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

**Permasalahan Umum Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)**

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah:

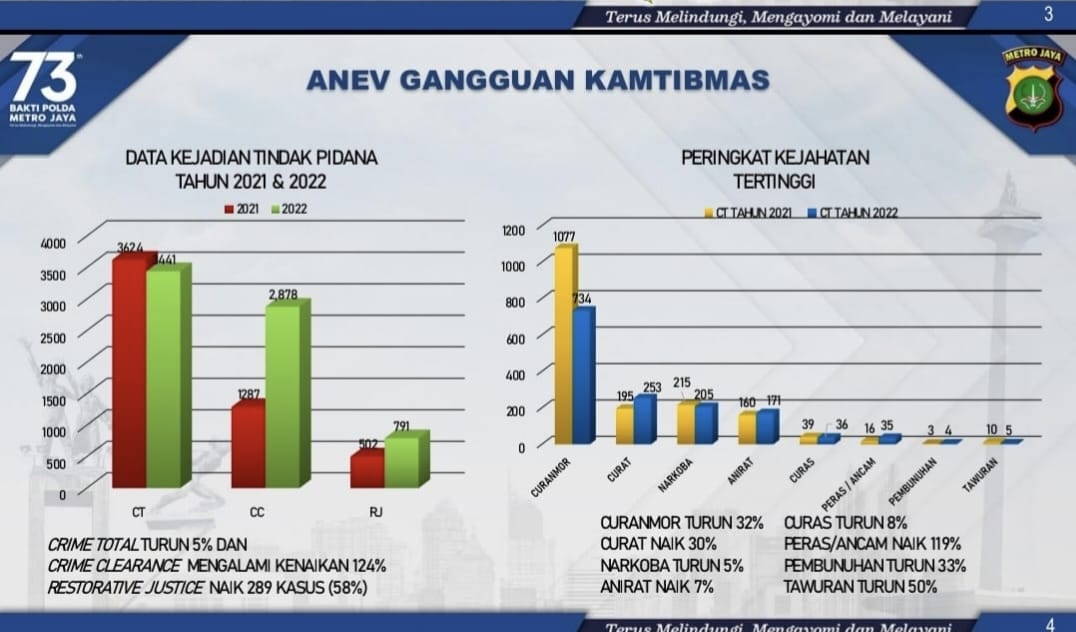
*“suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu Keamanan prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainnya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.*

Polri mencatat adanya kenaikan angka gangguan Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), sejak awal tahun 2022 sebanyak 183,39%. Lebih lanjut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan trend gangguan kamtibmas mengalami kenaikan sebanyak 552 kejadian (Alam, 2022). Kemudian Polri mencatat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) mengalami penurunan di awal 2023. Pada 31 Desember 2022 ada 1.226 kasus gangguan keamanan, sedangkan pada tanggal 1 Januari 2023 tercatat sebanyak 699 kasus (Rico, 2023).

Kekacauan dan kejahatan dalam bentuk gangguan kamtibmas menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Berbagai jenis Kamtibmas yang ada di Kota Tangerang berdasarkan laporan Polres Metro Tangerang Kota antara lain adalah pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), pencurian dengan pemberatan (Curat), narkoba, penganiayaan berat (Anrat), pencurian dengan kekerasan (Curas), peras/ancam, pembunuhan, dan tawuran. Data laporan peringkat kejahatan ganguan kamtibmas pada tahun 2021-2022 yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota dapat dilihat pada Gambar 2.

Dapat dilihat dari gambar bahwa perbandingan peringkat kejahatan pada tahun 2021 dan 2022 adalah Curanmor turun sebanyak 32%, Curat naik sebanyak 30%, Narkoba turun sebanyak 5%, Anrat naik sebanyak 7%, Curas turun sebanyak 8%, peras/ancam naik sebanyak 119%, pembunuhan turun sebanyak 33%, tawuran turun sebanyak 50%. Sementara itu, jika dilihat dari perbandingan total kejadian tindak pidana tahun 2021 dan 2022, *crime total* turun sebanyak 5%, *crime clearance* naik sebanyak 124%, dan *restorative justice naik* sebanyak 58%.

Motivasi kejahatan-kejahatan tersebut telah dieksplorasi, berdasarkan wawancara langsung, menurut anggota kepolisian Polres Metro Tangerang Kota, IPTU Dwi Muhamad Suryanto mengatakan, jika melihat hubungan sosial yang terkait dengan budaya jalanan, dimana motivasi dalam melakukan tindak kriminal itu dilandasi oleh faktor kemiskinan, ketidakadiran negara negara, dan penelantaran orang tua. Tingkat kejahatan di daerah yang ditandai dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang lebih tinggi dapat dihitung lebih tinggi daripada di daerah lain yang berkembang dengan baik. Selain itu, individu dengan pengendalian diri yang rendah memiliki peluang lebih besar untuk melakukan sebuah kejahatan.



**Sumber: Data Polres Metro Tangerang Kota, 2023**

**Gambar 2. Data laporan anev gangguan kamtibmas tahun 2023**

Namun, kondisi sosial struktural yang cukup berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dan proses-proses interaksi sosial yang semakin mematangkan lahirnya tindakan kejahatan itu tidak selalu sepenuhnya benar-benar melibatkan calon pelaku dalam tindakan kriminal. Kondisi yang sudah matang masih membutuhkan faktor-faktor berupa tekanan, rangsangan yang sangat kuat sedemikian rupa sehingga menyebabkan masyarakat tidak berdaya untuk menahan atau adanya kesempatan yang terbuka sangat luas dengan risiko yang hampir tidak nampak sampai dorongan yang kecil sekalipun dengan mudah dapat menyulut tindak kejahatan (Sumarlin, 2014). Dengan kata lain, suasana dan kondisi fisik lingkungan atau infrastruktur menjadi rangsangan kuat timbulnya kejahatan dan penyimpangan.

Menurut Lang, dkk (2010), *Broken window theory* menunjukkan bahwa kondisi lingkungan suatu tempat mengirimkan sinyal kontekstual kepada individu tentang perilaku mana yang dapat diterima dan normatif, yang selanjutnya memengaruhi perilaku individu (Liu, Wu, & Che, 2019). Contohnya, sebuah bangunan dengan jendela pecah yang tidak diperbaiki akan memberikan kesan bahwa tidak ada yang peduli dan tidak ada yang bertanggung jawab. Hal ini akan menyebabkan seorang atau sekelompok perusak memecahkan sisa jendela yang lain dan menambahkan grafiti, karena dalam pikiran mereka tidak ada yang peduli. Kerusakan fisik suatu lingkungan memberikan persepsi kepada pelaku bahwa daerah tersebut rentan terhadap kejahatan dan bahwa masyarakat sangat ketakutan sehingga mereka tidak melakukan apa pun untuk menghentikan suatu kejahatan. Kerusakan fisik lingkungan, berkemungkinan besar, tidak hanya memengaruhi kognisi dan perilaku pelaku potensial, tetapi juga membentuk bagaimana masyarakat berperilaku dan apa yang mereka pikirkan tentang masyarakat lainnya. Sebaliknya, perbaikan fisik suatu lingkungan dapat mengurangi tanda-tanda kerentanan dan meningkatkan komitmen terhadap aktivitas perlindungan bersama (Taylor & Harrell, 1996).

**Kondisi Pelaksanaan Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Tangerang Kota**

Penciptaan stabilitas Kamtibmas sangat dipengaruhi oleh adanya upaya preemtif dan preventif dari potensi gangguan yang mungkin terjadi. Langkah tersebut memerlukan pemahaman kondisi lingkungan dalam hal ini lingkungan tempat tinggal dan usaha dari masyarakat di setiap daerah. Kegiatan *community policing* oleh Polisi saat ini sudah menjadi suatu kebijakan dan strategi yang harapannya adalah Polisi bisa bekerjasama dengan masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan tugasnya. Implementasi kepolisian *broken window* yang paling terkenal berfokus pada taktik tingkat mikro untuk menangkap dan menghalangi pelaku individu yaitu, gangguan sosial dan ketidaksopanan (Jenkins, 2020). Para anggota kepolisian lebih dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam berinteraksi dengan masyarakat melalui pendekatan yang lebih intim dan mengayomi kepada masyarakat atau komunitas daerah tersebut. Pendekatan tersebutlah yang dituju dari dibentuknya Tim Patroli Perintis Presisi.

Dalam pelaksanaannya, Patroli Perintis Presisi Polres Metro Tangerang Kota dilaksanakan setiap hari dengan menggunakan kendaraan patroli bermotor roda dua, karena dalam penggunaannya kendaraan bermotor roda dua dinilai akan lebih efisien dalam sisi mobilitas bagi para anggota tim patroli. Sebelum pelaksanaan patroli, akan dilakukan apel oleh Katim patroli dengan diberikannya arahan dan atensi terkait lokasi sasaran yang rawan oleh terjadinya gangguan Kamtibmas, kemudian dilakukan peringatan kembali terkait SOP pelaksanaan tugas patroli serta tujuan dari Patroli Perintis Presisi.



**Sumber: tim Patroli Perintis Presisi Tangerang Kota, 2023**

**Gambar 3. Proses himbauan kepada anak sekolah**

Saat kegiatannya dalam berpatroli, terdapat proses sosialisasi yang dilakukan oleh anggota Tim Patroli Perintis Presisi diimplementasikan dengan cara, yaitu ketika dalam pemberhentian di satu titik lokasi, anggota menghampiri masyarakat yang berada di tempat tersebut dengan menghimbau akan suatu keamanan dan pencegahan bertemunya niat dan kesempatan dalam kegiatan pemicu gangguan Kamtibmas. Selain melakukan himbauan, anggota Tim Patroli Perintis Presisi juga akan menghimpun informasi dari masyarakat atau komunitas daerah tersebut dan menawarkan *call center* kepada masyarakat jika ada hal yang dicurigai akan menjadi cikal bakal adanya gangguan kemanan dan ketertiban masyarakat. Proses himbauan dan sosialisai dari anggota Tim Patroli Perintis Presisi tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya interaksi dengan intim antara kepolisian dengan masyarakat, sehingga memikat masyarakat untuk aktif ikut membantu melakukan pemeliharan Kamtibmas, seperti hasil penelitian dari implementasi patroli oleh Wilson and Kelling menunjukkan bahwa adanya peningkatan rasa aman yang dirasakan masyarakat dan kemudian masyarakat merasa lebih terdorong untuk campur tangan dalam mencegah kasus vandalisme atau kejahatan kecil, mengingat para petugas polisi akan ada bersama mereka (Kocak, 2018)..

.



**Sumber: tim Patroli Perintis Presisi Tangerang Kota, 2023**

**Gambar 4 Pemeriksaan pada pengendara bermotor roda dua**

Selain tujuannya untuk berinterakasi intim kepada masyarakat, tim Patroli Perintis Presisi melakukan pemberhentian yang dilakukan atas dasar kecurigaan yang masuk akal bahwa seseorang atau sekelompok orang terlihat gerak-geriknya sedang atau telah terlibat dalam suatu penyimpangan maupun kejahatan, termasuk pelanggaran ringan hingga berat. *Broken windows policing* berarti adopsi frekuensi tinggi atas pemberhentian dan penangkapan pelanggar tingkat rendah (Schenker, 2021). Dalam bukunya Jenkins dan DeCarlo (2015) menjelaskan bahwa terdapat tiga manfaat dari proses pemberhentian ini, yaitu: (1) memberi tahu masyarakat bahwa polisi peduli dengan potensi “*window breakers*”, (2) menghalangi orang dari menjadi penjahat serius (khususnya mereka yang secara ilegal membawa senjata atau obat-obatan), (3) dan menawarkan cara hukum untuk berinteraksi dengan individu untuk menetapkan kemungkinan penyebab bahwa mereka terlibat dalam kesalahan yang lebih serius. Salah satu wilayah di kota Tangerang, Teluk naga merupakan wilayah yang fisik lingkungan dan infrastrukturnya kurang memadai. Seringnya hilir mudik truk-truk bermuatan besar mengakibatkan jalan rusak dan banyak lubang, lampu jalan yang tidak memadai menyebabkan jalan gelap pada malam hari, hal-hal tersebut akhirnya membuahkan maraknya pungli, begal, dan aksi gangster. Tim Patroli Perintis Presisi secara rutin menggelar patroli dalam mengantisipasi dan mencegah semakin maraknya gangguan Kamtibmas dan potensi tindak kriminal di wilayah tersebut.

Kriminologi lingkungan menjelaskan bagaimana lingkungan terdekat mempengaruhi perilaku dan mengapa beberapa lingkungan bersifat kriminogenik. Kriminolog lingkungan mencari pola kejahatan dan berusaha menjelaskannya dalam kaitannya dengan pengaruh lingkungan (Wortley & Townsley, 2017). *Broken window theory* yang merupakan salah satu teori dalam kajian kriminologi lingkungan, dengan kegiatan peremajaan lingkungan menawarkan dukungan tegas untuk pentingnya menjaga tatanan fisik dalam masyarakat. Fokus yang diterapkan dalam wilayah kota Tangerang oleh tim Patroli Perintis Presisi adalah menghindari adanya pemakaian obat-obatan terlarang dan meminum minuman beralkohol di pinggir jalan, dilakukannya vandalisme di tembok-tembok jalan atau pemukiman, berkumpulnya sebuah kelompok yang dikhawatirkan akan memicu pertikaian dengan kelompok komunitas atau masyarakat yang lain.

***Broken Window Theory*: Optimalisasi pelaksanaan Patroli Perintis Presisi sebagai inovasi program pencegahan kejahatan dan Kamtibmas**

Pencegahan Kejahatan terdiri dari strategi dan langkah-langkah yang berusaha untuk mengurangi risiko kejahatan yang terjadi, dan potensi dampaknya yang berbahaya bagi individu dan masyarakat, termasuk ketakutan akan kejahatan, dengan campur tangan untuk mempengaruhi berbagai penyebabnya (unodc.org). Michael Tonry dan David P. Farrington (1995) mengidentifikasi empat strategi utama pencegahan kejahatan, yaitu: penegakan hukum, pembangunan/perkembangan, kemasyarakatan, dan situasional. Salah satu bentuk strategi pencegahan kejahatan yaitu adalah melalui pendekatan kemasyarakatan yang sering disebut sebagai *community based crime prevention* atau *community policing.* Melalui pencegahan kejahatan berbasis masyarakat, petugas polisi mendedikasikan perhatian pada akar masalah yang dirasakan alih-alih hanya berfokus pada insiden itu sendiri. Polisi dilatih untuk mengumpulkan informasi terkait tentang peristiwa kriminal, kemudian polisi berusaha menemukan kemungkinan sumber masalah sosial untuk menghindari insiden kriminal lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, warga juga dapat berpartisipasi dalam pelatihan pemecahan masalah untuk mengumpulkan informasi (Cossyleon, 2019).

Dalam buku (Wortley & Townsley, 2017) dijelasakan mengenai *Environmental Criminology and Crime Analysis* (ECCA) terdiri dari upaya untuk menggunakan pengetahuan tentang hubungan antara kejahatan dan lingkungan terdekat untuk melakukan sesuatu tentang masalah kejahatan. Tujuan ECCA adalah untuk mencegah kejahatan, bukan untuk menyembuhkan pelaku atau mereformasi masyarakat. ECCA didasarkan pada tiga proposisi kontinjen utama, yaitu:

1. Perilaku kriminal secara signifikan dipengaruhi oleh sifat lingkungan terdekat di mana ia terjadi.
2. Distribusi kejahatan dalam ruang dan waktu tidak acak. Karena perilaku kriminal bergantung pada faktor situasional, kejahatan dipolakan menurut lokasi lingkungan kriminogenik.
3. Memahami peran lingkungan kriminogenik dan menyadari pola kejahatan adalah senjata ampuh dalam penyelidikan, pengendalian dan pencegahan kejahatan.

*Broken window theory* sebagai sebagai salah satu teori dalam kajian kriminologi lingkungan hadir sebagai salah satu acuan dalam merawat kenyamanan, keamanan masyarakat dan mencegah kejahatan. Kriminologi lingkungan menekankan pada pemahaman tentang peristiwa kriminal di tingkat lokal (Wortley & Townsley, 2017). Jenkins (2020) menjelaskan bahwa hadirnya *broken window theory* beroperasi dengan pemahaman tentang hubungan utama antara kekacauan, ketakutan dan kejahatan, polisi mulai secara agresif menanggapi kondisi tidak tertib di lingkungan sekitar dan mencari kembali ke orientasi pekerjaan mereka yang lebih berbasis pada komunitas. Penyegaran kembali pada strategi polisi yang berorientasi pada masyarakat dan pemecahan masalah Kelling & Moore (1988) dalam (Jenkins, 2020) menyatakan:

1. Orang-orang khawatir tentang kondisi tidak tertib di lingkungan mereka, terlepas dari korelasinya dengan tingkat kejahatan yang sebenarnya;
2. Kejahatan dan kekacauan terkonsentrasi di wilayah tertentu; dan
3. Polisi dapat memengaruhi dinamika *fear of crime*, kekacauan, dan kejahatan.

*Broken window* mendalilkan bahwa ketika polisi memperhatikan kejahatan kecil dan ketidaksopanan, penduduk lingkungan memperhatikan dan diyakinkan tentang keamanan lingkungan mereka dan kebergantungan mereka pada polisi. Secara signifikan, Wilson dan Kelling (1982) tidak membuat teori *broken window* begitu saja, melainkan menawarkannya sebagai penjelasan mereka mengapa patroli jalan kaki membuat masyarakat merasa lebih aman bahkan jika itu tidak selalu mengarah pada pengurangan kejahatan serius yang terukur (Reisig & Kane, 2014).

Meskipun pertama kali dipraktikkan di New York City, ide *Broken Window* berasal dari seberang sungai di Newark, selama penelitian oleh kriminolog George Kelling. George Kelling menemukan bahwa memperkenalkan patroli jalan kaki di kota meningkatkan hubungan antara polisi dan penduduk kulit hitam, dan mengurangi ketakutan mereka akan kejahatan. Berkembangnya zaman kemudian patroli yang semula dengan jalan kaki juga berinovasi dengan menggunakan kendaraan bermotor dengan alasan efektifitas mobilitas petugas.

*Broken window theory* menawarkan perspektif yang jelas, masuk akal dan menarik bagi polisi dan masyarakat untuk berpikir tentang cara terbaik dalam mengatasi meningkatnya angka kejahatan dan kekacauan di wilayah mereka. Berdasarkan *broken window theory*, maka penurunan tingkat kriminalitas yang terdapat dalam bagan laporan Polres Metro Tangerang Kota merupakan hasil dari kerja sama yang baik yang dilakukan antara institusi kepolisian dan masyarakat atas kepedulian terhadap segala bentuk gangguan kamtibmas, dengan tidak memandang besar kecilnya bentuk gangguan atau tindak kriminal tersebut.

Bila ditelaah lebih dalam lagi, ternyata bila hubungan yang erat antara masyarakat dan kepolisian berjalan dengan baik, maka akan meningkatkan kapasitas dan kualitas komunitas yang berhubungan dengan teori pencegahan kejahatan berbasis *community policing.* Seperti yang dikemukakan oleh Maillard dan Terpstra (2021) *community policing* menjanjikan beberapa hal, yaitu: (1) memperkuat kohesi lingkungan, (2) meningkatkan hubungan masyarakat dengan polisi, (3) menyesuaikan layanan polisi dengan ekspektasi dari masyarakat, (4) menciptakan kondisi kerja yang lebih menarik bagi petugas polisi dengan mendiversifikasi tugas mereka dan menghargai kontak dengan masyarakat, (5) pencegahan kejahatan yang lebih baik (dan dengan menguranginya), (6) meningkatkan kemampuan untuk memecahkan kejahatan melalui informasi yang diberikan oleh masyarakat, dan (7) meningkatkan rasa aman masyarakat.

Dalam menyadari akan pentingnya ketertiban dan keamanan lingkungan, tetapi atas adanya suatu keterbatasan sumber daya institusi kepolisian, sehingga dalam membantu tugas-tugas dalam menjaga hal tersebut, keterlibatan masyarakat dan peran komunitas adalah hal yang juga penting dan tidak bisa diluputkan untuk diberdayakan. Schuck (2019) menjelaskan hal tersebut juga dikarenakan pemolisian masyarakat didasarkan pada prinsip-prinsip keterlibatan masyarakat dan pemecahan masalah yang memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup anggota masyarakat dengan memeriksa tindakan dan kebijakan polisi secara kolektif, menilai keselarasan kegiatan yang disetujui negara ini dengan nilai dan kebutuhan masyarakat, dan menyatukan keduanya dalam sebuah kesepakatan. Kemudian, pemberdayaan dianggap berhasil jika individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas mampu berpartisipasi serta ikut bertanggung jawab dalam upaya pemeliharan Kamtibmas. Hal ini sejalan dengan inti dari *broken window theory* yakni merupakan perwujudan dari keinginan petugas penjaga keamanan dalam hal ini yaitu institusi Polri untuk bersikap mengayomi, tanggap, dan responsif terhadap segala peluang timbulnya kekacauan dan kriminalitas.

## Kesimpulan dan Saran

Kondisi fisik lingkungan atau infrastruktur, karena keduanya dapat menjadi rangsangan timbulnya kejahatan dan penyimpangan. Oleh karena itu, pemeliharaan dan perawatan kondisi fisik lingkungan menjadi krusial, bahkan pada hal-hal mikro. *Broken Window* adalah metafora setiap tanda gangguan yang terlihat di lingkungan yang tidak terawat, dan teori ini menyatakan bahwa tanda-tanda tersebut dapat mendorong gangguan dan penyimpangan menuju tindak kriminal yang lebih serius. Broken window termasuk dari bentuk kejahatan kecil, vandalisme, perilaku mabuk di tempat umum, perilaku dan hal tidak tertib lainnya yang kemudian dapat memengaruhi perasaan aman masyarakat pada lingkungannya. Dalam konteks ini, peran Patroli Perintis Presisi dalam Polres Metro Tangerang Kota menjadi sangat penting. Patroli ini berfungsi sebagai garda terdepan yang sigap berpatroli dan berinteraksi intim dengan masyarakat, berkontribusi dalam optimalisasi pencegahan, pemeliharaan ketertiban, dan keamanan.

Pelaksanaan Patroli Perintis Presisi dalam menekan kiriminalitas di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota telah berjalan dalam rangka melaksanakan peran dan tugas polisi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat berlandaskan *community policing* dan pengimplementasian teori *broken window*. Pelaksanaan Patroli Perintis Presisi dapat dinilai cukup baik ditandai dengan laporan data tingkat kejahatan pada tahun 2021-2022 yang menurun dalam wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota.

Meskipun polisi memiliki tanggung jawab terhadap keamanan masyarakat, fakta di lapangan menunjukkan bahwa polisi tidak akan mungkin membuahkan suatu kemampuan yang menyamai kemampuan gabungan yang dimiliki masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, dalam melaporkan adanya pelanggaran, dalam mengidentifikasi pelaku, dan dalam membantu proses penuntutan. Namun, lembaga kepolisian sendiri tetap dalam tanggung jawabnya untuk memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan ini Penulis menyarankan agar kepolisian mengintensifkan penerapan teori *Broken Window* dalam operasional kepolisian. Fokus pada pencegahan kejahatan kecil, vandalisme, dan perilaku tidak tertib dapat mencegah eskalasi menjadi kejahatan yang lebih serius. Melibatkan masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan tanda-tanda gangguan menjadi kunci dalam mengimplementasikan konsep ini. Saran lainnya adalah agar kepolisian menguatkan strategi pemeliharaan lingkungan, yaitumeningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan kondisi fisik lingkungan, termasuk hal-hal mikro seperti penanganan tanda-tanda gangguan kecil (*broken window*) yang melibatkan kerjasama dengan pihak terkait untuk menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan, mengurangi potensi kejahatan kecil dan memberikan rasa aman kepada masyarakat; mengoptimalisasi peran Patroli Perintis Presisi dalam upaya pencegahan, pemeliharaan ketertiban, dan keamanan. Memberikan pelatihan tambahan kepada anggota patroli, termasuk cara berinteraksi dengan masyarakat secara positif dan efektif, untuk memperkuat hubungan polisi-masyarakat; dan melakukan evaluasi rutin dan peningkatan berkelanjutan terhadap program-program pencegahan kejahatan, terutama Patroli Perintis Presisi. Menggunakan data dan umpan balik dari masyarakat untuk terus memperbaiki strategi dan memastikan keberlanjutan efektivitas dalam menjaga keamanan.

# **Daftar Pustaka**

## Alam, B. (2022, Januari 4). *Polri Catat Terjadi Peningkatan Gangguan Kamtibmas di Awal Tahun 2022*. From merdeka.com: https://www.merdeka.com/peristiwa/polri-catat-terjadi-peningkatan-gangguan-kamtibmas-di-awal-tahun-2022.html

Aprilia, A. (2022, Januari 13). *Simak Penjelasan Kapolri Soal Tujuan Dibentuknya Tim Patroli Perintis Presisi*. From AKURAT.CO: https://akurat.co/simak-penjelasan-kapolri-soal-tujuan-dibentuknya-tim-patroli-perintis-presisi

Bayley, D. H., & Shearing, C. D. (1996). The Future of Policing. *Law & Society Review*, 585-606.

Cordner, G. W. (2014). *Community Policing.* New York: Oxford University Press.

Cossyleon, J. E. (2019). Community Policing. *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies*, 1-5.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. (2021, Desember 30). *KINERJA POLDA METRO JAYA PERIODE TAHUN 2021*. From reskrimum.metro.polri.go.id: https://reskrimum.metro.polri.go.id/2021/12/30/kinerja-polda-metro-jaya-periode-tahun-2021/

DL, C. (2011). Model pemolisian untuk mewujudkan dan memelihara keamanan, rasa aman serta keselamatan dalam masyarakat perkotaan. *Jurnal Polisi Indonesia*, 57-84.

Hendryadi, Tricahyadinata , I., & Zannati, R. (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik.* Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).

Jenkins, M. J. (2020). Fixing Broken Neighborhoods: How Police Can Ensure Neighborhood Safety and Community Well-Being. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 7-13.

Jenkins, M. J., & DeCarlo, J. (2015). *Police Leaders in the New Community Problem-Solving Era.* Durham: NC: Carolina Academic Press.

Kabage, R. G. (2019). Implementation of Community Policing Strategy: Impact of Community Factors in Nairobi Country. *International Journal of Scientific Research and Management*, SH-2019-537-543.

Kelling, G. L., & Moore, M. H. (1988). The Evolving Strategy of Policing. *Perspectives on Policing*, 2-16.

Kocak, D. (2018). *Rethinking Community Policing in International Police Reform: Examples from Asia.* London: Ubiquity Press.

Liu, J., Wu, J. S., & Che, T. (2019). Understanding perceived environment quality in affecting tourists’ environmentally responsible behaviours: A broken windows theory perspective. *Tourism Management Perspectives*, 236-244.

Maillard, J. d., & Terpstra, J. (2021). *COMMUNITY POLICING IN COMPARATIVE PERSPECTIVE.*

Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi.* Jakarta: Rineka Cipta.

OpenLearn. (2019, Januari 24). *What is crime?* From OpenLearn: https://www.open.edu/openlearn/society-politics-law/criminology/what-crime

Reisig, M. D., & Kane, R. J. (2014). *The Oxford Handbook of Police and Policing.* New York: Oxford University Press.

Ren, L., Zhao, J. “., & He, N. ". (2017). Broken Windows Theory and Citizen Engagement in Crime Prevention. *Justice Quarterly*, 1-30.

Rico, J. (2023, Januari 3). *Gangguan Kamtibmas Menurun di Awal 2023*. From infopublik.id: https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/699626/gangguan-kamtibmas-menurun-di-awal-2023#

Sampson, R. J. (2012). *Great American City: Chicago and the Enduring Neighborhood Effect.* Chicago: University of Chicago.

Sandelowski, M. (2004). Using qualitative research. *Qualitative Health Research*, 1366-1386.

Schenker, E. (2021). Community Policing: From Broken Windows to a Broken System, An Analysis of the Effects of Community Policing on American Society. *Proceedings of GREAT Day*, 207-226.

Schuck, A. M. (2019). Chapter 3 Community Policing, Coproduction, and Social Control: Restoring Police Legitimacy. *Political Authority, Social Control and Public Policy*, 63-77.

Skolnick, J. H., & Bayley, D. H. (1988). Theme and Variation in Community Policing. *Crime and Justice*, 1-37.

Sumarlin, E. (2014). Penyebab Timbulnya Gangguan Kamtibmas dalam Tahap Industrialisasi dan Upaya Penanggulangannya. *I U S*, 47-49.

Taylor, R. B., & Harrell, A. V. (1996). *Physical Environment and Crime.* National Criminal Justice.

Tonry, M., & Farrington, D. P. (1995). Strategic Appr ategic Approaches t oaches to Crime Pr o Crime Prevention. *19 CRIME & JUST*, 1-20.

Tribratanews.polri.go.id. (2023, Mret 28). *Kapolda Metro Jaya : Tim Patroli Perintis Presisi Adalah Garda Depan Cegah Kejahatan*. From Tribratanews.polri.go.id: https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kapolda-metro-jaya-tim-patroli-perintis-presisi-adalah-garda-depan-cegah-kejahatan-21110

unodc.org. (n.d.). *CRIME PREVENTION*. From unodc.org: https://www.unodc.org/unodc/es/justice-and-prison-reform/cpcj-crimeprevention-home.html#:~:text=%22Crime%20Prevention%20comprises%20strategies%20and,to%20influence%20their%20multiple%20causes.%22

Utama, J. D. (2019). PERAN KOMUNIKASI DIREKTORAT SAMAPTA BHAYANGKARA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH (DITSABHARA POLDA KALTENG) DALAM PENINGKATAN PATROLI DIALOGIS DI KOTA PALANGKA RAYA. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 1-5.

Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982). Broken Windows: The police and neighborhood safety. *The Atlantic Monthly*, 29-38.

Wortley, R., & Townsley, M. (2017). *Environmental Criminology and Crime Analysis Secon Edition.* New York: Routledge.

**ANALISA HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN SEBAGAI PERAN PELAKSANA**

**PENEGAKAN HUKUM**

**Rina Hasanah**

**Program Studi Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12160**

**e-mail: rinahasanah42@gmail.com**

**Abstrak**

Penelitian ini membahas fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penelitian ini juga ingin mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat peran dan fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kehidupan bernegara terdapat berbagai peraturan yang memaksa masyarakat untuk tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. Sifat ketundukan maupun kepatuhan terhadap peraturan, karena adanya kesadaran hukum, yaitu memahami makna dan tujuan hukum bagi kemashlatan. Polri memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Kepolisian bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan keinginan agar patuh terhadap hukum menjadi kewajiban dan ketaatan masyarakat dan keadilan bisa ditegakkan.

***Kata kunci: analisa hukum; tugas dan fungsi kepolisian; penegakan hukum***

***Abstract***

*The research discusses the function of the police in their role as law enforcers according to Law No. 2 of 2002 concerning Indonesian National Police (Polri). The research also intends to find out factors hindering the role and function of Polri in carrying out their duties. The author employs the qualitative approach using normative method. The results of the research conclude that in a state life there are various regulations that force people to submit and obey the applicable rules. The nature of submission and compliance with regulations is due to legal awareness, namely understanding the meaning and purpose of laws for the welfare of society. Polri has the main duties and functions as a law enforcement agent and builder of security and public order. The conception of the duties, functions and roles of Polri originates from a basis that is still relevant but still needs to be oriented towards the development of society. Polri is assigned to maintaining security and public order, enforcing the law and providing protection, guidance and service to the community in order to realize the desire to obey the law is becoming an obligation and community obedience and, the most important thing is, justice can be upheld.*

***Keywords: law analysis; tasks and police functions; law enforcement***

**Pendahuluan**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pasca Orde Baru adalah kepolisian yang berbeda dengan kepolisian-kepolisian sebelumnya. Sejak 1 April 1999, secara kelembagaan Polri keluar dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sebagaimana organisasi kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya, fungsi Polri selanjutnya adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat. Sebagai aparatur penegak hukum, maka tidak tepat lagi bila Polri menjadi bagian dari sebuah kesatuan yang bertugas mempertahankan negara, yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Untuk selanjutnya, organisasi yang dikenal sebagai pengemban Tri Brata. Sesuai dengan tuntutan reformasi, *Tri Brata* pun mendapatkan pemaknaan baru. Bila sebelumnya menggunakan bahasa *Sansekerta*, sejak Sarasehan Sespimpol 17-19 Juni 2002 di Lembang, Jawa Barat dasar dan pedoman moral Polri ini, dalam Bahasa Indonesia maknanya adalah: (1) Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; dan (3) Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban (Djamin, 2004). Polri mesti melakukan berbagai perubahan, mulai dari paradigmatik sampai ke empirik. Tanpa semangat itu, nampaknya kepercayaan publik atas perubahan peran yang dimaksud akan terus merosot. Bila hal ini terjadi, maka kesatuan ini tidak lagi mampu mengklaim dirinya sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia, melainkan kepolisian yang jauh dari rakyat yang harus dilindungi dan dilayani, yakni rakyat Indonesia.

Dalam bidang keamananan nasional, perlunya pemikiran ulang itu telah melahirkan sebuah langkah konkrit yang sangat fundamental. Polri dikembalikan ke dalam posisinya sebagai alat negara penegak hukum. Dengan demikian berbeda dengan masa-masa sebelumnya, Polri sejak April 1999 telah dipisahkan dari TNI dan diharapkan menjadi sebuah lembaga otonom yang mampu diandalkan dalam proses yang belum ada sejarahnya di Indonesia. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kendati secara retorika Indonesia adalah negara hukum, secara empirik Indonesia lebih merupakan negara kekuasaan. Bukan hukum menjadi panglima, melainkan kekuasaanlah yang menentukan arah perjalanan negara-bangsa ini.

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*) dan pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pengertian lain bahwa polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. Akibatnya, keberadaan polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, melainkan sebaliknya berada jauh dari rakyat, dan justru berhadapan dengan rakyatnya. Sementara di sebuah negara demokratis, polisi harus transparan dan bukan membela kekuasaan. Jadi, pengawasan terhadap lembaga yang memiliki alat kekerasan ini mesti dilakukan oleh rakyat, melalui badan independen yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa:

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Polri memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersedian personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Berkaca pada tugas dan peranan negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, maka dalam terminologi ilmu pemerintahan negara manapun di dunia ini, yakni: memberikan layanan civil *(civil service*), memberikan layanan publik (*public service*) dan memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat (*empowering*) melalui kebijakan-kebijakannya. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI Tahun 1945). Pelaksanaan prinsip etika politik dan hukum dari tugas negara untuk melindungi seluruh rakyatnya itu, diselenggarakan melalui salah satu tugas pemerintahan di bidang kepolisian negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI tahun 1945 serta disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002. Sejak lama masyarakat menghendaki Polri dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militeristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto (2004: 5) berpendapat bahwa “hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan; jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.” Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan UU yang berlaku dan HAM (hak azasi manusia). Atau dengan kata lain polisi harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus ke dalam prilaku yang dibenci masyarakat.

Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Kenyataan tersebut di atas, menurut Barda Nawawi Arief (2005: 5) bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda, baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial *(social worker)* pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian)*.* Terkait dengan perilaku masyarakat dan penegak hukum, Soerjono Soekanto (2005: 10) berpendapat bahwa:

Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau prilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Pembaharuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang terpenting adalah bagaimana Polri dalam melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menjaga keamanan dan ketertiban dengan memperoleh dukungan maksimal dari masyarakat. Adapun rumusan masalah tulisan ini adalah (i) bagaimanakah tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002; dan (ii) apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan fungsi dan tugas kepolisian.

**Tinjauan Literatur**

**Analisa Hukum**

Analisis hukum adalah suatu proses penyelidikan dan penilaian terhadap aspek-aspek hukum yang terkait dengan suatu masalah atau situasi tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami implikasi hukum, menentukan relevansi peraturan hukum, dan memberikan pemahaman mendalam tentang isu-isu hukum yang mungkin muncul (License 1, Anglais Juridique I, Plaquette de Travaux, Dirigés, Institut de Droit des Affaires Internationales (IDAI), 2021-2022). Berdasarkan sumber yang sama, ada beberapa langkah umum yang terlibat dalam analisis hukum, yaitu:

1. Identifikasi Masalah Hukum—Menentukan masalah atau isu hukum yang perlu dianalisis. Hal ini dapat melibatkan pemahaman fakta-fakta yang terkait dan situasi yang memicu pertanyaan hukum.
2. Pengumpulan Informasi—Mengumpulkan fakta dan informasi terkait dengan masalah hukum. Hal ini dapat mencakup data tentang kasus, peristiwa, atau kejadian yang relevan.
3. Penelitian Hukum—Mengevaluasi undang-undang, regulasi, dan preseden hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hal ini melibatkan mencari kasus hukum serupa atau aturan hukum yang dapat digunakan sebagai panduan.
4. Penafsiran Hukum—Menganalisis dan menafsirkan teks hukum untuk memahami implikasinya terhadap masalah yang sedang dianalisis. Ini melibatkan pemahaman makna dan relevansi hukum yang berlaku.
5. Pembuatan Argumen Hukum—Membangun argumen atau pendapat hukum berdasarkan hasil analisis. Hal ini melibatkan penyajian pendapat hukum yang kuat dan beralasan.
6. Rekomendasi Hukum—Memberikan rekomendasi atau solusi hukum berdasarkan temuan analisis. Hal ini dapat melibatkan saran tentang tindakan yang harus diambil atau potensi konsekuensi hukum.

Analisis hukum dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk dalam praktek hukum, penelitian hukum, atau bahkan dalam pengambilan keputusan bisnis di mana pertimbangan hukum diperlukan. Penting untuk memahami bahwa analisis hukum melibatkan kombinasi keterampilan penelitian, interpretasi hukum, dan logika argumentasi untuk menghasilkan hasil yang dapat diandalkan dan relevan secara hukum. Defenisi lain, sebagaimana dikemukakan dalam laman <https://law.utexas.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/Legal-Analysis-2016-2.pdf>, menyebutkan bahwa analisa hukum adalah *the analysis of a legal problem aimed at proposing a legal solution, using existing law, including precedent, statutes, and regulations; it is a style of breaking down a problem into logical, persuasive steps; and it is “thinking like a lawyer*.

**Penegakan Hukum**

Laman <https://bjs.ojp.gov/topics/law-enforcement> menjelaskan bahwa penegakan hukum atau *law enforcement describes the agencies and employees responsible for enforcing laws, maintaining public order, and managing public safety* (penegakan hukum menjelaskan lembaga dan pegawai yang bertanggung jawab atas penegakan, memelihara ketertiban umum dan menangani keselamatan publik)*. The primary duties of law enforcement include the investigation, apprehension, and detention of individuals suspected of criminal offenses. Some law enforcement agencies, particularly sheriffs' offices, also have a significant role in the detention of individuals convicted of criminal offenses* (Tugas utama penegakan hukum meliputi penyidikan, penangkapan, dan penahanan individu yang diduga melakukan tindak pidana. Beberapa lembaga penegak hukum, khususnya kantor sheriff, juga memiliki peran penting dalam penahanan terpidana tindak pidana). Sumber lain, yaitu laman <https://chat.openai.com/c/e580ae63-b409-46e4-b12b-38fabe81385f>, menjelaskan bahwa penegakan hukum merujuk pada implementasi dan penerapan hukum dalam masyarakat untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Ini melibatkan tindakan dari pihak berwenang, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga penegak hukum lainnya, untuk menjamin bahwa hukum dijalankan dan bahwa pelanggarannya mendapatkan respons yang sesuai.

Defenisi lain sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dalam laman <https://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf> menjelaskan bahwa penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika). A. Hamid S. Attamimi dalam sumber yang sama sebagaimana dikutip Siswanto Sunarno (2008: 42) mengemukakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Pakar hukum lain yang cukup dikenal di Indonesia, Andi Hamzah (2005: 48-49) mengemukakan dalam laman yang sama bahwa penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Hamzah mengutip pendapat Milieurecht, 1981 bahwa *handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif.

**Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian**

Laman <https://www.britannica.com/topic/police> menjelaskan bahwa *police typically are responsible for maintaining public order and safety, enforcing the law, and preventing, detecting, and investigating criminal activities*, yang dapat diterjemahkan bahwa kepolisian biasanya bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum dan mencegah, mendeteksi dan menyelidikai kegiatan kejahatan. Sumber lain (<https://www.bprd.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/6798203243-Volume%202.pdf>) yang dikelola oleh Bureau of Police Research and Development dengan jelas dan lengkap mengemukakan bahwa tugas, peran dan fungsi kepolisian adalah sebagai berikut: *the roles and functions of the police in general are:*

* *to uphold and enforce the law impartially, and to protect life, liberty, property, human rights, and dignity of the members of the public;*
* *to promote and preserve public order;*
* *to protect internal security, to prevent and control terrorist activities, breaches of communal harmony, militant activities and other situations affecting Internal Security;*
* *to protect public properties including roads, railways, bridges, vital installations and establishments etc. against acts of vandalism, violence or any kind of attack;*
* *to prevent crimes, and reduce the opportunities for the commission of crimes through their own preventive action and measures as well as by aiding and cooperating with other relevant agencies in implementing due measures for prevention of crimes;*
* *to accurately register all complaints brought to them by a complainant or his representative, in person or received by post, e-mail or other means, and take prompt follow-up action thereon, after duly acknowledging the receipt of the complaint;*
* *to register and investigate all cognizable offences coming to their notice through such complaints or otherwise, duly supplying a copy of the First Information Report to the complainant, and where appropriate, to apprehend offenders, and extend requisite assistance in the prosecution of offenders;*
* *to create and maintain a feeling of security in the community, and as far as possible prevent conflicts and promote amity;*
* *to provide, as first responders, all possible help to people in situations arising out of natural or man-made disasters, and to provide active assistance to other agencies in relief and rehabilitation measures;*
* *to aid individual, who are in danger of physical harm to their person or property, and to provide necessary help and afford relief to people in distress situations;*
* *to facilitate orderly movement of people and vehicles, and to control and regulate traffic on roads and highways;*
* *to collect intelligence relating to matters affecting public peace, and all kind of crimes including social offences, communalism, extremism, terrorism and other matters relating to national security, and disseminate the same to all concerned agencies, besides acting, as appropriate on it themselves;*
* *to take charge, as a police officer on duty, of all unclaimed property and take action for their safe custody and disposal in accordance with the procedure prescribed; and*
* *to train, motivate and ensure welfare of police personnel*

**Metodologi Penelitian**

Sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif (Nurhayati, 2013: 15). Sebenarnya ilmu hukum mempunyai ciri-ciri sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan dalam suatu hukum, baik buruk suatu aturan hukum, konsep-konsep dan norma hukum, sedangkan dalam ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan suatu prosedur, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan dalam menegakan suatu aturan hukum.

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), yang biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan peradilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Itu pula sebabnya digunakan analisis secara kualitatif karena datanya bersifat kualitatif. Penelitian hukum normatif akan mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

**Hasil dan Pembahasan**

**Refleksitas penegakan hukum**

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum di antara sekian banyak aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk semua perkara pidana (lihat Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang selanjutnya disebut UU Kepolisian). Atas dasar inilah aparat kepolisian dituntut untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai aparat hukum profesional yang mampu menerapkan hukum positif dalam kasus yang konkrit.

Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam kepolisian tidak dapat ditunda-tunda lagi dengan percepatan munculnya aturan-aturan baru, adanya perubahan aturan, kompleksitas modus operandi kejahatan, dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka niscaya penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kebijakan Kapolri dalam penerimaan mahasiswa akademi kepolisian dengan syarat lulus sarjana (S-1) menurut pendapat Penulis adalah langkah yang sangat tepat, dan akan lebih tepat lagi untuk bagian satuan reserse kriminal yang diwajibkan lulusan S1 fakultas hukum.

Aparat penegak hukum merupakan salah satu pilar dari keberhasilan penegakan hukum, artinya apabila aparat penegak hukum tidak profesional, maka penegakan hukum akan serampangan. Aturan hukum yang baik tanpa aparat penegak hukum yang baik dan profesional tentu berdampak pada penegakan hukumnya, berlaku pula sebaliknya aparat penegak hukum yang sudah baik dengan aturan hukum yang tidak baik berdampak tidak baik juga pada penegakan hukumnya. Untuk tindak pidana umum, kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang paling depan dan mereka harus mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep hukum dalam kasus yang konkrit. Aturan hukum, norma hukum, atau kaidah hukum (proposisi) merupakan rangkaian dari konsep-konsep dan konsep itu sendiri sifatnya masih abstrak dan kabur. Maka polisi harus dapat memahami defenisi atas konsep hukum tersebut, misalnya apa konsep mengambil barang milik orang lain; apakah konsep tentang barang; apa konsep melawan hukum; dan sebagainya. Tanpa pemahaman atas konsep-konsep tersebut, maka akan mengakibatkan *ex falso quo libet* (pemahaman konsep yang salah akan mengakibatkan penegakan hukum yang serampangan).

Aparat kepolisian tidak cukup dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan hanya mendasarkan pengalaman saja, melainkan harus juga memahami konsep-konsep hukum, aturan hukum, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Aparat penegak hukum tidak cukup berbekal pada peraturan perundang-undangan saja karena tidak sedikit dalam peraturan perundang-undangan kita terkandung konsep hukum yang tidak jelas atau kabur. Oleh karenanya perlu di setiap kantor kepolisian tersedia semacam perpustakaan untuk dapat memahami doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Berdasarkan pengamatan Penulis, masih terlalu minim literatur yang tersedia; yang ada hanya terbatas KUHP, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang lain. Di samping itu, karena rutinitas dan pekerjaan yang menumpuk, aparat kepolisian tidak sempat untuk membaca literatur yang terkait dengan perkara yang mereka tangani.

Kepolisian, termasuk juga aparat penegak hukum lainnya yaitu jaksa atau hakim, dalam melakukan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan aturan hukum, tidak diperbolehkan berdasarkan asumsi atau intuisi (perasaan) belaka. Untuk menyatakan seseorang melakukan perbuatan pidana maka parameter yang harus dipergunakan adalah apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik, sebagaimana prinsip yang berlaku yaitu *nullum delictum nulla poena sine pravea lege poenali* (asas legalitas)*.* Helbert L. Packer (1968: 160) mengemukakan ada dua model proses pidana, yaitu *crime control model* dan *due process model*. Secara garis besarnya, dinyatakan bahwa pada *crime control* *model*, prinsip yang paling utama adalah efisiensi, kuantitas, dan cepat. Model tersebut dapat dinyatakan berhasil apabila mampu menghasilkan sesuatu dalam jumlah besar tersangka yang ditahan dan kecepatan untuk menindak pelaku kejahatan dengan sedikit mengenyampingkan prosedur, dan jika diperlukan dapat dilakukan dengan cara ekstra yudisial. Berbeda halnya dengan *due process model*, Packer (1968: 163) juga mengemukakan bahwa pada model ini yang paling dipentingkan adalah prosedur dan berpegang teguh pada prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Herbert L. Packer dalam melakukan perbandingan ideologi antara *crime control model* dan *due process model*, enggan mengibaratkan *crime control model* menyerupai sebuah ban berjalan; sedangkan *due process model* menyerupai lari gawang (*obstacle course*).

Berdasarkan papapan di atas, pertanyaan yang dapat diajukan adalah: “Apakah penegakan hukum (pidana) di Indonesia masuk *idiologi crime control model* ataukah *due process model*?” Jika *crime control model* yang dipilih, maka kekuasaan diskresi aparat penegakan hukum sangat luar biasa luasnya, karena yang dipentingkan adalah kuantitas penangkapan, penahanan, dan penumpasan kejahatan. Berbeda halnya dengan *due process* model, di mana penggunaan kekuasaan diskresi kepolisian sangatlah dibatasi oleh aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Kekuasaan polisi untuk dapat menangkap orang untuk kepentingan penyelidikan/ penyidikan dan pencegahan adalah sesuatu yang harus ada jika polisi diharapkan dapat mengerjakan pekerjaannya secara baik. Persoalannya adalah apakah hal itu dilakukan oleh polisi secara meragukan (*dubius*), ataukah secara terbuka atau terang-terangan? Persoalannya adalah akan timbul rasa tidak hormat terhadap hukum apabila ada penyimpangan-penyimpangan dari apa yang tertuang dalam aturan tentang kewenangan polisi untuk melakukan itu dengan bagaimana kenyataan yang diketahui masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh polisi yang sebenarnya.

Pengungkapan suatu kejahatan kadang-kadang tidaklah semudah seperti yang dibayangkan. Meskipun demikian aparat penegak hukum harus dapat dengan piawai mengungkap kejahatan tanpa harus melakukan kekerasan atau penyiksaan. Penyidik janganlah mengejar pengakuan terdakwa, melainkan yang dicari adalah alat bukti yang sah dan barang bukti yang mendukung kebenaran atas perbuatan yang dilakukan tersangka. Kasus “pembunuhan atas Ashori” yang menelan korban Kemat, David dan Sugik merupakan suatu bukti kekeliruan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam hal salah tangkap (*error in persona*), salah tuntut, dan salah putus. Kesalahan yang utama pada perkara ini terletak pada penyidik, di mana penyidik dalam hal ini mengejar pengakuan tersangka padahal pengakuan bukan merupakan alat bukti yang sah, tanpa mempertimbangkan alat bukti dan barang bukti yang mendukung atas perbuatan tersebut. Delik yang dirumuskan secara materiil atau delik yang dikualifisir akibatnya perlu dicari hubungan kausal antara fakta-fakta yang telah dikumpulkan dengan akibat yang terjadi. Jika dalam perkara tersebut tidak ada hubungan kausal, maka hakim harus memutus bebas. Dalam perkara “pembunuhan atas Ashori” secara jelas bahwa fakta-fakta hukum yang telah dikumpulkan oleh penyidik adalah salah dan oleh karenanya hakim dalam menarik hubungan kausal mengalami kesesatan. Penyelidikan perkara sampai ditangani oleh kepolisian dapat dikarenakan adanya laporan, pengaduan atau tertangkap tangan. Dalam hal laporan atau pengaduan, pihak pelapor atau pengadu datang ke kantor polisi untuk melaporkan atau memberikan keterangan tentang sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana. Laporan merupakan hak dan kewajiban seseorang untuk memberikan keterangan tentang sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 24 KUHAP), berbeda halnya dengan pengaduan. Untuk pengaduan di samping merupakan hak dan kewajiban masih disertai dengan suatu permintaan tertentu (lihat Pasal 1 angka 25 KUHAP).

Laporan atau pengaduan tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Jika laporan tersebut disampaikan secara lisan, maka petugas akan mencatatnya dalam laporan polisi dan pihak pelapor atau pengadu menandatangani laporan atau pengaduan tersebut yang selanjutnya akan memperoleh tanda terima bukti laporan atau pengaduan. Dalam KUHAP perbedaan antara laporan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Perbedaan Laporan dan Pengaduan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **LAPORAN** | **PENGADUAN** |
| 1 | Hak dan kewajiban | Hak dan kewajiban disertai dengan permintaan tertentu |
| 2 | Delik biasa | Delik aduan |
| 3 | Tidak dapat dicabut | Dapat dicabut kembali |

**Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2023**

Pembedaan di atas menjelaskan bahwa dalam pengaduan harus terkait dengan delik aduan dan ada permintaan secara khusus dari pihak pengadu. Pelapor atau pengadu atau kuasa dari pelapor atau pengadu pada waktu menyampaikan laporan atau pengaduan harus datang ke kantor polisi karena setelah laporan, pihak pelapor atau pengadu atau kuasanya harus menandatangani formulir laporan atau pengaduan tersebut dan selanjutnya mendapatkan tanda terima laporan atau pengaduan. Di kepolisian ada satuan atau unit khusus yang mempunyai tugas menerima laporan masyarakat yaitu Satuan Pelayanan Kepolisian atau lazimnya diingkat dengan SPK, petugas inilah yang mempunyai tugas menerima setiap laporan masyarakat, yang selanjutnya laporan tersebut untuk diteruskan ke bidang atau unit masing-masing.

Terkait dengan laporan pidana, pelapor wajib menerangkan tentang peristiwa atau perbuatan yang sementara menurut penilaian dari pelapor (penyidik perlu membuktikan lebih lanjut) merupakan peristiwa atau perbuatan pidana. Atas dasar laporan tersebut, penyelidik atau penyidik harus segera menindaklanjuti laporan itu untuk dapat memastikan apakah perbuatan atau peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan peristiwa atau perbuatan pidana atau tidak.

Tindak lanjut yang pertama dari laporan polisi adalah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor. Pemeriksaan terhadap pelapor di sini tidak meliputi pemeriksaan terhadap kuasa pelapor, karena kuasa pelapor tidak dapat diklassifikasikan sebagai saksi. Atas dasar laporan polisi dan telah dilakukannya pemeriksaan terhadap pelapor tersebut apakah tindakan kepolisian selanjutnya, melakukan penyelidikan atau penyidikan? Berdasarkan pengamatan Penulis, setelah polisi menerima laporan dan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor kebiasaan yang dilakukan kepolisian dengan segera membuat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa dengan laporan (LP) dan pemeriksaan terhadap pelapor tersebut polisi sudah menduga bahwa peristiwa tersebut adalah perbuatan pidana (bandingkan antara pengertian penyelidikan dan penyidikan). Polisi berpendapat bahwa laporan (LP) dan hasil pemeriksaan pelapor (1BAP Saksi Pelapor) sudah merupakan bukti permulaan yang cukup. Jika semua aparat kepolisian mempunyai pendapat seperti itu menurut pendapat saya adalah kurang tepat.

Laporan maupun pemeriksaan atas diri pelapor sebenarnya baru pernyataan yang sifatnya sepihak dan oleh karena itu polisi harus menggali keterangan-keterangan lain. Oleh karena itu menurut pendapat Penulis semestinya tidak langsung menerbitkan SP Penyidikan, tetapi seharusnya melalui proses penyelidikan lebih dulu, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Aparat kepolisian mestinya memastikan lebih dulu bahwa peristiwa atau perbuatan tersebut adalah peristiwa atau perbuatan pidana sebelum melakukan penyidikan karena penyidikan baru dilakukan jika kepolisian sudah mendapatkan bukti yang cukup, tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Penyelidikan merupakan tahap awal dari proses penyidikan, tetapi tidak selalu proses penyidikan harus didahului dengan proses penyelidikan. Dalam Buku Petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP dinyatakan bahwa “penyelidikan” merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Jika dalam hal tertangkap tangan, maka tidak perlu lagi dilakukan penyelidikan karena sudah secara jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana. Misalnya, tertangkap tangan dalam hal “mengambil dompet orang lain (mencopet atau mencuri)” tidak perlu dibuktikan apakah mereka mencuri atau tidak. Penyelidikan bertujuan untuk memastikan apakah peristiwa atau perbuatan tersebut merupakan perbuatan atau peristiwa pidana, sedangkan penyidikan adalah suatu rangkaian kegiatan dari penyidik untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga terang tindak pidananya sekaligus dapat ditentukan pelakunya atau tersangkanya. Hasil penyelidikan dapat ditingkatkan ke dalam tahapan penyidikan jika diketemukan bukti yang cukup bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana, dan oleh karena itu tidaklah mengherankan jika pada waktu pertama kali diperiksa sebagai saksi dan untuk pemeriksaan yang ke dua dapat berubah statusnya sebagai tersangka.

Perubahan status dari saksi ke tersangka harus diikuti pula dengan perubahan Berita Acara Pemeriksaan, yaitu dengan cara pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka, tidak boleh melakukan perubahan sendiri dari BA Saksi menjadi BA Tersangka tanpa melakukan pemeriksaan kembali. Dalam tahapan penyelidikan, surat panggilannya tidak mencantumkan “Pro Yustisia,” sedangkan dalam tahapan penyidikan surat panggilannya mencantumkan “Pro Yustisia.” Jika perubahan tersebut dilakukan sendiri oleh penyidik akan terancam kebatalan atau ketidak absahan pemeriksaan perkara tersebut.

Dalam prakteknya, setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, polisi dengan serta merta mengeluarkan Sprindik. Jika hal itu dilakukan maka dapat dipastikan perkara di kepolisian tersebut akan terjadi penumpukan perkara. Penumpukan perkara akan membawa dampak terhadap efektifitas dan efisiennya penanganan perkara. Pencari keadilan menunggu dalam waktu yang lama untuk mendapatkan kepastian atas penanganan perkaranya. Tudingan bahwa perkara tersebut telah di-“peti es”-kan seringkali muncul ke permukaan. Tetapi tudingan tersebut kadang-kadang tidak selalu benar dan terjadinya keterlambatan penanganan perkara tersebut semata-mata disebabkan karena tugas yang menumpuk pada penyidik, bukan karena sengaja tidak diselesaikan. Polisi akan melakukan penyelidikan lebih dulu, tidak langsung menerbitkan SP Penyidikan, dalam hal polisi mendapatkan informasi dari informan atau dari bagian inteligen tentang telah atau sedang terjadi suatu perbuatan pidana.

KUHAP memberikan kemungkinan pihak kepolisian membuat laporan polisi (laporan sendiri) karena dalam KUHAP dirumuskan yang dapat memberikan laporan adalah seseorang karena hak atau kewajiban (lihat Pasal 1 angka 24 KUHAP). Oleh karena itu setiap orang tidak terkecuali polisi dapat membuat laporan, yang dalam prakteknya dikenal dengan Laporan Form Model A. Dengan adanya laporan Form Model A ini, maka polisi akan menerbitkan SP Penyelidikan atas peristiwa atau perbuatan tersebut. Apabila hasilnya menunjukkan adanya bukti yang cukup maka polisi dapat meningkatkan ke tahap penyidikan dengan cara menerbitkan SP Penyidikan. Jika dalam penyelidikan tidak diketemukan unsur melawan hukum, maka polisi tidak meningkatkan ke tahap penyidikan. Yang menjadi persoalan adalah produk hukum apa yang akan diterbitkan, Surat Penetapan Penghentian Penyelidikan atau Surat Penetapan Penghentian Penyidikan atau cukup tidak menerbitkan surat apapun, Dalam praktek pihak kepolisian enggan atau tidak dapat mengeluarkan SP3 jika masih dalam tahapan penyelidikan, dengan suatu argumentasi bahwa SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penyidikan) diperuntukkan untuk penyidikan, tidak diperuntukkan untuk penyelidikan. Dalam praktek penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian jika di dalam penyelidikan ternyata perbuatan atau peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan perbuatan atau peristiwa pidana atau dalam penyidikan tetapi belum ada penetapan tersangkanya, kepolisian biasanya akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Produk kepolisian yang berupa SP2HP tersebut tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (KUHAP) karena barangkali hal tersebut mengacu pada aturan internal kepolisian. Produk kepolisian yang berupa SP2HP akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan hukum di antaranya yaitu, “Bagaimana kekuatan hukum dari SP2 HP? Apakah SP2HP dapat dijadikan dasar untuk mengajukan ke lembaga praperadilan? Kapan SP2 HP dapat dimaknai sebagai SP3?” Penyelidikan merupakan bagian integral dari penyidikan, oleh karena itu jika dalam proses penyelidikan ternyata bukan perbuatan atau peristiwa pidana maka perkara tersebut mestinya dapat diterbitkan SP3. Adapun argumentasi hukumnya adalah, Pertama, untuk memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan. Kedua, penyelidikan merupakan bagian integral dari penyidikan. Ketiga, aturan lain di luar KUHAP membolehkan penyelidik mengeluarkan SP3 untuk tahapan penyelidikan misalnya dalam UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keempat, SP3 belum merupakan keputusan akhir melainkan dapat dibuka kembali jika diketemukan bukti baru. Interpretasi (penafsiran) sistematis dapat dipergunakan untuk menjustifikasi bahwa dalam tahapan penyelidikan dapat pula diterbitkan SP3. Interpretasi atas penyelidikan dapat dikeluarkan SP3 masih tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 30 Tahun 2002, tidak dapat dinyatakan melakukan interpretasi yang sewenang-wenang atau tanpa dasar. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengeluarkan SP3 jika dalam penyelidikan tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup (minimal dua alat bukti yang sah) tentang perbuatan pidana korupsi.

Pengalaman praktek yang dapat dijadikan rujukan adalah pemeriksaan saksi B.J. Habibie di Jerman dengan menggunakan *teleconference,* walaupun KUHAP tidak mengatur tentang hal itu namun secara hukum masih dapat dibenarkan. Pemeriksaan dengan cara *teleconference* tidak bertentangan dengan *ratio legis* dari pemeriksaan saksi dipersidangan. Demikian pula penghentian penyelidikan dengan dikeluarkannya SP3 tidak bertentangan dengan *ratio legis* dari KUHAP. SP2HP untuk kepentingan pencari keadilan tidak memberikan kepastian hukum tentang apakah perkara tersebut tetap dilanjutkan atau perkara tersebut dihentikan? Untuk kepentingan Terlapor dengan diterbitkan SP2HP apakah dapat dipakai sebagai “senjata” untuk memukul atau melaporkan balik terhadap Pelapor? Misalnya melaporkan tentang pencemaran nama baik, penghinaan, atau perbuatan tidak menyenangkan; sedangkan untuk kepentingan Pelapor adalah apakah SP2HP dapat dipakai sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan ke lembaga praperadilan?

Jika seandainya penyelidik mengeluarkan SPP Penyelidikan dan pihak melapor mengajukan tuntutan ke lembaga Praperadilan, menurut dugaan saya bahwa pengadilan (*a quo* lembaga pra peradilan) pasti akan menolak permohonan itu dengan suatu alasan wewenang lembaga praperadilan hanya menilai tentang sah tidaknya penghentian penyidikan (lihat Pasal 77 KUHAP), tidak mencakup penghentian penyelidikan. Menurut pendapat saya, wewenang lembaga praperadilan mestinya tidak hanya menilai sah tidaknya penghentian penyidikan, tetapi juga meliputi sah tidaknya penghentian penyelidikan.

**Polri dan Penegakan Hukum**

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis seperti di Indonesia sebelum Polri lepas dari militer (ABRI). Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Soebroto Brotodiredjo (1989: 2) menyebutkan bahwa istilah polisi berasal dari istilah Yunani kuno “*politeia”* yang berarti pemerintahan suatu *polis* atau kota. W.J.S. Poerwadarminta (1985: 763) memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar UU atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 mengatakan, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” Sedangkan penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat (Sitompul, 2001: 55). Secara konseptual Soerjono Soekanto (2006: 7) menjelaskan:

penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa di sini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah yang diatur oleh ketentuan perundangundangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.

Polri adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri berfungsi sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorientasikan dengan perkembangan masyarakat. Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan UU tersebut, ada dua hal yang mendasar sebagai tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam *Tribrata* maupun *Catur Prasetya* Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13 dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas untuk:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Rahardjo, dalam tulisannya yang berjudul *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 1-6 Tahun X/10 hlm. 20 mengatakan sebagai penegakan hukum *(Law Enforcement Officer)* dan pemulihan ketertiban *(Order maintenance).*

**Tugas dan fungsi kepolisian dan Kendala dalam Penegakan Hukum**

1. Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Istilah penegak hukum *(law enforcement officer)* yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi tetapi dapat juga mencakup Jaksa. Akan tetapi di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian penegak hukum ini adalah pengacara *(advokat)*. Dalam pengertian luas terakhir ini, dapat dipergunakan terjemahan dari *rechthandhaving*, yang artinya penegakan hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaranhukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yaitu: Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian sebagai berikut: Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa fungsi Kepolisian adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlingdungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 5 UU No. 2 tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Polri mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian, Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, yaitu bertugas: melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pengawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya. Kenyataan tersebut di atas, menurut Barda Nawawi Arie (2005: 5) adalah bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum (di bidang peradilan pidana) maupun sebagai pekerja sosial *(social worker)* pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian)*.* Selanjutnya, secara universal fungsi lembaga kepolisian mencakup dua hal, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban *(peace & order maintenance)* dalam penegakan hukum *(law enforcement).*

1. Kendala penghambat kepolisian dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum

Dalam rangka menegakkan hukum, Polri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsinya yang saling berkaitan dengan beberapa situasi dan kondisi masyarakat setempat. Dalam praktik penegakan hukum, pihak kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal. Kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi hal sebaliknya. Semua hambatan-hambatan tersebut di atas bermuara pada model-model pendekatan yang digunakan yang harus didukung dengan profesionalisme, mental, dan pendidikan yang memadai bagi setiap anggota Polri. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran dan fungsi yang dilakukan oleh kepolisian pada umumnya dan polmas pada khususnya, dengan menggunakan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum sebagaimana dijelaskan Soekanto adalah:

1. Faktor aturan hukum yang kadang banyak celah yang bisa digunakan pelaku untuk menghindar dari jeratan hukum.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
6. Peran Polisi dalam Peradilan Pidana

Sadjijono (2005: 103-105) menjelaskan bahwa tugas dan peran kepolisian meliputi:

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas-tugas kepolisian yang secara umum diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan 1 UU No. 2 Tahun 2002, sedangkan untuk kewenangan kepolisian secara umum diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, kewenangan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan lain dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002. Kewenangan secara khusus dalam menyelenggarakan tugas bidang proses pidana selain diatur dalam Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, juga diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Peran polisi dalam penyelidikan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Dalam tahap penangkapan, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepolisian dapat melakukan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh kepolisian serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang penuntut umum atau penyidikan. Dalam tahap penahanan, berdasarkan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana UU No. 8 Tahun 1981, kepolisian melakukan hal-hal yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

**Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai perbandingan sistem hukum dalam disiplin hukum, beberapa kesimpulan dapat diambil. Pertama, tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tergambar jelas pada Pasal 2 UU tersebut. Fungsi kepolisian diartikan sebagai “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Selanjutnya, terdapat beberapa faktor penghambat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum, antara lain: pertama, faktor aturan hukum yang kerap memiliki celah yang dimanfaatkan pelaku untuk menghindari jerat hukum; kedua, faktor penegak hukum, yaitu individu atau kelompok yang membentuk dan menerapkan hukum; ketiga, faktor sarana atau fasilitas; keempat, faktor masyarakat, yang mencakup lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan kelima, faktor kebudayaan, yang merupakan hasil karya, cipta, dan rasa berdasarkan karsa manusia dalam interaksi sosial.

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, Penulis merekomendasikan peningkatan peran serta masyarakat dalam membantu tugas-tugas kepolisian sehingga terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dan Polri dan terhindar dari benturan yang dapat merugikan masyarakat dan citra Polri itu sendiri. Polri, sebagai penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, tidak melakukan pilih kasih dalam menindaki pelaku tindak pidana dan bersikap adil dalam penegakan hukum.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat,* Media Sarana Press, Jakarta, 1986.

Abdussalam, R., *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri,* Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.

Addink, G.H., *Principles of Good Governance,* Utrecht Uni­versity, the Netherlands, 2003

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum,* Pustaka Prima, Jakarta, 1988.

Arsyad, A. Mukti, dkk, *Amandemen UUD1945 Antara Teks dan Konteks Dalam Negara Yang Sedang Berubah,* Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Kedua, 2000.

Asmara, Galang, Disertasi judul: *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Ombudsman Ditinjau Dari System Pemerintah dan Sistem Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia,* Program Pascasarjana Unair Surabaya, 2003.

Baringbing, Simpul, RE, 2001, *Mewujudkan Supremasi Hukum,* Pusat Kegiatan Reformasi, Brotodirejo, Soebroto, 1989, *Polri Sebagai Penegak Hukum*,Sespimpol. Bandung

License 1. Anglais Juridique I, Plaquette de Travaux, Dirigés, Institut de Droit des Affaires Internationales (IDAI), 2021-2022

Nawawi, Barda, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Poerwadarminta, W.J.S., 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesi*a,PN Balai Pustaka, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Cet Kelima,Rajawali, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi,* Remaja Karya, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Masalah-Masalah Hukum, Nomor 1-6 Tahun X/10.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Bandung

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan Good Governance,* Laksbang, Yogyakarta.

Nurhayati, Yati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Internet:**

<https://law.utexas.edu/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/Legal-Analysis-2016-2.pdf>

<https://bjs.ojp.gov/topics/law-enforcement>

<https://chat.openai.com/c/e580ae63-b409-46e4-b12b-38fabe81385f>

<https://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf>

<https://www.britannica.com/topic/police>

<https://www.bprd.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/6798203243-Volume%202.pdf>

**ANALISA LEMBAGA PRAPERADILAN SEBAGAI KONTROL TUGAS PENYIDIK DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM**

**Tatang Prajitno Panjaitan**

**Program Studi Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan 12160**

**e-mail: tatang.panjaitan@yahoo.com**

**Abstrak**

Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Kebenaran material adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam perkara a quo hakim mempunyai pertimbangan terkait asas keadilan dan persamaan hukum untuk menetapkan tersangka baru yang sebenarnya merupakan domain atau kewenangan dari penyidik melalui serangkaian tindakan penyidikan. Penulis merekomendasikan kehati-hatian dalam melakukan tindakan penahanan dan peningkatan kemampuan para penyidik dalam melaksanakan tugasnya.

***Kata kunci: praperadilan; penyidik; penegakan hukum***

***Abstract***

*The aim of Criminal Procedure Law is to seek and obtain or at least approach material truth. Material truth is the complete truth of a criminal case by applying the provisions of the Criminal Procedure Law honestly and precisely with the aim of finding out who the perpetrator is who can be accused of committing a violation of the law and then requesting an examination and decision from the court to determine whether it is proven that a crime has been committed and whether the person accused can be blamed. The results of this research reveal that in the aquo case a judge has considerations related to the principles of justice and legal equality in determining a new suspect which was actually the domain or authority of the investigator through a series of investigative actions. The author recommends the caution in carrying out detention actions and increasing the ability of investigators to carry out their duties.*

***Keywords: pretrial; investigator; law enforcement***

**Pendahuluan**

Dalam realitasnya—selama lebih dari sepuluh 10 tahun setelah reformasi—penegakan hukum khususnya melalui proses peradilan pidana terutama yang melibatkan aparat kepolisian, sering terjadi penyimpangan terhadap hukum dan mengabaikan kemanusiaan yang berdampak negatif pada hubungan kepolisian dengan masyarakat. Banyaknya keluhan masyarakat tentang perilaku menyimpang kepolisian menunjukkan kurang berfungsinya mekanisme pengawasan atau kontrol terhadap kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum. Hal ini dapat terlihat dari fakta belum adanya perubahan perilaku kepolisian dalam menangani suatu kasus, di mana masih ada diskriminasi dalam melaksanakan penegakan hukum.

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari kemungkinan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang (UU) yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi tersangka/ terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum Acara Pidana menentukan suatu tatanan beracara untuk seluruh proses perkara pidana yang dirumuskan dalam UU atau peraturan lainnya. Tatanan tersebut menjadi aturan bekerjanya alat perlengkapan negara yang berwenang berhadapan dengan segala hak untuk membela bagi tersangka atau orang lain apabila timbul dugaan terjadi perbuatan pidana dan untuk menetapkan keputusan hukum yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) (Purnomo, 1982: 5).

Apabila kita perhatikan secara lebih saksama, tujuan Hukum Acara Pidana ini ditegaskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP (1982: 1) sebagai berikut:

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipesalahkan.

Arief (2007: 19-26) berpendapat bahwa SPP (Sistem Peradilan Pidana) pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kewenangan menegakkan hukum. Kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Karena SPP pada hakekatnya juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan dalam empat subsistem yaitu:

1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik.
2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum.
3. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan.
4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah SPP terpadu (*integrated criminal justice system*). Maka. kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana dilaksanakan oleh empat badan seperti tersebut di atas. Keempat badan itulah yang dapat disebut sebagai badan-badan kehakiman menurut istilah yang disebut dalam Pasal 24 UUD 1945 (sebelum amandemen ke-3). Jadi, badan-badan kehakiman yang disebut oleh UUD 1945 tidak dapat diidentikkan dengan badan-badan peradilan yang disebut dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 yang mengalami perubahan berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kalau ditelaah secara teliti isi ketentuan sebagaimana yang dimuat dalam KUHAP, maka SPP Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Setiap komponen dari sistem tersebut seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem dapat berjalan secara terpadu. Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, UU memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

1. paksa yang dibenarkan UU demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;
2. paksa yang dibenarkan hukum dan UU, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap HAM. Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan UU yang berlaku *(due process of law*). Sesuai dengan konteks ini maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan UU;
3. tidak diperkenankan secara lisan dan apabila dilakukan menjadi "batal demi hukum"; dan
4. jika dijabarkan lebih intens terhadap asas ini mengandung pula pengertian bahwa tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh UU tersebut menimbulkan adanya asas kepastian di dalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan dan kewenangannya (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP), kepastian terhadap pejabat, macam-macam jangka waktu penahanan dan penangguhannya (Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 KUHAP), kepastian terhadap macam-macam pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penggeledahan (Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP) dan kepastian adanya pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP) sebagaimana dijelaskan oleh Mulyadi (2007: 8).

Menangkap dan menahan berkaitan dengan menghilangkan kemerdekaan; menggeledah berkaitan dengan hak pribadi (*privacy*); menyita berkaitan dengan perampasan hak milik, hak atas kemerdekaan, *privacy* dan milik, yang merupakan hak asasi utama yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap tindakan termasuk tindakan hukum yang menghilangkan hak-hak tersebut harus diatur secara rinci untuk mencegah kesewenang-wenangan. Juga ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminir pelaksanaan penahanan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang sangat merugikan pihak tersangka/ terdakwa atau keluarganya. Upaya-upaya tersebut sebagian besar terdapat dan diatur dalam KUHAP. Memang kenyataan ini cukup menggembirakan sehingga diharapkan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap HAM dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Salah satu upaya tersebut adalah praperadilan (Triatmojo, 1982: 54).

**Tinjauan Literatur**

**Praperadilan**

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan tentang adanya kekurangan atau kesalahan dalam proses berjalannya perkara pidana (<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/00300021/apa-itu-praperadilan->) Praperadilan menjadi alat koreksi terhadap tindakan para penegak hukum. Aturan mengenai praperadilan tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 10 menjelaskan obyek praperadilan adalah sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi atas dihentikannya perkara pidana pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Praperadilan terkait sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan dapat diajukan atas permintaan tersangka, keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

Tersangka, keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka juga dapat mengajukan praperadilan mengenai permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi karena perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Sementara itu, praperadilan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, misalnya saksi korban. Dalam proses pemeriksaannya, praperadilan dipimpin hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. Saat melaksanakan tugas, hakim tersebut dibantu oleh seorang panitera. Hakim yang ditunjuk kemudian menetapkan hari sidang dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, sekaligus melakukan pemanggilan terhadap pemohon dan termohon praperadilan untuk didengar keterangannya. Dalam waktu paling lambat tujuh hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Putusan ini tidak dapat dimintakan banding, kecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Untuk putusan ini, pemohon dapat meminta banding sebagai putusan akhir ke pengadilan tinggi.

**Penyidik**

Pasal 1 angka 4 dan 5 KUHAP berbunyi, “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penyelidikan (https://stih-adhyaksa.ac.id/apasih-bedanya-penyidik-dengan-penyelidik) Penyidik adalah orang yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan dalam suatu kasus pidana. Mereka biasanya adalah petugas polisi atau penyidik dari lembaga penegak hukum yang lain. Penyidik bertanggung jawab mengumpulkan bukti, memeriksa tersangka, dan membuat keputusan apakah akan mengajukan dakwaan resmi atau tidak. Sementara itu. Pasal 1 angka 1 dan 2 KUHAP berbunyi, “Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat PNS (Pegawai Negeri Sipil) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan.”

Laman <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/453/pdf> juga menjelaskan bahwa Pasal 6 ayat (1) UU No 8 tahun 1981 berbunyi, “Penyidik adalah (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU. Sedangkan menurut UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, disebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyidikan. Mengenai kriteria tentang siapa saja yang bisa diangkat sebagai penyidik dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. PPRI ini memberikan penegasan lebih khusus lagi tentang kriteria pejabat Polri yang bisa ditunjuk sebagai penyidik. Secara spesifik ditentukan bahwa tidak semua pejabat Polri adalah penyidik, tapi hanya sebatas pejabat tertentu. Syarat kepangkatan dan pengangkatan menjadi Penyidik menurut PP No. 27 tahun 1983 adalah:

1. Pejabat Polri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi; dan
2. Pejabat PNS tertentu sekurang-kurangnya pengatur muda tingkat I (Golongan II/B) atau yang disamakan dengan itu.

PPRI No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas PPRI No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Pasal 2A menyatakan bahwa untuk dapat diangkat sebagai pejabat Penyidik Polri, maka calon Penyidik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. berpangkat paling rendah inspektur dua polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
2. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
3. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
4. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
5. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

**Metodologi Penelitian**

Penelitian ini bersifat hukum normatif, yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya (Ibrahim, 2005: 46-48). Untuk menunjang diperolehnya data yang aktual dan akurat, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yang hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian (Sunggono, 2001: 115-117). Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep UU, yakni melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Bungin, 2003: 83).

Penelitian yuridis normatif lebih menekankan pada bahan hukum atau data kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan:

* UUD 1945
* KUHP
* KUHAP
* UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

1. Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hasil penelitian para ahli.
2. Bahan hukum tertier berupa bahan yang dapat mendukung bahan hukum primer: kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia dan kamus besar Bahasa Indonesia.

Penulis menggunakan bahan hukum yaitu studi kepustakaan untuk mencari landasan teori dari permasalahan penelitian dengan menggali UU yang ada hubungannya dengan obyek penelitian dan menggunakan beberapa buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar atau dokumen. Data-data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif, yaitu berfikir dengan hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan konstruksi hukum yang bersifat komparatif, artinya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normatif yang dilengkapi dengan perbandingan penelitian bahan hukum.

**Hasil dan Pembahasan**

**Ketentuan-ketentuan hukum pidana dalam memformulasikan lembaga praperadilan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan tugas penyidik kepolisian dalam SPP**

1. **Wewenang praperadilan menurut KUHAP**

Praperadilan terdiri dari dua kata, yaitu pra dan peradilan, sedangkan apabila kita teliti menurut istilah KUHAP "praperadilan" maka maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti "praperadilan" sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan (Hamzah, 1992). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praperadilan adalah suatu proses pemeriksaan voluntair sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan. Perkara pokok dimaksud adalah suatu sangkaan/dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan. Oleh karena itu praperadilan hanyalah bersifat ikutan atau asesoris dari perkara pokok tersebut sehingga putusannya pun bersifat *voluntair* (Hamzah, 1992).

Praperadilan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau pelapor atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya (Hamzah, 1992). Istilah praperadilan diambil dari kata *pretrial*, akan tetapi ruang lingkupnya lebih sempit karena *pretrial* dapat meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup mengajukan suatu penuntutan terhadap perkara pidana di depan pengadilan. Sementara ruang lingkup praperadilan terbatas diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Pasal 95 KUHAP. Sedangkan dalam pengertian secara umum dicantumkan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP mengatakan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam UU ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 95 merupakan penjelasan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP, dengan tambahan adanya unsur dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan UU atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan tindakan lain berupa:

1. Pemasukan rumah;
2. Penggeledahan; dan
3. Penyitaan.

Tindakan lain itu tidak terbatas pada ketiga hal tersebut. Akan tetapi disesuaikan dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan penyidik dan penuntut umum. Misalnya apabila terjadi perbuatan di luar hukum atau tersangka atau terdakwa selama dalam penangkapan atau penahanan, seperti teraniaya, tertembak atau malah meninggal dunia. Dengan demikian apabila perbuatan itu terjadi tanpa suatu alasan yang dibenarkan hukum, maka karenanya korban atau keluarganya dapat mengajukan tuntutan.

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang ada selama ini. Kalau selama ini, wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan. Soeparmono menjelaskan bahwa praperadilan bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, sebab menurut sistem KUHAP setiap tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan, dan sebagainya yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi tersangka.

Menurut Harahap (2006: 1), ditinjau dari struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga yang berdiri sendiri. Praperadilan hanya suatu lembaga yang ciri dan eksistensinya:

1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri.
2. Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri.
3. Administrasi yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
4. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Lembaga baru yang tersendiri memiliki eksistensi dan ciri itu adalah praperadilan yang merupakan kesatuan yang melekat dengan Pengadilan Negeri. Karena keadaan dan eksistensi adanya lembaga praperadilan tersebut di antara lembaga lain di dalam KUHAP maka mempunyai arti adanya kemajuan di bidang hukum acara pidana yang memberi wewenang bagi Pengadilan Negeri. Setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi tersangka. Oleh karena itu terdapat prinsip yang terkandung pada praperadilan yang bermaksud dan bertujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang. Sifat atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seorang diputus oleh Pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga Negara, pencegahan atau tindakan yang melanggar hak-hak asasi tersangka/terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan hukum dan perundang- undangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan main (Soeparmono, 2003). Praperadilan juga untuk memberikan perlindungan bagi HAM, terutama hak asasi tersangka atau terdakwa yang merasa dirugikan.

Kehadiran lembaga ini disambut dengan gembira bagi segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan. Lembaga Praperadilan yang diciptakan pasti didorong dengan maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni untuk memberi pengawasan terhadap perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan yang kemudian dijabarkan dalam UU No.8 tahun 1981 (KUHAP) yang dikenal dengan Lembaga Praperadilan. Praperadilan bertujuan mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum atau lembaga penegak hukum yang lain terhadap tersangka, agar tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakan hukum dimasa HIR. Pengawasan juga dilakukan terhadap perilaku masyarakat serta terhadap perilaku para penegak hukum yang kerjanya berperan secara pidana, yang dimaksudkan sebagai pengawasan horizontal oleh hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaksanaan upaya paksa.

Hakim dalam praperadilan bukan berarti fungsionaris peradilan, bukan pula wasit yang mengadili sengketa hukum. Hakim dalam praperadilan dipinjam karena diperlukan suatu fungsionaris netral untuk mengontrol penangkapan dan penahanan itu. Jelaslah bahwa prosedur praperadilan mengganti atau mengalihkan tugas pengawasan terhadap penangkapan dan penahanan serta penghentian penyidikan atau penuntutan dari kepala-kepala kejaksaan atau kepala-kepala kepolisian kepada Hakim Pengadilan Negeri yang berkedudukan netral. Serta lembaga ini bertujuan untuk menempatkan pelaksanaan hukum pada proposi yang sebenarnya demi terlindungnya HAM, khususnya hak-hak tersangka dan terdakwa dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan. Dan upaya paksa di luar yang ditentukan UU bukanlah menjadi wewenang praperadilan untuk memeriksanya, tetapi itu dapat menjadi perbuatan pidana biasa tetapi bisa jadi dapat dikaji ulang wewenang praperadilan dan menambahkan obyek praperadilan untuk wewenang praperadilan yang belum ditentukan oleh UU.

Lembaga praperadilan menjadi harapan bagi pencari keadilan. Walaupun dalam praktek banyak praperadilan yang diajukan tidak berhasil. Pantas kita renungkan mengapa permohonan praperadilan lebih banyak mengalami kegagalan atau tidak dikabulkan, daripada yang berhasil. Setiap praktisi dan teoritis hukum hendaknya memperhatikan masalah ini, karena sebagai lembaga baru yang banyak diminati dalam khasanah hukum kita masih banyak yang belum difahami secara benar, atau terdapatnya kekosongan hukum yang perlu diisi melalui praktisi peradilan.

Kewenangan secara spesifik praperadilan sesuai dengan Pasal 77-88 KUHAP adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, akan tetapi dikaitkan dengan Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP kewenangan praperadilan ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perihal ganti rugi dan rehabilitasi. Dalam keputusan Menkeh RI No, M.01.PW.07.03 tahun 1982, praperadilan disebutkan dapat pula dilakukan atas tindakan kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat bukti, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan UU karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, wewenang praperadilan ditambah dalam pemeriksaan keabsahan penetapan tersangka yang sebelumnya penetapan tersangka ini muncul dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/201.5/PN Jkt.Sel.

Lebih jelas wewenang Pengadilan Negeri dalam praperadilan untuk memeriksa dan memutus menurut KUHAP sebagai berikut:

1. Sah atau Tidaknya Penangkapan atau Penahanan

Inilah wewenang pertama yang diberikan UU kepada lembaga praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya:

1. Penangkapan

Dalam menyidik suatu tindak pidana adakalanya penyidik harus melakukan penangkapan atas tersangka pelakunya, yaitu suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa. Untuk melakukan penangkapan harus terpenuhi dua syarat, yaitu:

1. Syarat formil—dilakukan oleh penyidik atau polisi atas perintah penyidik. Dilengkapi dengan surat tugas dari yang berwenang (surat perintah penangkapan).
2. Menyerahkan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.
3. Kecuali dalam hal tertangkap tangan penangkapan dapat dilakukan oleh setiap orang.
4. Syarat material yaitu:
5. Ada bukti permulaan yang cukup Pasal 17 KUHAP
6. Penangkapan paling lama untuk satu hari 1x24 jam sesuai Pasal 19 ayat (1) KUHAP. Penangkapan dilakukan paling lama untuk jangka waktu satu hari atau 24 jam. Apabila tenggang waktu tersebut terlewati, maka penangkapan dimaksud beralih menjadi penahanan, atau apabila tidak hendak ditahan maka tersangka harus dimerdekakan (Prints).
7. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP. Atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan batas waktu yang ditentukan Pasal 24. Kaitannya dengan praperadilan yang penting diketahui adalah syarat-syarat dan tata cara melakukan penahanan. Suatu penahanan yang tidak dilandasi. Surat Perintah Penahanan (SPP) dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim adalah tidak sah. Menurut Prints penahanan yang dilakukan terhadap tindak pidana diluar yang diatur oleh Pasal 21 KUHAP tersebut adalah tidak sah dan karenannya dapat diajukan kepada lembaga praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penahanan yang dimaksud (Prints).

1. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

Kasus lain yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan praperadilan ialah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Baik penyidikan maupun penuntut umum berwenang menghentikan pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dengan alasan hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Sebab itu, tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan nebis in idem, karena apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bisa juga penghentian dilakukan penyidik atau penuntut umum, disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kadaluarsa untuk penuntut. Kemungkinan alasan penghentian ditafsirkan secara tidak tepat atau sama sekali tidak beralasan. Atau penghentian itu dihentikan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, mesti ada lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, supaya tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan hukum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*).

Penghentian penyidikan—UU memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Demikian pula sebaliknya penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada praperadilan.

1. Ganti kerugian dan rehabilitasi

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya berupa imbalan sejumlah uang. Timbulnya tuntutan ganti kerugian itu karena pemohon telah dikenai tindakan seperti apa yang diuraikan dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP.

Hal-hal yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP sebagian sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Akan tetapi Pasal 95 KUHAP membuat dua pengertian pokok yang harus dipahami yakni tuntutan ganti kerugian bagi yang perkara pokoknya tidak pernah sampai ke pengadilan dan tuntutan ganti kerugian bagi perkara yang sudah diputus di pengadilan.

Adapun hal-hal yang perkara pokoknya tidak sampai ke pengadilan itu berupa:

1. ditangkap secara tidak sah;
2. ditahan secara tidak sah, penahanan yang lebih lama dari seharusnya;
3. sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
4. sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
5. dikenakan tindakan lain tidak berdasarkan undang-undang, seperti: tidak sahnya pemasukan rumah, tidak sahnya penggeledahan, tidak sahnya penyitaan;
6. keliru mengenai orangnya; dan
7. keliru mengenai hukum yang diterapkan Permohonan ganti kerugian dalam hal demikian dapat diajukan paling lambat tiga (3) bulan sejak putusan praperadilan diberitahukan Pasal 7 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Ganti Kerugian.

Hal ini berarti bahwa permohonan ganti kerugian sesuai Pasal 95 KUHAP itu baru dapat dilakukan setelah adanya putusan praperadilan yang menyatakan upaya-upaya seperti penangkapan, penahanan itu tidak sah. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabat semula. Rehabilitasi dapat diberikan dalam tingkat penyidikan, penuntutan ataupun pada putusan pengadilan. Dalam hal perkaranya sampai ke pengadilan, sesuai Pasal 97 KUHAP maka rehabilitasi itu akan diberikan bersamaan dengan putusan pengadilan. Artinya apabila terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka dalam putusan itu juga sekaligus kedudukan dan haknya direhabilitasi. Akan tetapi bagi perkara-perkara yang tidak sampai pengadilan, maka sesuai Pasal 97 ayat (3) KUHAP rehabilitasi harus diberikan melalui putusan pengadilan (Pasal 77 KUHAP).

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

1. Pelaksanaan Putusan Praperadilan

Pada dasarnya putusan hakim sudah dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu pula dengan putusan praperadilan. Namun demikian, putusan yang dijalankan adalah putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan si pemohon, baik seluruh maupun sebagian. Melihat dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP, bahwa ada tiga macam pelaksanaan putusan praperadilan:

* 1. **Melakukan perbuatan tertentu**

Isi putusan yang memerintahkan kepada penyidik atau penuntut yang diajukan permintaan pemeriksaan praperadilan sebagai termohon untuk melakukan perbuatan tertentu tercantum dalam Pasal 82 ayat (3 huruf a, b, dan d) KUHAP meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umu pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka.
2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan tau penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
3. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka penyidik atau penuntut umum harus segera mengembalikan benda tersebut kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Putusan praperadilan yang mengandung perintah untuk melakukan perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3 huruf a, b, dan d) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik atau penuntut umum selaku termohon dalam putusan praperadilan tersebut. Misainya putusan praperadilan menetapkan bahwa penahanan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah, apabila tersangka berada dalam tahanan, penyidik atau penuntut umum sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan selaku termohon harus membebaskan tersangka dimaksud dari tahanan, yaitu dengan mengirim surat perintah pembebasan tersangka dari tahanan kepada kepala rutan (rumah tahanan) dimana tersangka ditahan. Atas perintah tersebut, kepala rutan membebaskan tersangka dengan membuat BAP (Berita Acara Pelepasan) tersebut kepada penyidik atau penuntut umum. Selanjutnya, setelah BAP tersebut diterima, penyidik atau penuntut umum yang bersangkutan membuat laporan pelaksanaan putusan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

* 1. **Melakukan pembayaran sejumlah uang**

Apabila isi putusan praperadilan menetapkan bahwa tersangka diberikan ganti rugi sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 ayat (3 huruf c) KUHAP, maka tersangka selaku pemohon berhak untuk mendapat sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan.

Oleh karena tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum merupakan tindakan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai alat negara penegak hukum, maka ganti kerugian atas tindakan mereka yang menurut putusan praperadilan adalah tidak sah, dibebankan kepada negara. Negara yang memberikan sejumlah uang tertentu kepada tersangka, dalam hal ini menurut Pasal 11 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 adalah Menteri Keuangan RI. Dalam praktek setelah penerima petikan ganti kerugian dari panitera Pengadilan Negeri yang mengadili permintaan pemeriksaan praperadilannya, pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan putusan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri membuat surat ketetapan pembayaran ganti kerugian dengan melampirkan surat permohonan pemohon, dan putusan praperadilan tersebut kepada kantor perbendaharaan Negara. Kemudian atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, kantor perbendaharaan Negara mengeluarkan surat perintah membayar uang sejumlah yang telah ditetapkan dalam putusan praperadilan dan mengirimkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Karena yang mengajukan permintaan kepada kantor perbendaharaan negara adalah Pengadilan Negeri lalu uang tersebut diserahkan kepada pemohon.

* 1. **Pemberian rehabilitasi**

Putusan praperadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan. Sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntut adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan yang rehabilitasinya dicantumkan dalam Pasal 82 ayat (3 huruf c) KUHAP.

Dalam hal pemberian rehabilitasi, menurut Pasal 15 PP No. 27 Tahun 1983 isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menetapkannya pada papan pengumuman pengadilan. Penetapan pemberian rehabilitasi hendaknya tidak saja dimuat dalam papan pengumuman pengadilan melainkan dimuat juga dalam media masa, demi nama baik orang yang bersangkutan yang sudah tercemar di mata masyarakat.

1. **Kebijakan aplikasi lembaga praperadilan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan tugas penyidik kepolisian dalam SPP**

Tujuan lembaga praperadilan adalah untuk memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan pendahuluan perkara pidana, khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Praperadilan diharapkan dapat membuat pemeriksaan perkara pidana berjalan dengan sebaikbaiknya, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penuntutan dan sebagainya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Kesemuanya ini untuk mewujudkan perlindungan terhadap HAM agar jangan sampai diperkosa (Syahrani, 1983: 74). Penegakan hukum atau *law enforcement* adalah rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat (Abdussalam, 1997: 21). Kepastian hukum menjadi salah satu pokok pemikiran aliran yuridis dogmatis. Kepastian hukum dapat diwujudkan dengan penerapan hukum yang dirumuskan dalam UU. Akan tetapi penerapan hukum seringkali terhambat karena UU tidak sempurna. Adakalanya UU tidak lengkap dan atau tidak jelas (Mertokusumo, 1986: 132).

Menurut Soekanto (1993: 3) penegakan hukum merupakan pasangan nilai-nilai yang harus diserasikan dalam wujud yang lebih kongkrit, yang kemudian menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindakan yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Maka dapat dikatakan penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu terkenal. Namun masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

* 1. faktor hukum itu sendiri (dalam hal ini adalah UU);
  2. faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk atau menerapkan hukum;
  3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung;
  4. faktor masyarakat, tempat hukum diterapkan; dan
  5. faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia.

Guna menegaskan hal itu, Muladi (1978: 2) menambahkan bahwa penegakan hukum merupakan proses penyerasian nilai, kaidah dan pola perilaku yang nyata guna mencapai kedamaian. Penegakan hukum pidana merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari pentahapan sebagai berikut:

1. tahapan perumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, yang menjadi wewenang lembaga legislatif;
2. tahapan penerapan/aplikatif yang menjadi wewenang lembaga yudikatif;
3. tahapan pelaksanaan/administratif yang menjadi wewenang lembaga eksekutif.

Dalam realitasnya, penegakan hukum secara menyeluruh (*total enforcement*) tidak mungkin terlaksana, karena adanya *non-enforcement area,* di mana tindakan aparat penegak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum materiil (misalnya syarat harus ada pengaduan) maupun ketentuan hukum formil (misalnya syarat-syarat penangkapan, penahanan, penyitaan dsb). Selanjutnya yang ada hanyalah ruang lingkup penegakan hukum secara penuh (*area full of enforcement*) sebagaimana dijelaskan oleh Goldstein (1998: 4). Pada lingkup ini penegakan hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Namun penegakan hukum secara penuh ini merupakan harapan yang tidak realistis karena banyaknya kendala dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dsb (Quinney, 1975: 13). Dengan demikian yang tersisa hanyalah “*actual enforcement*” yaitu penegakan hukum yang kongkrit.

Mengenai kebijakan legislatif yang tentunya bisa berdampak pada kebijakan kriminal, Arief menjelaskan bahwa kebijakan legislatif sebagai tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap- tahap berikutnya seperti aplikasi dan eksekusi, merupakan hal strategis bagi proses penegakan hukum pidana (Muladi dan Arief, 1992: 157-158). Sehingga peran strategis penyusunan kebijakan tahap formulasi berada pada badan legislatif dan aparat lain yang diberi wewenang untuk menyusun dan membuat peraturan perundang-undangan nasional, khususnya UU acara pidana. Perubahan warna kebijakan kriminal yang dipengaruhi oleh pemerintahan yang berkuasa selayaknya dimaknai sebagai suatu keinginan untuk menjadi lebih baik, terutama demi menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat seiring dengan aspirasi rakyat yang berkembang sesuai dengan tuntutannya. Diperlukan adanya kebijakan di bidang SPP, apabila diajukan permohonan praperadilan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari tindakan pejabat baik penyidikan maupun penuntutan, di mana kebijakan tersebut dapat berupa amandemen UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan jalan menambah ketentuan "apabila dilakukan permohonan praperadilan, seharusnya perkara pokok tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sebelum diputuskan permohonan praperadilan ini. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap tersangka yang dikenai tindakan penangkapan dan/ atau penahanan oleh pejabat yang berwenang di mana tindakan pejabat tersebut akan dinilai atau dikontrol oleh lembaga praperadilan melalui putusannya yang mempertimbangkan keabsahan dari tindakan pejabat dimaksud sehingga nantinya tidak ada putusan praperadilan yang serta merta dinyatakan gugur akibat mulai diperiksanya perkara pidana pokok terhadap tersangka.

Masalah kepastian hukum menyangkut masalah bentuk dari hukum. Bentuk hukum yang tertulis disebut hukum undang-undang dan bentuk hukum yang tidak tertulis disebut hukum adat dan hukum kebiasaan. Bahwa hukum UU yang karena bentuknya tertulis lebih banyak memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum mempunyai dua segi (Mustafa, 2001: 34). yaitu:

1. dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang kongkrit; dan
2. kepastian hukum berarti keamanan hukum artinya perlindungan bagi para pihak dari kesewenang-wenangan.

Untuk itu perubahan KUHAP yang diinginkan harus mencerminkan tuntutan tersebut tanpa meninggalkan asas-asas yang terkandung sebelumnya, misalnya asas[[1]](#footnote-1):

* perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
* penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh UU dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan UU;
* setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
* orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman disiplin;
* peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
* setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
* terhadap tersangka sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya dan wajib diberitahu hak tersebut termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan advokat;
* pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali ditentukan lain dalam UU;
* pemeriksaan di sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain dalam UU;
* acara pidana yang diatur dalam undang-undang ini dilaksanakan secara wajar (*fair*) dan para pihak berlawanan secara berimbang (*adversarial*); dan
* bagi setiap korban diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan.

Dalam rancangan atau konsep KUHAP dipertegas adanya asas legalitas demi terciptanya kepastian hukum dalam hukum acara pidana sehingga ketentuan hukum tidak tertulis tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan dalam lingkup hukum acara pidana. Ditentukan pula ruang lingkup hukum acara pidana adalah guna melaksanakan tata cara peradilan pada lingkungan peradilan umum di semua tingkat peradilan, tentunya ini berkaitan dengan pemisahan lingkungan peradilan militer. Lingkup berlakunya hukum acara pidana termasuk pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Saat ini selaku hukum positif (*ius constitutum*) hukum acara pidana yang diterapkan pada kebijakan aplikasi adalah bertitik tolak kepada UU Nomor 8 Tahun 1981. Undang-undang tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 disebut sebagai "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" atau dalam praktik peradilan lazim disebut dengan terminologi KUHAP. Semenjak pengundangannya, banyak kalangan "memuji" KUHAP dengan menyebutkan sebagai sebuah "karya agung" bangsa Indonesia. Namun ada juga yang berpendapat UU dinamai "kitab". Mestinya kodifikasinya yang diberi nama kitab. Jadi seharusnya “Kodifikasi ini dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” Bukan UU yang dinamai "kitab" tetapi kodifikasinya (Hamzah, 2000: 1).

Dalam rangka upaya perbaikan hukum yang diasumsikan menjadi visi tiap pemerintahan di Indonesia, maka perubahan atau reformasi hukum yang dicanangkan tidak hanya berupa pembaharuan UU atau substansi hukum tetapi juga pembaharuan struktur hukum dan pembaharuan budaya hukum, yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum. Hakekat pembaharuan/pembangunan hukum bukan terletak pada aspek formal dan lahiriah (seperti terbentuk UU baru, struktur kelembagaan dan mekanisme/prosedur baru, bertambahnya bangunan dan sarana/prasarana lainnya yang serba baru) melainkan justru terletak pada aspek immateriil ini, yakni membangun budaya dan nilai-nilai kejiwaan dari hukum (Arief, 2008: G).

Praperadilan dalam perwujudannya tetap satu dan berada pada Pengadilan Negeri, baik organisatoris maupun administratif, personal, material, dan finansial berada dalam tubuh Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Praperadilan ini tunduk dan berada di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kedudukannya pun berada dan bersatu dengan pengadilan Negeri setempat.

Lembaga praperadilan, di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir 10 UU Nomor 8 tahun 1981 menyatakan bahwa “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan Pasal 78 KUHAP yang berbunyi, “yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan; Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praperadilan dibentuk sebagai sarana pengontrol tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya praperadilan, aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap seorang tersangka tetap berdasarkan UU dan tidak bertentangan dengan hukum.

Hal inilah yang membedakan KUHAP dengan masa berlakunya HIR, di mana pada waktu itu tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap seorang tidak terawasi dan tidak terkontrol, sehingga dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penyidik. Untuk itu dibentuk lembaga praperadilan yang berwenang melakukan koreksi, penilaian, dan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Ketentuan tersebut di atas pada pokoknya tujuan dasar dari praperadilan adalah satu cerminan pelaksanaan dari asas *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah) sehingga tiap orang yang diajukan sebagai terdakwa telah melalui proses awai yang wajar dan mendapat perlindungan harkat dan martabat manusianya (Kaligis, 1997: x).

Lembaga praperadilan merupakan alat uji apakah seseorang itu telah melalui proses awai penangkapan dan penahanan oleh aparatur penyidik secara sah menurut UU atau satu penahanan dan atau penangkapan yang mengandung cacat. Subyek hukum praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan. Obyek praperadilan dalam hal untuk sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal (Hermawaty, 2019). Fungsi dan peranan peradilan di dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) merupakan ikon pembaharuan hukum acara pidana model *Hat Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang diberlakukan sejak tahun 1941-1942. HIR harus dapat memperoleh pengakuan dari tersangka mengenai peristiwa yang melibatkan dirinya, di mana pengakuan tersangka merupakan salah satu alat bukti utama dari alat bukti lainnya sehingga terbukti sering terjadi perlakuan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang pemeriksaan dalam beberapa kasus tindak pidana. Lembaga peradilan diharapkan menjadi tempat bagi masyarakat mendapatkan keadilan dan menaruh harapan. Namun, realitanya jauh dari harapan. Justru, pengadilan dianggap sebagai tempat yang berperan penting menjauhkan masyarakat dari keadilan. Harapan akan memperoleh kebenaran dan keadilanpun pupus ketika ditemukan adanya permainan sistematis yang diperankan oleh segerombolan orang yang bernama mafia peradilan.

Lembaga Rechter Commisaris (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah memberikan peranan *Rechter Commisaris,* suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat (Departemen Kehakiman, 1982).

Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP adalah mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka. Namun, bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam UU, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan (Departemen Kehakiman, 1982). Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka, atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, ia berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi (Alfiah, 1986: 75).

**Alasan pengajuan praperadilan**

Bentuk-bentuk upaya paksa dalam KUHAP adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Upaya-upaya ini dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan yang sering tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya, khususnya dalam konteks pembuktian di sidang praperadilan. Penahanan, misalnya, tentu berkaitan langsung dengan upaya paksa sebelumnya berupa penangkapan, dan tindakan setelahnya berupa perpanjangan penahanan. Dalam pengajuan permohonan praperadilan, adakalanya permohonan memuat pokok perkara lebih dari satu seperti penangkapan dan penahanan sekaligus, namun terkadang permohonan hanya mempersoalkan satu bentuk upaya paksa.

Jika permohonan diajukan dengan pokok perkara lebih dari satu, pemohon tidak secara lengkap dan menyeluruh dalam menjelaskan dan merasionalisasi dasar permohonannya terhadap setiap pokok perkara itu. Ketika pokok perkara yang diusung berjumlah dua atau tiga, maka pemohon akan lebih fokus untuk memaparkan dan merasionalisasi satu pokok perkara "utama" yang dipersoalkan, sementara pokok perkara lainnya justru terkesan diabaikan. Padahal, KUHAP telah menentukan, setiap upaya paksa yang masuk dalam kewenangan praperadilan maupun tidak, masing-masing memiliki unsur-unsur tersendiri dan mandiri, meskipun terkait satu sama lainnya. Tindakan penangkapan misalnya, memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dijelaskan pemohon untuk menjadi dasar baginya dalam mengajukan praperadilan, sebagaimana pula terhadap tindakan penahanan dan perpanjangan penahanan. Dalam praktiknya, tidak sedikit pemohon yang menyandarkan permohonannya kepada tindakan awal aparat yang dianggap cacat atau menyimpang , untuk dijadikan justifikasi ilegalnya tindakan aparat selanjutnya kepada pemohon. Contohnya, pemohon mendalilkan keabsahan penahanannya dengan pemenuhan syarat penangkapan terhadap dirinya.

Pemohon menganggap, tindakan penahanan terhadap dirinya praktis menjadi cacat karena diawali dengan cacatnya tindakan penangkapan yang dilakukan aparat. Bahkan, seringkali pemohon justru mengabaikan pemaparan, pembuktian, dan rasionalisasi tidak terpenuhinya unsur-unsur penahanan terhadap dirinya seperti diatur dalam Pasal 21 KUHAP. Misalnya, merujuk Putusan No. 06/PID.PRA/2010/PN.PTK (P-l), pemohon mengusung tiga pokok perkara melalui permohonannya, yaitu penangkapan, penahanan, dan penyitaan. Selain itu, pemohon bahkan meminta hakim praperadilan memerintahkan termohon untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadapnya. Dalam paparannya, pemohon menjelaskan panjang lebar kronologi kasus hingga tuntutan yang diminta untuk diputus oleh hakim. Meski memberikan penjelasan panjang, rasionalisasi pemohon terhadap pokok permohonan tidak disinggung dengan baik. Pemohon memfokuskan dasar permohonannya kepada penangkapan yang dijustifikasi sebagai dasar ketidakabsahan penahanan dan penyitaan terhadapnya. Sedangkan, penjelasan dan rasionalisasi tidak absahnya penyitaan dan penahanan terhadap mereka nyaris tidak didapati. Dalam paparannya, pemohon mendalilkan: "...dari alasan-alasan penangkapan tersebut di atas, jelas penangkapan yang dilakukan oleh termohon tersebut tidak sah dan tidak berdasar dan melawan hukum, maka penyitaan Surat Tanda Penerimaan Benda Sitaan serta Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh termohon, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang tidak sah, tidak berdasarkan hukum dan bersifat melawan hukum yang ditujukan kepada Pemohon I dan Pemohon II, (secara) *mutatis mutandis* harus dibatalkan demi hukum.”

Hal yang sama juga ditemukan dalam Putusan No. 09/PID.PRA/2009/PN.PTK (P-3). Dalam putusan ini, pemohon mengusung dua pokok perkara, yaitu penangkapan dan penahanan. Pemohon mengungkapkan penjelasan dan rasionalisasi dasar permohonannya dengan sangat singkat. Meski terdapat dua pokok perkara, tapi pemohon lebih fokus untuk merasionalisasi penangkapan saja. Penjelasan dan rasionalisasi mengenai ketidakabsahan penahanan tidak didapati dalam permohonan. Terkait dengan ketidakabsahan penahanan terhadapnya, pemohon hanya mengelaborasi ketidakabsahan tersebut pada aspek penangkapan. Pemohon mendalilkan: “Bahwa dengan demikian, tindakan termohon (dalam putusan ditulis 'Pemohon') yang melakukan penangkapan terhadap pemohon pada tanggal 27 Mei 2009 sekitar jam 08.30 WIB harus dinyatakan tidak sah dan penahanannyapun juga harus dianggap tidak sah karena bertentangan dengan dan melanggar pasal 19 ayat (1) KUHAP, yang mengharuskan mengeluarkan Pemohon dari Rutan Termohon demi hukum.” Sebaliknya, ketika pemohon hanya mengusung satu pokok perkara saja dalam permohonannya misainya penahanan saja penjelasan dan rasionalisasi pemohon terhadap cacat atau tidak sahnya penahanan menjadi sangat gamblang dan menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 05/PID.PRA/2008/PN.KPG (P-76). Terlepas dari alasan-alasan yang menyebabkan penjelasan dan rasionalisasi dasar permohonan menjadi tidak fokus atau kurang lengkap, penyajian permohonan praperadilan semacam ini jelas tidak menguntungkan pemohon sendiri. Hal ini terbukti dari putusan praperadilan yang terkumpul, di mana hakim menolak seluruh perkara praperadilan yang dasar pengajuan permohonannya (penahanan) tidak dipaparkan secara lengkap dan detail, meskipun dipahami bahwa faktor ini bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi putusan hakim. Sebaliknya, ada dua perkara yang dikabulkan hakim, di mana keduanya adalah perkara yang dasar permohonannya dijelaskan secara lengkap dan terperinci.

**Kesimpulan dan Saran**

Wewenang hakim praperadilan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), serta Pasal 124) dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 merumuskan bahwa obyek praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; penetapan tersangka; penyitaan dan penggeledahan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, sehingga peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan oleh hakim dalam memutus perkara praperadilan pada pokoknya sudah diatur namun dalam perkara *aquo* hakim mempunyai pertimbangan terkait asas keadilan dan persamaan hukum untuk menetapkan tersangka baru yang sebenarnya merupakan domain atau kewenangan dari penyidik melalui serangkaian tindakan penyidikan. Penerapan lembaga praperadilan betujuan untuk menguji pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik dalam praktek-praktek penyelidikan dan penyidikan dalam menetapkan tersangka. Praperadilan di Indonesia adalah salah satu subsistem yang menjalankan kerja pengawasan horizontal terhadap kerja penyidik dan penuntut dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Sebelum menetapkan penahanan, penyidik harus benar-benar memahami konstruksi kasus yang sedang ditangani sehingga tidak menjadi obyek dari praperadilan. Kemudian sebelum melakukan tindakan kepolisian, para penyidik harus benar-benar memahami aturan-aturan yang diberlakukan.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Hamzah, A. 1992. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta.

Nasution, A. Karim. 1972. Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana, Jakarta.

Wisnubroto, A. 2001. Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana, Penerbit Galaxy Pustaka Nusa, Bekasi.

Nawawi, Arief Barda. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya.

Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Fatahillah, A. Syukur, Dewi Ds. 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia,* Jakarta: Indie Publishing.

Hamid, Hamrat dan Harum M. Husain, 1996. Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksepsi, Sinar Grafika.

Harahap, M Yahya, 1991. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Pustaka Kartini.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit P.T. Raja Grafindo Persada.

Simorangkir, dkk. 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno. 2001. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Jogjakarta: Liberty.

Sugiyono (III). 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung, Alfabeta.

Widinyana, I Made. 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.

**Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan**

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

**Internet**

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/00300021/apa-itu-praperadilan-

https://stih-adhyaksa.ac.id/apasih-bedanya-penyidik-dengan-penyelidik/

https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/453/pdf

**OPTIMALISASI KERJASAMA HEXA-HELIX**

**GUNA MENDUKUNG PENGAMANAN PEMILU**

**Bellen Anggara Pratama**

**Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri Lemdiklat Polri Dikreg 63 Tahun 2023, Bandung, Lembang 40391**

**e-mail:** [**bellenanggarapratama@gmail.com**](mailto:bellenanggarapratama@gmail.com)

**Abstrak**

Tulisan ini dilatarbelakangi adanya urgensi untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu (Pemilihan Umum) 2024, mengingat sejumlah negara mengalami konflik pascapemilu. Meskipun demokrasi Indonesia cenderung barada dalam kondisi yang lebih baik, tantangan pengamanan Pemilu semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan kerjasama *hexa-helix*, yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas/NGO, media massa, serta agregator yaitu penyelenggara dan peserta pemilu yang diharapkan dapat meningkatkan sinergi dalam pengamanan Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitik teknik data dengan SWOT. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi antar unsur *hexa-helix* belum optimal, terutama interaksi dengan akademisi, dunia usaha, media massa, dan peserta pemilu. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Polres Ketapang memiliki peran sentral dalam mengkolaborasikan unsur *hexa-helix*, meskipun masih ada ditemukan kendala operasional dan perlu meningkatkan perannya sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator.

***Kata kunci: kolaborasi; hexa-helix; Polres Ketapang; Pemilu 2024***

***Abstract***

*This paper is motivated by the urgency of maintaining political stability and security leading up to the 2024 general elections, considering that several countries have experienced post-election conflicts. Although Indonesia's democracy tends to be better, the challenges of securing the 2024 general elections are increasing. This research aims to optimize hexa-helix collaboration, which involves the government, business sectors, academics, communities/NGOs, mass media, and aggregators, namely election organizers and participants to enhance synergy in securing the 2024 general elections. The research employs the descriptive-analytical method and data is collected through observations, interviews, literature reviews, and SWOT analysis. The results of the research indicate that the interactions among hexa-helix elements are not yet optimal, especially with academics, the business sectors, mass media, and election participants. It is also found out that Ketapang police resort has a central role in coordinating the hexa-helix elements, although there are operational challenges and a need to enhance their role as regulators, facilitators, and catalysts.*

***Keywords: collaboration; hexa-helix; Ketapang Police Resort; 2024 general election***

**Pendahuluan**

Permintaan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia di SICC (Sentul International Convention Centre) pada awal tahun 2023 kepada seluruh jajarannya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 perlu mendapatkan perhatian serius dari segenap aparatur negara (<https://www.kominfo.go.id/content/detail/46918/presiden-buka-rakornas-kepala-daerah-dan-forkopimda-tahun-2023/0/berita>). Permintaan tersebut bukan tanpa alasan mengingat keberadaan sejumlah negara yang terjerumus ke dalam konflik berkepanjangan pasca pemilu di negara mereka masing-masing. Sebagai contoh, pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2018 di negara-negara Venezuela, Pakistan, Kongo dan Zimbabwe berakhir dengan konflik yang menimbulkan instabilitas di negara-negara tersebut (<https://www.cnnindonesia.com /internasional/20190521112908-106-396803/lima-negara-ricuh-karena-sengketa-pemilu>). Pemilu di Afghanistan tahun 2014 bahkan lebih buruk lagi karena berujung kepada perang saudara berkepanjangan.

Situasi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang kondusif juga dapat mendukung transparansi sebuah Pemilu karena ketika Pemilu berlangsung dalam suasana yang aman, tertib, dan bebas dari konflik, masyarakat lebih cenderung percaya pada hasil Pemilu dan institusi demokrasi yang terlibat. Walaupun masih diwarnai dengan berbagai permasalahan, kondisi demokrasi di Indonesia cenderung lebih baik. Namun demikian, kondisi tersebut tidak serta merta menjadikan tugas Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) menjadi lebih mudah. Seiring dengan semakin dekatnya waktu penyelenggaraan Pemilu 2024, eskalasi ancaman dan gangguan kamtibmas dirasakan kian mengalami peningkatan akibat suhu politik yang semakin memanas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) telah melakukan sebuah survei pada bulan Desember 2022 dan merilis hasil penelitian tersebut pada awal tahun 2023. Hasil-hasil survei ini menyebutkan bahwa tahun 2023 bisa menjadi sebuah masa atau tahun yang gelap akibat adanya berbagai ancaman (<https://www.antaranews.com /berita/3320757/survei-lpi-2023-akan-menjadi-tahun-yang-berat>). Dalam kesempatan itu, Boni Hargens yang dikenal sebagai Direktur Eksekutif LPI mengatakan:

Tahun 2023 menjadi tahun yang berat karena potensi krisis ekonomi dunia sebagai efek lanjutan perang Rusia-Ukraina, instabilitas pasar keuangan, dan meroketnya inflasi dunia, sehingga risiko stagflasi serta ancaman instabilitas nasional, seperti radikalisme, terorisme, dan separatism Papua.

Situasi tersebut, sebagaimana yang diprediksi oleh hasil survei LPI, lebih diperparah lagi jika kita merujuk pada data gangguan-gangguan kamtibmas yang terjadi selama berlangsungnya Pemilu 2019. Pada durasi waktu tersebut, telah terjadi 55.582 kasus kriminal dalam berbagai bentuk, antara lain kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kontinjensi yang ditemukan selama selama Operasi Mantap Brata. Pada Pemilu 2019 juga ditemukan fenomena baru, di mana sebanyak 894 orang anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) meninggal dunia karena alasan kesehatan (<https://news.republika.co.id/berita/rl4n80436/tragedi-gugurnya-ratusan-petugas-kpps-berpotensi -terulang-di-pemilu-2024>) dan ditambah 29 personel Polri gugur dalam melaksanakan tugas; penolakan hasil rekap berujung kerusuhan; polarisasi di tengah masyarakat yang sampai saat ini; politik identitas; berkembangnya *hoax* dan *hate speech;* fenomena *buzzer* dan *money politics;* pelanggaran netralitas di kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara) serta Aparatur Desa/Kelurahan khususnya saat pilkada serentak yang dilaksanakan antara tahun 2021 dan 2022, termasuk di daerah hukum Polres Ketapang.

Mengingat bahwa tantangan terhadap pengamanan Pemilu 2024 semakin tinggi, baik dalam hal eskalasi maupun kompleksitasnya sebagaimana dijelaskan dalam paragraf-paragraf sebelumnya, maka Polri dituntut untuk menjalin kerjasama dengan seluruh pihak, baik di internal kepolisian itu sendiri, bersama-sama dengan kementerian/lembaga pemerintah lainnya, penyelenggara pemilu maupun dengan unsur-unsur masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah satu model kerjasama tersebut adalah kerjasama *hexa-helix*. Model kerjasama *hexa-helix* ini menurut Sturesson, Lindmark, dan Roos (2009) terdiri dari enam pemangku kepentingan, yaitu: pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi non pemerintah, media massa dan *aggegator,* yaitu penyelenggara dan peserta Pemilu. Keterlibatan yang lebih banyak dari *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam pengamanan Pemilu 2024 mengartikan lebih banyak sinergi di antara para pihak, termasuk pelaku atau peserta pemilu. Keberhasilan pengamanan Pemilu 2024 akan menciptakan suasana yang kondusif dan menjamin partisipasi aktif dari seluruh warga negara serta menjamin transparansi dan integritas dari hasil pemilu itu sendiri.

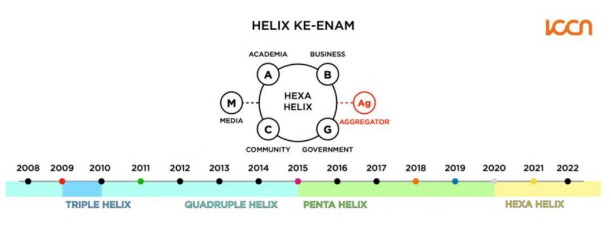
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam jurnal ini adalah bagaimana mengoptimalisasi kerjasama *hexa-helix* yang dapat mendukung pengamanan Pemilu 2024. Sedangkan pokok-pokok persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah (i) bagaimana interaksi antar unsur *hexa-helix* dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024, dan (ii) bagaimana peran Polres Ketapang dalam mengkolaborasikan unsur *hexa-helix* dalam pengamanan Pemilu 2024?

Adapun ruang lingkup tulisan ini dibatasi pada upaya Kapolres Ketapang sebagai subyek penulisan dalam mengoptimalkan kerjasama *hexa-helix* berdasarkan teori kerjasama menurut Pamudji (1985) yang menjelaskan bahwa efektifitas kerjasama dipengaruhi oleh sumber daya yang memadai, peran masing-masing pihak untuk mencapai kepentingan bersama, serta interaksi dalam kerangka organisasi kerjasama. Analisis data diambil dari lokasi penelitian yaitu Polres Ketapang dan sumber-sumber lainnya yang berasal dari tahun 2020 sampai tahun 2022.

**Tinjauan Literatur**

Kolaborasi menurut Camarihna-Matos dan Afsarmanesh (2008) adalah sebuah proses ketika beberapa entitas atau kelompok saling berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab atas sebuah program kegiatan yang dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan kolaborasi kelembagaan menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) adalah proses dan struktur dari pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif antar badan badan publik, berbagai level pemerintahan dan atau pada ranah publik, privat dan sipil untuk melaksanakan suatu tujuan publik yang tidak dapat dicapai kecuali oleh forum bersama.

Seiring berjalannya waktu, bentuk kolaborasi kelembagaan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut ini:



**Sumber:** **Satari dan Larasati, 2021.**

**Gambar 1. Perkembangan Bentuk Kolaborasi Kelembagaan**

Terkait perkembangan bentuk kolaborasi kelembagaan, maka berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kolaborasi *Triple Helix* menurut Pahlevi (2017) dalam Haris Satria (2022: 9) adalah sebuah konsep yang mengacu pada kerjasama antara tiga aktor utama, yaitu pemerintah, swasta dan intelektual (tim ahli dari kalangan akademisi dan publik). Konsep ini menekankan pentingnya kolaborasi dan interaksi antara ketiga sektor tersebut dalam upaya meningkatkan inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.
2. Kolaborasi *Quadra Helix* dengan penambahan unsur komunitas atau NGO (Non-Government Organization) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), di mana NGO bisa mewakili kepentingan masyarakat, memfasilitasi dialog dan partisipasi publik, melakukan advokasi dan pemberdayaan, kolaborasi penelitian dan proyek atau ikut melakukan pengawasan (Haris Satria, 2022).
3. Kolaborasi *Penta Helix* dengan penambahan domain media massa yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan bersama dalam inovasi, pembangunan berkelanjutan, dan pertumbuhan ekonomi melalui pemberian informasi, mendorong partisipasi publik, advokasi kesadaran masyarakat, media pengawasan serta pendukung kolaborasi dan jaringan.
4. Model kerjasama *hexa-helix* menurut Sturesson, Lindmark, dan Roos (2009) terdiri dari 6 (enam) pemangku kepentingan terdiri dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi non pemerintah, media massa dan *aggregator*. Kolaborasi *hexa-helix* menambahkan unsur *aggregator* yang menurut Moghadam dan Moballeghi (2007) adalah menyatukan berbagai sumber daya yang berbeda yang sepertinya tidak saling berhubungan di dalam satu platform. Dalam Pemilu 2024, *aggregator* dapat disematkan kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, dalam hal ini yaitu KPUD Ketapang dan Bawaslu Ketapang serta peserta pemilu termasuk partai politik dan masyarakat itu sendiri.

Sementara itu, model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2008) terdiri dari beberapa dimensi, yaitu sebagai berikut:

1. Konteks (*Context*) yang mencakup kondisi dan faktor-faktor yang membentuk latar belakang kolaborasi;
2. Aktor (*Actor*) yang berfokus pada individu, kelompok, atau organisasi yang terlibat dalam kolaborasi;
3. Proses (*Process*) yang menjelaskan bagaimana kolaborasi terjadi termasuk interaksi, komunikasi, dan negosiasi antara aktor-aktor yang terlibat; dan
4. Hasil (*Outcome*) yang berfokus pada dampak dan hasil yang dihasilkan dan mencakup keputusan yang diambil, kebijakan yang diimplementasikan, dan perubahan nyata dalam masyarakat.

Kolaborasi kelembagaan yang melibatkan kerjasama antara lembaga-lembaga yang berbeda memiliki urgensi yang signifikan dalam berbagai konteks. Banyak isu kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat dan dunia saat ini sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling terkait. Tidak ada satu lembaga tunggal yang memiliki sumber daya, pengetahuan, atau keahlian yang cukup untuk mengatasi isu-isu ini secara efektif. Kolaborasi kelembagaan memungkinkan penggabungan sumber daya, keahlian, dan perspektif yang berbeda dari lembaga-lembaga yang terlibat, sehingga dapat menangani isu-isu tersebut dengan lebih holistik dan komprehensif. Melalui kolaborasi kelembagaan pula, lembaga-lembaga dapat memanfaatkan dan membagi sumber daya yang terbatas secara lebih efisien. Hal ini dapat mencakup berbagi infrastruktur, teknologi, keahlian, atau anggaran. Dengan melakukan kerjasama, lembaga-lembaga dapat mencapai lebih banyak hasil daripada jika mereka bekerja secara terpisah, karena dapat menghindari duplikasi dan memanfaatkan keunggulan masing-masing. Untuk itulah dalam banyak kesempatan baik Presiden, Wakil Presiden maupun Kapolri selalu menekankan mengenai pentingnya kolaborasi antar kelembagaan.

**Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analisis, yang diuraikan dengan menganalisa dan menggambarkan kondisi yang ada berdasarkan fakta dan data serta menggambarkan konsepsi yang mungkin dilakukan berkaitan dengan persoalan yang muncul khususnya terkait kerjasama *hexa-helix* guna mendukung pengamanan Pemilu 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara secara langsung melalui saluran telepon kepada Kapolres dan Wakapolres Ketapang dan *video call* dan *sharing* opini terhadap subjek penelitian di Polres Ketapang serta digabungkan dengan studi empiris yang berasal dari pengalaman penulis selama bertugas di Polres Ketapang. Data-data juga diperoleh dari studi literatur terhadap bahan referensi berupa berupa buku, jurnal, karya ilmiah, Lapsat, LAKIP, rekap pelanggaran, buku, internet dan lain sebagainya lainnya sedangkan proses analisis data/fakta dalam penelitian ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sesuai pendapat B. Milles dan Huberman (2014).

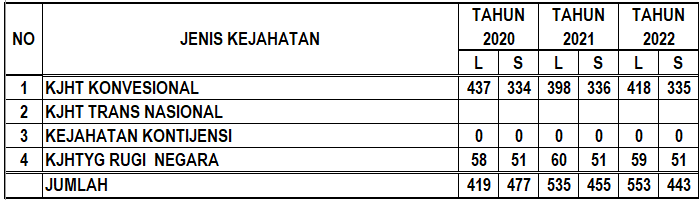
Data dan fakta yang berhasil dikumpulkan kemudian dikelompokkan sesuai dengan aspeknya kemudian dipilih dan dianalisis menggunakan pendekatan analisis SWOT (Rangkuti, 2013) untuk menentukan dan memformulasikan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan kerjasama *hexa-helix* guna mendukung pengamanan Pemilu 2024.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**Kondisi Umum Situasi Kamtibmas Menjelang Pemilu**

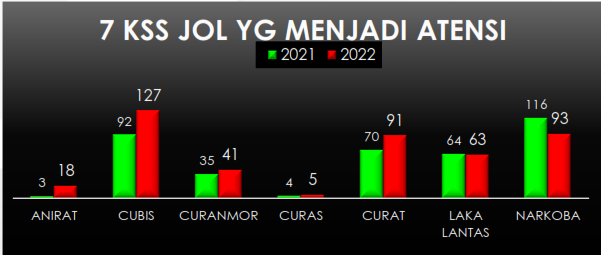
Untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai situasi keamanan dan ketertiban Masyarakat, atau seringkali disebut kamtibmas di Polres Ketapang, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai penyelesaian perkara agar dapat memberi gambaran yang lebih komprehensif. Adapun jumlah tindak pidana yang terjadi di Polres Ketapang akan digambarkan pada Tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1. Data Kriminalitas dan Penyelesaiannya**



**Sumber: Satreskrim Polres Ketapang, 2022.**

**Tabel 2. Data Kriminalitas Menonjol**



**Sumber: Satreskrim Polres Ketapang, 2022.**

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 di atas, diketahui bahwa baik tindak kriminal umum maupun kejahatan yang menonjol yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Ketapang masih menunjukkan angka yang cukup tinggi untuk kejahatan cubis, curat dan narkoba sebagai bentuk kriminalitas yang paling banyak terjadi. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa tingkat kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Ketapang senantiasa mengalami fluktuasi namun masih cukup tinggi.

Selain dari aspek kriminalitas, indeks keamanan menurut Chrysnanda (2023: 136) dapat dilihat dalam bidang politik, antara lain:

1. Pemilu dan pilkada dapat terselenggara pada setiap tahapannya tanpa konflik fisik maupun pertumpahan darah;
2. Pejabat-pejabat politik mampu menjadi ikon dan mampu mencegah terjadinya konflik politik;
3. Masyarakat mempunyai ketahanan terhadap issue- issue politik; dan
4. Terbebas dari berbagai kejahatan-kejahatan terorganisir yang mengganggu bidang perpolitikan (*white collar crime*).

Pemilu (pemilihan umum) merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan demokrasi di era otonomi daearah saat ini. Pemilu bukan saja salah satu sarana untuk mewujudkan demokrasi tetapi sekaligus sarana dalam penyelenggaraan kehidupan demokrasi. Pemilu merupakan proses lanjut dari keinginan untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, di mana dengan pemilu akan memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam berbagai proses politik. Namun dalam pelaksanaan pemilu tersebut, seringkali masih diperumit dengan maraknya ketidakteraturan sosial yang berwujud gangguan kamtibmas.

Adapun prediksi gangguan kamtibmas dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024, sesuai dengan hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan sepanjang Operasi Mantap Brata dalam pengamanan pemilu 2019 adalah sebagai berikut:

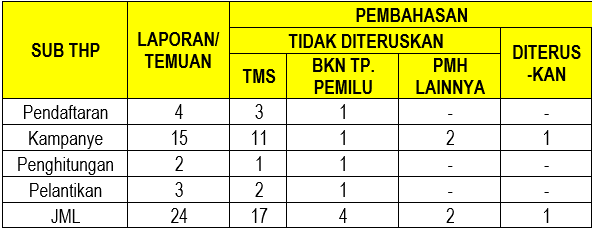
**Tabel 3 : Potensi Kerawanan Pemilu 2024**



**Sumber: Laporan Infosus Satintelkam Polres Ketapang, 2023.**

Berdasarkan hasil-hasil analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu 2019, dapat digambarkan secara umum bahwa pemilu 2019 tersebut masih diwarnai adanya pelanggaran dan laporan kecurangan pemilu sebagaimana digambarkan pada Tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4 : Penanganan Laporan Temuan Pada Pemilu 2019**



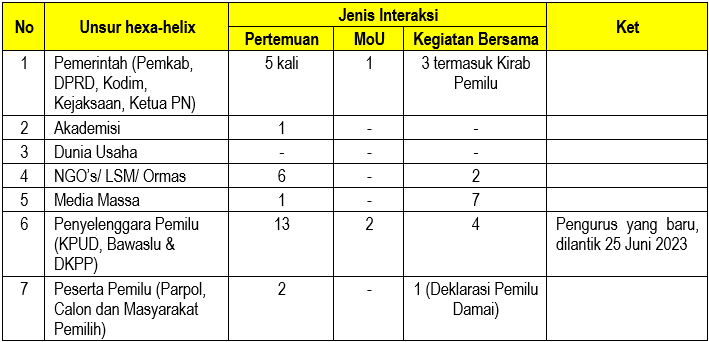
**Sumber: Laporan Anev Pam Pemilu 2019. Polres Ketapang.**

Berdasarkan Tabel 4 di atas, diketahui bahwa Polres Ketapang melalui Sentra Gakkumdu menerima 24 laporan pelanggaran maupun tindak pidana pemilu. Namun dari 24 laporan tersebut: 17 di antaranya tidak memenuhi syarat pelaporan; 4 kasus bukan tindak pidana pemilu; 2 kasus termasuk perbuatan melawan hukum lainnya; dan hanya ada 1 kasus yang diteruskan ke penyidikan.

**Kolaborasi Hexa-helix dalam Pengamanan Pemilu 2024 di Polres Ketapang**

Berdasarkan jenis interaksinya, maka gambaran umum terkait kerjasama *hexa-helix* dapat digambarkan pada Tabel 5 sebagai berikut:

**Tabel 5. Data Interaksi antara Polres Ketapang dengan unsur *Hexa-helix* dalam Pengamanan Pemilu 2024**



**Sumber: Bagops Polres Ketapang, 2023**

Berdasarkan data-data yang dimuat pada Tabel 5 di atas, terlihat bahwa interaksi antara Polres dengan unsur *hexa-helix* pada dasarnya sudah cukup baik, khususnya dengan lembaga-lembaga formal. Walaupun demikian, interaksi dengan unsur-unsur lainnya seperti akademisi, dunia usaha, media massa serta peserta pemilu termasuk partai politik, calon dan masyarakat pemilih masih cenderung belum optimal. Pembahasan terkait peran dan interaksi antar unsur *hexa-helix* dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 akan diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten, DPRD, Kodim, Kejaksaan dan Ketua Pengadilan Negeri—Unsur pemerintah memiliki peran sentral dalam pengamanan pemilu termasuk Pemkab (Pemerintah Kabupaten), DPRD, Kodim, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri. Pemkab berperan sebagai penanggung jawab pemilu di tingkat kabupaten, sementara DPRD mengawasi pelaksanaannya. Kodim membantu pengamanan melalui perbantuan kepada Polres. Kejaksaan bersama Polres melaksanakan penegakan hukum terkait pemilu sementara dan Pengadilan Negeri menangani sengketa dan gugatan yang terkait dengan hasil pemilu. Kerjasama di antara unsur pemerintah ini krusial untuk memastikan pemilu berjalan aman, adil, dan stabil. Namun dalam implementasinya terdapat catatan diantaranya:
2. Adanya potensi penggunaan program kerja dan sumber daya publik untuk keuntungan politik termasuk anggaran dan fasilitas pemerintah, untuk keuntungan politik calon atau partai tertentu.
3. Masih adanya isu netralitas ASN (Aparat Sipil Negara) dan konflik kepentingan mengingat bupati dan anggota DPRD adalah pengurus partai politik tertentu, di mana keterlibatan ini dapat mempengaruhi independensi mereka dalam melakukan tugas-tugas yang mendukung proses pemilu yang adil.
4. Unsur Dunia usaha—Dunia usaha dapat berperan sebagai sumber dana atau sponsor untuk mendukung kegiatan pengamanan pemilu. Namun demikian, masih terdapat risiko keterlibatan dunia usaha dalam pengamanan pemilu, di antaranya adalah politisasi dan keterlibatan aktif dari sebagian pengusaha dalam mendukung atau mendanai calon atau partai tertentu dapat mempengaruhi transparansi dan kemandirian pemilu, serta mengganggu persaingan yang adil di antara calon atau partai.
5. Unsur Akademisi—Universitas dan akademisi dapat melakukan riset dan analisis data terkait risiko keamanan. Disamping itu, universitas dan akademisi juga dapat berperan dalam menyebarkan informasi, advokasi dan kampanye sosialisasi anti *hoax*, polarisasi dan politik identitas, misalnya melalui acara *Ngobras* (ngobrol bareng santai) ataupun Podcast Pemilu Aman Demokratis. Adapun catatan terkait peran akademisi dalam pengamanan pemilu selain minimnya partisipasi, yaitu politisasi dan bias terkait hasil riset, penelitian atau survei yang mempengaruhi kredibilitas dan independensi mereka.
6. Unsur Organisasi Non Pemerintah termasuk LSM dan Ormas—LSM Pemantau Pemilu dan ormas keagamaan dapat berperan sebagai mediator dalam menangani potensi konflik atau perselisihan yang mungkin terjadi selama pemilu dengan membantu meredakan ketegangan dan mencari solusi damai dalam menangani perbedaan pendapat atau sengketa yang terkait dengan pemilu serta edukasi kontra *hoax*. Adapun tantangan yang selama ini masih dicari solusinya adalah keterbatasan sumber daya, seperti anggaran, personel, dan akses informasi yang memadai yang mempengaruhi kemampuan unsur NGO dalam mendukung pengamanan pemilu.
7. Unsur Media Massa—Media massa berperan dalam menyebarkan informasi terkait pengamanan pemilu, termasuk informasi mengenai regulasi pemilu, edukasi kesadaran menjaga kondisi aman dan damai, informasi tata cara pelaporan gangguan keamanan dan pelanggaran pemilu serta sebagai media informasi terpercaya yang bebas dari *hoax*. Sedangkan tantangannya adalah:
8. masih ada media yang mengejar *rating*, perhatian dan popularitas sehingga media-media tersebut sering menyajikan berita dengan sensasional yang cenderung tidak substantif, bahkan merupakan pengalihan isu penting;
9. media juga berpotensi digunakan sebagai alat untuk *spin issue* dengan memanipulasi opini dan pandangan masyarakat terhadap calon atau isu-isu pemilu tertentu; dan
10. media digital rentan terhadap serangan siber dan tindakan keamanan digital lainnya yang dapat mengganggu proses pemilu melalui penyebaran berita palsu melalui *platform* media sosial.
11. Unsur *aggregator*—KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu secara transparan, adil, dan jujur. Sedangkan Bawaslu berperan melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan. Adapun tantangannya adalah adanya ketidakmampuan teknis KPUD dalam mengatur, mengorganisir, dan mengawasi pemilu apalagi pengurus KPUD baru dilantik tanggal 25 Juni 2023 dan dari lima orang anggota KPU Kabupaten Ketapang hanya 1 orang yang merupakan anggota periode sebelumnya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan tantangan Bawaslu yang merekrut para anggotanya yang di antaranya belum mempunyai kualifikasi sarjana hukum.
12. Unsur partai politik dan para calon kepala daerah dan legislator—Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan iklim politik yang kondusif dan menjamin kader dan simpatisan mereka untuk tetap menjunjung tinggi norma keamanan selama pemilu berlangsung dan menghindari retorika provokatif yang dapat memicu ketegangan selama pemilu. Adapun tantangan yang mereka hadapi adalah minimnya edukasi politik kepada pendukungnya. Politisasi SARA (Suku Agama dan Ras) yang sering kali mengangkat politik identitas dan isu-isu primordial masih dianggap sebagai sarana paling mudah dan murah untuk menggalang dukungan serta karakter masyarakat yang temperamental, mudah tersulut serta cenderung menujukkan fanatisme golongan terutama pada masa pemilu.

**Peran Polres Ketapang dalam Mengkolaborasikan unsur *Hexa-helix* dalam Pengamanan Pemilu 2024**

Untuk menilai Peran Polres Ketapang dalam mengkolaborasikan unsur *hexa-helix* dalam pengamanan Pemilu 2024, terlebih dahulu Penulis menyampaikan keterangan tentang jumlah personel Polres Ketapang dengan spesifikasi pendidikannya sebagai berikut:

**Tabel 6. Data Personel**

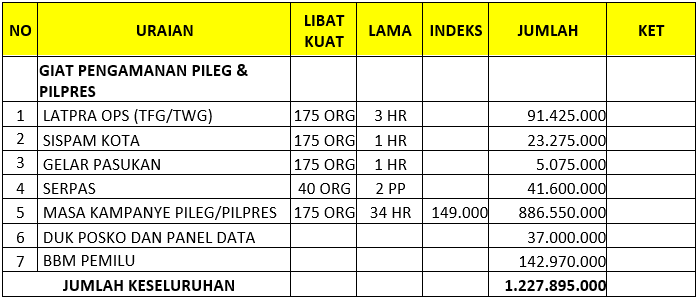


**Sumber: BagSDM Polres Ketapang, 2022.**

Data-data yang tertera pada Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa jumlah personel yang berpendidikan sarjana atau magister baru berjumlah 149 orang atau sekitar 27% dari keseluruhan personel. Sedangkan di kalangan PJU (Pejabat Utama) dan Pa (Perwira) Polres diketahui bahwa dari 71 Pamen (Perwira menengah) dan Pama (Perwira pertama) baru 41 orang yang sudah mengikuti Dikbang (Pendidikan pengembangan), baik Sespimmen, STIK, SIP maupun Alih Golongan. Dari keseluruhan personel tersebut, hanya 2/3 dari seluruh personel yang akan dilibatkan dalam pengamanan Pemilu 2024 mendatang.

Terkait sarana dan prasarana, Polres Ketapang menggunakan sarana dan prasarana serta peralatan yang telah ada di Polres Ketapang (alut/ alsus) berupa perlengkapan organik, yang digunakan sesuai dengan kebutuhan operasi dan hakekat ancaman yang dihadapi. Sedangkan dari aspek anggaran, diketahui bahwa Polres Ketapang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.227.895.000,- untuk pengamanan Pileg dan Pilres 2024 sebagaimana yang dijabarkan dalam Tabel 7 di bawah ini:

**Tabel 7. Data Anggaran Pengamanan Pemilu 2024**



**Sumber: Bagops Polres Ketapang, 2023.**

Secara umum, dukungan organisasi Polres Ketapang dalam pengamanan Pemilu 2024 sejatinya memang masih terbatas. Namun, jika melihat ke belakang, pada pelaksanaan pengamanan Pemilu 2019 yang lalu, melalui manajemen yang baik, bahkan sumber daya organisasi yang terbatas ternyata mereka dapat diberdayakan untuk mencapai tujuan terjaminnya keamanan pemilu. Dengan anggaran tambahan sebesar Rp. 1.227.895.000,- untuk pengamanan Pileg dan Pilres 2024, Polres Ketapang dapat meningkatkan profesionalisme pengamanan. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan para PJU Polres Ketapang diketahui ada sejumlah kendala operasional sebagai berikut:

1. Kendala konsolidasi internal:
2. Masih kurangnya intensitas pelatihan dan peningkatan kapasitas sehingga sebagian personel kurang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang cukup untuk menghadapi tantangan dan situasi yang kompleks selama pemilu.
3. Sebagian anggota Polres Ketapang merupakan polisi muda yang baru lulus SPN (Sekolah Polisi Negara) dan ditempatkan dalam fungsi gakum (penegakan hukum) sehingga didapati masih ada kesenjangan (*gap*) antara kompetensi dan pengalaman dalam pengamanan pemilu. Adanya perbedaan usia anggota yang cukup beragam yang mempengaruhi daya adaptasi terhadap teknologi informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
4. Polres Ketapang belum memiliki *Command Center*. Secara umum sebanyak 91,31% sarana prasarana milik Polres Ketapang berada dalam kondisi baik namun ada sejumlah ranmor (kendaraan bermotor) dan perangkat IT yang rusak yang mencapai angka 22,2% dan 15,5%.
5. Peran sebagai regulator yang diwujudkan dengan menyusun MoU (Memorandum of Understanding) dengan para *stakeholder*, yaitu sebanyak 1 MoU dengan unsur Kejaksanaan dalam pembentukan Sentra Gakkumdu serta 2 MoU dengan penyelenggara pemilu yaitu KPUD dan Bawaslu. Sedangkan catatan terkait peran Polres sebagai regulator antara lain sebagai berikut:
6. Kerjasama antara Polres Ketapang dengan unsur *hexa-helix* belum seluruhnya dibingkai dalam kerangka MoU dan dijabarkan dalam SOP kerjasama sehingga pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab (TWT) masih sering diwarnai saling lempar tanggung jawab.
7. Belum optimalnya kemampuan menjalin kerjasama termasuk keterampilan *legal drafting* sehingga belum maksimal dalam menyusun poin-poin kerjasama dengan unsur *hexa-helix* lainnya.
8. Masih adanya ego sektoral dalam pengamanan pemilu karena menganggap bahwa pengamanan pemilu adalah ranah kewenangan kepolisian semata.
9. Peran sebagai fasilitator—Sebagai fasilitator, Polres Ketapang menjalankan fungsi preemtif dengan memfasilitasi sejumlah unsur *hexa-helix* termasuk media massa, pelibatan TNI dan partisipasi masyarakat untuk mendukung terwujudnya sitkamtibmas (sistem keamanan dan ketertiban masyarakat) yang kondusif selama Pemilu 2024. Namun demikian masih terdapat catatan terkait peran Polres Ketapang sebagai fasilitator keamanan pemilu antara lain sebagai berikut:
   1. Kurangnya peran Polres dalam memfasilitasi peserta pemilu khususnya para calon dan parpol pendukung dalam memberikan edukasi politik serta masih ada peserta pemilu yang melakukan politisasi SARA, mengangkat politik identitas dan isu-isu primordial.
   2. Polres kurang berperan dalam memfasilitasi peran akademisi dan unsur NGO termasuk LSM pemantau pemilu serta ormas dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 untuk mengadvokasi, mengedukasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
   3. Polres masih kurang optimal dalam memfasilitasi pembangunan SIPT (Sistem Informasi Pemilu Terpadu). Sekalipun penyelenggara pemilu, Pemda dan Polres pada dasarnya sudah memiliki perangkat IT, namun perangkat tersebut belum dilakukan sinkronisasi dan integrasi kepada seluruh unsur *hexa-helix* sehingga pertukaran informasi masih dilakukan secara manual.
10. Peran sebagai Dinamisator—Sebagai dinamisator, Polres Ketapang berperan menggerakkan dan mendorong partisipasi para *stakeholder* dalam pengamanan pemilu, di antaranya dengan pelatihan bersama unsur sentra gakkumdu bagi penyidik Polres, anggota Bawaslu dan JPU serta Deklarasi Pemilu Damai dan Berintegritas. Adapun kondisi faktual terkait peran Polres sebagai dinamisator pengamanan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:
11. Polres belum optimal dalam mendorong pertukaran informasi yang efektif dengan unsur Kominda untuk mendeteksi berbagai potensi kerawanan pemilu.
12. Polres belum optimal dalam mendorong peran polsek dan bhabinkamtibmas dalam pembentukan dan pembinaan jaringan untuk mendukung pulbaket informasi oleh polsek sebagai basis deteksi dan penanganan potensi gangguan keamanan pemilu serta dalam mendorong pelaksanaan polmas pemilu dan kolaborasi 3 pilar kamtibmas di tingkat desa.
13. Masih kurangnya upaya Polres dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengamanan Pemilu 2024 baik secara konvensional melalui siskamling, patroli bersama dan giat sambang maupun secara *online* dengan melakukan *cyber patrol*, penyebaran infografis pemilu aman dan melaporkan berbagai pelanggaran dan tindak pidana Pemilu.

**Upaya Pemecahan Masalah**

Upaya pemecahan masalah untuk mengoptimalkan kerjasama *hexa-helix* dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 memiliki tujuan sebagai berkut:

1. Meningkatkan interaksi antar unsur *hexa-helix* yang sinergis dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024.
2. Meningkatkan peran Polres Ketapang yang optimal dalam pengamanan Pemilu 2024.

Dalam mengimplementasikan upaya pemecahan masalah untuk mengoptimalkan kerjasama *hexa-helix* dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024, mengacu pada regulasi peraturan perundang-undangan dan pedoman lain sebagai berikut:

1. Pancasila dan UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan perubahannya (UU No 7 tahun 2023)
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
5. Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik atau Parpol
6. Perkap No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perkap No. 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Polri.
7. Perkap Nomor 12 tahun 2014 tentang Panduan-Penyusunan Kerjasama Polri
8. Program Prioritas Kapolri yaitu Transformasi Menuju Polri yang Presisi khususnya pada program Transformasi Organisasi dan Transformasi Operasional.
9. Rencana Kerja Polri 2023

Adapun implementasi strategi untuk mengoptimalkan kerjasama *hexa-helix* dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Strategi meningkatkan interaksi antar unsur Hexa-helix yang sinergis dalam mendukung Pengamanan Pemilu 2024**
2. Pemberdayaan dukungan unsur Pemerintah unsur FKPD kepada Polres dalam pengamanan Pemilu 2024

Sasarannya adalah meningkatnya dukungan unsur Pemerintah unsur FKPD kepada Polres dalam pengamanan Pemilu 2024. Program kerja yang dapat dilaksanakan untuk memberdayakan dukungan unsur Pemerintah unsur FKPD kepada Polres dalam pengamanan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pertemuan rutin antara pimpinan Polres Ketapang dengan unsur FKPD Ketapang dan pimpinan daerah lainnya untuk membangun koordinasi yang efektif serta penyamaan persepsi dan pola tindak dalam pengamanan Pemilu 2024 dengan target terselenggaranya pertemuan dan koordinasi unsur FKPD secara rutin minimal sebulan sekali.
2. Memastikan tersedianya dukungan SDM, anggaran dan sarana yang memadai secara kolaboratif untuk mendukung operasional dan kelancaran pengamanan Pemilu dengan target tersedianya SDM, anggaran dan sarpras yang memadai untuk pengamanan Pemilu.
3. Peningkatan sinergisitas kerjasama Polres dengan penyelenggara Pemilu khususnya KPUD dan Bawaslu.

Sasarannya adalah meningkatnya sinergisitas kerjasama Polres dengan penyelenggara Pemilu khususnya KPUD dan Bawaslu. Program kerja yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan sinergisitas kerjasama Polres dengan penyelenggara Pemilu khususnya KPUD dan Bawaslu adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi rutin antara pimpinan Polres, KPUD, dan Bawaslu untuk menjamin seluruh agenda Pemilu dapat terselenggara sesuai jadwal secara aman dengan target terlaksananya seluruh agenda Pemilu dapat terselenggara sesuai jadwal secara aman.
2. Pelatihan bersama unsur sentra Gakkumdu bagi penyidik Polres, anggota Bawaslu dan JPU dengan target terbangunnya kesamaan persepsi dan pola tindak pada tiap anggota sentra Gakkumdu khususnya penyidik Polres, anggota Bawaslu dan Jaksa.
3. Peningkatan peran Akademisi dan unsur NGO dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024

Sasarannya adalah meningkatnya peran Akademisi dan unsur NGO dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 melalui kontribusi pemikiran, analisis, dan partisipasi aktif dalam upaya menjaga keamanan. Adapun program kerja yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan peran Akademisi dan unsur NGO dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Selip Kamtibmas untuk menjaga keamanan Pemilu dalam setiap materi yang disampaikan oleh akademisi dan unsur NGO termasuk LSM dan Ormas keagamaan termasuk dalam kegiatan-kegiatan keagamaan (pengajian, khotbah dan lain sebagainya) dengan target pesan Kamtibmas diselipkan dalam setiap materi yang disampaikan unsur hexa-helix.
2. Program Ngobras (ngobrol bareng santai) bersama NGO termasuk LSM dan Ormas keagamaan dan unsur Hexa-helix lainnya untuk berbagi pemikiran terkait langkah-langkah strategis dalam mendukung pengamanan Pemilu dengan target terlaksananya kegiatan Ngobras (ngobrol bareng santai) sebulan sekali
3. Penguatan peran media massa dalam menjaga sitkamtibmas yang kondusif selama Pemilu 2024

Sasarannya adalah untuk meningkatnya peran media massa dalam menjaga sitkamtibmas yang kondusif selama Pemilu 2024 dengan memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Program kerja yang dapat dilaksanakan untuk memperkuat peran media massa dalam menjaga sitkamtibmas yang kondusif selama Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

1. Seminar jurnalisme Pemilu bagi jurnalis dan wartawan media massa mengenai etika jurnalistik dan penanganan berita sensitif selama Pemilu dengan target seluruh media mengirimkan utusan untuk mengikuti pelatihan etika jurnalistik Pemilu.
2. Edukasi literasi hukum jurnalistik untuk meningkatkan kesadaran media massa tentang peran dan tanggung jawab media dalam menjaga keamanan Pemilu.
3. Media monitoring untuk memastikan informasi yang disampaikan tidak memicu konflik dan diseminasi berita hoax yang dapat meresahkan masyarakat dengan target untuk menurunkan berita-berita yang bersifat provokatif atau hoax di media massa.
4. Peningkatan peran peserta Pemilu dalam memberikan edukasi politik dan menolak politik identitas

Sasarannya adalah untuk meningkatnya peran peserta Pemilu dalam memberikan edukasi politik dan menolak politik identitas. Adapun program kerja yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan peran peserta Pemilu dalam memberikan edukasi politik dan menolak politik identitas adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan kepemimpinan dan etika politik bagi calon dan kader Parpol tentang etika politik Pancasila dengan indikator 50% calon dan kader Parpol mengikuti pelatihan kepemimpinan dan etika politik.
2. Kerjasama edukasi politik yang berfokus pada pentingnya kontestasi Pemilu yang sehat dan adil, serta bahaya politik identitas bagi persatuan dan keutuhan bangsa dengan target minimnya insiden politisasi SARA dan isu primordial dalam kontestasi Pemilu.
3. Menyelenggarakna podcast Pemilu secara terpadu dengan unsur Hexa-helix untuk membangun pemahaman tentang pentingnya Pemilu yang aman, adil dan demokratis dengan target terlaksananya podcast Pemilu secara terpadu dengan unsur Hexa-helix setiap bulan.
4. **Strategi meningkatkan peran Polres Ketapang yang optimal dalam Pengamanan Pemilu 2024**

Strategi internal untuk meningkatkan peran Polres Ketapang yang optimal dalam Pengamanan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

1. Analisa dan evaluasi hasil pengamanan Pemilu di masa lalu yang aman dan kondusif secara kolaboratif

Sasarannya adalah untuk menyusun strategi pengamanan pada Pemilu 2024 berdasarkan analisis hasil pengamanan Pemilu sebelumnya. Program kerja yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan analisa dan evaluasi hasil pengamanan Pemilu di masa lalu yang aman dan kondusif secara kolaboratif adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan tim analisis yang terdiri dari perwakilan dari Polres, KPU, Bawaslu, akademisi, media dan Data Analyst profesional dengan indikator terbentuknya tim analisis dengan representasi lengkap dari berbagai instansi terkait.
2. Pengumpulan data dan informasi keberhasilan, tantangan, dan kegagalan yang dihadapi selama proses Pemilu dengan target terkumpulnya data dan informasi lengkap untuk keperluan analisis.
3. Perumusan rencana tindak lanjut dan pengembangan strategi dan taktik yang lebih efektif dalam menghadapi situasi Pemilu 2024 dengan target tersusunnya strategi pengamanan Pemilu 2024 yang lebih efektif dan adaptif.
4. Pembinaan kompetensi personel dalam melaksanakan Pengamanan Pemilu 2024

Sasarannya adalah untuk meningkatnya kompetensi personel Polres Ketapang dalam melaksanakan Pengamanan Pemilu 2024 secara profesional dan efektif. Beberapa program kerja yang dapat dilaksanakan untuk membina kompetensi personel dalam melaksanakan Pengamanan Pemilu 2024 diantaranya adalah:

1. Pelatihan khusus bagi personel Polres Ketapang tentang teknik dan taktik pengamanan Pemilu, termasuk penanganan situasi kontinjensi dan potensi konflik dengan indikator terlaksananya pelatihan khusus pengamanan Pemilu bagi seluruh personel yang dilibatkan dalam pengamanan pemilu.
2. Simulasi pengamanan Pemilu secara berkala, guna meningkatkan kesiapan dan responsivitas personel dalam menghadapi dinamika situasional dengan indikator terwujudnya kesiapan dan kecepatan respon personel menghadapi dinamika di lapangan.
3. Peningkatan peran Polsek dan Bhabinkamtibmas dalam mendukung kerjasama pengamanan Pemilu 2024.

Sasarannya adalah untuk meningkatnya peran Polsek dan Bhabinkamtibmas dalam mensinergikan dukungan pengamanan Pemilu 2024. Program kerja yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan peran Polsek dan Bhabinkamtibmas dalam mendukung kerjasama pengamanan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan dan pembinaan jaringan untuk mendukung pulbaket informasi oleh Polsek sebagai basis deteksi dan penanganan potensi gangguan keamanan Pemilu terdepan dengan indikator Terbentuk dan terbinanya jaringan informasi serta pertambahan kontak person oleh Polsek dan Bhabinkamtibmas.
2. Penguatan Polmas Pemilu dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan pemuda, dalam mendukung kegiatan pengamanan Pemilu dengan indikator meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pengamanan Pemilu.
3. Pembinaan kolaborasi 3 pilar Kamtibmas di tingkat Desa dalam pengamanan Pemilu dengan indikator terlaksananya kegiatan pengamanan Pemilu 2024 di tingkat desa oleh Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa.
4. Pemberdayaan teknologi informasi dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 oleh Polres Ketapang.

Sasarannya adalah meningkatnya dukungan teknologi informasi dalam pengamanan Pemilu 2024 untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsifitas pengamanan Pemilu. Adapun program kerja yang dapat dilaksanakan untuk memberdayakan teknologi informasi dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 oleh Polres Ketapang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Informasi Pemilu Terintegrasi sebagai media pengumpulan, analisis, dan pelaporan data terkait Pemilu dengan target terbangunnya Sistem Informasi Pemilu terintegrasi di Polres Ketapang.
2. Penggunaan teknologi analisis data big data, kecerdasan buatan (AI), integrasi API/ Application Programming Interface Google Map untuk memonitor dan menganalisis situasi kamtibmas secara real-time dengan target meningkatnya pemanfaatan teknologi big data dan kecerdasan buatan dalam pengawasan keamanan Pemilu.
3. Kerjasama dengan dengan vendor teknologi terkait dan prodi Teknik Informatika untuk memastikan teknologi tepat guna dalam pengamanan Pemilu dengan target terjalinnya kerjasama yang efektif dengan instansi teknologi terkait.
4. Penjabaran MoU dalam SOP kerjasama berdasarkan Perkap Panduan Kerjasama Polri untuk memperjelas pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab (TWT) masing-masing unsur Hexa-helix.

Sasarannya adalah meningkatnya kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab (TWT) masing-masing unsur Hexa-helix. Program kerja yang dapat dilaksanakan untuk memperjelas pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab (TWT) masing-masing unsur Hexa-helix adalah sebagai berikut:

1. Konsultasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media, untuk menyusun MoU yang mencerminkan kepentingan dari setiap unsur Hexa-helix dengan target terselesaikannya MoU sesuai Perkap Panduan Kerjasama Polri.
2. Penyusunan SOP kerjasama berdasarkan MoU yang telah disepakati, yang memuat rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing unsur Hexa-helix dengan target tersusunnya SOP kerjasama yang jelas dan terstruktur sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas, wewenang dan tanggung jawab.
3. Diseminasi, sosialisasi dan audit kepatuhan terkait implementasi SOP kerjasama dengan tagret terlaksananya kerjasama yang terkoordinasi dengan baik sesuai dengan SOP yang telah disusun.

**Kesimpulan dan Saran**

Interaksi antar unsur Hexa-helix dalam mendukung Pengamanan Pemilu 2024 pada dasarnya sudah berjalan baik dengan unsur pemerintah, Dunia usaha, Akademisi, Organisasi Non Pemerintah, Media Massa maupun aggregator termasuk Penyelenggara dan Peserta Pemilu dengan isu utama yaitu konflik kepentingan, minimnya partisipasi, politik identitas dan karakter masyarakat. Upaya pemcahan masalahnya diantaranya melalui penguatan peran media massa, peserta Pemilu, Akademisi dan unsur NGO, dukungan unsur Pemerintah serta penyelenggara Pemilu khususnya KPUD dan Panwaslu.

Peran Polres Ketapang dalam pengamanan Pemilu 2024 sudah cukup baik dan sesuai tupoksinya serta belum ditemukan adanya laporan isu netralitas maupun kurang profesional. Namun demikian masih terdapat sejumlah catatan terkait peran Polres sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator kerjasama Hexa-helix diantaranya yaitu kerjasama belum dibingkai dalam MoU akibat keterbatasan keterampilan legal drafting, belum optimal dalam memfasilitasi peserta Pemilu, Akademisi dan unsur NGO dan pembangunan Sistem Informasi Pemilu Terpadu, pertukaran informasi, pembentukan dan pembinaan jaringan serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian perlu dioptimalkan melalui Anev hasil pengamanan Pemilu, pemberdayaan teknologi informasi serta menjabarkan MoU dalam SOP kerjasama untuk memperjelas pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab (TWT) masing-masing unsur Hexa-helix.

Menyarankan kepada Kapolda Up Karoops untuk (1) menyegerakan pelatihan 13 kompetensi prioritas terkait dengan Pengamanan Pemilu, yaitu: Pelatihan penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*); Diskresi Kepolisian; Penanganan Konflik Sosial; PAM Pemilu; menembak; beladiri Polri; Polsek sebagai deteksi dini; penanganan radikalisme; PHH; Pengamanan VIP/VVIP; Jibom; Sistem Peradilan Penanganan Anak Serta Pengemudi VIP/VVIP; (2) mengembangkan Sistem Informasi Pemilu Terintegrasi sebagai media pengumpulan, analisis, dan pelaporan data terkait Pemilu yang didukung dengan teknologi analisis data big data, kecerdasan buatan (AI), integrasi API/ *Application Programming Interface* Google Map sehingga dapat memonitor dan menganalisis situasi kamtibmas secara real-time melalui pop-up notification; dan (3) menyelenggarakan Podcast Pemilu Aman Damai dan Demokratis, Program Ngobras dan Selip Kamtibmas di tingkat Polda dengan melbatkan seluruh unsur Hexa-helix sebagai nara sumber.

**Daftar Pustaka**

**Buku-buku**

Ansell, C., & Gash, A. 2008. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory, 543-571.

Camarihna-Matos, L.M. & Hamideh Afsarmanesh. 2008. *Concept of Collaboration*. USA: IGI Global.

Chryshnanda DL. 2023. Jejak Dialog Peradaban. Bandung: Penerbit Sespim Polri

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. 2012. *An Integrative Framework For Collaborative Governance*. Journal of Public Administration Research and Theory, 1-29.

Lindmark, A.; Sturesson. E.; and Nilsson R. M. 2009. *Collaboration for Innovation - A Study in the Öresund Region.* Sweden: Lund University Libraries.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. (Terjemahan. Jakarta: UI Press)

Moghaddam, Golnessa Galyani & Moballeghi, Mostafa. 2007. *The Importance of Aggregators for Libraries in the Digital Era.* Diakses tanggal 4 Oktober 2023 dari http://eprints.rclis.org/11331/1/The\_Importance\_of\_Aggregators\_for\_Libraries\_in\_the\_Digital%E2%80%A6.pdf

Pahlevi, A. S. 2017. Gagasan tentang pengembangan ekonomi kreatif nasional (studi pada potensi, peluang, dan tantangan ekonomi kreatif di kota Malang). Seminar Nasional Seni dan Desain, hlm 185-188.

Rangkuti, Freddy. 2013. Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI. Penerbit PT. Gramedia Pustaka.

Satari, F., Larasati, T., Putri, S. S., Shintia, I., Pempasa, I., Oktaviani, Y., Ramadhan, P., & Herawan, R. (2017). Indonesia Kreatif Animasi. In Bekraf. Badan Ekonomi Kreatif Indonesia.

Satria, Haris. 2022. Pengembangan Kota Kreatif Berbasis Lingkungan Berkelanjutan. Jakarta: Jejak Pustaka.

**Internet**

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/46918/presiden-buka-rakornas-kepala-daerah-dan-forkopimda-tahun-2023/0/berita>

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190521112908-106-396803/lima-negara-ricuh-karena-sengketa-pemilu>

<https://www.antaranews.com/berita/3320757/survei-lpi-2023-akan-menjadi-tahun-yang-berat>

<https://news.republika.co.id/berita/rl4n80436/tragedi-gugurnya-ratusan-petugas-kpps-berpotensi-terulang-di-pemilu-2024>.

**PENERAPAN METODE *MULTIPLE MACHINE LEARNING (HYBRID MODEL)* UNTUK MENDETEKSI LINK PHISHING SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DALAM MEMINIMALISIR KORBAN PENCURIAN DATA**

**1Mokhamad Fikri Alfawaid, 2Jarot Prianggono**

**1,2Program Studi S1 Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12160**

**e-mail:** [**alfawaidfikri@gmail.com**](mailto:alfawaidfikri@gmail.com)

**Abstrak**

Hegemoni yang dihasilkan dari meluasnya penggunaan teknologi dan media sosial tidak dapat dibendung. Di sisi lain, efek negatif dari dunia yang saling terhubung selalu ada di benak semua pengguna. Seperti halnya teknologi, kejahatan berevolusi dari waktu ke waktu, menciptakan ruang-ruang baru yang sebelumnya tidak berpenghuni. *Phishing*, salah satu bentuknya, telah menjadi momok yang menakutkan di dunia digital karena mengeksploitasi kerentanan terbesar di dunia maya: manusia. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian penulis dalam mengembangkan model *machine learning* (ML) untuk membantu mendeteksi dan mengenali tautan *phishing*, sekaligus mengusulkan penggunaan ML oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk membantu masyarakat dalam menghindari kejahatan *phishing*. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan ML dengan tiga (3) metode, yaitu Support Vector Machine (SVM), Decision Tree, dan Random Forest secara terpisah dan kombinasinya (hybrid model) dalam empat (4) area penilaian, yaitu tingkat akurasi, presisi, *recall*, dan nilai f1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model *hybrid* yang merupakan gabungan dari ketiga model ML, yaitu Decision Tree, Random Forest dan Support Vector Machine (SVM) mampu menunjukan performa yang lebih unggul dibandingkan dengan masing-masing model berdiri sendiri. Penulis merekomendasikan penggunaan model gabungan dan para peneliti yang berniat untuk melakukan penelitian yang serupa untuk memperkaya jumlah dataset yang digunakan agar hasil klasifikasi dan performa ML yang dihasilkan lebbih baik.

***Kata kunci: phishing; Machine Learning; Support Vector Machine (SVM); Decision Tree;***

***Random Forest; Hybrid Model***

***Abstract***

*The hegemony resulting from the widespread use of technology and social media cannot be stopped. On the other hand, the negative effects of an interconnected world are always present in the minds of all users. As with technology, crime evolves over time, creating new spaces that were previously uninhabited. Phishing, one of its forms, has become a terrifying spectre in the digital world because it exploits the greatest vulnerability in cyberspace: humans. This journal aims to present the results of the author's research into developing a machine learning (ML) model to assist in detecting and recognizing phishing links, while also proposing the use of ML by the National Police to assist citizens in avoiding phishing crimes. The research was conducted using the ML approach with three (three) methods, namely Support Vector Machine (SVM), Decision Tree, and Random Forest separately and their combination (hybrid model) in four (four) assessment areas, namely the level of accuracy, precision, recall, and scores f1. The research results show that the hybrid model which is a combination of three ML models, namely Decision Tree, Random Forest and Support Vector Machine (SVM) is able to show superior performance compared to each model standing alone. The author recommends the use of combined models and researchers who intend to conduct similar research to enrich the number of datasets used so that the resulting classification results and ML performance are better.*

***Keywords: phishing; machine learning; Support Vector Machine (SVM); decision tree; random forest; hybrid model.***

**Pendahuluan**

*Phishing* merupakan salah satu bentuk serangan siber yang paling sering digunakan oleh para pelaku kejahatan siber. *Phishing* sudah menjadi sebuah masalah yang berkepanjangan di dalam ruang maya sejak pertama kali serangan tersebut terjadi dan menyerang sebuah web portal America Online (AOL) sebagai pada tahun 1995 (James, 2006, dalam Chiew, Yong & Tan, 2018). Metode yang pertama digunakan adalah dengan berusaha mencuri data password penggunanya dan men-generate nomor kartu kredit secara random menggunakan algoritma tertentu. Kemudian akun tersebut digunakan untuk mengirimkan email *phishing* secara acak ke beberapa pengguna lain untuk mendapatkan data sensitif milik mereka. Pada akhirnya AOL berhasil menggagalkan serangan tersebut dengan mengaplikasikan langkah-langkah keamanan untuk mencegah metode yang sama terjadi.

*Link* *phishing* adalah link yang digunakan untuk menipu korban agar memberikan informasi sensitif, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya. Link phishing biasanya dikirim melalui email, pesan teks, atau media sosial. Link tersebut sering kali disamarkan sebagai link dari sumber yang tepercaya, seperti bank, perusahaan e-commerce, atau layanan pemerintah. Pencurian data adalah tindakan mengambil data sensitif dari seseorang atau organisasi tanpa izin. Data yang dicuri dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang merugikan, seperti penipuan, pemerasan, atau pencurian identitas.

*Link phishing* biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tautan yang mencurigakan: Tautan phishing biasanya memiliki URL yang tidak lazim atau terlihat mencurigakan. Misalnya, URL yang mengandung simbol atau huruf yang tidak biasa, atau URL yang tidak sesuai dengan domain situs web yang diklaimnya.
2. Pesan yang mendesak: Pesan phishing biasanya berisi pesan yang mendesak korban untuk bertindak segera, seperti “Akun Anda akan diblokir jika Anda tidak memperbarui informasi Anda sekarang.”
3. Gaya bahasa yang tidak formal: Pesan phishing biasanya ditulis dengan gaya bahasa yang tidak formal atau tidak profesional.

Berdasarkan laporan investigasi kebocoran data Verizon, serangan *phishing* masih menjadi jenis serangan yang paling sering digunakan dan berhasil dengan lebih dari 80% laporan insiden keamanan dan kebocoran data (Data Breach Investigations Report, 2021). Serangan *phishing* juga merupakan jenis serangan siber yang mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 65% dibandingkan dengan tahun sebelumnya berdasarkan laporan Anti-*Phishing* *Working Group* (APWG, 2021). Selain dari jumlah serangan yang terus meningkat, keadaan semakin diperparah dengan fakta bahwa serangan *phishing* tidak hanya memiliki dampak pada kerugian materiil namun juga non-materiil. Salah satu contoh kerugian materiil yang ditimbulkan oleh serangan *phishing* diantaranya laporan IBM mengenai Cost of Data Breach tahun 2022 (IBM, 2022) dimana, *phishing* memiliki proporsi jumlah serangan terbanyak kedua sebesar 16% dengan nominal kerugian $ 4.91 juta sepanjang tahun 2022. Sedangkan dampak non-materiilnya yaitu terjadinya 3.7 juta kebocoran data perbulan sejak Agustus 2020 hingga Juli 2021 di Amerika Serikat dengan 58.8% diantaranya terjadi pada penyedia jasa layanan kesehatan di Amerika Serikat (HIPAA, 2021).

Selama masa pandemi COVID-19 telah terjadi peningkatan tajam sebanyak 4-5 kali lipat terhadap tindak kejahatan siber melalui serangan *phishing* hal tersebut berdasarkan pada laporan transparansi Google (*Google Transparency Report*, 2021) Berbagai situs website mulai dari e-commerce, sosial media hingga situs perbankan tidak luput dari serangan *phishing*. Dalam melakukan serangan *phishing*, penyerang mencoba untuk memperoleh informasi sensitif dari korban, seperti *username*, *password*, nomor kartu kredit, atau informasi keuangan penting lainnya dengan memperdaya korbannya menggunakan link yang menipu. *Link phising* tersebut pada umumnya dikirim melalui email, pesan instan, atau media sosial.

*Phishing* tidak hanya digunakan sebagai bentuk serangan utama seorang pelaku kejahatan dunia maya dalam melakukan serangan. Tetapi *phishing* juga dapat dilakukan sebagai serangan pembuka untuk mengirimkan *payload* seperti *malware* baik itu *ransomware* maupun *spyware*. Selain itu, *phishing* juga kerap digunakan untuk digunakan sebuah *entry point* untuk memudahkan melakukan serangan pada target yang sebenarnya.

Sudah terdapat berbagai metode untuk menangani permasalahan terkait *phishing* tersebut, salah satu diantaranya adalah metode yang terbilang masih tradisional untuk mendeteksi link *phising* yaitu menggunakan metode blacklist dan whitelist untuk mengidentifikasi tautan yang aman atau tidak aman. Namun sayangnya, metode ini memiliki banyak keterbatasan dalam mendeteksi tautan *phising* yang baru dan seringkali tidak efektif dalam mengenali tautan *phising* yang tersembunyi di balik URL yang valid. Sehingga, dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan ML hadir sebagai solusi untuk mendeteksi tautan *phising* secara akurat dan otomatis.

Dalam penelitian ini, algoritma ML dilatih untuk mengenali pola dan karakteristik dari tautan *phising* sehingga dapat mengklasifikasikan tautan yang mencurigakan. Dimana, penulis menerapkan 3 algoritma ML yaitu *Support Vector Machine, Decision Tree, dan Random Forest* yang kemudian dikolaborasikan untuk menciptakan sebuah algoritma hybrid dalam mendeteksi tautan *phishing*. Penelitian ini ditujukan untuk meneliti dan menciptakan sebuah metode baru menggunakan penggabungan hasil dari 3 algoritma ML yang lebih efektif dan efisien dalam mendeteksi tautan palsu yang kerap digunakan dalam serangan *phishing*. Selain itu, penelitian tentang pengaplikasian ML untuk alat deteksi tautan *phising* ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam upaya pencegahan kejahatan siber dan perlindungan informasi sensitif baik bagi individu maupun organisasi yang dapat digunakan dan diaplikasikan pada institusi Polri.

Penelitian ini dilakukan menggunakan bahasa pemograman Python untuk membuat algoritma ML dengan menggunakan 1.677 *dataset* yang berisi 827 tautan *phishing* dan 850 tautan *non-phishing* untuk melatih model ML yang dibuat dengan rasio 80:20 untuk data *training* dan *test*. Dataset tersebut penulis dapatkan dari database milik Phishtank (Phishtank, 2021). Sebelum melatih model ML, penulis terlebih dahulu melakukan ekstraksi fitur dari masing-masing dataset dalam sebuah ekosistem *sandbox* pada OS Linux dengan menggunakan jaringan TOR. Selanjutnya, sebuah *pilot software* yang berbasis ekstensi *Google Chrome* dapat dibuat untuk menguji pengaplikasian model ML yang dibuat dalam kasus nyata.

Pada awal penelitian, penulis menggunakan 10.000 dataset *phishing* dan non-*phishing* URL. Namun, dalam proses ekstraksi fitur pertama kali terjadi beberapa kendala diantaranya lama waktu yang diperlukan untuk memproses ekstraksi fitur yang tidak kunjung berakhir, dimana hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti halaman web dari tautan yang sudah tidak aktif dan sistem keamanan yang cukup sensitif. Sehingga, hasil ekstraksi fitur pada percobaan pertama tidak begitu kuat untuk mengidentifikasi link *phising* dan non-*phishing*. Oleh sebab itu, penulis menetapkan *time-limit* pada percobaan yang kedua dan berhasil menghasilkan 1.677 dataset.

**Tinjauan Literatur**

**Teori Difusi Inovasi**

Teori difusi inovasi adalah teori yang menjelaskan bagaimana ide dan teknologi baru menyebar dalam suatu sistem sosial. Teori ini menjelaskan proses komunikasi dan adopsi inovasi melalui saluran tertentu dalam suatu sistem sosial sepanjang waktu. Teori ini dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul *Diffusion of Innovations*. Teori difusi inovasi didasarkan pada asumsi bahwa inovasi adalah suatu hal yang baru dan belum banyak diketahui, dan adopsi inovasi adalah proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

Pada dasarnya, teori ini mengasumsikan bahwa adopsi inovasi oleh masyarakat terjadi dalam pola yang bisa diprediksi. Beberapa kelompok orang akan mengadopsi inovasi segera setelah mereka mendengar tentang inovasi tersebut, sementara kelompok lainnya membutuhkan waktu lebih lama untuk mengadopsinya. Ketika sebuah inovasi banyak diadopsi oleh sejumlah orang, hal itu dikatakan sebagai difusi inovasi yang berhasil. Teori Difusi Inovasi juga mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan dan tingkat adopsi inovasi, seperti saluran komunikasi, ciri-ciri sistem sosial, kegiatan promosi, dan peran pemuka pendapat atau opinion leader.

Rogers membagi proses difusi inovasi menjadi lima tahap, yaitu:

1. Kesadaran (*awareness*): Tahap ini ditandai dengan munculnya kesadaran akan adanya inovasi.
2. Pemahaman (*interest*): Tahap ini ditandai dengan munculnya ketertarikan untuk mempelajari lebih lanjut tentang inovasi.
3. Evaluasi (*evaluation*): Tahap ini ditandai dengan munculnya penilaian terhadap manfaat dan risiko inovasi.
4. Percobaan (*trial*): Tahap ini ditandai dengan mencoba inovasi dalam skala kecil.
5. Adopsi (*adoption*): Tahap ini ditandai dengan penerimaan dan penggunaan inovasi secara penuh.

Rogers juga membagi individu-individu yang mengadopsi inovasi menjadi lima kategori, yaitu:

1. Pelopor (*Pioneer*): Individu yang pertama kali mengadopsi inovasi.
2. Pengadopsi Awal (*Early adopter*) Individu yang mengadopsi inovasi setelah pelopor, tetapi masih dalam kelompok awal.
3. Mayoritas Awal (*Early majority*): Individu yang mengadopsi inovasi setelah pengadopsi awal.
4. Mayoritas Akhir (*Late majority*): Individu yang mengadopsi inovasi setelah mayoritas awal.
5. Yang Tertinggal (*Laggard*): Individu yang mengadopsi inovasi paling akhir.

Teori difusi inovasi telah digunakan untuk menganalisis penyebaran berbagai macam inovasi, seperti teknologi baru, ide-ide baru, dan perilaku baru. Teori ini telah diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pemasaran, komunikasi, dan pengembangan masyarakat. Beberapa contoh penerapan teori difusi inovasi digunakan untuk:

1. Pemasaran: Teori difusi inovasi dapat digunakan untuk memahami bagaimana konsumen mengadopsi produk dan layanan baru.
2. Komunikasi: Teori difusi inovasi dapat digunakan untuk memahami bagaimana informasi dan ide-ide baru menyebar dalam masyarakat.
3. Pengembangan masyarakat: Teori difusi inovasi dapat digunakan untuk memahami bagaimana inovasi sosial menyebar di masyarakat.

Dalam konteks penerapan teori ini, difusi inovasi dapat terjadi dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Teori ini memberikan pemahaman tentang bagaimana inovasi dapat diterima dan menyebar di masyarakat, serta membantu dalam merencanakan strategi komunikasi dan pemasaran yang efektif untuk mempercepat adopsi inovasi.

Teori Difusi Inovasi adalah teori yang menjelaskan bagaimana ide atau gagasan baru dan teknologi tersebar dalam suatu kebudayaan melalui saluran tertentu sepanjang waktu. Teori ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi dan memberikan pemahaman tentang proses difusi inovasi dalam berbagai konteks. Teori difusi inovasi merupakan alat yang bermanfaat untuk memahami penyebaran inovasi. Teori ini dapat digunakan untuk memprediksi tingkat adopsi inovasi, serta untuk mengembangkan strategi untuk mempercepat penyebaran inovasi.

***Machine Learning* (ML) untuk Deteksi *Phishing* URL**

*Machine Learning* adalah cabang ilmu komputer yang mengeksplorasi algoritma dan strategi untuk mengotomatiskan solusi dari masalah rumit yang sulit diprogram menggunakan teknik pemrograman standar (Rebala, Ravi and Churiwala, 2019). ML bekerja dengan cara yang mirip. Algoritma ML dilatih pada set data yang besar dan terstruktur yang berisi contoh-contoh yang telah diberi label. Algoritma tersebut kemudian mempelajari pola dan hubungan dalam data tersebut sehingga dapat membuat prediksi atau keputusan baru pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

Data adalah elemen kunci dalam *machine learning*. Model-*machine learning* dipelajari dari data yang diberikan. Data ini dapat berupa berbagai jenis informasi, termasuk gambar, teks, suara, atau angka. Model-machine learning adalah struktur matematis atau komputasional yang digunakan untuk mewakili pengetahuan atau pola yang ditemukan dalam data. Model ini dapat berupa jaringan saraf tiruan, pohon keputusan, regresi, atau berbagai jenis struktur lainnya.

Algoritma *machine learning* adalah langkah-langkah matematis atau perhitungan yang dijalankan oleh model untuk mempelajari pola dari data. Algoritma ini mencakup proses pelatihan (*training)* di mana model dipelajari dari data, dan proses pengujian *(testing)* di mana model diuji pada data baru untuk melakukan prediksi atau klasifikasi. Dalam supervised learning, model dilatih dengan menggunakan data yang sudah diberi label, yang berarti bahwa setiap contoh data sudah diketahui output yang seharusnya. Tujuan model adalah untuk mempelajari hubungan antara input dan output sehingga dapat melakukan prediksi pada data baru.

*Unsupervised learning* tidak menggunakan label pada data pelatihan. Tujuan model adalah untuk menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data, seperti pengelompokan (*clustering*) atau reduksi dimensi. Reinforcement learning melibatkan model yang belajar melalui interaksi dengan lingkungan. Model menerima umpan balik (*reward* atau hukuman) berdasarkan tindakan yang diambilnya, dan tujuannya adalah untuk memaksimalkan kumulatif *reward*. Proses identifikasi dan pemilihan fitur (*features*) yang paling relevan dari data untuk memperbaiki kinerja model.

Beberapa literatur tentang penelitian terdahulu pada pemanfaatan ML dalam mendeteksi *phishing* telah diteliti dan dipelajari, antara lain:

1. Subasi, Molah, Almkallawi and Chaudhery (2017) meneliti performa beberapa model ML diantaranya ANN, KNN, SVM, Random Forest, dan C4.5 dalam mendeteksi *phishing*. Mereka berhasil memproduksi angka akurasi yang cukup tinggi dalam mendeteksi tautan *phishing*; model Random Forest adalah model yang paling akurat dengan tingkat akurasi 97.26%. *Dataset* yang digunakan dalam penelitiannya didapatkan dari University of California’s UCI repository dengan 30 fitur. Penelitian ini menguji performa masing-masing model ML berdasarkan akurasi, *f-measure and Receiver Operating Characteristics* (ROC).
2. Pandey, Gill, Sai Prasad Nadendla and Thaseen (2019) dalam penelitiannya menggabungkan model SVM dan Random Forest untuk menciptakan sebuah model hybrid. Model tersebut kemudian dilatih dan diuji pada 1.353 dataset URL dari *University of California, Irvine’s ML Repository*. Model *Random Forest* merupakan model yang paling akurat diantara kedua model tersebut (RF and SVM). Namun, jika dibandingkan antara model *hybrid* yang diciptakan dengan masing-masing model secara berdiri sendiri, model *hybrid* menunjukkan signifikansi dalam hal keakuratan. Selain akurasi tes yang dilakukan juga meliputi *f1, precision, correlation coefficient, true positive rate and true negative rate*.

Kemudian, dengan mempertimbangkan beberapa penelitian tersebut, penulis menetapkan untuk menggunakan 3 model ML dalam penelitian ini. Berikut adalah 3 model yang dipilih beserta alasan penggunaannya:

**Tabel 1. Model *Machine Learning***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ML Model | Alasan |
| 1 | *Support Vector Machine* (SVM) | Merupakan sebuag model *supervised learning* yang umum digunakan untuk kategorisasi, terkenal karena efisiensinya dalam mengkategorikan bidang dimensi yang beragam. |
| 2 | *Decision Tree* | Sebuah model ML yang banyak digunakan secara luas, model ini menggunakan struktur seperti pohon untuk mendeskripsikan peristiwa dan potensi konsekuensinya dalam berbagai konteks. |
| 3 | *Random Forest* | Model *ensemble learning* untuk klasifikasi, regresi dan masalah lainnya, dengan *output* berupa serangkaian pilihan acak untuk mewakili kelas mayoritas. |

**Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2023**

***Dataset* dan *Data Pre-Processing***

Penulis memperoleh himpunan data URL *phishing* dan non-*phising* dari repositori dari *Phishtank* dan *University of New Brunswick*. Penulis menggunakan 19 fitur untuk ekstraksi fitur yang telah dibuat oleh Lakshmi dan Vijaya (2021) dan Mohammad, Thabtah dan McCluskey (2012), sebagai berikut:

**Tabel 2. Fitur Adress Bar Himpunan Dataset**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Fitur Pada Address Bar** | **Indikator** | **Kesimpulan** |
| 1 | Menggunakan IP sebagai alamat URL | Jika ditemukan | *Phishing* |
| 2 | Menggunakan symbol ‘@’ pada alamat URL | Jika ditemukan | *Phishing* |
| 3 | Panjang URL | Lebih dari 54 karakter | *Phishing* |
| 4 | Kedalaman URL | Hitung simbol ‘/’ | - |
| 5 | URL redirection | Bila ditemukan posisi simbol “//” diluar dari urutan ke 6 dan 7 | *Phishing* |
| 6 | HTTPS palsu | Jika ditemukan | *Phishing* |
| 7 | Menggunakan URL shortening | Jika ditemukan | *Phishing* |
| 8 | Terdapat prefiks maupun sufiks symbol ‘-‘ | Jika ditemukan | *Phishing* |
| 9 | Jumlah subdomain | > 2 | *Phishing* |
| 10 | Jumlah parameter yang digunakan | Hitung jumlah query dalam URL | - |
| 11 | Jumlah period pada URL | Hitung jumlah simbol ‘.’ | - |
|  |  |  |  |
|  | Fitur pada Domain |  |  |
| 12 | Lakukan pengecekan DNS | Jika tidak ditemukan | *Phishing* |
| 13 | Cek web traffic (Alexa Rating) | Ranking > 100.000 | *Phishing* |
| 14 | Cek sertifikat SSL | Jika tidak ditemukan | *Phishing* |
| 15 | Cek umur domain | < 6 bulan | *Phishing* |
|  |  |  |  |
|  | Fitur berbasis pada HTML dan Javascript |  |  |
| 16 | Pengalihan Iframe | Jika ditemukan | *Phishing* |
| 17 | Kostumisasi bar status | Jika ditemukan | *Phishing* |
| 18 | Right-click dinonaktifkan | Jika ditemukan | *Phishing* |
| 19 | Website forwarding | Jika > 2 | *Phishing* |

**Sumber: *Phistank and University of New Brunswick repository* dan 19 fitur untuk ekstraksi olehLakshmi dan Vijaya (2021) dan Mohammad, Thabtah dan McCluskey (2012)**

Selanjutnya, untuk mengklasifikasikannya maka data yang sudah diekstrak akan diberikan kode 1 untuk fitur yang dicurigai merupakan sebuah *phishing* dan 0 untuk fitur non-*phishing*. Kemudian data yang sudah diekstrak penulis gunakan untuk melatih model ML.

**Metode Pengujian Model ML**

Pengujian model ML dilakukan dengan menguji performa berdasarkan 4 kriteria penilaian yaitu: akurasi, presisi, *recall, dan f1-score*. Dalam pengujian performa yang dilakukan penulis menitik beratkan pada didapatkannya performa model ML yang seimbang, oleh karena itu pengujian *f1-score* sangat dibutuhkan dalam pengujian ini (M.D. Hossain et al., 2020). Tabel dibawah menjelaskan masing-masing pengujian performa yang dilakukan beserta *confusion matrix*.

**Tabel 3. Nilai Klasifikasi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nilai diklasifikasikan positif** | **Nilai diklasifikasikan negatif** |
| *Actual Positive* | *True Positive* | *False Negative* |
| *Actual Negative* | *False Positive* | *True Negative* |

**Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2023**

**Tabel 4. 4 Kriteria Penilaian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pengujian** | **Formula** | **Deskripsi** |
| 1 | Akurasi | *True Positive* + True Negative  *nsamples* | Akurasi adalah jumlah TAPI dibandingkan dengan banyaknya data |
| 2 | Presisi | *True Positive*  *True Positive + False Positive* | Presisi dapat dinyatakan baik apabila FP memiliki pengaruh yang signnifikan |
| 3 | *Recall* | *True Positive*  *True Positive + False Negative* | *Recall* dikatakan baik apabila FN memiliki pengaruh yang signifikan |
| 4 | *F1-Score* | Presisi x Recall  Presisi + Recall | *F1-Score* diperlukan apabila model yang membutuhkan keseimbangan antara Presisi dan *Recall* |

**Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2023**

**Teknologi yang Digunakan**

Figur di bawah menjelaskan berbagai perangkat lunak, baik teknologi maupun *environment* yang Penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:



**Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2023**

**Gambar 1. Teknologi dan *Environment* yang digunakan Penulis pada penelitian ini**

**Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Research and Development* (RnD). Metode penelitian *Research and Development* (R&D) adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan produk, proses, atau sistem. Penelitian ini terbagi atas beberapa bagian dalam prosesnya, yaitu: Pertama, melakukan pendalaman latar belakang termasuk di dalamnya studi literatur dengan membaca dan mempelajari beberapa penelitian terdahulu pada area penelitian yang sama serta menentukan teknologi yang akan digunakan. Kedua, proses pengumpulan dataset berupa link *phising* dan non-*phishing*. Ketiga, melakukan data pre-processing dengan metode ekstraksi fitur. Keempat, menyiapkan dan melatih 3 model ML (SVM, *Decision Tree, dan Random Forest*), Kelima, menyiapkan algoritma penggabungan 3 model ML untuk menciptakan model hybrid. Keenam, pengujian masing-masing model baik model yang berdiri sendiri maupun model hybrid berdasarkan 4 area penilaian (akurasi, presisi, *recall dan f1-score*). Ketujuh, analisis dan evaluasi hasil penelitian terhadap keempat model ML tersebut.

A picture containing text, font, screenshot, line

Description automatically generated

**Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2023**

**Gambar 2. Konsep Metode penelitian *Research and Development(*R&D)**

**Hasil dan Pembahasan**

Link *phishing* dan pencurian data adalah bentuk serangan siber yang umum digunakan oleh penjahat dunia maya untuk mencuri informasi pribadi atau rahasia dari individu atau organisasi. Link *phishing* adalah teknik di mana penyerang mencoba untuk mendapatkan informasi rahasia, seperti nama pengguna, kata sandi, atau rincian keuangan, dengan menyamar sebagai entitas tepercaya. Ini sering dilakukan melalui email, pesan teks, atau media sosial, di mana korban diminta untuk mengklik tautan yang sebenarnya mengarah ke situs web palsu yang dirancang untuk mengekstrak informasi pribadi.

Link *phishing* sering digunakan sebagai salah satu metode untuk melakukan pencurian data. Pelaku *phising* akan mengirimkan *email*, pesan teks, atau pesan lain yang mengelabui pengguna agar mengklik tautan palsu yang mengarah ke situs web palsu yang menyerupai situs asli. Ketika pengguna memasukkan informasi pribadi mereka ke dalam situs palsu tersebut, data tersebut akan dicuri oleh pelaku *phising*. Cara umum di mana *link phishing* dapat dilakukan dengan:

1. *Email Phishing*: Penyerang mengirimkan email yang terlihat sah, sering kali menyamar sebagai layanan atau organisasi yang dikenal, dan meminta korban untuk mengklik tautan yang sebenarnya menuju situs palsu.
2. *Spear Phishing*: Jenis serangan ini melibatkan pendekatan yang lebih terfokus, di mana penyerang menargetkan individu atau organisasi tertentu dengan pesan yang dikustomisasi agar terlihat meyakinkan.
3. *Smishing (SMS Phishing)*: Serangan ini melibatkan penggunaan pesan teks atau SMS untuk mengarahkan korban ke situs *phishing*.
4. *Social Media Phishing*: Penyerang dapat menggunakan pesan atau tautan palsu di platform media sosial untuk mengecoh korban.

Pencurian data merupakan aksi mengambil, mengakses, atau mengumpulkan informasi pribadi atau rahasia tanpa izin, meliputi data pribadi, informasi keuangan, informasi medis, atau bahkan rahasia perusahaan. Pencurian data dapat terjadi melalui berbagai metode, termasuk serangan siber yang meliputi:

1. Serangan *Malware*: Penyebaran perangkat lunak berbahaya, seperti virus, trojan, atau ransomware, untuk mengakses dan mencuri data dari sistem korban.
2. Pengambilan Fisik: Pencurian perangkat penyimpanan, laptop, atau perangkat mobile yang berisi data sensitif.
3. Serangan *Man-in-the-Middle*: Penyerang mencuri atau menyadap data saat berpindah antara dua pihak yang berkomunikasi.
4. Pencurian Identitas: Penggunaan informasi pribadi seseorang untuk mendapatkan akses ke akun atau layanan lainnya.

Baik *link phishing* dan pencurian data, dapat menjadi ancaman serius terhadap keamanan informasi. Penting bagi individu dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran akan risiko ini, mengadopsi praktik keamanan siber yang baik, dan menggunakan alat keamanan seperti perangkat lunak *antivirus, firewall*, dan enkripsi untuk melindungi data mereka (Clarke, 2010).

Pencurian data dapat memiliki konsekuensi serius bagi korban, termasuk pencurian identitas, penipuan keuangan, atau penggunaan data pribadi untuk tujuan jahat lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk selalu waspada terhadap *link phishing* dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi data pribadi mereka, seperti tidak mengklik tautan yang mencurigakan, menggunakan kata sandi yang kuat, dan mengaktifkan fitur keamanan tambahan seperti otentikasi dua faktor.

*Link phishing* adalah tautan palsu yang dirancang untuk menipu pengguna agar mengungkapkan informasi pribadi mereka, sementara pencurian data adalah tindakan mengambil atau mengakses data pribadi seseorang tanpa izin. *Link phishing* sering digunakan sebagai metode untuk melakukan pencurian data, dan pengguna perlu waspada dan melindungi data pribadi mereka dari ancaman ini.

Sedangkan *Machine Learning* (ML) adalah cabang dari kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang berkaitan dengan pengembangan algoritma dan model komputer yang dapat belajar dari data dan melakukan tugas-tugas tertentu tanpa perlu secara eksplisit diprogram. Tujuan utama dari *machine learning* adalah untuk mengembangkan sistem yang dapat mengenali pola, membuat prediksi, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan (Zhang dkk., 2014).

Pada dasarnya, *machine learning* melibatkan penggunaan algoritma dan model statistik untuk melatih komputer agar dapat mengenali pola dan membuat prediksi berdasarkan data yang diberikan. Proses ini melibatkan dua tahap utama: tahap pelatihan (*training*) dan tahap pengujian (*testing*). Pada tahap pelatihan, model machine learning diberikan data yang telah dilabeli (*labeled data*) dan menggunakan algoritma untuk menyesuaikan parameter agar dapat mengenali pola dalam data tersebut. Setelah pelatihan selesai, model tersebut dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau mengklasifikasikan data baru pada tahap pengujian.

Ada beberapa jenis pendekatan dalam *machine learning*, termasuk *supervised learning, unsupervised learning,* dan *reinforcement learning*. Dalam *supervised learning*, model *machine learning* dilatih menggunakan data yang telah dilabeli dengan benar, sedangkan dalam *unsupervised learning*, model tersebut belajar dari data yang tidak dilabeli untuk menemukan pola atau struktur yang tersembunyi. Sementara itu, *reinforcement learning* melibatkan interaksi model dengan lingkungan untuk belajar melalui percobaan dan umpan balik.

*Machine learning* memiliki berbagai aplikasi yang luas, termasuk pengenalan wajah, pengenalan suara, analisis data, prediksi pasar, pengenalan pola, dan banyak lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan dalam teknologi komputasi dan ketersediaan data yang besar telah mendorong kemajuan pesat dalam bidang *machine learning*.

*Multiple Machine Learning (Hybrid Model)* merupakan pendekatan di mana dua atau lebih jenis metode atau model pembelajaran mesin digabungkan untuk meningkatkan kinerja dan keefektifan sistem. *Hybrid models* atau model hibrida mengintegrasikan kekuatan berbagai pendekatan pembelajaran mesin untuk menangani kompleksitas masalah yang lebih baik daripada model tunggal. Contoh umum dari *hybrid model* melibatkan kombinasi antara model parametrik dan model non-parametrik, model generatif dan model diskriminatif, atau bahkan gabungan antara pembelajaran terawasi dan tidak terawasi.

Dalam *multiple machine learning*, model-model yang berbeda dapat digunakan secara bersamaan atau secara bergantian. Misalnya, dapat digunakan kombinasi antara model regresi logistik, *decision tree*, dan *neural network* untuk meningkatkan kinerja prediksi. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan berbagai teknik dan algoritma yang paling sesuai untuk setiap tugas atau masalah yang dihadapi. Salah satu contoh penerapan *multiple machine learning* adalah pada deteksi anomali. Dalam penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, mereka menggunakan metode *multiple machine learning* yang menggabungkan *deep learning* dan *machine learning* tradisional untuk meningkatkan deteksi anomali.

*Multiple machine learning*, atau *hybrid model*, adalah teknik yang menggabungkan dua atau lebih model *machine learning* yang berbeda untuk meningkatkan kinerja. Teknik ini dapat digunakan untuk mengatasi berbagai macam tantangan dalam *machine learning*, seperti kurangnya data, data yang tidak seimbang dan kompleksitas data. *Hybrid model* dapat digunakan untuk menggabungkan data dari berbagai sumber untuk meningkatkan kinerja model. *Hybrid model* dapat digunakan untuk menggabungkan model yang lebih baik dalam menangani data yang tidak seimbang. *Hybrid model* dapat digunakan untuk menggabungkan model yang lebih baik dalam menangani data yang kompleks. Beberapa contoh konsep *hybrid model* dalam konteks *machine learning*, antara lain:

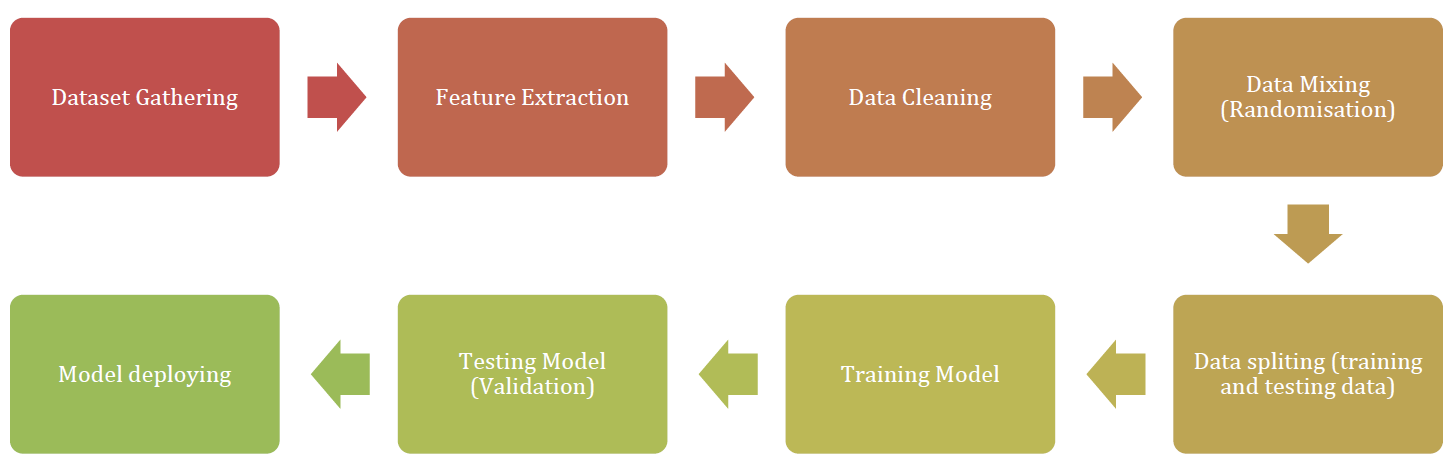
1. *Ensemble Learning*: adalah salah satu bentuk *hybrid model* yang paling umum. *Ensemble learning* melibatkan penggabungan hasil dari beberapa model pembelajaran mesin untuk meningkatkan performa keseluruhan. Contoh termasuk *Random Forest*, yang menggabungkan beberapa pohon keputusan, dan *Boosting*, di mana model yang lemah digabungkan untuk membentuk model yang lebih kuat.
2. *Transfer Learning*: Model *transfer learning* menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari satu tugas pembelajaran untuk meningkatkan kinerja pada tugas pembelajaran lainnya. Ini dapat melibatkan penggunaan model yang telah dilatih sebelumnya dan disesuaikan dengan tugas tertentu.
3. *Neuro-Fuzzy Systems*: *Hybrid model* ini menggabungkan konsep dari jaringan saraf (*neural networks*) dan sistem logika *fuzzy*. Sistem *neuro-fuzzy* dapat memanfaatkan kelebihan jaringan saraf, seperti kemampuan untuk memodelkan pola kompleks, dengan kelebihan sistem logika *fuzzy*, seperti kemampuan untuk menangani ketidakpastian dan ambiguitas.
4. *Genetic Algorithms + Machine Learning*: Algoritma genetika dapat digunakan untuk mengoptimalkan parameter model dalam konteks pembelajaran mesin. *Hybrid model* ini dapat membantu menemukan konfigurasi parameter yang optimal untuk model pembelajaran mesin.
5. *Rule-Based Learning + Neural Networks*: Dalam beberapa kasus, model hibrida dapat menggabungkan aturan-aturan berbasis pengetahuan dengan kemampuan pembelajaran mendalam dari jaringan saraf. Ini dapat membantu menggabungkan pengetahuan eksplisit manusia dengan kemampuan adaptasi dan generalisasi dari model *neural networks*.

Dalam konteks lain, *multiple machine learning* juga dapat digunakan dalam analisis data tak terstruktur. Data tak terstruktur adalah data yang tidak memiliki format yang terstruktur seperti teks, gambar, atau suara. Dalam analisis data tak terstruktur, multiple machine learning dapat digunakan untuk menggabungkan berbagai teknik dan algoritma yang paling sesuai untuk menganalisis dan memahami data tersebut.

*Multiple machine learning (hybrid model)* adalah pendekatan dalam *machine learning* di mana beberapa metode atau model *machine learning* digabungkan untuk meningkatkan kinerja dan akurasi prediksi. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan berbagai teknik dan algoritma yang paling sesuai untuk setiap tugas atau masalah yang dihadapi.

**Alur ML *Deployment***

Proses penyusunan model ML dimulai dari pengumpulan dataset URL *phishing* dan non-*phishing*. Selanjutnya, penulis melakukan proses ekstraksi fitur terhadap dataset yang ada berdasarkan 19 fitur ada pada bagian data *pre-processing*. Data yang sudah diekstraksi kemudian dibersihkan untuk menghapus data dengan nilai *null* atau *error*, setelah itu data dibagi menjadi 2 set untuk *training* dan *testing* dari model ML yang dibuat. Setelah data dibagi menjadi 2 set penulis melatih model ML yang dibuat menggunakan dataset untuk training serta men-*deploy* model ML tyang sudah dilatih. Figur di bawah mengilustrasikan *flowchart* dari proses pelatihan model ML, *testing* hingga *deployment*. Dalam proses ekstraksi fitur penulis menyiapkan sebuah program berbasis bahasa *python* untuk mempercepat prosesnya menggunakan fungsi *looping* yang terotomatisasi. Proses ekstraksi fitur merupakan bagian terpenting untuk menghasilkan kualitas model ML yang baik. Dikarenakan proses ekstraksi fitur memerlukan *request* dan perintah *whois* pada *phishing* URL maka proses tersebut penulis lakukan pada sebuah *environment* terisolasi di dalam sebuah *sandbox*. Penulis menggunakan *Operating System (OS) Kali Linux* dalam sebuah *virtual box* dengan menggunakan jaringan *TOR* dan *Whonix gateway* yang dikombinasikan dengan *VPN* pada OS utamanya.



**Sumber: Hasil Olahan Penulis**

**Gambar 3. Alur *ML Deployment***

**Performa Model ML**

Dalam proses pengujian performa model ML yang dibuat, pada proses *data cleaning* penulis menghapus beberapa fitur dari *dataset* untuk menghindari bias dari model ML untuk membedakan URL *Phishing* dan *nonphishing*. Beberapa fitur yang dihapus dan alasan dihapusnya fitur rersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Alasan fitur yang dihapus**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fitur yang Dihapus** | **Alasan** |
|  | Jumlah tak tersembunyi | Hampir separuh data mengalami nilai *timeout* |
|  | Jumlah *hyperlink* | Hampir separuh data mengalami nilai *timeout* |
|  | Jumlah *inframe* | Hampir separuh data mengalami nilai *timeout* |
|  | *Script* untuk menon-aktifkan *right-click* | Hampir tidak ada perbedaan antara URL *phishing* dan non-*phishing* |

**Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2023**

Selanjutnya, dataset dibagi menjadi 2 (dua) dengan rasio 80:20 untuk training dan testing terhadap 3 model ML yang sebelumnya sudah disampaikan pada bab sebelumnya. Kemudian masing-masing model yang telah dilatih dievaluasi tingkat akurasi, presisi, *recall* dan skor f1 nya dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 6. Hasil Latihan model ML**

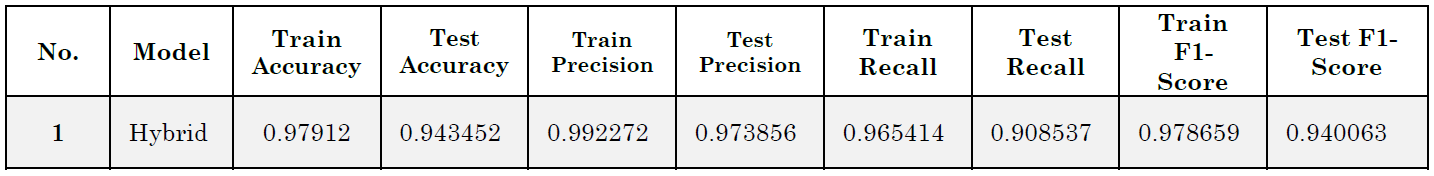
A picture containing text, font, line, number

Description automatically generated

**Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2023**

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat dilihat bahwa model RF memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan kedua model yang lain. Ketiga model ML tersebut selanjutnya dikombinasikan untuk menciptakan sebuah model ML baru, dan dilakukan pengujian yang sama terhadap model tersebut dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 7. Hasil Uji Model ML Baru**



**Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2023**

Simulasi training model ML dan pengujian performa yang dilakukan dalam penelitian ini sudah diunggah secara online pada platform *IDE Google Colab* yang dapat dilihat dengan melakukan *scan* pada kode qr berikut atau dengan mengakses link berikut: <https://tinyurl.com/y5ywr299>.

A qr code on a white background

Description automatically generated

**Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2023**

**Gambar 4. *Qr Code* Simulasi Training model ML**

**Kesimpulan dan Saran**

Secara umum, model ML yang diciptakan dalam penelitian ini menunjukan hasil yang baik dengan performa yang mumpuni. Model hybrid yang merupakan gabungan dari ketiga model ML yaitu *Decision Tree, Random Forest dan Support Vector Machine* (SVM) mampu menunjukan performa yang lebih unggul dibandingkan dengan masing-masing model berdiri sendiri. Skor yang didapatkan dari tes performa dari model hybrid yang dibuat diantaranya akurasi 94%, presisi 97% dan *recall* 96%. Model hybrid yang diciptakan juga mampu menunjukan skor f1 sebesar 94% yang mengindikasikan bahwa model tersebut memiliki keseimbangan antara presisi dan *recall-*nya.

Berkaca pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menyarankan para peneliti yang berniat untuk melakukan penelitian yang serupa untuk memperkaya jumlah dataset yang digunakan agar hasil klasifikasi dan performa ML yang dihasilkan lebbih baik. Selain itu dalam data *pre-processing* peneliti juga dapat mengimbuhkan beberapa teknik ekstraksi fitur yang lain untuk meningkatkan kualitas dari ekstraksi fitur pada masing-masing URL seperti penggunaan citra dari tampilan suatu situs *web* agar diketahui ciri suatu situs web *phishing* tidak hanya dari URL saja.

**Daftar Pustaka**

Anti *Phishing* Working Group. (2016). *Phishing Activity Trends Report 4th 2016.*

Chiew, K.L., Yong, K.S.C. and Tan, C.L. (2018). A survey of phishing attacks: Their types, vectors and technical 'approaches', *Expert Systems with Applications, 106, pp. 1–20.*

Clarke, R. (2010). Situational Crime Prevention: Successful Case Studies, 2nd ed. Boulder: Lynne Rienner.

Google. (2021). *Google Transparency Report 2021.*

Hossain, M. D. et al. (2020). 'LSTM-Based Intrusion Detection System for In-Vehicle Can Bus 'Communications', *IEEE Access, 8, pp. 185489–185502.*

IBM. (2022). *Cost of Data Breach 2022.*

Journal, H. (2021). *July 2021 Healthcare Data Breach Report*. HIPAA Journal.

Kabir, M., Tayan, O., Alginahi, Y., Hasan, M. and Rahman, M. (2019). *On the development of a web extension for text authentication on Google Chrome 2019*. International Conference on Electrical, Computer and Communication Engineering (ECCE), Cox'sBazar.

Lakshmi, V. and Vijaya, M. (2012). Efficient prediction of phishing websites using supervised learning algorithms. *Procedia Engineering, 30, 798-805.*

Mohammad, R., Thabtah, F. and McCluskey, L. (2012). *Phishing Websites Features.* University Of Huddersfield Repository.

Pandey, A., Gill, N., Sai Prasad Nadendla, K. and Thaseen, I. (2019). Identification of Phishing Attack in Websites Using Random Forest-SVM Hybrid Model. *Advances In Intelligent Systems And Computing, 120-128.*

Phishtank. (2021). *Phishing Website Dataset. csv.*

Rebala, G., Ravi, A. and Churiwala, S. (2019). *Machine Learning Definition and Basics. An* introduction to machine learning. 1st ed. Springer, pp.1-17.

Rogers, Everett M. (1964). *Diffusion of innovations.* New York: Free Press of Glencoe.

Subasi, A., Molah, E., Almkallawi, F. and Chaudhery, T. (2017). *Intelligent phishing website detection using random forest classifier.* International Conference on Electrical and Computing Technologies and Applications (ICECTA). Ras Al Khaimah: IEEE.

Zhang, X., Zeng, Y., Jin, X. B., Yan, Z.W. and Geng, G. G. (2014). Boosting the Phishing Detection Performance by Semantic Analysis, in IEEE International Conference on Big Data (BIGDATA), 2014, pp. 1063-1070.

**PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA: KETIDAKADILAN**

**KEMANUSIAAN DAN DAMPAK SOSIALNYA**

**Dien Fahrur Romadhoni**

**Program Studi Sarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12160**

**e-mail: dienromadhoni@gmail.com**

**Abstrak**

Perdagangan organ tubuh manusia adalah masalah serius yang mengancam prinsip-prinsip kemanusiaan, dengan dampak yang meluas pada individu yang terlibat, masyarakat, dan sistem kesehatan. Hal ini melibatkan eksploitasi individu yang rentan secara ekonomi dan mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, masalah ini menciptakan ketidak setaraan akses terhadap transplantasi organ, merusak sistem perawatan kesehatan, dan memengaruhi persepsi masyarakat tentang etika dalam bidang kesehatan. Diperlukan upaya serius untuk mengatasi masalah perdagangan organ tubuh manusia ini dan melindungi hak asasi manusia serta prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasar. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis perdagangan ilegal organ tubuh manusia melalui analisa unsur ketidak adilan kemanusiaan dan dampak sosialnya. Penulis menggunakan teori sosiologi kriminal, teori kejahatan organisasi dan teori eksploitasi. Metode penulisan artikel ini dilaksanakan melalui pendekatan kulitatif, dengan teknik pengambilan data secara studi kepustakaan. Hasil penulisan artikel menunjukkan bahwa perdagangan ilegal organ manusia adalah praktik ilegal yang melanggar hukum, etika, dan hak asasi manusia. Fenomena ini berkembang karena berbagai faktor, seperti ketidak setaraan ekonomi dan permintaan organ yang tinggi. Dampaknya pada korban dan keluarganya sangat serius, melibatkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup perlindungan hukum, perawatan medis, dan dukungan psikososial bagi korban, serta upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Selain itu, perdagangan ilegal organ manusia juga memengaruhi pandangan masyarakat tentang etika dan kemanusiaan, dengan menghadirkan isu-isu etis dan moral yang kompleks. Dalam menghadapi tantangan ini, masyarakat harus mencari solusi yang memadukan perlindungan HAM, keadilan sosial, dan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan.

***Kata kunci: perdagangan organ tubuh manusia; dampak sosial***

**Abstract**

*Human organ trafficking is a serious problem that threatens humanitarian principles, with widespread impacts on the individuals involved, society, and health systems. This involves the exploitation of economically vulnerable individuals and leads to human rights violations. Additionally, these issues create inequities in access to organ transplants, undermine the health care system, and influence public perceptions of ethics in healthcare. Serious efforts are needed to address the problem of human organ trafficking and protect human rights and basic humanitarian principles. The purpose of writing this article is to analyze the illegal trade in human organs through analyzing the elements of humanitarian injustice and its social impacts. The author uses criminal sociology theory, organizational crime theory and exploitation theory. The method for writing this article was carried out through a qualitative approach, using data collection techniques using library research. The results of the article show that illegal trade in human organs is an illegal practice that violates law, ethics and human rights. This phenomenon is growing due to various factors, such as economic inequality and high demand for organs. The*

*impact on victims and their families is very serious, involving physical, psychological, social and economic aspects. To overcome this problem, a holistic approach is needed that includes legal protection, medical care and psychosocial support for victims, as well as stronger prevention and law enforcement efforts. In addition, the illegal trade in human organs also affects society's views on ethics and humanity, by presenting complex ethical and moral issues. In facing this challenge, society must look for solutions that combine human rights protection, social justice and awareness of human values.*

***Keywords: human organ trafficking; social impacts***

**Pendahuluan**

Organ tubuh manusia memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup individu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, isu perdagangan organ tubuh manusia menjadi salah satu masalah yang mendalam dan kompleks. Perdagangan organ tubuh manusia menciptakan dampak yang signifikan pada aspek kemanusiaan dan masyarakat secara keseluruhan. Perdagangan organ tubuh manusia sering kali melibatkan eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Organ tubuh diambil dari individu tanpa persetujuan yang bebas, informasi yang memadai, atau kompensasi yang layak. Hal ini merupakan suatu ketidakadilan kemanusiaan yang harus diungkap dan dihentikan (Adham dan Khaled, 2005).

Pembunuhan Blanca Arellano sudah jadi sensasi dunia. Wanita 51 tahun itu diduga jadi korban perdagangan organ tubuh manusia. Mengenaskannya, dia dibunuh oleh kekasih *online*nya yang baru saja ia temui. Blanca Arellano adalah wanita asal Meksiko yang suka bermain *game online*. Lewat permainan *online* tersebut, Blanca bertemu dengan Juan Pablo Jesus Villafuerte. Perjalanan 3.000 mil dari Meksiko ke kota Huacho, Peru dilakoni Blanca untuk menjumpai kekasih *online*nya itu. Dia meninggalkan Meksiko sejak bulan Juli dan masih sering memberikan kabar ke keluarganya. Namun kontak terakhir Blanca terjadi pada 7 November. Pihak keluarga langsung mencari keberadaan Blanca. Ketika Karla menanyakan keberadaan bibinya ke Juan, pria tersebut mengatakan bahwa Blanca bosan dengan hubungan mereka dan memilih untuk pulang ke Meksiko. Nyatanya, Blanca tidak diketahui rimbanya. Saat ditemukan organ Blanca sudah tidak utuh. Mayat Blanca diidentifikasi berkat sebuah cincin yang terdampar dekat jasadnya yang merupakan milik wanita Meksiko tersebut. Menurut investigator, jasad Blanca dibuang ke laut setelah dimutilasi. Polisi menemukan darah di kamar mandi, ruang cuci dan tempat tidur Juan. Pada tanggal 17 November, Juan Pablo Jesus Villafuerte ditangkap sehubungan dengan pembunuhan Blanca Arellano. Dalam masa Blanca Arellano dilaporkan menghilang, Juan diduga sempat memposting sebuah video di *TikTok* yang menampilkan dirinya membedah organ manusia, termasuk otak manusia. Dugaan mengarah organ tersebut adalah milik Blanca Arellano (detik.com, 2022).

Fenomena perdagangan organ tubuh manusia tidak hanya merusak prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasar, tetapi juga menghadirkan berbagai masalah sosial yang mempengaruhi beragam aspek kehidupan manusia. Hal ini mencakup dampak pada sistem kesehatan, struktur sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Oleh karena itu, penulisan artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dan memahami secara holistik permasalahan perdagangan organ tubuh manusia serta implikasinya terhadap kemanusiaan dan masyarakat.

Dalam beberapa negara, perdagangan organ tubuh manusia terjadi karena berbagai alasan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, dan kebijakan yang lemah dalam mengatur perdagangan organ. Praktik ini sering kali melibatkan eksploitasi individu yang rentan secara ekonomi, dengan mengeksploitasinya untuk mendapatkan organ tubuh mereka yang akan dijual di pasar-pasar ilegal.

Ketidakadilan kemanusiaan yang terkait dengan perdagangan organ tubuh mencakup pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi, dan pencabutan organ tubuh tanpa persetujuan yang sah. Penulisan artikel ini akan menggali lebih dalam dampak psikologis dan fisik pada individu yang menjadi korban perdagangan organ tubuh, serta bagaimana masyarakat dan lembaga terkait menangani permasalahan ini. Selain itu, perdagangan organ tubuh juga memiliki dampak sosial yang luas, seperti menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap layanan transplantasi organ yang layak, menyebabkan ketidakpercayaan pada sistem kesehatan, dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap etika dalam bidang kesehatan. Penulisan artikel ini akan mencoba merinci dampak-dampak sosial ini dan bagaimana mereka memengaruhi masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu utama yang mendorong penulisan artikel tentang perdagangan organ tubuh manusia adalah kurangnya pasokan organ yang tersedia untuk transplantasi. Banyak orang yang membutuhkan transplantasi organ, seperti jantung, ginjal, hati, dan paru-paru, tetapi pasokan organ yang tersedia jauh lebih sedikit daripada permintaan. Hal ini dapat mengarah pada keputusan ekstrem untuk mencari organ melalui perdagangan ilegal (Yea dan Sallie, 2010).

Banyak individu yang berakhir sebagai "penyumbang" organ dalam perdagangan organ tubuh manusia berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah. Mereka sering kali menjadi sasaran pengeksploitasi oleh sindikat perdagangan organ yang menawarkan bayaran yang relatif kecil untuk organ mereka. Penulisan artikel ini membahas dampak eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi yang mendasari perdagangan ini.

Perdagangan organ tubuh manusia juga memiliki dampak sosial yang luas, termasuk mendorong tindakan kriminal, merusak integritas sistem perawatan kesehatan, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem transplantasi organ yang sah. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menggali dampak sosial ini secara mendalam. Masalah etika dan hukum yang berkaitan dengan perdagangan organ tubuh manusia sangat kompleks. Penulisan artikel ini dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran etika dan hukum yang terjadi serta mencari solusi dan rekomendasi untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Penulisan artikel tentang perdagangan organ tubuh manusia sangat penting untuk memahami akar permasalahan ini, dampaknya terhadap masyarakat, dan bagaimana kita dapat mencegahnya serta mempromosikan sistem transplantasi organ yang adil dan kemanusiaan. Dengan memahami secara mendalam permasalah perdagangan organ tubuh manusia dan dampaknya, penulisan artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyusun solusi yang lebih baik dan efektif untuk menangani permasalahan ini. Upaya perlindungan hak asasi manusia, penguatan sistem regulasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat dapat menjadi langkah-langkah kunci dalam mengatasi perdagangan organ tubuh manusia dan memastikan prinsip-prinsip kemanusiaan tetap terjaga.

**Kajian Literatur**

**Perdagangan organ manusia**

Apa itu perdagangan organ? Ketika seorang pasien menderita kegagalan organ dan semua intervensi medis telah dilakukan, transplantasi organ dapat menjadi satu-satunya cara untuk tetap hidup. Ini memulai pencarian donor organ yang kompatibel. Donor hidup seringkali adalah anggota keluarga atau teman dekat. Donasi organ juga dapat berasal dari orang yang telah meninggal yang telah meninggalkan izin terdokumentasi untuk menjadi donor organ. Dalam proses donasi organ etis seperti itu, tidak ada seorang pun yang memperoleh keuntungan finansial dari donasi organ tersebut (<http://theexodusroad.com>). Namun kebutuhan global akan organ saat ini jauh lebih besar dibandingkan pasokannya, menurut Global Observatory on Donation and Transplantation, 2020. Lebih dari 150.000 transplantasi dilakukan setiap tahun di seluruh dunia, namun jumlah ini kurang dari 10% dari kebutuhan global. Beberapa pasien yang sakit rela melanggar hukum dan membayar biaya transplantasi organ, meskipun hal tersebut melibatkan eksploitasi orang-orang yang rentan dan miskin. Istilah “Perdagangan Organ” dan “Perdagangan Orang untuk Pengambilan Organ” sebenarnya mewakili dua kejahatan yang sangat berbeda dengan implikasi hukum yang berbeda. “Perdagangan Organ” mengacu pada penanganan organ secara ilegal. Misalnya, menjual organ untuk mendapatkan keuntungan atau mengiklankan kesediaan untuk membeli atau menjual organ adalah perdagangan organ.

Laman the Exodus Road menjelaskan bahwa perdagangan orang untuk pengambilan organ adalah ketika seseorang yang rentan dieksploitasi, ditipu, dipaksa, atau dianiaya karena penggunaan organ tubuhnya secara tidak sah. Organ tersebut bahkan tidak perlu diambil agar kejahatan ini dapat terjadi, karena perdagangan manusialah yang merupakan kejahatan tersebut. Lalu seberapa lazimkah perdagangan organ? Lama yang sama menjelaskan bahwa perdagangan organ, termasuk transplantasi organ ilegal, menghasilkan pendapatan yang signifikan, dengan perkiraan konservatif tahunan antara USD $840 juta hingga USD $1,7 miliar dan 12.000 transplantasi ilegal. Sekitar 10% dari seluruh transplantasi diyakini merupakan transplantasi ilegal. Perdagangan organ jauh lebih jarang terjadi dibandingkan perdagangan tenaga kerja atau perdagangan seks, sebagian karena tingginya tingkat pengetahuan medis dan koordinasi yang diperlukan agar kejahatan dapat terjadi. Namun, para ahli menyatakan bahwa besarnya masalah ini sulit untuk dilacak karena kejahatan sering kali terjadi dalam jaringan layanan medis yang sah dengan profesional medis yang bersertifikat secara hukum. “Meskipun perdagangan manusia untuk pengambilan organ tubuh bukanlah fenomena baru, hal ini tidak dilaporkan karena sifat kejahatannya yang bersifat rahasia, ditambah dengan kurangnya kesadaran lembaga penegak hukum dan kurangnya saluran pertukaran informasi antara sektor medis dan kepolisian,” kata Cyril Gout, Direktur Dukungan Operasional dan Analisis INTERPOL (theexodusroad.com).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada ytahun 2007 melalui laman resminya (<https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/UNODC_Assessment_Toolkit_TIP>) memperkirakan bahwa dari seluruh transplantasi di seluruh dunia, 5–10% di antaranya berhasil dilakukan secara illegal (Haken, 2011). Pada tahun 2011, diperkirakan terjadi ‘perdagangan organ’ illegal menghasilkan keuntungan ilegal antara USD 600 juta dan USD 1,2 miliar per tahun (Shimazono, 2007). ‘Pasar organ’ bawah tanah menghadirkan ancaman besar terhadap keamanan nasional sistem donasi organ, mengikis citra transplantasi dan masyarakat kepercayaan terhadap transplantasi organ di seluruh dunia.

**Teori Sosiologi Kriminal**

Teori Sosiologi Kriminal adalah pendekatan teoretis yang digunakan untuk memahami kenapa orang melakukan tindakan kriminal, bagaimana tindakan tersebut dapat dijelaskan dari sudut pandang sosial, dan bagaimana masyarakat dan lembaga-lembaga sosial mempengaruhi perilaku kriminal. Teori ini menekankan bahwa tindakan kriminal tidak hanya dipahami sebagai masalah individu, tetapi juga sebagai hasil dari faktor-faktor sosial yang lebih luas. Teori ini menekankan pentingnya struktur sosial dalam membentuk perilaku kriminal. Struktur sosial mencakup segala sesuatu mulai dari status sosial, kelas ekonomi, etnisitas, dan pendidikan. Teori sosiologi kriminal mengajukan bahwa faktor-faktor ini dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk terlibat dalam perilaku kriminal (ten Have, 2013).

Salah satu teori terkenal dalam sosiologi kriminal adalah teori Strain yang dikembangkan oleh Robert K. Merton. Teori ini mengatakan bahwa tindakan kriminal dapat terjadi ketika individu mengalami ketegangan antara tujuan sosial yang diharapkan (misalnya, sukses ekonomi) dan sarana yang sah untuk mencapainya. Ketika individu merasa terhalang dalam mencapai tujuan tersebut, mereka dapat mencari alternatif ilegal untuk mencapainya. Teori ini juga memperhatikan peran kontrol sosial dalam mencegah tindakan kriminal. Kontrol sosial mencakup norma-norma sosial, nilai-nilai, dan lembaga-lembaga yang membentuk perilaku individu. Ketika kontrol sosial melemah atau kurang efektif, risiko terjadinya tindakan kriminal dapat meningkat.

Teori ini menyoroti bagaimana tindakan kriminal terkadang dapat dipicu oleh proses pemberian label oleh masyarakat atau sistem hukum. Ketika individu diberi label sebagai "penjahat" atau "kriminal," hal ini dapat mempengaruhi identitas mereka dan mengarah pada lebih banyak perilaku kriminal. Teori ini menunjukkan bahwa ketidak setaraan sosial dan konflik antara berbagai kelompok dalam masyarakat dapat menciptakan kondisi yang mendorong tindakan kriminal. Ketidak setaraan ekonomi, rasial, atau gender dapat memainkan peran penting dalam mendorong konflik sosial dan tindakan kriminal.

Teori ini berfokus pada perilaku devian (menyimpang), yang mencakup perilaku yang dianggap melanggar norma sosial. Teori ini mencoba menjelaskan mengapa individu memilih untuk melanggar norma sosial dan bagaimana perilaku tersebut berkembang dalam masyarakat. Praktik ilegal seperti perdagangan gelap organ tubuh manusia dianggap perilaku devian karena melanggar norma sosial dan hukum. Teori Perilaku Devian dapat membantu memahami bagaimana individu yang terlibat dalam praktik ini memilih untuk melanggar norma sosial dan bagaimana perilaku tersebut berkembang dalam Masyarakat. Dalam konteks perdagangan gelap organ tubuh manusia, teori Sosiologi Kriminal dapat membantu kita memahami faktor-faktor sosial yang memengaruhi terjadinya praktik ilegal ini, serta bagaimana masyarakat dan lembaga-lembaga sosial dapat berperan dalam mencegah dan menangani masalah tersebut. Struktur sosial, seperti ketidak setaraan ekonomi dan akses terbatas ke layanan kesehatan, dapat memengaruhi terjadinya perdagangan gelap organ tubuh manusia. Orang-orang dari lapisan masyarakat yang lebih miskin mungkin lebih rentan terhadap tawaran kompensasi finansial yang menarik untuk menyumbangkan organ mereka.

Teori Strain mencakup ide bahwa individu mungkin mencari sarana alternatif, termasuk tindakan ilegal seperti perdagangan organ, ketika mereka merasa terhalang dalam mencapai tujuan ekonomi atau kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, orang-orang yang membutuhkan uang untuk mengatasi kesulitan keuangan mereka mungkin terdorong untuk terlibat dalam perdagangan organ tubuh. Kontrol sosial yang kurang efektif atau ketidakmampuan sistem peradilan pidana untuk menindak pelaku perdagangan organ dapat menciptakan lingkungan di mana praktik ilegal ini dapat berkembang. Selain itu, terdapat situasi di mana lembaga medis atau pihak yang terlibat dalam sistem transplantasi dapat melanggar etika dan hukum, dan kurangnya kontrol sosial yang memadai dapat memungkinkan hal ini terjadi.

Teori Etiket menyoroti bagaimana pemberian label "penyumbang organ ilegal" atau "penerima organ ilegal" dapat mempengaruhi perilaku individu. Beberapa orang yang terlibat dalam perdagangan gelap organ mungkin telah diberi label sebagai "penjahat" oleh masyarakat atau sistem hukum, yang dapat memperumit situasinya dan memicu lebih banyak perilaku ilegal. Dalam situasi di mana terdapat ketidak setaraan ekonomi atau ketidak setaraan akses terhadap perawatan kesehatan, konflik sosial dapat berkembang. Perdagangan gelap organ tubuh manusia dapat menjadi salah satu hasil dari konflik sosial ini, dengan individu yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mencari keuntungan finansial.

Teori sosiologi kriminal memungkinkan untuk memahami tindakan kriminal sebagai hasil dari berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi, bukan hanya sebagai masalah individu. Dalam konteks penelitian mengenai perdagangan organ tubuh manusia, teori ini dapat membantu menganalisis faktor-faktor sosial yang mungkin memengaruhi individu untuk terlibat dalam praktik ilegal seperti itu serta bagaimana masyarakat dan sistem hukum dapat berperan dalam pencegahan dan penanganannya.

**Teori Kejahatan Organisasi**

Teori kejahatan organisasi adalah pendekatan dalam sosiologi kriminal yang berkaitan dengan studi tentang bagaimana kelompok-kelompok kriminal terorganisasi dan bagaimana mereka beroperasi. Teori ini berfokus pada kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki struktur hierarki dan tujuan kriminal yang terkoordinasi. Teori ini memandang kejahatan organisasi sebagai aktivitas kriminal yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi yang terstruktur. Organisasi ini dapat mencakup mafia, kartel narkoba, sindikat perdagangan organ, dan kelompok kriminal terorganisasi lainnya (Wyatt dan Tanya, 2009).

Salah satu karakteristik utama dari organisasi kejahatan adalah adanya struktur hierarki. Ini berarti bahwa ada tingkatan dalam organisasi, mulai dari pemimpin tertinggi hingga anggota biasa. Pemimpin biasanya memiliki kekuasaan besar dan mengambil keputusan strategis. Organisasi kejahatan memiliki tujuan kriminal yang terorganisir. Tujuan ini dapat mencakup pencucian uang, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, perdagangan organ, penipuan keuangan, dan banyak lagi. Organisasi ini beroperasi untuk mencapai keuntungan finansial atau kepentingan kriminal lainnya. Anggota organisasi kejahatan bekerja sama dan mengkoordinasikan aktivitas mereka untuk mencapai tujuan kriminal. Ini dapat mencakup distribusi narkoba, penggelapan uang hasil kejahatan, atau penyelenggaraan operasi perdagangan organ. Organisasi kejahatan cenderung memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi dan akan melindungi anggotanya dari hukum. Mereka sering menggunakan ancaman atau tindakan kekerasan untuk menjaga kerahasiaan dan disiplin dalam organisasi.

Organisasi kejahatan sering memiliki hubungan yang kompleks dengan penegak hukum dan pejabat pemerintah. Mereka dapat mencoba mempengaruhi atau membujuk pejabat pemerintah untuk menghindari penegakan hukum terhadap mereka. Banyak organisasi kejahatan memiliki operasi internasional dan beroperasi di berbagai negara. Mereka dapat menggunakan perbatasan internasional untuk menghindari penegakan hukum dan memperluas jaringan perdagangan ilegal mereka. Organisasi kejahatan sering memiliki sumber daya finansial yang besar, yang berasal dari kegiatan ilegal mereka seperti perdagangan narkoba atau penipuan. Keuntungan ini sering digunakan untuk membiayai operasi mereka dan untuk membujuk atau menakuti individu atau lembaga yang mungkin mengancam organisasi tersebut.

Dalam konteks perdagangan gelap organ tubuh manusia, teori kejahatan organisasi sangat relevan untuk memahami bagaimana praktik ilegal ini terorganisir dan beroperasi. Praktik perdagangan gelap organ tubuh manusia sering kali melibatkan organisasi kejahatan yang memiliki struktur hierarki. Ada pemimpin atau perantara tingkat atas yang mengoordinasikan seluruh operasi dan memutuskan berbagai aspek, seperti harga organ, metode pengambilan organ, dan bagaimana organ tersebut akan dijual. Organisasi ini memiliki tujuan kriminal yang jelas, yaitu menghasilkan keuntungan finansial dari perdagangan organ tubuh manusia. Mereka dapat mencari keuntungan dari penjualan organ ke penerima yang membutuhkan atau dapat mengambil organ secara ilegal dari donor tanpa persetujuan atau kompensasi yang layak. Para pelaku dalam perdagangan gelap organ tubuh manusia bekerja sama dan mengkoordinasikan aktivitas mereka. Ini mencakup pencarian calon donor, pengambilan organ, transportasi organ, dan penjualan organ. Semua ini memerlukan koordinasi yang cermat. Organisasi ini biasanya berusaha menjaga kerahasiaan operasi mereka dan melindungi identitas anggota serta pelanggan mereka. Mereka dapat menggunakan ancaman atau kekerasan untuk menjaga kerahasiaan dan menekan saksi atau anggota yang ingin keluar. Organisasi perdagangan gelap organ tubuh manusia sering memiliki hubungan yang rumit dengan penegak hukum dan pejabat pemerintah. Mereka dapat mencoba mempengaruhi atau membujuk pejabat pemerintah untuk menghindari penegakan hukum terhadap mereka, seperti inspeksi medis atau penyelidikan.

Organisasi ini menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan dari perdagangan organ tubuh manusia. Keuntungan ini sering digunakan untuk membiayai operasi ilegal mereka dan membujuk individu yang rentan atau bermasalah finansial untuk terlibat. Beberapa organisasi perdagangan organ tubuh manusia dapat memiliki operasi internasional. Mereka dapat mencari donor atau pembeli di negara lain dan memanfaatkan perbatasan internasional untuk menghindari penegakan hukum. Teori Kejahatan Organisasi sangat penting dalam memahami dinamika kelompok kriminal terorganisasi dan bagaimana mereka beroperasi. Studi tentang kejahatan organisasi membantu penegak hukum dan masyarakat umum untuk memahami bagaimana mereka dapat menghadapi ancaman yang dihadirkan oleh organisasi kejahatan, serta bagaimana mencegah, mengungkap, dan menindak tindakan kejahatan semacam itu. Penerapan Teori Kejahatan Organisasi dalam konteks perdagangan gelap organ tubuh manusia membantu kita memahami bahwa praktik ini bukanlah tindakan sporadis individu, melainkan aktivitas yang terorganisir secara serius dengan tujuan keuntungan kriminal. Ini juga memungkinkan penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan strategi pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk melawan perdagangan gelap organ tubuh manusia.

**Teori Eksploitasi**

Teori Eksploitasi adalah kerangka teoretis yang digunakan dalam ilmu sosial untuk memahami situasi di mana individu atau kelompok eksploitatif menggunakan kekuasaan atau sumber daya mereka untuk memanfaatkan individu atau kelompok yang lebih lemah secara ekonomi, sosial, atau politik. Teori ini mencakup konsep pemanfaatan yang tidak adil, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan dalam hubungan antara individu atau kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Pada dasarnya, eksploitasi merujuk pada tindakan atau praktik di mana satu pihak memanfaatkan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan atau kekayaan yang tidak adil, sering kali dengan cara yang merugikan atau merendahkan pihak yang dieksploitasi. Teori Eksploitasi menggarisbawahi ketidaksetaraan dan ketidakadilan sebagai fitur penting dalam situasi eksploitasi. Ketidaksetaraan ini bisa bersifat ekonomi, sosial, atau politik. Misalnya, eksploitasi ekonomi terjadi ketika pekerja dibayar upah yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya dari pekerjaan mereka (Mendoza dan Roger, 2011).

Eksploitasi sering kali terkait dengan ketidaksetaraan dalam hal kekuasaan dan kontrol. Pihak yang memanfaatkan biasanya memiliki lebih banyak kekuasaan atau kontrol atas sumber daya, informasi, atau kesempatan dibandingkan dengan pihak yang dieksploitasi. Individu atau kelompok yang melakukan eksploitasi cenderung mencari keuntungan atau keuntungan ekonomi dari situasi tersebut. Ini bisa mencakup pengeksploitasi pekerja dengan membayar upah rendah sambil memperoleh keuntungan besar. Selain eksploitasi ekonomi, ada juga eksploitasi sosial, yang melibatkan penindasan, diskriminasi, atau pengabaian terhadap kelompok sosial tertentu berdasarkan karakteristik seperti ras, gender, agama, atau orientasi seksual. Ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi tingkat dan jenis eksploitasi yang terjadi, termasuk struktur ekonomi, hukum, budaya, dan kebijakan sosial. Misalnya, sistem ekonomi yang tidak mengatur dengan baik atau melindungi hak pekerja dapat memicu eksploitasi pekerja.

Eksploitasi dapat memiliki akibat yang merugikan bagi individu atau kelompok yang dieksploitasi, seperti kemiskinan, ketidak setaraan, ketidak adilan, dan hilangnya hak-hak asasi manusia. Hal ini juga dapat merusak hubungan sosial dan masyarakat secara keseluruhan. Teori Eksploitasi sering kali dikaitkan dengan konsep pemberdayaan (*empowerment*), yaitu memberikan individu atau kelompok yang dieksploitasi alat dan sumber daya untuk melawan eksploitasi dan mencapai keadilan. Dalam konteks perdagangan gelap organ tubuh manusia, Teori Eksploitasi sangat relevan untuk memahami bagaimana individu atau kelompok yang lebih kuat secara ekonomi atau sosial dapat memanfaatkan individu yang lebih lemah, terutama para donor organ, untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Praktik perdagangan gelap organ tubuh manusia sering kali melibatkan pengambilan keuntungan ekonomi yang tidak adil oleh para pelaku, termasuk perantara dan calon penerima organ. Para donor organ, terutama jika mereka berasal dari lapisan masyarakat yang lebih miskin, sering kali hanya mendapatkan bayaran yang sangat rendah atau bahkan tidak sama sekali, sedangkan nilai organ yang mereka sumbangkan bisa sangat tinggi.

Calon donor organ sering kali berada dalam situasi ekonomi atau sosial yang rentan. Mereka mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke perawatan kesehatan atau pendidikan, sehingga terbatas dalam pilihan mereka. Pihak yang mengatur perdagangan gelap organ dapat memanfaatkan ketidaksetaraan ini dengan menawarkan uang sebagai insentif untuk menyumbangkan organ mereka. Beberapa donor organ mungkin dieksploitasi secara emosional atau psikologis dengan cara yang memaksa mereka untuk menyumbangkan organ mereka tanpa persetujuan yang benar atau tanpa pemahaman penuh tentang risiko dan konsekuensinya. Mereka dapat diintimidasi atau diancam untuk terlibat dalam praktik tersebut. Para donor organ yang dieksploitasi dapat mengalami dampak yang merugikan fisik, emosional, dan sosial. Mereka mungkin mengalami komplikasi medis akibat pengambilan organ, trauma psikologis, dan stigmatisasi dalam masyarakat. Praktik perdagangan gelap organ tubuh manusia sering melibatkan tindakan ilegal dan serius yang melanggar hak asasi manusia. Ini termasuk penculikan, penjualan organ tanpa persetujuan yang sah, perdagangan manusia, dan pelanggaran hukum lainnya.

Para perantara atau penyelenggara perdagangan gelap organ tubuh manusia sering memiliki kekuasaan dan kontrol atas proses tersebut. Mereka dapat memanipulasi situasi dan mengendalikan proses penerimaan organ, pengambilan organ, dan penjualan organ. Pihak yang dieksploitasi sering kali memiliki sedikit kekuasaan dalam situasi tersebut. Dengan menggunakan Teori Eksploitasi dalam konteks perdagangan gelap organ tubuh manusia, kita dapat mengidentifikasi bagaimana individu yang lebih lemah secara sosial atau ekonomi dieksploitasi dalam praktik tersebut dan bagaimana praktik ini menghasilkan ketidak setaraan, ketidak adilan, dan dampak merugikan. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami akar permasalahan, memprotes perdagangan ilegal ini, dan bekerja menuju solusi yang mencegah eksploitasi dalam perdagangan organ tubuh manusia.

**Metodologi Penelitian**

Penulis, dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang merupakan istilah umum untuk serangkaian sikap dan strategi untuk melakukan penyelidikan yang ditujukan untuk menemukan bagaimana manusia memahami, mengalami, menafsirkan, dan menghasilkan dunia sosial (Sandelowski, 2004). Penelitian kualitatif adalah suatu proses penyelidikan naturalistik yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial secara alami (Hendryadi, Tricahyadinata, & Zannati, 2019). Penulisan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana peneliti berupaya mendapatkan data-data yang relevan melalui kajian kepustakaan serta bahan-bahan literatur lainnya

**Hasil dan Pembahasan**

**Perkembangan Praktik Perdagangan Ilegal Organ Manusia**

Perdagangan ilegal organ manusia adalah praktik illegal, di mana organ tubuh manusia diperoleh, diperdagangkan, atau diberikan secara ilegal dalam sebuah pasar yang tidak sah atau tanpa persetujuan yang sah dari donor organ. Praktik ini melibatkan penjualan, pembelian, atau perantaraan dalam perdagangan organ tubuh manusia dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya. Perdagangan ilegal organ manusia sering kali melibatkan tindakan yang melanggar hukum, etika, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Schwartz dkk., 2010).

Pembunuhan Blanca Arellano yang diduga terlibat dalam perdagangan organ tubuh manusia adalah sebuah kejadian yang mencengangkan dan memunculkan berbagai pertanyaan terkait dengan kejahatan ini. Kejadian ini menciptakan sensasi dunia karena unsur-unsur yang sangat kontroversial, seperti perkenalan melalui permainan online, perjalanan jarak jauh, dan dugaan keterlibatan dalam perdagangan organ manusia. Blanca Arellano adalah seorang wanita berusia 51 tahun asal Meksiko yang terlibat dalam permainan online. Melalui permainan ini, dia bertemu dengan Juan Pablo Jesus Villafuerte, yang kemudian menjadi kekasih onlinenya. Blanca melakukan perjalanan sejauh 3.000 mil dari Meksiko ke kota Huacho, Peru, untuk bertemu dengan Juan Pablo. Kontak terakhir dengan Blanca terjadi pada 7 November. Keluarga mulai mencari keberadaannya setelah itu.

Blanca Arellano diduga menjadi korban perdagangan organ tubuh manusia, yang menciptakan ketidakadilan kemanusiaan yang sangat serius. Organ Blanca ditemukan tidak utuh ketika mayatnya ditemukan, menguatkan dugaan tersebut. Dugaan ini diperkuat oleh fakta bahwa Juan Pablo Jesus Villafuerte sempat memposting video di TikTok yang menampilkan dirinya membedah organ manusia, termasuk otak manusia. Dugaan mengarah pada organ-organ yang mungkin milik Blanca Arellano. Mayat Blanca Arellano diidentifikasi berkat sebuah cincin yang ditemukan dekat jasadnya. Pada pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan tanda-tanda mutilasi pada tubuh Blanca, dan jasadnya diduga dibuang ke laut setelah kematian. Polisi menemukan jejak darah di beberapa tempat di tempat tinggal Juan Pablo, termasuk kamar mandi, ruang cuci, dan tempat tidur, yang menunjukkan adanya tindak kekerasan. Pada 17 November, Juan Pablo Jesus Villafuerte ditangkap oleh pihak berwenang dalam kaitannya dengan pembunuhan Blanca Arellano.

Kasus ini menggambarkan bagaimana perdagangan organ tubuh manusia dapat menyebabkan tindakan kekerasan yang mengerikan dan mengancam nyawa individu yang rentan. Selain itu, peran media sosial seperti TikTok dalam memperlihatkan aktivitas yang tidak etis atau ilegal juga menjadi perhatian. Kasus ini juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas dan upaya internasional untuk memberantas perdagangan organ tubuh manusia serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ini adalah peristiwa tragis yang harus dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan tindakan preventif terhadap praktik kejahatan semacam ini. Perkembangan praktik perdagangan ilegal organ manusia adalah sebuah fenomena yang sangat kompleks dan memprihatinkan dalam masyarakat modern. Praktik ini melibatkan perolehan, pengambilan, dan penjualan organ tubuh manusia tanpa izin atau prosedur medis yang sah. Salah satu faktor utama yang memengaruhi perkembangan perdagangan ilegal organ adalah ketidak setaraan ekonomi di berbagai negara. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem mungkin melihat penjualan organ sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi masalah finansial mereka.

Kekurangan organ yang tersedia untuk transplantasi di seluruh dunia telah memicu peningkatan permintaan terhadap organ. Banyak pasien yang membutuhkan transplantasi organ harus menunggu lama sebelum mendapatkan donor yang cocok, dan ini dapat mendorong mereka untuk mencari organ secara ilegal. Beberapa kasus perdagangan ilegal organ melibatkan peran tenaga medis yang tidak etis atau korup. Dokter atau petugas kesehatan yang terlibat dalam praktik ini dapat membantu menyusun operasi pengambilan organ atau memfasilitasi perdagangan ilegal. Kurangnya regulasi atau penegakan hukum yang lemah dalam beberapa negara juga telah menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi perdagangan ilegal organ. Ini memungkinkan sindikat dan individu untuk beroperasi dengan lebih bebas tanpa takut penegakan hukum.

Internet telah memungkinkan praktik perdagangan ilegal organ untuk berkembang secara global. Penjualan organ dapat diatur melalui *platform online*, yang memungkinkan perantara dan calon penerima organ untuk berhubungan dengan donor potensial. Banyak kasus perdagangan ilegal organ melibatkan eksploitasi dan kekerasan terhadap donor organ. Donor sering kali mendapatkan bayaran yang sangat rendah atau bahkan tidak sama sekali, sementara pihak perantara memperoleh keuntungan besar. Beberapa donor bahkan dapat menjadi korban penculikan atau penipuan. Pasar gelap organ tubuh manusia menjadi semakin menguntungkan dengan peningkatan permintaan dan kurangnya pasokan organ yang legal. Calon penerima organ yang membutuhkan transplantasi dapat menjadi korban penipuan dan terlibat dalam perdagangan ilegal tanpa menyadari risiko yang terlibat. Individu yang hidup dalam kemiskinan dan ketidak setaraan ekonomi cenderung lebih rentan terhadap praktik perdagangan ilegal organ karena mereka dapat dijanjikan kompensasi finansial yang relatif tinggi.

Dalam perdagangan ilegal organ, organ tubuh manusia, seperti ginjal, hati, paru-paru, atau bahkan jaringan tubuh lainnya, dapat dijual kepada pihak yang membutuhkan organ tersebut. Donor organ seringkali dipaksa atau diberikan imbalan finansial yang tidak pantas. Individu yang terlibat dalam perdagangan ilegal organ manusia seringkali merupakan orang-orang yang rentan secara ekonomi atau sosial. Mereka dapat dipaksa atau diancam untuk menjual organ mereka atau organ keluarga mereka. Hal ini sering kali merupakan bentuk eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Perdagangan ilegal organ manusia seringkali menciptakan ketidak setaraan akses terhadap transplantasi organ yang layak. Orang-orang yang memiliki uang atau sumber daya memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan organ yang mereka butuhkan daripada yang tidak mampu, yang dapat menciptakan ketidak adilan dalam sistem kesehatan. Dalam beberapa kasus, perdagangan ilegal organ melibatkan perantara atau sindikat yang mengorganisir seluruh transaksi. Mereka dapat mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan ini dan seringkali beroperasi di luar batas hukum. Organ tubuh apa yang paling sering diperdagangkan? laman yang dikelola oleh the Exodus Road mengungkapkan bahwa ginjal adalah yang paling umum di “pasar organ”, diikuti oleh hati dan kornea. Pasar negara berkembang tersedia untuk telur manusia, kulit, embrio manusia, dan plasma darah. Dimana saja perdagangan organ terjadi? Perdagangan Orang untuk Pengambilan Organ Tubuh terjadi di seluruh dunia, namun jumlah tertinggi terjadi di Afrika Utara dan Timur Tengah. Hal ini juga lebih umum terjadi di Asia Selatan dan Tenggara, Amerika Tengah dan Eropa. Ketika seseorang bersedia bepergian ke luar negeri dengan tujuan mendapatkan organ disebut Wisata Transplantasi.

Wisata transplantasi ini sering terjadi di negara-negara yang peraturannya lebih sedikit. Beginilah cara para pelaku perdagangan manusia membangun jaringan kriminal dengan koordinasi para profesional medis yang korup, administrator rumah sakit, staf laboratorium, pengemudi, penerjemah, dan penegak hukum. Siapa korban paling umum dari Perdagangan Orang untuk Pengambilan Organ? Pengungsi, migran, dan pencari suaka menjadi sasaran para pelaku perdagangan orang karena mereka mungkin sangat ingin menafkahi diri mereka sendiri dan keluarga mereka di negara tuan rumah dan bersedia menggunakan organ untuk membayar biaya penyelundup. Menurut Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), rata-rata korbannya adalah laki-laki dewasa muda, berusia sekitar 30 tahun. Bagaimana cara merekrut korban perdagangan organ? Donor direkrut secara online dan secara langsung. Mereka biasanya adalah orang-orang yang rentan karena kurangnya stabilitas keuangan. Mereka mungkin tidak berpendidikan dan dibohongi oleh para pedagang manusia bahwa ginjal mereka tumbuh kembali, bahwa mereka mempunyai tiga ginjal, atau bahwa mereka akan diberikan perawatan medis setelah operasi. Mereka dijanjikan berkisar antara $500 hingga $10.000 tetapi mungkin tidak pernah dibayar sama sekali. Mereka kadang-kadang dipaksa untuk menandatangani surat yang menunjukkan persetujuan yang sah atau untuk menyatakan bahwa mereka mempunyai hubungan keluarga dengan pasien. Dalam kasus di Pakistan pada Januari 2023, para korban diiming-imingi dengan janji pekerjaan dan gaji besar. Ginjal mereka dijual hingga setara dengan USD $4.000 (http://theexodusroad.com).

Sayangnya, korban perdagangan orang untuk pengambilan organ kadang-kadang bisa disalahartikan sebagai penjahat karena mereka dibayar. Namun, kita perlu mempertimbangkan apa sebenarnya yang menjadikan seseorang menjadi korban perdagangan manusia dan apa yang menjadikannya sebagai penjahat. Korban perdagangan manusia adalah seseorang yang direkrut, ditipu, disembunyikan, diangkut, dipaksa, dan dieksploitasi. Ada yang mungkin berpikir bahwa jika seseorang dibayar untuk mendapatkan organnya, maka ia mendapat keuntungan dan karena itu merupakan bagian dari kejahatan dan bukan korban perdagangan manusia, namun jika donor dipaksa dan kerentanannya dieksploitasi, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai persetujuan yang sah. Organisasi Kesehatan Dunia, di antara otoritas lainnya, sebenarnya memerlukan evaluasi psikologis untuk memastikan bahwa donor tidak mengambil keuntungan finansial dari atau dipaksa untuk melakukan donasi organ. Apa yang bisa dilakukan terhadap perdagangan organ? Kampanye peningkatan kesadaran dapat memberikan perbedaan dalam mengedukasi masyarakat umum dan meningkatkan akuntabilitas di kalangan profesional medis. Namun, melacak skala permasalahannya masih rumit. Meskipun bentuk-bentuk perdagangan manusia lainnya untuk tujuan seks atau kerja paksa umumnya terjadi berulang kali dalam jangka waktu tertentu, perdagangan manusia untuk pengambilan organ hanya terjadi satu kali, sehingga lebih sulit untuk dilacak. Mereka yang diperdagangkan untuk diambil organnya mungkin akan tetap diam karena menjual organ mempunyai stigma dan ilegal. Oleh karena itu, orang yang dieksploitasi mungkin takut dituduh sebagai penjahat. Kerahasiaan dan privasi pasien, meskipun merupakan komponen penting dalam perawatan medis profesional, sebenarnya dapat menghambat penyelidikan hukum.

Pada bulan Oktober 2022, (UNODC) merilis perangkat untuk mendukung penyelidikan dan penuntutan kejahatan ini. Perangkat ini merupakan langkah maju yang besar dalam komunitas internasional untuk membangun kapasitas penegakan hukum dalam mengatasi kejahatan ini. Perdagangan ilegal organ manusia adalah masalah serius yang memiliki konsekuensi kemanusiaan yang signifikan. Hal ini juga dapat merusak sistem kesehatan, menciptakan ketidakpercayaan terhadap pelayanan medis, dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap etika dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu, banyak negara dan organisasi internasional telah berupaya keras untuk mengatasi perdagangan ilegal organ manusia dengan menguatkan regulasi, meningkatkan kesadaran, dan memberlakukan hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku perdagangan ilegal organ. Dalam rangka untuk mengatasi perkembangan praktik perdagangan ilegal organ manusia, diperlukan upaya luas, termasuk regulasi yang lebih ketat, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang risiko perdagangan ilegal organ, serta peningkatan dalam sistem legal untuk mengatasi kekurangan organ secara sah.

**Dampaknya Pada Kehidupan Sosial Korban dan Keluarga**

Perdagangan ilegal organ manusia memiliki dampak yang serius dan merusak pada kehidupan sosial korban dan keluarganya. Dampak ini melibatkan berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Donor organ dalam perdagangan ilegal seringkali mengalami dampak fisik yang serius akibat pengambilan organ. Proses ini dapat mengancam nyawa mereka, dan banyak donor menghadapi risiko komplikasi medis serius. Setelah menyumbangkan organ, donor juga dapat mengalami dampak kesehatan jangka panjang, seperti penurunan fungsi organ yang tersisa atau komplikasi pascaoperasi.

Korban perdagangan ilegal organ dapat mengalami trauma emosional yang signifikan karena mereka mungkin terpaksa menjual organ mereka tanpa persetujuan yang sah atau dalam kondisi yang tidak diinginkan. Hal ini dapat menyebabkan rasa bersalah, depresi, dan kecemasan. Korban mungkin mengalami stigmatisasi sosial karena terlibat dalam praktik ilegal seperti perdagangan organ. Mereka mungkin dicap sebagai pelaku tindakan ilegal atau dianggap sebagai korban yang terlibat dalam aktivitas yang dianggap tabu. Akibat stigma dan rasa malu, korban dapat mengalami isolasi sosial. Mereka mungkin merasa terisolasi dari masyarakat atau ditolak oleh teman dan keluarga. Korban dapat mengalami konflik identitas karena tindakan yang mereka lakukan. Mereka mungkin merasa dilema antara menjadi donor organ ilegal dan peran sosial atau identitas mereka yang sebelumnya.

Banyak korban perdagangan ilegal organ terlibat dalam praktik ini karena kesulitan ekonomi yang signifikan. Namun, kompensasi finansial yang mereka terima mungkin tidak mencukupi untuk mengatasi masalah ekonomi mereka dalam jangka panjang. Penerima organ ilegal juga dapat mengalami kerugian pekerjaan jika mereka mengalami komplikasi kesehatan yang serius setelah menyumbangkan organ. Ini dapat memperburuk situasi ekonomi mereka. Keluarga korban juga dapat mengalami dampak emosional yang serius karena keadaan korban. Mereka mungkin merasa cemas, bersalah, dan berduka atas pilihan yang dibuat oleh anggota keluarga mereka. Keluarga korban juga dapat merasakan beban finansial yang signifikan, terutama jika mereka harus merawat anggota keluarga yang mengalami komplikasi medis akibat pengambilan organ ilegal (Mitra dan Nikola, 2013).

Dalam konteks perdagangan ilegal organ manusia, dampaknya sangat serius dan beragam. Dampak tersebut tidak hanya memengaruhi korban langsung yang menyumbangkan organ mereka, tetapi juga keluarga mereka yang terlibat atau yang mungkin tidak mengetahui praktik ilegal tersebut. Mari kita jelaskan lebih lanjut dampak yang dialami oleh korban dan keluarganya:

1. Dampak pada Korban

Proses pengambilan organ yang sering dilakukan tanpa persetujuan yang sah atau dalam kondisi yang tidak steril dapat menyebabkan komplikasi serius pada kesehatan fisik korban. Mereka dapat mengalami infeksi, perdarahan, kerusakan organ lainnya, atau bahkan risiko kematian. Korban cenderung mengalami trauma psikologis yang signifikan. Mereka mungkin merasa terpaksa, bersalah, atau malu karena terlibat dalam praktik ilegal ini. Ini bisa menyebabkan depresi, gangguan stres pasca-trauma, dan masalah psikologis lainnya. Setelah menyumbangkan organ, korban dapat menghadapi kondisi kesehatan jangka panjang. Ini dapat mencakup penurunan fungsi organ yang tersisa atau komplikasi pasca operasi yang memerlukan perawatan medis yang berkelanjutan. Akibat stigma dan rasa malu, korban dapat mengalami isolasi sosial. Mereka mungkin merasa terasing dari teman, keluarga, atau masyarakat karena tindakan mereka.

1. Dampak pada Keluarga Korban

Keluarga korban dapat mengalami kecemasan dan ketidakpastian tentang kondisi kesehatan dan keselamatan korban. Mereka juga dapat merasa bingung tentang bagaimana tindakan ilegal ini dapat terjadi tanpa sepengetahuan mereka. Dalam beberapa kasus, keluarga korban mungkin terlibat dalam praktik ilegal ini atau menerima kompensasi finansial sebagai imbalan. Namun, kompensasi ini mungkin tidak cukup untuk mengatasi masalah ekonomi keluarga dalam jangka panjang. Keluarga korban dapat mengalami kehilangan kepercayaan dalam hubungan keluarga jika mereka mengetahui bahwa praktik ilegal ini melibatkan salah satu anggota keluarga mereka. Hal ini dapat merusak hubungan antaranggota keluarga dan menciptakan konflik internal. Keluarga korban juga dapat mengalami dampak psikologis yang serius, termasuk perasaan bersalah, rasa malu, atau stres karena terlibat dalam situasi yang melibatkan tindakan ilegal.

Dalam banyak kasus, praktik perdagangan ilegal organ manusia menciptakan situasi yang merusak bagi korban dan keluarganya, dengan dampak yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi masalah ini melalui pendekatan yang holistik yang mencakup perlindungan hukum, perawatan kesehatan yang memadai, dan dukungan psikososial bagi korban dan keluarganya. perlindungan hukum dan dukungan medis serta psikososial bagi korban dan keluarganya sangat penting. Upaya pencegahan yang lebih baik dan penegakan hukum yang lebih tegas juga diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik ilegal semacam ini dan melindungi individu yang rentan.

**Fenomena perdagangan ilegal organ manusia dan pandangan masyarakat terhadap etika dan kemanusiaan**

Fenomena perdagangan ilegal organ manusia memiliki dampak serius terhadap pandangan masyarakat terhadap etika dan kemanusiaan. Praktik ini menghadirkan sejumlah isu etis dan moral yang memunculkan perdebatan tentang nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat. Perdagangan ilegal organ manusia menimbulkan pertanyaan fundamental tentang nilai kehidupan manusia. Hal ini memicu perdebatan tentang apakah setiap orang memiliki hak atas organ yang dapat menyelamatkan atau meningkatkan kualitas hidup mereka, dan sejauh mana perdagangan ilegal dapat menghancurkan nilai ini (Daniels dan Peter, 2004).

Praktik perdagangan ilegal organ menciptakan ketidak setaraan akses terhadap perawatan medis. Pasien kaya yang mampu membayar dapat membeli organ, sementara mereka yang tidak mampu harus menunggu donor yang cocok atau menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi. Ini memunculkan isu keadilan sosial dan ekonomi dalam sistem perawatan kesehatan. Pasien yang menerima organ melalui perdagangan ilegal dan donor yang terlibat dalam praktik tersebut sering mengalami stigmatisasi dan diskriminasi. Hal ini dapat menciptakan perasaan tidak aman dan ketidak setaraan dalam masyarakat. Praktik perdagangan ilegal organ manusia seringkali melibatkan donor yang memberikan organ mereka tanpa persetujuan yang sah atau tanpa pemahaman penuh tentang risiko yang terlibat. Ini mengangkat pertanyaan tentang persetujuan yang sah dan etika dalam dunia medis.

Masyarakat seringkali harus menghadapi pertimbangan ekonomi dalam perdagangan ilegal organ. Beberapa orang mungkin melihat perdagangan organ sebagai peluang ekonomi yang menguntungkan, terutama jika mereka hidup dalam kemiskinan ekstrem. Ini memicu perdebatan tentang apa yang lebih penting, nilai ekonomi atau nilai-nilai etis. Praktik perdagangan ilegal organ sering kali melibatkan masalah regulasi. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk melindungi hak donor dan pasien, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai campur tangan berlebihan dalam urusan pribadi. Dampak fisik dan psikologis pada donor organ pasca-operasi menciptakan perdebatan tentang perawatan dan dukungan yang seharusnya mereka terima. Ini mengangkat pertanyaan tentang tanggung jawab etis dalam perawatan pascaoperasi.

Indonesia, terutama apparat penegak hukum juga disibukkan dengan fenomena-fenome baru dalam pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah membawa polisi masuk ke modus perdagangan organ tubuh, di mana sindikat mengirim sejumlah warga Indonesia ke luar negeri untuk diambil ginjalnya (<https://www.voaindonesia.com/a/penjualan-ginjal-antarnegara-warnai-kejahatan-perdagangan-orang-/7166124.html>). Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mohammad Mahfud MD memaparkan modus itu dalam keterangan resmi di kantornya pada Selasa (4/7). Saat ini, polisi tengah mengembangkan kasus yang diawali tindak penggerebekan TPPO di Bekasi, Jawa Barat. Menurut Mahfud, ada 14 orang masih tertahan di sebuah rumah sakit di satu negara karena menjual ginjal. “Waktu berangkat dari sini, bilang mau bekerja di restoran, di mana. Di sana kontrak jual ginjal,” ujarnya tanpa mengungkap nama rumah sakit maupun negara di mana diduga korban TPPO itu berada.

Fenomena perdagangan ilegal organ manusia dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada sistem kesehatan. Ketika orang mulai merasa bahwa praktik ilegal dapat terjadi di bawah naungan sistem perawatan kesehatan, ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga medis dan otoritas kesehatan. Perdagangan ilegal organ manusia dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap profesi medis. Ketika beberapa dokter atau petugas medis terlibat dalam praktik ilegal, ini bisa menciptakan ketidak percayaan terhadap profesi medis secara keseluruhan dan mengaburkan garis etis dalam praktik medis.

Perdagangan ilegal organ manusia sering melibatkan perdagangan internasional, dengan donor dari negara-negara miskin menjual organ mereka kepada penerima dari negara-negara kaya. Hal ini memunculkan pertanyaan etis tentang hubungan antara negara-negara yang kuat ekonominya dan negara-negara yang rentan. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab global dalam menangani masalah ini. Praktik perdagangan ilegal organ manusia dapat menciptakan budaya yang mementingkan keuntungan ekonomi di atas nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pentingnya empati, solidaritas sosial, dan perhatian terhadap sesama manusia.

Fenomena ini menimbulkan tantangan hukum dan etika dalam pengaturan praktik medis, persetujuan organ, dan pengambilan tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan ilegal. Ini mengharuskan masyarakat untuk merenungkan ulang hukum dan etika yang mengatur sektor kesehatan. Perdagangan ilegal organ manusia memunculkan pertanyaan moral yang mendalam tentang hak asasi manusia, martabat individu, dan keadilan sosial. Masyarakat menjadi terdorong untuk merenungkan ulang nilai-nilai etis yang mendasari tindakan dan kebijakan mereka. Praktik ilegal ini juga dapat memengaruhi pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang etika dan kemanusiaan. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendidikan harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi etis dan dampak sosial perdagangan ilegal organ manusia.

Fenomena perdagangan ilegal organ manusia secara luas mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap etika dan kemanusiaan, dan memunculkan pertanyaan yang kompleks tentang nilai-nilai yang mendasari masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ini, masyarakat harus berusaha untuk mengembangkan solusi yang menghormati hak asasi manusia, mengutamakan keadilan, dan memastikan bahwa perawatan kesehatan yang memadai tersedia bagi semua orang tanpa merusak prinsip-prinsip etika dan moral yang mendasari kehidupan.

**Kesimpulan dan Saran**

Perdagangan ilegal organ manusia akan berdampak serius pada kehidupan sosial korban dan keluarganya dan melibatkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Korban akan mengalami dampak fisik yang merusak, trauma psikologis, menghadapi isolasi sosial, dan konflik identitas. Keluarga korban akan mengalami kecemasan, ketidak pastian, konflik internal, dan beban finansial. Fenomena perdagangan ilegal organ manusia memiliki dampak serius terhadap pandangan masyarakat tentang etika dan kemanusiaan. Praktik ini menghadirkan isu-isu etis dan moral yang melibatkan hak asasi manusia, keadilan, tanggung jawab global, mempengaruhi kepercayaan pada sistem kesehatan, profesi medis, serta menciptakan konflik antara nilai-nilai ekonomi dan etika.

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap praktik perdagangan ilegal organ tubuh manusia maka perlu memperhatikan hal-hal berikut: (i) Organisasi pemerintah, LSM, dan lembaga medis segera mengadakan kampanye pendidikan dan kesadaran tentang praktik perdagangan ilegal organ, mencakup seminar, lokakarya, pameran, dan kampanye media sosial yang menyediakan informasi tentang risiko, dampak, dan cara melaporkan kegiatan illegal; (ii) bekerja sama dengan media massa sebagai kunci untuk menyebarkan informasi yang lebih luas dan mendorong liputan media yang luas tentang masalah ini sehingga dapat membantu masyarakat memahami risiko yang terlibat dan cara menghindarinya; (iii) meningkatkan pelatihan untuk petugas medis tentang etika, regulasi, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perdagangan organ dapat membantu mereka mengenali dan melaporkan aktivitas illegal; (iv) memberikan perlindungan hukum kepada individu yang memberikan informasi tentang praktik ilegal ini sehingga dapat memberikan insentif bagi saksi untuk melaporkan kegiatan ilegal tanpa takut represalias; (v) Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan regulasi terkait transplantasi organ untuk mencegah praktik ilegal, termasuk mengidentifikasi donor yang sah dan memantau peralatan medis yang digunakan dalam transplantasi karena banyak praktik perdagangan ilegal organ melibatkan perdagangan lintas batas, kerja sama internasional antara negara-negara dalam memerangi praktik ini sangat penting, di mana perjanjian dan protokol internasional harus diperkuat; (vi) Untuk mengurangi permintaan terhadap organ ilegal, pemerintah harus bekerja untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap donor organ yang legal dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjadi donor yang sah; (vii) Korban dan keluarga yang terlibat dalam praktik perdagangan ilegal organ memerlukan dukungan psikososial. Layanan konseling dan dukungan harus tersedia bagi mereka untuk membantu mereka mengatasi dampak psikologis yang serius; dan (viii) Hukuman yang lebih tegas bagi pelaku perdagangan ilegal organ harus diterapkan untuk memberikan efek jera. Penegakan hukum yang kuat juga harus menjadi prioritas. Masyarakat harus diajak untuk berpartisipasi secara aktif dalam melaporkan dan menghindari praktik ilegal ini. Ini bisa dilakukan melalui program pelatihan dan pendidikan.

**Daftar Pustaka**

Adham, Khaled. 2005. Globalization, Neoliberalism, and New Spaces of Capital in Cairo. *Traditional Dwellings and Settlements Rev. 19–32.*

Daniels, Peter W. 2004. Urban Challenges: The Formal and Informal Economies in Mega-Cities. *Cities 501–11.*

Hendryadi, Tricahyadinata , I., & Zannati, R. (2019). Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).

Mendoza, Roger Lee 2011. Price Deflation and the Underground Organ Economy in the Philippines*. J. of Public Health 101–07.*

Mitra, Agomoni Ganguli & Nikola Biller-Andorno 2013. Vulnerability and Exploitation in a Globalized World. *International J. of Feminist Approaches to Bioethics 91– 102.*

Schwartz, L., Sinding, C., Hunt, M., Elit, L., Redwood-Campbell, L., Adelson, N., Luther, L., Ranford, J., & DeLaat, S. 2010. Ethics in humanitarian aid work: Learning from the narratives of humanitarian health workers. *AJOB Primary Research, 1(3), 45–54.*

ten Have, H. 2013. Global bioethics: Transnational experiences and Islamic bioethics. *Zygon, 48(3), 608.*

Sandelowski, M. (2004). Using qualitative research. Qualitative Health Research, 1366-1386.

Wyatt, Tanya 2009. Exploring the Organization of Russia Far East’s Illegal Wildlife Trade: Two Case Studies of the Illegal Fur and Illegal Falcon Trades. *Global Crime 144–54.*

Yea, Sallie. 2010. Trafficking in Part(s): The Commercial Kidney Market in a Manila Slum, Philippines. *Global Social Policy 358–76.*

Shimazono, Y. "Mapping Transplant Tourism," in World Health Organizations Second Global

Consultation on Human Transplantation (Geneva 28-30 March 2007).

Haken, J. "Transnational Crime in the Developing World," (Washington DC: Global Financial

Integrity, 2011).

<https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-6431526/7-fakta-wanita-yang-dibunuh-dan-diambil-organ-tubuhnya-oleh-kekasih-online> diakses pada tanggal 5 September 2023

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/UNODC\_Assessment\_Toolkit\_TIP\_for\_the\_Purpose\_of\_Organ\_Removal.pdf

https://www.voaindonesia.com/a/penjualan-ginjal-antarnegara-warnai-kejahatan-perdagangan-orang-/7166124.html

**PEMOLISIAN TERHADAP MARGINALISASI DAN EKSKLUSI SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL**

**DI PULAU REMPANG**

# 1Dony Setiawan, 2Supardi Hamid

**1,2Program Studi Doktor, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12160**

**e-mail: donysetiawan0@gmail.com**

**Abstrak**

Mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah adalah salah satu etika kenegaraan yang wajib dilaksanakan Polri yang bila tidak dilaksanakan merupakan pelanggaran kode etik profesi Polri. Dalam mengamankan kebijakan pemerintah, sering kali Polri dihadapkan pada dilema untuk mengabdi kepada kepentingan pemerintah atau kepentingan publik. Seperti dalam pengamanan pembangunan PSN (Proyek Strategis Nasional) di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Polri dihadapkan dengan rangkaian penolakan dan perlawanan dari warga yang merasa termarginalkan sehingga menimbulkan kerusuhan, kerusakan fasilitas, korban luka, dan dugaan pelanggaran HAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi marginalisasi dan eksklusi sosial yang terjadi, faktor penyebabnya serta strategi pemolisian yang diperlukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* dengan paradigma pragmatik studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marginalisasi dan eksklusi sosial yang terjadi bersifat struktural, multidimensi dan relasional meliputi dimensi politik, hukum dan HAM, ekonomi, sosial dan budaya. Marginalisasi tersebut disebabkan oleh paradigma pembangunan, tidak adanya pengakuan terhadap eksistensi dan hak masyarakat adat dan paradigma kepolisian. Peneliti merekomendasikan penerapan pemolisian yang berorientasi pada masalah agar marginalisasi dan eksklusi sosial tidak berkembang sehingga membahayakan keselamatan dan keamanan warga dengan cara bersama *stakeholder* mengatasi marginalisasi, eksklusi sosial, diskriminasi, dan ketidaksetaraan yang terjadi, mengatasi faktor-faktor penyebab dan dampaknya, membangun hubungan dan komunikasi saling percaya, sosialisasi informasi yang dibutuhkan warga, memfasilitasi aspirasi dan mendorong partisipasi warga, pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap eksistensi, identitas dan hak asasi manusia dan hak masyarakat adat, mengupayakan persetujuan warga atau kesepakatan atas solusi yang telah dirumuskan bersama sebelum memulai tahapan pembangunan.

***Kata kunci : eksklusi sosial, inklusi sosial, marginalisasi, proyek strategis nasional, pemolisian***

***berorientasi masalah (problem-oriented policing), Rempang.***

***Abstract***

*Supporting and safeguarding government policies is one of the state ethics that must be implemented by Polri, which if not implemented is a violation of the Polri professional code of ethics. In securing government policies, Polri is often faced with the dilemma of serving the interests of the government or the public interest. For example, in securing the development of the National Strategic Project (PSN) on Rempang Island, Riau Islands, the police are faced with a series of rejections and resistance from residents who felt marginalized, resulting in riots, damage to facilities, injuries, and allegations of human rights violations. To overcome this, it is necessary to identify the dimensions of marginalization and social exclusion that occur, the factors that cause them and the policing strategies needed to overcome them. The research employs the qualitative approach using library research method with a case study pragmatic paradigm. The results of the research reveal that the marginalization and social exclusion that occurred are structural,*

*multidimensional and relational, including political, legal and human rights, economic, social and cultural dimensions. The marginalization is caused by the development paradigm, the lack of recognition of the existence and rights of indigenous people and the police paradigm. The author recommends to apply problem-oriented policing so that marginalization and social exclusion do not develop to endanger the safety and security of citizens by working with stakeholders to overcome the marginalization, social exclusion, discrimination and inequality that occur, overcoming the factors that cause and impact, building relationships and trusting communication, disseminating information needed by citizens, facilitating aspirations and encouraging citizen participation, recognition, respect and protection of the existence, identity and human rights and rights of indigenous people, seeking citizen approval or agreement on solutions that have been formulated together before commencing the development.*

***Keywords: marginalization; national strategic project; social exclusion; social inclusion;***

***problem-oriented policing, Rempang.***

**Pendahuluan**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf i dan Pasal 9 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Polri diwajibkan untuk melaksanakan etika kenegaraan yaitu mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah, yang bila tidak dilaksanakan akan menjadi pelanggaran kode etik profesi Polri.

Dalam melaksanakan amanat konstitusi dan perundang-undangan, Polri sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum, senantiasa dihadapkan pada sebuah dilema ketika di satu sisi harus mengamankan kebijakan pemerintah, namun di sisi lain dihadapkan pada kepentingan publik yang ternyata tidak sejalan dan cenderung diabaikan oleh pemerintah. Seperti dalam pengamanan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Rempang, Polri dihadapkan dengan rangkaian penolakan dan perlawanan dari warga hingga menimbulkan kerusuhan yang menyebabkan beberapa warga harus berhadapan dengan proses hukum serta banyaknya korban luka baik dari Polri maupun warga.

Kerusuhan tersebut terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City yang merupakan PSN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. PSN tersebut meliputi pengembangan kawasan industri, perdagangan dan wisata melalui kerja sama BP Batam dengan PT Makmur Elok Graha (MEG) dengan nilai investasi sekitar Rp. 381 Triliun hingga tahun 2080 (bpbatam.go.id, 31/8/2023).

Penolakan warga 16 Kampung Tua Melayu, yang didukung warga Melayu dari Batam dan Bintan diawali saat unjuk rasa tanggal 23 Agustus 2023 di Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Ternyata, yang ditolak warga bukan pembangunan PSN, melainkan relokasi 16 Kampung Tua, pemukiman warga asli yang terdiri dari suku Orang Laut, dan suku Orang Darat yang telah bermukim di Pulau Rempang setidaknya sejak 1834 (kompas.id, 23/8/2023). Karena aspirasi warga tersebut tidak difasilitasi, penolakan warga berlanjut pada tanggal 7 September 2023 dimana warga memblokir akses jalan dengan merobohkan pohon, membakar sejumlah ban dan melawan petugas dengan lemparan batu dan botol kaca saat petugas gabungan (Polri, TNI, BP Batam, Satpol PP) hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang. Merespon perlawanan warga, kepolisian melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa (kompas.com, 7/9/2023). Gas air mata tersebut masuk ke SMPN 22 Galang hingga menyebabkan 10 siswa dan 1 orang guru yang harus dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat karena mengalami sesak nafas hebat, pusing dan mual. Kerusuhan tersebut telah menimbulkan rasa takut dan dampak psikologis bagi siswa SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang. Selain itu Komnas HAM mendapatkan informasi adanya korban bayi berusia 8 bulan yang terdampak hebat akibat gas air mata tersebut. (Komnas HAM RI, 22/9/2023).

Sebagai imbas kerusuhan tersebut, 7 orang warga ditetapkan tersangka oleh Polresta Barelang karena menghadang dan melawan petugas dengan cara memukul, menendang, melempari petugas dengan batu, menembak dengan katapel berisikan batu, menggunakan parang, balok kayu dan bom molotov (kompas.com, 10/9/2023). Penolakan dan perlawanan warga berlanjut pada tanggal 11 September 2023 dengan menggelar aksi di depan kantor BP Batam. Warga menghancurkan pagar, melempar batu ke arah petugas dan melempari kaca gedung BP Batam hingga pecah. Bentrokan ini menyebabkan 26 aparat terluka dan 43 orang warga ditangkap (mediaindonesia.com, 12/9/2023).

Kebijakan pemerintah dan pengamanannya oleh Polri telah memproduksi konflik yang mengancam keselamatan warga dan Polri sendiri. Konflik tersebut menempatkan Polri sebagai alat negara yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik, melakukan intimidasi, kekerasan, kriminalisasi dan bahkan dugaan pelanggaran HAM. Untuk mengatasi marginalisasi dan eksklusi sosial dalam pembangunan PSN di Pulau Rempang, perlu dilakukan penelitian tentang dimensi marginalisasi dan eksklusi sosial yang terjadi dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya serta strategi pemolisian yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut.

**Kajian Literatur**

**Eksklusi dan Inklusi Sosial (*Social Exclusion And Social Inclusion*)**

Dari sekian banyak definisi yang ada, inti dari eksklusi sosial adalah minimnya partisipasi di dalam masyarakat. Lengkapnya, eksklusi sosial menggambarkan suatu keadaan dimana individu tidak dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta proses yang menyebabkan dan mempertahankan keadaan tersebut. Eksklusi sosial bersifat multi dimensi, relasional dan dinamis (*United Nations Department of Economic and Social Affairs/UN DESA,* 2016: 18).

Eksklusi sosial juga diartikan sebagai proses yang kompleks dan multi-dimensi. Hal ini melibatkan kekurangan atau ketidaktersediaan sumber daya, hak, barang dan jasa, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam hubungan dan kegiatan yang tersedia bagi sebagian besar orang dalam suatu masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Hal ini mempengaruhi kualitas hidup individu dan kesetaraan dan kohesi masyarakat secara keseluruhan (Levitas and others, 2007: 9 dalam UN DESA, 2016: 19). Partisipasi tersebut dapat terhambat ketika orang tidak memiliki akses ke sumber daya, tidak dapat berinteraksi satu sama lain dan ketika hak dan martabat mereka tidak mendapatkan penghormatan dan perlindungan yang setara. Dengan demikian, eksklusi sosial tidak hanya mencakup perampasan materi, tetapi juga kurangnya kebebasan atau kendali atas keputusan penting serta perasaan terasingkan (UN DESA, 2016: 18).

Sedangkan inklusi sosial adalah proses meningkatkan kondisi bagi individu dan kelompok untuk mengambil bagian dalam masyarakat dan proses meningkatkan kemampuan, kesempatan, dan martabat orang-orang, yang kurang beruntung atas dasar identitas mereka (World Bank:2013,3-4, dalam UN DESA, 2016: 19). Inklusi sosial merupakan proses untuk memastikan bahwa mereka yang berisiko mengalami kemiskinan dan eksklusi sosial mendapatkan kesempatan dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya dan untuk menikmati standar kehidupan yang dianggap normal dalam masyarakat dimana mereka tinggal. Memastikan bahwa mereka memiliki partisipasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan akses terhadap hak-hak dasar mereka (World Bank, 2003: 9 dalam UN DESA, 2016: 19).

Dalam wacana kebijakan, upaya untuk mempromosikan inklusi sosial muncul dari keprihatinan atas eksklusi sosial. Inklusi sosial didefinisikan sebagai proses peningkatan kesempatan berpartisipasi dalam masyarakat bagi orang-orang yang kurang beruntung berdasarkan usia, jenis kelamin, disabilitas ras, etnis, asal usul, agama, atau status ekonomi atau status lainnya, melalui peningkatan kesempatan, akses terhadap sumber daya, suara dan penghormatan terhadap hak-hak (UN DESA, 2016: 19). Dengan demikian, inklusi sosial merupakan sebuah proses dan tujuan. Mempromosikan inklusi sosial membutuhkan penanganan eksklusi sosial dengan menghilangkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi orang dalam masyarakat, serta dengan mengambil langkah-langkah inklusi aktif untuk memfasilitasi partisipasi tersebut. Sebagai respons politik terhadap hambatan eksklusi, inklusi sosial merupakan proses yang lebih terencana untuk mengakomodasi dan menyambut semua orang dan menciptakan kesetaraan dan toleransi yang lebih besar (UN DESA, 2016: 19).

Dalam proses meningkatkan kesempatan berpartisipasi dalam masyarakat, inklusi sosial membutuhkan penanganan faktor-faktor penyebab eksklusi, termasuk kebijakan dan peraturan serta sikap dan perilaku diskriminatif, dan secara aktif "membawa orang masuk" (UN DESA, 2016: 22).

**Marginalisasi**

Marginalisasi dapat diartikan sebagai usaha membatasi atau pembatasan (kbbi.kemendikbud.go.id) atau tindakan memperlakukan seseorang atau sesuatu seolah-olah mereka tidak penting (dictionary.cambridge.org). Marginalisasi juga diartikan sebagai proses atau hasil dari membuat seseorang merasa seolah-olah mereka tidak penting dan tidak dapat mempengaruhi keputusan atau peristiwa atau fakta yang menempatkan seseorang dalam posisi dimana mereka tidak memiliki kekuatan (oxfordlearnersdictioanaries.com).

Marginalisasi kadang disebut marginalisasi sosial (*social marginalization*) dan eksklusi sosial (*social exclusion*) yang merujuk pada kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang kurang mampu melakukan sesuatu atau mengakses layanan atau peluang dasar (liberties.eu). Ada tiga jenis marginalisasi yang utama, yaitu: (i) marginalisasi sosial, yaitu ketika orang yang terpinggirkan secara sosial tidak mempunyai kesempatan sosial yang sama dengan orang lain; (ii) marginalisasi ekonomi, yaitu masyarakat tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan orang lain untuk berkontribusi dan memperoleh manfaat dari perekonomian; dan (iii) marginalisasi politik, di mana kelompok masyarakat tidak mampu beradaptasi secara demokratis dalam proses pengambilan keputusan (liberties.eu).

Sedangkan marginalisasi yang terjadi akibat struktur dan institusi yang tidak mendistribusikan peluang hidup, manfaat dan beban secara merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda, dan akibatnya, memarginalkan kelompok atau orang tertentu disebut marginalisasi struktural (Renata et.al,. 2000; Powel, 2013: 3). Marginalisasi yang dialami kelompok minoritas dan kegagalan dalam mengakui keberadaan mereka dapat menciptakan ketegangan, mendorong mereka untuk bertahan hidup atau melindungi komunitas mereka dan bahkan konflik (*United Nations Development Programme*/UNDP, 2010: 16, 58).

Untuk mengatasi marginalisasi, diperlukan pemahaman yang jelas mengapa kaum minoritas terpinggirkan dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan marginalisasi, pengentasan ketidaksetaraan dan diskriminasi yang sudah mengakar, memperhatikan dampak negatif dari ketidaksetaraan terhadap pembangunan secara keseluruhan, mendukung pihak-pihak yang berkuasa untuk melakukan perubahan yang memungkinkan partisipasi penuh dari masyarakat dalam pengambilan keputusan, mempromosikan kebijakan yang adil dan anti diskriminasi dan memastikan pembangunan ekonomi tidak memarginalkan masyarakat atau menghancurkan identitas mereka.

Selain itu, dibutuhkan juga sosialisasi dan kampanye informasi publik yang lebih luas, menciptakan akses dan distribusi kekuasaan yang lebih adil, pengakuan dan perlindungan terhadap hak, eksistensi, identitas dan partisipasi dalam kehidupan publik, pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka, partisipasi dalam konsultasi stakeholder dan partisipasi dalam manfaat kemajuan ekonomi dan pembangunan, dialog antar pihak yang bertikai, distribusi sumber daya alam dan infrastruktur yang adil dan setara, akses terhadap keadilan, membangun kapasitas kaum minoritas untuk sepenuhnya terlibat di bidang ekonomi politik (UNDP, 2010: 2,3,4,5,15,16,63).

Efek kumulatif akibat praktik diskriminatif dan beberapa kasus kekerasan oleh kepolisian terhadap kelompok minoritas adalah rendahnya kepercayaan dan kerja sama antara polisi dengan masyarakat. Solusi untuk mengatasi hal ini adalah memastikan kepolisian tidak melanggar hak-hak minoritas, sepenuhnya menerapkan hukum yang melindungi minoritas, pelatihan berkala tentang hak minoritas dan faktor pengucilan yang mempengaruhi minoritas, membangun perjanjian kemitraan dengan minoritas dan perwakilannya yang meliputi komitmen jangka panjang dan membangun kepercayaan antar pihak, memastikan saling pengertian, komunikasi terbuka dan transparansi, mengarusutamakan petugas penghubung pada komunitas minoritas pada semua tingkatan (UNDP, 2010: 46).

**Pemolisian Berorientasi Masalah (*Problem-Oriented Policing*)**

Herman Goldstein mengemukakan bahwa *problem-oriented policing* (POP) sebagai kerangka kerja komprehensif kepolisian untuk mengatasi kondisi-kondisi yang mendasari timbulnya berbagai masalah yang mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat yang tidak terbatas hanya pada kejahatan serius (Scott, 2020: 2-3). Mengingat banyak dari apa yang biasanya dianggap sebagai “akar masalah” berada di luar kemampuan polisi untuk mengubahnya, maka polisi menjadi perantara atau bergabung dengan entitas yang berbeda untuk menangani masalah (Scott, 2020: 6).

POP menggunakan metode pemecahan masalah yang lebih luas dari yang selama ini digunakan secara konvensional dan lebih luas dari hanya sekedar menegakkan hukum (Scott, 2020: 2,4,5). Penyelesaian masalah yang efektif menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada peningkatan respons keseluruhan terhadap masalah daripada menimpakan kesalahan atas masalah tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi polisi untuk mengembangkan hubungan kerja yang efektif dengan mereka yang terkena dampak dari suatu masalah yang dibangun dengan semangat saling percaya (Scott, 2020: 7).

**Proyek Skala Nasional (PSN)**

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah terus melakukan upaya percepatan proyek-proyek yang dianggap strategis. Keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) berkontribusi terhadap upaya percepatan pertumbuhan tersebut. PSN adalah proyek dan program yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan serta pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, terdapat 208 proyek dan 10 program PSN 2020-2024. Pembangunan bendungan dan irigasi menjadi proyek terbanyak, yakni 57 proyek. Disusul jalan dan jembatan 56 proyek dan pembangunan kawasan 19 proyek (<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/04000021/daftar-proyek-strategis-nasional-2020-2024>).

Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang gencar dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin sejak 2016 silam dinilai telah mendatangkan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Selain meningkatkan investasi, sebanyak 124 PSN yang telah dirampungkan dan tersebar di seluruh wilayah Tanah Air, mampu menyerap lebih dari 11 juta tenaga kerja—langsung maupun tidak langsung—meski di tengah pandemi. Alhasil, sejumlah kalangan meminta agar PSN terus didorong (https://investor.id/business/275062/proyek-strategis-nasional-beri-manfaat-nyata).

**Rempang**

Dilansir situs Kemdikbudristek, Pulau Rempang adalah salah satu pulau di wilayah Kecamatan Galang, yang berada di bawah wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Rempang terhubung langsung dengan Pulau Galang dan Pulau Batam melalui jembatan Barelang. Secara administratif, Pulau Rempang masuk wilayah Pemerintah Kota Batam. Jembatan Barelang merupakan singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang, yang menjadi sebuah jembatan penyambung antar wilayah di Rempang, yang dibangun untuk memperluas Otorita Batam sebagai regulator daerah industri Pulau Batam (https://news.detik.com/berita/d-6934602/soal-rempang-pulau-dekat-batam-yang-kini-sedang-ada-konflik-agraria).

Luas wilayah Pulau Rempang adalah 165 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 7.512 jiwa (Badan Pusat Statistik). Mata pencaharian penduduk Pulau Rempang sebagian besar adalah nelayan dan pelaut, dan etnis penduduk adalah Melayu, Orang Laut, dan Orang Darat. Pulau Rempang masuk dalam wilayah Kota Batam berawal dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tanggal 29 Juni 1992. Saat itu, pemerintah melakukan penambahan wilayah kawasan industri Pulau Batam. Pemerintah berpendapat, kegatan usaha di Pulau Batam meningkat, tetapi ada keterbatasan daya dukung. Kemudian, masuklah Pulau Galang dan Rempang dengan status kawasan berikat (<https://news.detik.com/berita/d-6934602/soal-rempang-pulau-dekat-batam-yang-kini-sedang-ada-konflik-agraria>.). Selain itu, tujuan kebijaksanaan pemerintah mengintegrasikan Pulau Rempang dan Pulau Galang ke dalam wilayah kerja Otorita Batam adalah untuk masa depan pengembangan wilayah itu. Oleh karena itu, ditetapkan penambahan wilayah lingkungan kerja daerah Otorita Batam dengan Pulau Rempang dan Pulau Galang, sehingga lebih dikenal dengan istilah Barelang alias Batam, Rempang, Galang (<https://news.detik.com/berita/d-6934602/soal-rempang-pulau-dekat-batam-yang-kini-sedang-ada-konflik-agraria>).

Orang Darat atau Orang Oetan (hutan) diyakini sebagai penduduk asli Batam. Tampilan Orang Darat, kulitnya lebih gelap dari orang Melayu. Mereka hidup dari bercocok tanam dan mencari hasil hutan. Jika kondisi air pasang, mereka baru mencari kepiting dan lokan. Nantinya, dibarter dengan orang Tionghoa yang memiliki kebun gambir yang ada di Pulau Rempang. Pada tahun 1930, jumlah Orang Darat hanya sekitar 36 jiwa. Namun, kondisi Orang Darat (Orang Hutan) di Batam makin punah atau tersisih. Tahun 2014 lalu, jumlahnya sekitar delapan kepala keluarga (KK). Pulau Rempang juga memiliki kawasan wisata bernama Taman Buru Pulau Rempang.

**Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu melakukan penelusuran bahan pustaka dan dengan paradigma pragmatik studi kasus. *Library research* dilakukan dengan mengidentifikasi dan menemukan informasi yang relevan, menganalisis temuan dan kemudian mengembangkan dan mengekspresikan ide-ide peneliti (Burhan Bungin, 2020: 237,244). Data-data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan tersebut diolah dengan triangulasi data sehingga Penulis dapat memeproleh kesimpulan.

**Hasil dan Pembahasan**

**Marginalisasi Dan Eksklusi Sosial Dalam Pembangunan Proyek Skala Nasional di Pulau Rempang.**

Untuk merumuskan solusi, diperlukan identifikasi bentuk dan dimensi marginalisasi dan eksklusi sosial. Identifikasi dan deskripsi didasarkan pada kerangka konseptual yang dibangun berdasarkan komponen-komponen dalam konsep marginalisasi dan eksklusi social, yang meliputi pembatasan dan keterbatasan partisipasi, peluang dan kesempatan, sumber daya, eksistensi, martabat dan hak. Komponen ini kemudian dibandingkan dengan kondisi faktual yang terjadi sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Pembatasan dan terbatasnya peluang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan PSN—masyarakat tidak memiliki akses informasi pembangunan PSN dan tidak memilik kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan, tahapan pembangunan, rencana relokasi dan ganti rugi. Kondisi ini dapat diketahui dari keterangan Juru Bicara Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Suardi Monggok yang menyampaikan mandat dari warga di 16 Kampung Tua Melayu melalui surat yang dikirimkan kepada Mahfud MD. Dalam surat tersebut tertulis bahwa sebagai warga Tempatan yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun mendiami kampung, merasa selama ini tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan kawasan Rempang *Eco City* (CNNIndonesia.com, 12/9/2023).

Begitu pula keterangan dari tokoh masyarakat Riau dan Kepulauan Riau, Azlaini Agus bahwa warga Rempang baru mengetahui adanya rencana pembangunan Rempang *Eco City* pada awal Agustus 2023 dari berita di media dan tidak ada sosialisasi resmi dari pemerintah (mediaindonesia.com,12/9/2023). Keterangan ini dikuatkan dengan temuan Ombudsman RI bahwa sosialisasi tergolong belum masif, tidak tepat sasaran dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan warga (ombudsman.go.id, 18/9/23). Ditambahkan lagi dari hasil investigasi Komnas HAM RI dan keterangan Kapolresta Barelang bahwa sosialisasi memang masih masih minim (detik.com, 22/9/2023).

Bahkan, Presiden Joko Widodo (detik.com, 13/9/2023) dan Menteri Investasi/Kepala Badang Koordinasi Penanaman Modal (BKPP) Bahlil Lahadalia (cnnindonesia.com, 13/9/2023) membenarkan dan menguatkan kondisi tersebut di atas bahwa kerusuhan di Pulau Rempang disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

1. Pembatasan dan terbatasnya akses untuk saluran dan fasilitasi aspirasi warga—hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan untuk memulai tahapan pembangunan PSN yang mengabaikan aspirasi warga dan tidak didasari oleh persetujuan warga. Aspirasi penolakan warga pada unjuk rasa pada tanggal 23 Agustus 2023 di depan kantor BP Batam yang tidak difasilitasi oleh pemerintah lokal telah berkembang dan berlanjut menjadi perlawanan dari warga kepada petugas gabungan yang akan melakukan pengukuran dan pemasangan patok pada tanggal 7 September 2023. Aksi penolakan dan bentrok warga dengan petugas berlanjut lagi pada tanggal 11 September 2023 sehingga menimbulkan korban luka dan kerusakan fasilitas kantor BP Batam.

Fakta pengabaian aspirasi warga tersebut diperkuat dengan isi gugatan permohonan uji materiil warga ke Mahkamah Konstitusi bahwa telah terjadi pengabaian atas ketidaksetujuan atau penolakan yang tidak diperhitungkan pemerintah, menunjukkan telah diskriminasi atas kedudukan kepentingan pihak dalam Proyek *Eco City* Rempang (Gerakan Rakyat Selamatkan Rempang, 2023).

Temuan Komnas HAM RI yang disampaikan oleh Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing membenarkan pengabaian aspirasi warga di mana beberapa saksi menyatakan tidak pernah didengar oleh BP Batam dan pendekatannya hanya dari atas saja melalui aparat di tingkat kelurahan dan kecamatan. Terkait hal ini, Uli mengungkapkan dugaan pelanggaran hak atas tempat tinggal yang layak dikaitkan dengan rencana relokasi yang tidak dasarkan pada partisipasi dan aspirasi masyarakat (cnnindonesia.com, 22/9/2023). Hak atas tempat tinggal yang dimaksud adalah hak untuk memilih tempat tinggal (pasal 28E) dan bertempat tinggal yang baik dan sehat (Pasal 28 H) sebagaimana diatur dalam UUDNRI Tahun 1945.

1. Pengabaian identitas, status, eksistensi, martabat dan hak masyarakat adat yang sudah tinggal turun temurun di Pulau Rempang—kondisi ini didasarkan pada temuan Ombudsman RI yang disampaikan oleh Johanes Widijantoro (anggota Ombudsman RI) bahwa warga yang tetap menolak relokasi merasa tempat tinggalnya sudah turun menurun, generasi ke generasi, bahkan ada yang sampai 6-7 generasi dan merasa tidak ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama bila direlokasi. Selain itu, seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Batam berdasarkan keterangan dari Lembaga Adat Melayu (cnnindonesia.com, 27/9/2023).

Status dan hak masyarakat adat yang menempati lahan di Pulau Rempang tersebut tidak diakui oleh negara mengacu pada pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD bahwa negara telah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) di Pulau Rempang kepada entitas perusahaan dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto yang menerangkan bahwa lahan tinggal di Pulau Rempang tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU), tidak ada sertifikatnya, merupakan kawasan hutan dan sebanyak 600 hektare merupakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari BP Batam (cnnindonesia.com, 14/9/2023).

Pernyataan tersebut banyak ditentang oleh beberapa pihak yang justru mengakui status dan hak masyarakat adat Rempang. Misalnya, pengakuan dari Ahmad Taufan Damanik (eks Ketua Komnas HAM), Anggota DPRD Kepri Taba Iskandar, tokoh melayu Riau Alzaini dan Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau Abdul Rajak Agus (cnnindonesia.com, 14/9/2023; cnnindonesia.com, 15/9/2023; tempo.co, 9/9/2023).

Beberapa tokoh tersebut menyatakan bahwa warga Rempang sudah tinggal di Pulau Rempang ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka. Tokoh Melayu Riau Alzaini Agus menyatakan bahwa masyarakat Melayu sudah tinggal dan beranak pinak di Rempang termasuk Pulau Galang dan Bulang sejak lebih dari 300 tahun lalu. Alzaini mengutip kitab *Tuhfat An-Nafis* karya pahlawan nasional Raja Ali Haji yang ditulis dengan Bahasa Melayu Arab tahun 1885, yang diterbitkan pertama kali pada 1890 dan diterbitkan juga pada 1923 pada *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society*, London. Menurutnya, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa penduduk Pulau Rempang, Galang, dan Bulang adalah keturunan dari prajurit atau laskar Kesultanan Riau Lingga. Mereka mendiami pulau-pulau tersebut sejak tahun 1720, di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah I (cnnindonesia.com, 15/9/2023).

Bahkan pada tahun 2020 sebelum konflik PSN Rempang mengemuka dan status masyarakat adat Rempang belum dipertanyakan, keberadaan masyarakat adat Pulau Rempang pernah diungkap oleh Dedi Arman dalam website Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau, Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (12 Juni 2020). Dalam website tersebut dijelaskan bahwa Orang Darat atau Orang Oetan (hutan) diyakini sebagai penduduk asli Batam. Keberadaan Orang Darat di Pulau Rempang (Batam) disebutkan dalam sejumlah arsip kolonial Belanda. Pada tanggal 4 Februari 1930, *Controleur Onderafdeeling* Tanjungpinang, P. Wink mengunjungi Orang Darat di Pulau Rempang. Catatannya tentang kunjungan dimuat dalam artikel berjudul *Verslag van een bezoek aan de Orang Darat van Rempang*, 4 Februari 1930 (Laporan Sebuah Kunjungan ke Orang Darat di Pulau Rempang pada 4 Februari 1930). Laporan ini ditulis di Tanjungpinang, 12 Februari 1930 dan dimuat dalam *Tijdschrift voor Indische Taal, Land en Volkunde, Deel LXX Aflevering* I,1930.

Tidak hanya itu, Hans Kahler (1960,3-15) juga menggambarkan eksistensi orang Darat di Pulau Batam dan Rempang Kepulauan Riau dalam penelitiannya dalam bahasa Jerman yang berjudul “*Studi Etnografi Dan Linguistik Tentang Orang Darat, Orang Akit, Orang Laut Dan Orang Utan Di Kepulauan Riau Dan Pulau-Pulau Di Pesisir Timur Sumatera*” dalam publikasi seminar bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa Laut Selatan di Universitas Hamburg.

Dalam penelitiannya, Hans Kahler (1960: 3-15) mengungkapkan eksistensi orang Darat Pulau Rempang meliputi bahasa dialek Melayu, ciri-ciri fisik, keturunan, kebiasaan hidup, pakaian, tempat tinggal, makanan, bergantung hidup dengan hasil hutan, alat musik, hukum adat.

1. Pembatasan akses terhadap sumber daya, meliputi layanan fasilitas kesehatan dan sekolah di Pulau Rempang serta akses untuk memperoleh keadilan—kondisi ini diketahui dari keterangan Tokoh Melayu Riau Alzaini Agus (mediaindonesia.com, 13/9/2023) dan Zuki warga Pulau Rempang (kompas.com, 15/9/2023) yang mengungkapkan bahwa fasilitas kesehatan (puskesmas) dan sekolah di Rempang sempat ditutup pada pertengahan Agustus sebagai bentuk pemaksaan secara tidak langsung agar warga Rempang bersedia direlokasi demi proyek strategis nasional.

Pembatasan akses kesehatan tersebut dinilai sebagai dugaan pelanggaran HAM terkait hak atas kesehatan sebagaimana diungkapkan dalam temuan Komnas HAM perihal upaya pengosongan puskesmas dan pembebastugasan tenaga kesehatan di Pulau Rempang sehingga fasilitas kesehatan tidak berfungsi maksimal (cnnindonesia.com, 22/9/2023). Hak atas kesehatan tersebut diatur dalam pasal 28H dan pasal 34 ayat 3 UUDNRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dan hak untuk mendapat pendidikan diatur dalam pasal 28C, pasal 28E dan pasal 31 UUDNRI Tahun 1945. Selanjutnya, pembatasan hak untuk memperoleh keadilan, diketahui berdasarkan keterangan Komnas HAM bahwa ada dugaan pelanggaran hak untuk memperoleh keadilan dimana ada pembatasan akses terhadap bantuan hukum kepada 8 tersangka yang sudah dibebaskan saat proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan dari masyarakat dan kuasa hukumnya (cnnindonesia.com, 22/9/2023). Temuan ini dikuatkan oleh keterangan Noval Setiawan Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru yang dalam keterangan tertulisnya meminta Kapolda Kepri untuk memeriksa anggota kepolisian yang menghalangi akses bantuan hukum dan kunjungan keluarga para tahanan (nasional.tempo.co, 16/9/2023).

Marginalisasi yang dialami warga Pulau Rempang tersebut di atas merupakan marginalisasi struktural sebagai proses dan hasil dari kebijakan yang menyebabkan ketimpangan, di mana eksistensi, hak dan kepentingan masyarakat diabaikan, dikecualikan, tidak diakui, tidak didengarkan, tidak dianggap penting dan tidak memiliki akses untuk terlibat dalam kebijakan pemerintah. Ragam bentuk marginalisasi dan eksklusi sosial yang dialami warga Rempang bersifat multidimensi dan relasional meliputi bidang politik (kebijakan pemerintah), hukum dan hak asasi manusia (hak warga negara), ekonomi (investasi dan pembangunan nasional), sosial dan budaya (eksistensi, identitas sosial dan hak masyarakat adat).

**Faktor Yang Melatarbelakangi Marginalisasi Dalam Proyek Skala Nasional Di Pulau Rempang.**

Untuk mengatasi ketidaksetaraan dan marginalisasi, diperlukan pemahaman yang jelas tentang penyebab marginalisasi dan upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya marginalisasi dan eksklusi sosial (UNDP, 2010: 3; UN DESA, 2016: 22). Untuk mencari solusi atas permasalahan ini, tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk marginalisasi yang terjadi lalu mencetuskannya sebagai penyebab utama terjadinya permasalahan dalam PSN Rempang. Padahal di balik marginalisasi tersebut terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya marginalisasi dan eksklusi sosial sebagai akar permasalahan yang seharusnya menjadi prioritas penanganan dan tidak luput dalam proses pencarian solusi.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi marginalisasi dalam pembangunan PSN di Pulau Rempang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga hal yaitu:

1. Paradigma pembangunan pemerintah yang lebih mengutamakan investasi ketimbang eksistensi, keadilan, hak dan partisipasi masyarakat—paradigma ini mirip dengan paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*) dimana pembangunan di negara berkembang lebih ditekankan pada pertumbuhan ekonomi, ketimbang paradigma kesejahteraan (*welfare paradigm*) yang lebih mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, apalagi paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development paradigm*) yang ditandai dengan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat (Hidayat, 2004: 19-21).

Pembangunan yang mengabaikan kepentingan warga rasanya sulit untuk dikategorikan berorientasi pada nilai keadilan, persatuan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Juga, tidak dekat dengan cita-cita konstitusi untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang menganut prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33 ayat 4 UUD NRI tahun 1945). Juga patut dipertanyakan apakah berorientasi pada tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum (alinea ke-4 pembukaan UUDNRI tahun 1945).

Menanggapi permasalahan di Pulau Rempang, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron berpendapat bahwa memang investasi penting bagi pertumbuhan ekonomi, namun kehadiran investasi tidak boleh melupakan keberadaan masyarakat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi dan keberadaan negara, pemerintah diminta untuk bisa mengutamakan kepentingan masyarakat (dpr.go.id, 11/10/2023).

Pendapat tersebut persis dengan rekomendasi UNDP bahwa pembangunan ekonomi tidak memarginalkan masyarakat atau menghancurkan identitas mereka. Pengakuan terhadap eksistensi kelompok minoritas dapat memfasilitas pemerintahan yang demokratis yaitu negara yang partisipatif dan multikultural yang mengakui keragaman masyarakat yang membentuk negara (UNDP, 2010: 16,60). Dalam konteks Indonesia, konsep yang ditawarkan UNDP terbukti kebenarannya, di mana kegagalan negara untuk mengakui kaum minoritas dan marginalisasi yang mereka hadapi dapat menciptakan ketegangan dan bahkan konflik. Dan ini terjadi di Rempang, ketika negara mengabaikan eksistensi dan hak warga Rempang, ketegangan tercipta hingga menempatkan Polri berada pada pusaran konflik antara pemerintah dan masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bentrokan antara warga dan kepolisian telah menyebabkan warga dan kepolisian menderita luka, kerusakan fasilitas, beberapa warga harus berhadapan dengan proses hukum, kecaman terhadap pemerintah dan Polri yang dianggap tidak berpihak pada rakyat hingga dugaan pelanggaran HAM.

1. Pengakuan terhadap identitas dan eksistensi warga setempat sebagaimana diungkapkan di atas, terkait dengan faktor penyebab terjadinya marginalisasi dan eksklusi sosial yang **kedua** yaitu tidak adanya pengakuan terhadap identitas, eksistensi masyarakat adat dan hak tradisionalnya. Padahal, dalam konstitusi, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya diakui oleh negara sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 18 B UUD NRI tahun 1945).

Sayangnya, ketentuan turunan terkait hal ini masih pada tahap rancangan undang-undang sejak dikonsepkan sejak tahun 2012 (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat, 2017: 6). Ditambah lagi, peraturan-peraturan pelaksana pengakuan masyarakat hukum adat tidak memiliki karakter *implementable* (dapat diberlakukan) karena muatannya tidak mengandung standarisasi mekanisme pengakuan melainkan menawarkan variasi sebagai efek dari sektoralisme (Abdurrahman, 2015: 93).

Di samping itu, paradigma pembangunan dalam konteks agraria menyebabkan terciptanya kesenjangan ketika komunitas-komunitas adat belum diakui keberadaannya dan hak ulayatnya, keberpihakan pemerintah kepada pemilik modal sehingga mempersulit masyarakat menyelesaikan konflik dan mendapatkan sertifikat tanah dan masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik (Herwati, 2020: 5).

Meski demikian, pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya dalam konstitusi seharusnya tidak diabaikan oleh pemerintah dalam setiap kebijakan pembangunan yang akan berdampak terhadap masyarakat adat, termasuk juga bagi Polri dalam mengamankan kebijakan tersebut.

1. Faktor penyebab marginalisasi yang **ketiga** adalah paradigma pemolisian dalam mengamankan kebijakan pemerintah. Berdasarkan keterangan Kapolresta Barelang bahwa sosialisasi rencana relokasi masyarakat Pulau Rempang sangat minim dan tidak memadai sehingga berpotensi menimbulkan penolakan dari masyarakat (Komnas HAM RI, 22 September 2023), diperoleh kesimpulan bahwa kepolisian setempat tidak terlebih dahulu memastikan persetujuan warga sebelum melakukan pengamanan tahapan pembangunan PSN.

Aspirasi penolakan warga yang sebelumnya disampaikan pada tanggal 23 Agustus 2023 tidak dijadikan pertimbangan untuk mengingatkan BP Batam agar menunda tahapan pembangunan dan memaksimalkan lagi sosialisasi kepada warga untuk mencari solusi dan memastikan aspirasi warga dapat difasilitasi. Hal ini menunjukkan telah terjadi pengabaian terhadap aspirasi, penolakan, eksistensi dan hak masyarakat adat setempat.

**Pemolisian Terhadap Marginalisasi Dalam Proyek Skala Nasional Di Pulau Rempang.**

Mengamankan kebijakan pemerintah merupakan salah satu bentuk etika kenegaraan dalam kode etik profesi Polri yang wajib dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya, Polri juga dihadapkan pada kepentingan publik dalam hal ini masyarakat Rempang. Dalam konteks ini, Polri dihadapkan pada pilihan untuk mengabdi pada kepentingan pemerintah atau kepentingan publik atau menyeimbangkan keduanya. Memilih untuk mengutamakan kepentingan pemerintah di atas kepentingan publik merupakan pertaruhan yang berisiko bagi Polri. Tindakan Polri dalam mengamankan tahapan pembangunan PSN di Rempang dihadapkan pada penolakan dan perlawanan dari warga hingga menempatkan Polri dalam pusaran konflik antara pemerintah dan masyarakat.

Polri dituding melakukan dugaan intimidasi, kriminalisasi, penggunaan kekerasan yang berlebihan, dugaan pelanggaran HAM dan mendapat kecaman dari berbagai pihak. Sebagai contoh, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil berpendapat bahwa tugas Polri adalah mengamankan dan melindungi masyarakat bukan sebaliknya mengancam dan membahayakan masyarakat adat (dpr.go.id, 10/9/23). Senada dengan hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak agar kepolisian tidak melakukan kekerasan dan menggunakan kekuatan berlebih, tetapi dengan pendekatan humanisme dan bersama pemerintah membuka ruang dialog untuk menciptakan *win-win solution* termasuk menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan rekomendasi Komnas HAM agar rencana pembangunan dilakukan tanpa menggusur warga setempat(antaranews.com, 18/9/2023).

Selain itu, Ketua *Indonesia Police Watch* (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyebut Polri seharusnya tidak menjadi alat kekuasaan yang represif dan intimidatif terhadap rakyat dan meminta agar Polri menjadi lembaga keamanan sipil yang humanis, menghormati hak asasi manusia dan berpihak pada rakyat serta bisa menolak tekanan kekuasaan agar Polri tidak dinilai tidak berpihak pada rakyat (sinarharapan.net, 18 September 2023). Terkait kondisi ini, tujuan yang ingin dicapai Polri sebagaimana diatur dalam pasal 4 UURI No.2 Tahun 2002 tentang Polri adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri (kamdagri) yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini berarti ketika kamdagri, kamtibmas, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, terbinanya ketenteraman dan penghormatan HAM dalam kasus Rempang tidak dapat diwujudkan, maka tujuan Polri tidak tercapai. Oleh karena itu, idealnya dalam pengamanan kebijakan pemerintah terkait pembangunan PSN harusnya sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai Polri.

Dalam pengamanan PSN, Polri idealnya menerapkan instrumen perlindungan HAM dalam pola pikir, sikap dan tindakannya, termasuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan budaya lokal (adat, tradisi, kebiasaan atau tata nilai) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf g dan Pasal 8 ayat 2 huruf e Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Marginalisasi dan eksklusi sosial yang seringkali multidimensi bila tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada terciptanya ketegangan sosial dan konflik. Karena ketegangan sosial yang berpotensi menjadi konflik dapat mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat, maka marginalisasi dan eksklusi sosial harusnya juga merupakan tanggung jawab Polri yang dimandatkan untuk menjaga stabilitas kamdagri dan kamtibmas.

Mengacu kepada konsep *problem-oriented policing (*POP)yang dikemukakan Herman Goldstein maka kepolisian idealnya dapat mengatasi kondisi-kondisi yang mendasari timbulnya masalah yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat (Michael S.Scott, 2020: 2-3) yaitu marginalisasi, eksklusi sosial, diskriminasi dan ketidaksetaraan yang menyebabkan terjadinya konflik dan berdampak pada keselamatan dan keamanan masyarakat. Dalam konteks POP, kepolisian tidak dapat mengabaikan marginalisasi, diskriminasi dan ketidaksetaraan yang terjadi sekalipun hal ini diproduksi oleh kebijakan pemerintah yang justru mau tidak mau harus diamankan oleh kepolisian. Kegagalan kepolisian dalam mendeteksi dan mengatasi hal tersebut terbukti menyulut konflik yang tidak hanya membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat tapi justru telah membahayakan kepolisian sendiri, yaitu keselamatan dan keamanan personel kepolisian di lapangan maupun eksistensi dan citra kepolisian di mata masyarakat.

Melalui POP, penanganan kepolisian dalam kasus Rempang setidaknya mencakup dua hal yaitu: (i) mengatasi marginalisasi, eksklusi sosial, diskriminasi dan ketidaksetaraan yang menyebabkan terjadinya ketegangan sosial dan konflik; dan (ii) mengatasi faktor-faktor penyebab atau akar masalah yang melatarbelakangi terjadinya hal-hal tersebut. Dengan demikian, pemolisian untuk mengatasi marginalisasi dalam PSN di Rempang tidak hanya meliputi penanganan terhadap marginalisasi dan eksklusi sosial yang terjadi tidak berkembang menjadi konflik, tetapi lebih luas lagi dengan mendorong stakeholder untuk bersama-sama mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya marginalisasi eksklusi sosial.

Penanganan atas keduanya dilakukan secara simultan antara kepolisian pusat dan daerah. Mengingat upaya untuk mengatasi faktor-faktor penyebab marginalisasi dan eksklusi sosial membutuhkan waktu yang lama, melibatkan banyak pihak, membutuhkan perubahan kebijakan mendasar dan komitmen dari pemerintah pusat, maka dalam konteks kepolisian wilayah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. mengatasi marginalisasi, eksklusi sosial, diskriminasi dan ketidaksetaraan serta dampaknya terhadap masyarakat;
2. membangun hubungan, toleransi dan komunikasi saling percaya dengan masyarakat yang terkena dampak;
3. mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya marginalisasi terhadap warga dan mendorong stakeholder dalam pencarian solusi bersama;
4. mengakui, menghormati dan melindungi eksistensi, identitas dan hak masyarakat adat setempat;
5. bersama-sama para *stakeholder* terkait, memfasilitasi aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam tahapan pembangunan;
6. mendorong stakeholder untuk menindaklanjuti aspirasi warga dan memaksimalkan sosialisasi informasi tahapan pembangunan kepada seluruh warga;
7. menghormati dan melindungi hak asasi warga; dan
8. mengingatkan Pemerintah untuk tidak dulu melanjutkan tahapan pembangunan sebelum adanya solusi, kesepakatan dan persetujuan warga serta kondisi di mana potensi kerawanan sudah bisa diatasi.

**Kesimpulan dan Saran**

Marginalisasi dan eksklusi sosial yang terjadi terhadap warga Rempang bersifat struktural, multidimensi dan relasional meliputi dimensi politik, hukum, hak asasi manusia, ekonomi, sosial, budaya yang terkait dengan pembatasan, keterbatasan partisipasi, sumber daya, peluang, kesempatan, eksistensi dan hak masyarakat setempat. Faktor yang melatarbelakangi marginalisasi adanya paradigma pembangunan pemerintah yang lebih mengutamakan investasi ketimbang keadilan, eksistensi, partisipasi warga setempat. Hal ini terjadi karena tidak ada pengakuan terhadap identitas dan eksistensi warga sebagai masyarakat adat dan hak tradisional yang menyertainya, di mana paradigma pemolisian legalistik cenderung mengabaikan eksistensi, aspirasi dan hak masyarakat adat setempat.

Untuk mengantisipasi agar marginalisasi dan eksklusi sosial tidak berkembang menjadi konflik dan mengancam kamdagri dan kamtibmas, kepolisian bersama para *stakeholder* diharapkan dapat mengupayakan langkah proaktif dalam mengatasi faktor penyebab untuk mengatasi marginalisasi, diskriminasi, eksklusi sosial dan ketidaksetaraan; membangun hubungan, toleransi dan komunikasi saling percaya dalam memfasilitasi aspirasi, partisipasidan mensosialisasi informasi yang dibutuhkan warga; serta mengakui, menghormati dan melindungi eksistensi, identitas, hak asasi manusia, hak masyarakat adat, dan berupaya membuat kesepakatan dan persetujuan warga saat potensi kerawanan sudah dapat diatasi sebelum memulai tahapan pembangunan.

**Daftar Pustaka**

**Buku dan Jurnal.**

Abdurrahman. (2015). *Draf Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.

Bungin, Burhan. (2020), *Post-Qualitative: Social Research Methods, Kuantitatif-Kualitatif-Mixed Methods: Positivism-Pospositivism, Phenomenology-Postmodern: Filsafat, Paradigma, Teori, Metode, dan Laporan*. Jakarta: Kencana.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2017). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat, https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf.

Herwati, Siti Rakhma Mary & Referandum M, Citra. (2020), *RUU Pertanahan: Membangun Koloni Baru di Bawah Investasi, Kertas Posisi*. Jakarta Pusat : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta).

Hidayat, Syarifudin. (2004). *Paradigma Pembangunan Dan Kapabilitas Aparatur*. Wacana Kinerja, Vol.7, Nomor 4, Desember 2004, p.17-24.

*Kahler, Hans.* (1960). *Studi etnografi Dan Linguistik Tentang Orang Darat, Orang Akit, Orang Laut Dan Orang Utan Di Kepulauan Riau Dan Pulau-Pulau Di Pesisir Timur Sumatera.* Publikasi Seminar Bahasa Indonesia Dan Bahasa-Bahasa Laut Selatan Di Universitas Hamburg, Volume 2, *Dietrich Reimer*, Berlin, p.3-15.

Nations, United. (2010). *Marginalized Minorities in Development Programming*. *A UNDP Resource Guide And Toolkit, New York* : *United Nations Development Programme (UNDP).*

Nations, United. (2016). *Leaving no one Behind: The Imperative of Inclusive Development*, Report on the World Social Situation 2016. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs.

Scott, S, Michael. (2000). *Problem-Oriented Policing: Reflection On The First 20 Years*, *Office of Community-Oriented Policing Services, Washington D.C* : *U.S. Department of Justice.*

Sihombing, Uli Parulian. (2023). *Temuan Awal Komnas HAM Atas Kasus Pulau Rempang*. Keterangan Pers Nomor : 55/HM.001/IX/2023, 22 September 2023, Jakarta : Komnas HAM RI.

**Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UURI Nomor. 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

**Internet**

Amnesty International, *Apa itu Free, Prior, and Informed Consent ?*, https://www.amnesty.id/apa-itu-free-prior-and-informed-consent/, 28 Maret 2022.

Alamudin Hampau-detikSumut, *Gubernur Kepri Jelaskan Penyebab Kerusuhan Rempang*, https://www.detik.com/sumut/berita/d-6929033/gubernur-kepri-jelaskan-penyebab-kerusuhan-di-rempang, 13 September 2023.

Badan Pengusahaan Batam, *Proyek Pengembangan Pulau Rempang Masuk Daftar Program Strategis Nasional*, https://bpbatam.go.id/proyek-pengembangan-pulau-rempang-masuk-daftar-program-strategis-nasional/, 31 Agustus 2023.

CNNIndonesia.com, *Warga Penolak Proyek Rempang Bakal ke Jakarta, Ingin Bertemu Mahfud*, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230912174125-12-998109/warga-penolak-proyek-rempang-bakal-ke-jakarta-ingin-bertemu-mahfud, 12 September 2023.

Cnnindonesia.com, 3 Dugaan Bahlil Soal Pemicu Proyek Rempang Eco City Memanas, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230913140121-92-998495/3-dugaan-bahlil-soal-pemicu-proyek-rempang-eco-city-memanas, 13 September 2023.

Cnnindonesia.com, *Polemik Status Tanah Rempang Batam Yang Bakal Disulap PSN Eco City*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230913134704-12-998484/polemik-status-tanah-rempang-batam-yang-bakal-disulap-psn-eco-city>, 14 September 2023.

Cnnindonesia.com, *Rempang dan Perlawanan Keturunan Pasukan Elite 300 Tahun Silam*, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230915102448-12-999359/rempang-dan-perlawanan-keturunan-pasukan-elite-300-tahun-silam, 15 September 2023.

Cnnindonesia.com, *Komnas HAM Ungkap Dugaan Pelanggaran HAM di Rempang*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230922191237-12-1002605/komnas-ham-ungkap-dugaan-pelanggaran-ham-di-rempang>, 22 September 2023.

Cnnindonesia.com, *5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230927202710-92-1004610/5-temuan-sementara-hasil-survei-warga-rempang-oleh-ombudsman>, 27 September 2023.

Dede Arman, *Kisah Orang Darat (Orang Hutan) Di tengah Kemajuan Batam*, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/kisah-orang-darat-orang-hutan-ditengah-kemajuan-batam/>, 12 Juni 2020.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Kepolisian Harusnya Melindungi Bukan Mengancam Masyarakat Adat*, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46395/t/Kepolisian%20Harusnya%20Melindungi%20Bukan%20Mengancam%20Masyarakat%20Adat, 10 September 2023.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia-dpr.go.id, *Herman Khaeron: Investasi Tetap Utamakan Masyarakat, Tidak Hanya untuk Pertumbuhan Ekonomi*, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47035/t/Herman%20Khaeron:%20Investasi%20Tetap%20Utamakan%20Masyarakat,%20Tidak%20Hanya%20untuk%20Pertumbuhan%20Ekonomi , 11 Oktober 2023.

Eka Yudha Saputra-tempo.co, *Tim Advokasi Kasus Pulau Rempang Minta Propam Periksa Polisi yang Halangi Bantuan Hukum untuk Warga*, <https://nasional.tempo.co/read/1772587/tim-advokasi-kasus-pulau-rempang-minta-propam-periksa-polisi-yang-halangi-bantuan-hukum-untuk-warga>, 16 September 2023.

Farid Muhamad Faza et.al., Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Gerakan Rakyat Selamatkan Rempang, 8 Oktober 2023.

Hadi Maulana dan David Oliver Purba-kompas.com, *Duduk Perkara Bentrok Warga Rempang VS Aparat, Berawal Dari Proyek Rempang Eco City*, https://regional.kompas.com/read/2023/09/07/190627378/duduk-perkara-bentrok-warga-rempang-vs-aparat-berawal-dari-proyek-rempang?page=all, 7 September 2023.

Hadi Maulana dan Reni Susanti-kompas.com, *Imbas Kericuhan Pulau Rempang, 7 Warga Ditetapkan Tersangka*, <https://regional.kompas.com/read/2023/09/10/212455478/imbas-kericuhan-pulau-rempang-7-warga-ditetapkan-tersangka?page=all>, 10 September 2023.

Hadi Maulana, Teuku Muhammad Valdy Arief-kompas.com, *Warga Sebut Layanan Kesehatan dan Pendidikan di Pulau Rempang Berhenti, Dibantah Pemkot Batam*, https://regional.kompas.com/read/2023/09/15/082027778/warga-sebut-layanan-kesehatan-dan-pendidikan-di-pulau-rempang-berhenti, 15 September 2023.

Henderi Sukma Indrawan-antaranews.com, *Ketua MPR Desak Aparat Hindari Kekerasan Saat Tangani Konflik Rempang*, <https://www.antaranews.com/berita/3732609/ketua-mpr-desak-aparat-hindari-kekerasan-saat-tangani-konflik-rempang>.

Liberties, *What Is Marginalization? Definition And Coping Strategies,* https://www.liberties.eu/en/stories/marginalization-and-being-marginalized/43767, 5 Oktober 2021.

Wikipedia The Free Encyclopedia, *Social Exclusion*, https://en.wikipedia.org/wiki/Social\_exclusion, 19 November 2023.

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *Marginalisasi*, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/marginalisasi, KBBI VI Daring, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

CultureAlly, *What Does Marginalized Mean and Why Does it Matter?* https://www.cultureally.com/blog/what-does-marginalized-mean-and-why-does-it-matter, Ontario, 2023.

Oxford Learners Dictionaries, *marginalization*, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/marginalization, Oxford University Press, 2023.

Cambridge Dictionary, *marginalization,* https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/marginalization, Cambridge University Press & Assessment, 2023.

Mayhan- sinarharapan.net, *IPW Menilai, Konflik Rempang Merupakan Kegagalan Negara dalam Menjalankan Amanat Pasal 18B ayat (2) UUD Thn 1945*, <https://www.sinarharapan.net/ipw-menilai-konflik-rempang-merupakan-kegagalan-negara-dalam-menjalankan-amanat/>, 18 September 2023.

Mulia budi-detikNews, *Temuan Komnas HAM Terkait Konflik Rempang : Minim Sosialisasi-Pelibatan ASN*, https://news.detik.com/berita/d-6946137/temuan-komnas-ham-terkait-konflik-rempang-minim-sosialisasi-pelibatan-asn, 22 September 2023.

Pandu Wiyoga-kompas.id, *Ribuan Warga Rempang Berdemonstrasi Menolak Penggusuran*, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/23/ribuan-warga-rempang-berdemonstrasi-menolak-penggusuran, 23 Agustus 2023.

Reporter antara-Tempo.com, *Polisi Tangkap 43 Orang Usai Demo yang Berujung Kericuhan di Depan Kantor BP Batam*, https://nasional.tempo.co/read/1770941/polisi-tangkap-43-orang-usai-demo-yang-berujung-kericuhan-di-depan-kantor-bp-batam, 12 September 2023.

Rudi Kurniawansyah-mediaindonesia.com, *Warga Pulau Rempang Dipaksa Setujui Relokasi, Layanan Faskes dan Sekolah dihentikan sejak Agustus*, https://mediaindonesia.com/nusantara/613214/warga-pulau-rempang-dipaksa-setujui-relokasi-layanan-faskes-dan-sekolah-dihentikan-sejak-agustus, 13 September 2023.

Siaran Pers Nomor 048/HM.01/IX/2023, *Soal Rempang Eco City, Ombudsman RI Tegaskan Pemerintah Harus Prioritaskan Kepentingan Masyarakat Dibanding Percepatan Pembangunan*, https://ombudsman.go.id/news/r/-soal-rempang-eco-city-ombudsman-ri-tegaskan-pemerintah-harus-prioritaskan-kepentingan-masyarakat-dibanding-percepatan-pembangunan, 18 September 2023.

Siti Yona Hukmana, *26 Aparat Terluka, 43 Warga Rempang Ditangkap dalam Aksi Unjuk Rasa di Kantor BP Batam*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/612715/26-aparat-terluka-43-warga-rempang-ditangkap-dalam-aksi-unjuk-rasa-di-kantor-bp-batam>, 12 September 2023.

Yogi Eka Sahputra-tempo.com, *Lembaga Adat Melayu Sebut Warga Rempang Merupakan Suku Melayu Pertama Di Batam,* https://nasional.tempo.co/read/1770007/lembaga-adat-melayu-sebut-warga-rempang-merupakan-suku-melayu-pertama-di-batam, 9 September 2023.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/04000021/daftar-proyek-strategis-nasional-2020-2024?lgn_method=google>, 10 November 2023

<https://investor.id/business/275062/proyek-strategis-nasional-beri-manfaat-nyata>, 10 November 2023

<https://news.detik.com/berita/d-6934602/soal-rempang-pulau-dekat-batam-yang-kini-sedang-ada-konflik-agraria>, 10 November 2023

1. Penjelasan Rancangan Umum KUHAP [↑](#footnote-ref-1)